



KONTESTASI WACANA KEISLAMAN DI DUNIA MAYA

MODERATISME, EKSTREMISME, DAN HIPERNASIONALISME

EDITOR :
M. THOYIBI
YAYAH KHISBIYAH

KONTESTASI WACANA KEISLAMAN DI DUNIA MAYA

Moderatisme, Ekstremisme, dan Hipernasionalisme

Editor

M. Thoyibi

Yayah Khisbiyah

**Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial
2018**

**KONTESTASI WACANA KEISLAMAN DI DUNIA MAYA
Moderatisme, Ekstremisme, dan Hipernasionalisme**

Penulis: Yayah Khisbiyah
M. Thoyibi
Abdullah Aly
Agus Triyono
Subkhi Ridho
Yanuar Ihtiyarso
Yeny Prastiwi
Zuly Qodir (Contributor)

Editor: M. Thoyibi
Yayah Khisbiyah

Penyelaras Akhir: Azaki Khoirudin

Proof Reader: M. Ali Yafi

Layout: Paksi Hidayatullah

Desain Sampul: Ragil Setya Budi

Layout : Sugiono

Penerbit

Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Lantai 5 Gedung Induk Siti Walidah

Jl. A. Yani Pabelan Surakarta, 57102

Telp: 0271-717417 ext. 1521

email: psbps@ums.ac.id

Website: www.psbps.ums.ac.id

ISBN: 978-623-91744-0-8

Sekapur Sirih

SEJAK beberapa tahun terakhir, keberlimpahan informasi di dunia siber (maya) telah menimbulkan eksek yang meresahkan. Di satu sisi, banyak anak muda yang tidak memiliki keterampilan menulis karena segala yang ingin ditulis telah terwakili oleh tulisan orang lain dan tersedia di internet. Di sisi lain, banyak tulisan yang lebih tepat sebagai catatan-catatan pribadi, yang seharusnya tersimpan di ruang tersembunyi, tetapi lepas terpublikasi. Padahal, dalam literasi media, tulisan-tulisan tersebut sebenarnya kurang memenuhi azas kepatutan dalam berkomunikasi, atau azas keadilan sebagai sumber informasi, yang masih perlu *cross-check* dan *re-check* secara teliti untuk layak dikonsumsi. Sebagian masyarakat mengalami ambivalensi dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Ada yang terbersit niatan luhur untuk menyeru kebaikan dan mencegah ketidakadilan.

Selain itu, ada keprihatinan mendalam tentang bermacam corak dan skala ujaran kebencian serta ekspresi permusuhan yang marak di media online pada 2 dekade terakhir. Salah satu sumber keprihatinan adalah menguatnya fenomena yang kerap diistilahkan sebagai radikalisme *online*, yaitu penyebaran pesan-pesan ideologis dan sistem keyakinan ekstrem, di media berbasis internet. Radikalisme online ini ditengarai mampu mengubah pandangan arus utama yang lazimnya moderat menjadi keyakinan ekstrem, yang kerap menggunakan kekerasan untuk memaksakan pemahannya. Pada gilirannya, pandangan-pandangan ekstrem dapat menumbuhkan sikap intoleran yang menuntun kepada

tindakan kekerasan ekstremis yang mencabik harmoni kebangsaan serta memecah belah solidaritas kemanusiaan.

Buku ini awalnya merupakan laporan hasil penelitian akademis kami di Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), bertajuk "Wacana Radikalisme di Website dan Media Sosial". Kami memodifikasi laporan penelitian dalam waktu relatif singkat menjadi buku monograf, agar dapat dibaca, didiskusikan lebih lanjut, dan dimanfaatkan oleh khalayak lebih luas. Kami berharap buku sederhana ini dapat berkontribusi secara akademis terhadap reproduksi ilmu untuk pembaharuan teori dan hasil riset dengan topik ini, sekaligus secara praksis menjadi salah satu rujukan kebijakan untuk merancang program-program aksi yang bertujuan merajut harmoni sosial dan membina perdamaian melalui *alternative narration* di media online.

Penelitian ini mengalami proses panjang. Idenya dimulai pada sekitar tengah tahun 2016 dari diskusi dengan Prof. Mike Hardy dari Coventry University, Inggris, tentang program riset dan aksi untuk menyemaikan budaya perdamaian kepada kaum muda melalui media online, dalam upaya menangkal kekerasan ekstremisme. Ide ini kemudian kami kembangkan menjadi proposal penelitian pada awal 2017, ditujukan kepada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (PPIM UINJ) Jakarta yang bekerjasama dengan *United Nations Development Program* (UNDP) dalam mengelola hibah dana dari Jepang. Program kerjasama PPIM UINJ dengan UNDP ini disebut sebagai CONVEY (kependekan dari *Countering Violent Extremism in Youth*) Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan *bidding* dengan lembaga-lembaga lain yang juga mengajukan proposal

penelitian, proposal kami diterima oleh Project Management Unit CONVEY. Tentu penerimaan itu disertai berbagai catatan revisi. Mungkin sepanjang pengalaman kami memproses proposal penelitian, proses revisi ulang-alik dengan PMU CONVEY terbilang yang paling panjang dan ketat.

Proses panjangnya terletak pada serial diskusi informal untuk menemukan kesepakatan antara kami dengan PMU CONVEY. Topik penelitian yang semula mengambil pendekatan “‘Kekerasan Ekstremisme’ di Media Online” bergeser menjadi “‘Radikalisme’ di Website dan Media Sosial” agar sesuai dengan nomenklatur TOR CONVEY. Untuk eksekusi penelitiannya sendiri, kami hanya diberi waktu amat singkat, yaitu 3 bulan, dari September sampai November 2017. Kami agak pesimis akan mampu menyelesaikan penelitian berskala nasional ini dalam durasi waktu terpendek yang pernah kami alami. Biasanya penelitian kami berlangsung 1 semester sampai 2 semester untuk 1 judul. Ternyata benar, beberapa kendala teknis mekanisme penelitian, dan kontestasi tafsir data lapangan membuat kami meminta perpanjangan waktu, utamanya untuk penulisan laporan. Penelitian akhirnya selesai pada Februari 2018, berkat kontribusi banyak pihak. Tim peneliti utama terdiri dari: Yayah Khisbiyah (koordinator penelitian, Fakultas Psikologi UMS), M. Thoyibi (wakil koordinator, FKIP UMS), dengan anggota Abdullah Aly (Fakultas Agama Islam UMS), Agus Triyono (Fakultas Komunikasi dan Informatika UMS), Yanuar Ihtiyarso (FKIP UMS), dan mendapat penguat dari peneliti luar UMS yaitu M. Subkhi Ridho (Lembaga Studi Islam dan Politik, Yogyakarta). Selain tim inti, ada 2 asisten peneliti dari FKIP yaitu M. Ali Yafi dan Yeni Prastiwi. Ucapan terima kasih kami haturkan pula kepada tim IT yang dipimpin oleh Bana Handaga yang telah melakukan *web scrapping/minning*

untuk keperluan data penelitian serta Zuly Qodir atas sumbangan gagasannya. Kami juga dibantu oleh 9 asisten lapangan: Viska Erma Mustika, Iknandi Intan Permatasari, Ragil Setya Budi, Paksi Hidayatulloh, Istiqlal Assa (Fak. Psikologi UMS), Hindun Niyatus Sa'adah (Fak. Ekonomi UMS), Shella Gherina, Dwi Latifatul Fajri (FKIP UMS), dan Azaki Khoirudin (FAI UMS). Keseluruhan tim telah bekerja intensif di 4 kota, yaitu Solo, Purwarkarta, Yogya, Jakarta untuk beberapa kegiatan terkait proyek penelitian berupa lokakarya desain penelitian, pelatihan asisten lapangan, penggalian data, diskusi kelompok terpandu, dan seminar diseminasi hasil penelitian yang melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan. Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim peneliti. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih mendalam kepada Rektor UMS Dr. Sofian Anif beserta jajaran Rektorat khususnya WR I, WR II, WR IV dan RW V; juga kepada Badan Pengurus Harian UMS dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang senantiasa konsisten menyokong PSBPS sejak berdirinya di tahun 2000 sebagai lembaga kajian-terapan transdisiplin di lingkungan UMS sehingga cukup dikenal secara nasional maupun inter-nasional.

Apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada PMU CONVEY Indonesia yang dimotori oleh PPIM UINJ, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami sebagai salah satu mitra dari 22 mitra seluruh Indonesia. Harus disematkan di sini, testimoni bahwa CONVEY Indonesia telah melakukan upaya *capacity buiding* yang luar biasa substantif dan amat mengesankan terhadap semua mitra yang terdiri dari berbagai institusi akademis dan LSM di seluruh Indonesia, dalam waktu yang relatif singkat. CONVEY tidak saja berperan sebagai donor

untuk riset dan program advokasi praksis terhadap ke-22 mitra, namun juga menjadi mentor dan pemberdaya dalam ranah akademis-keilmuan, manajemen, *networking*, dan perluasan visi transformasi sosial positif. Peran majemuk CONVEY itu diwujudkan melalui berbagai program sistematis dan komprehensif mulai dari reuiu proposal, pendampingan semua tahapan proses penelitian, pelatihan manajerial, seminar nasional, lokakarya koordinator, konferensi internasional, hingga ke lokakarya perumusan *policy briefs*. Kami menikmati keseluruhan proses itu dan merasa bertumbuhkembang lebih baik karenanya, secara personal, professional maupun institusional. Kepada Prof. Jamhari Makruf, Saiful Umam, Din Wahid, Fuad Jabali, Ali Munhanif, Didin Syafruddin, Jajang Jahroni, Ismatu Ropi, dan Dadi Darmadi, *heartfelf gratitude* untuk pendampingan intelektual-akademis, kebijaksanaan, dan kehangatan humor di tengah kejaran linimasa dan agenda-agenda lain yang sering bertumbukan. Tentu juga apresiasi mendalam kami sampaikan kepada tim UNDP untuk kesabaran mendampingi dan menguatkan: Syamsul Tarigan, Ridwansyah, Jaya Dani Mulyanto, Utami Sandyarini, Narsi, Abdallah, dan semua yang terlibat membantu.

Akhir kata, wajarlah kami sebagai peneliti-penulis merasa belum puas dengan kualitas isi buku ini. InsyaAllah akan kami segera perbaiki, dan karenanya masukan serta kritik konstruktif dari para pembaca yang budiman, kami nantikan.

Surakarta, 18 Maret 2018.

Yayah Khisbiyah

Koordinator Penelitian,
Direktur Eksekutif PSBPS UMS

SENARAI ISI

SEKAPUR SIRIH	iii
SENARAI ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II: PESAN-PESAN RADIKAL DI SEPUTAR PILPRES, PILKADA DKI, DAN AKSI BELA ISLAM	7
A. Pesan-pesan Radikal di Seputar Pilpres 2014	7
B. Pesan-pesan Radikal di Seputar Pilkada DKI 2017	20
C. Pesan-pesan Radikal di Seputar Aksi Bela Islam I dan II.....	24
D. Pesan Radikal Pasca Bela Islam I dan II	28
E. Pesan Radikal Jelang 2018-2019	33
BAB III: PROFIL WEBSITE ORGANISASI ISLAM: ARUS UTAMA, KONTEMPORER DAN NON-AFILIASI	41
A. Website Organisasi Islam Arus Utama	41
1. Suara Muhammadiyah	41
2. NU Online	45
B. Website Organisasi Islam Kontemporer.....	57
1. Suara Islam	57
2. Hidayatullah.....	59
3. Majelis Mujahidin Indonesia	62
4. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.....	64
5. Majelis Tafsir Al-Quran	66
C. Website Organisasi Islam Non-Afiliasi.....	68
1. portal-islam.id.....	68
2. eramuslim.com.....	71
3. voa-islam.com.....	74
4. muslimoderat.net.....	78
5. Arrahmah.com	80
6. Thoriquna.id	83
7. dakwatuna.com.....	87

BAB IV: POPULARITAS ORGANISASI ISLAM DI KALANGAN

PENGGUNA INTERNET	91
A. Situs Organisasi Islam Arus Utama	91
B. Situs Organisasi Islam Kontemporer	93
C. Organisasi Islam Non-afiliasi	95
D. Popularitas Tokoh di Media Online	99

BAB V: KONTESTASI WACANA WEBSITE ORGANISASI ISLAM ARUS UTAMA DAN KONTEMPORER

103	103
A. Pesan Damai Website Organisasi Islam Arus Utama	103
B. Kepentingan Pragmatis Publisitas Organisasi Kontemporer	113
1. Penolakan Perppu Ormas	120
2. Sikap dan Pandangan terhadap Pancasila	126

BAB VI: POPULISME WEBSITE ISLAM NON-AFILIASI:

KOMODIFIKASI DAN REPRODUKSI KONTEN	137
A. Respons Era Muslim terhadap Radikalisme	150
B. Respons Portal Islam terhadap Radikalisme	197
C. Respons VOA-Islam terhadap Radikalisme	211
D. Respons Thoriquna.id terhadap Radikalisme	236

BAB VII: RADIKALISME DI MEDIA SOSIAL

243	243
A. Platform Media Sosial	243
B. Jenis Akun Pegiat Media Sosial	245
C. Motivasi Pegiat Akun	249

BAB VIII: PENUTUP

251	251
DAFTAR PUSTAKA	255
SENARAI PENULIS	259

bab I

Pendahuluan

INDONESIA, seperti juga banyak negara lain, berjibaku dengan ancaman terorisme, radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang dewasa ini kian kompleks. Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*) kini cenderung menggunakan pendekatan "mencegah" atau *preventing* daripada "melawan" atau *countering*, sehingga istilah *Preventing Violent Extremism* (PVE) lebih banyak dipakai daripada *Countering Violent Extremism* (CVE) untuk mempromosikan strategi yang lebih komprehensif, efektif, inklusif dan berkelanjutan dalam upaya penjagaan perdamaian dan keamanan global. Riset yang dilakukan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini bertujuan untuk menambah pemahaman berbasis bukti data terbaru (*evidence-based knowledge*) tentang "radikalisme dan kekerasan ekstremisme", sebagai pijakan bagi para perumus kebijakan, praktisi dan profesional dalam merespon fenomena radikalisme dan ekstremisme kekerasan, terutama yang menggunakan website online dan media sosial di Indonesia.

Berbagai hasil penelitian terdahulu di Indonesia menengarai maraknya radikalisme kekerasan di lembaga-lembaga pendidikan (Setara Foundation, 2015; Wahid Institute, 2016; Maarif Institute, 2015), dan di media sosial (Alvara Research Center, 2017). Penelitian di mancanegara menegaskan hasil serupa di media daring: Rand Corporation pada 2014 mengkonfirmasi bahwa media berbasis website memainkan peran besar dalam proses

radikalisasi kalangan teroris dan ekstremis kekerasan yang kasuskasusnya diteliti. Bukti lapangan menegaskan bahwa media sosial meningkatkan peluang orang atau sekelompok orang menjadi radikal, sebagai pengaruh penjangkauan dan pelibatan, melalui penyebaran informasi, komunikasi dan propaganda keyakinan-keyakinan ekstrem. Sejalan dengan itu, pada 2016 Brookings Institute melaporkan bahwa lebih dari 46,000 akun Twitter dikendalikan oleh para pendukung ISIS guna memposting materi dan konten kekerasan untuk merekrut pengikut baru melalui YouTube, website Google, Facebook dan sejenisnya. Konektivitas di dunia maya yang meningkat pesat telah memperburuk problem akut ini. Karenanya, para peneliti, perumus kebijakan dan praktisi yang prihatin akan ancaman kekerasan domestik dan global ini, mulai melakukan *re-framing* pendekatan-pendekatan baru yang berbasiskan pada media online dan media sosial.

Sementara itu, penelitian tentang isu-isu radikalisme dan ekstremisme kekerasan mendapat kritik internal maupun eksternal karena membuat *framing* Islam sebagai sumber radikalisme dan kekerasan. Kritik juga ditujukan pada media yang dianggap bias karena banyak berfokus pada insiden dan aksi-aksi kekerasan di dunia Muslim, sambil menafikan aspek-aspek lain yang positif dan konstruktif dari masyarakat Muslim. Di Indonesia sendiri, wajah radikalisme dan ekstremisme kekerasan berubah dari waktu ke waktu; ancaman kekerasan dari Jemaah Islamiyah (JI) dan kelompok-kelompok Salafi-Jihadis pada awal 2000-an yang meredup kini mendapatkan momentum peningkatan baru, antara lain akibat efek domino kekerasan *Arab Spring* dan ISIS/Daesh. Media di Indonesia termasuk yang paling hidup (*vibrant*) dan terbuka di kawasan Asia Tenggara, dan justru bersamaan dengan itu, muncul banyak tantangan yang harus dihadapi bersama. Walaupun sudah ada penelitian sebelumnya tentang radikalisme dan ekstremisme kekerasan

di media online, sejauh ini belum ada penelitian akademis yang khusus membahas fenomena pengguna media sosial Indonesia dalam memproduksi dan mereproduksi wacana radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Penelitian ini dimaksudkan mengisi kekosongan tersebut, melalui analisis terhadap pembuatan, penyebaran dan konsumsi pesan-pesan radikal dan ekstremis kekerasan, dengan mempertimbangkan konteks geopolitik makro dari ideologi dan gerakan-gerakan ekstremis pro-kekerasan.

Dari perspektif psikologi sosial, W.T. Root mendefinisikan konsep radikalisme sebagai “menjauhkan diri secara mencolok dari kebiasaan-kebiasaan sosial yang telah mempunyai cap persetujuan sosial.” Namun demikian, Root menegaskan bahwa apakah menjauhkan diri seperti itu merupakan sesuatu yang radikal atau tidak sebenarnya tergantung pada konteks waktu dan tempat, sehingga konsep radikalisme sebenarnya merupakan persoalan relativitas sosial. Sebagai contoh, menempeli harga pada barang dagangan merupakan sesuatu yang dianggap radikal pada pertengahan abad ke-19 tetapi sekarang tindakan seperti itu tidak hanya diterima, bahkan oleh sebagian orang dianggap sebagai tindakan yang seharusnya.

Joanna Pliner (2013) merumuskan 21 indikator teramati ketika seseorang mengalami proses radikalisasi. Indikator-indikator tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu: (1) identifikasi diri, (2) pandangan dikotomis KAMI versus MEREKA tentang masyarakat, (3) interaksi sosial, (4) kepribadian, dan (5) perkumpulan.

Identifikasi diri merujuk pada acara individu mendefinisikan diri; pandangan dikotomis KAMI versus MEREKA merupakan cara individu memandang masyarakat secara keseluruhan sebagai lawan yang tidak biasa mereka

ikuti; interaksi sosial merujuk pada cara individu berinteraksi dengan masyarakat; kepribadian merujuk pada kepribadian dan ungkapan perasaan individu; dan perkumpulan berarti hubungan dengan, atau representasi keterkaitan dengan, kelompok-kelompok radikal. Lima di antara 21 indikator tersebut yang paling sering disebut adalah: (1) perubahan dalam penampilan fisik/pakaian, (2) memutuskan diri dari komunitasnya terdahulu, (3) ungkapan verbal melawan pemerintah, (4) ungkapan perasaan keterputusan, dan (5) berhubungan dengan kelompok-kelompok teroris.

Dalam riset ini konsep radikal dimaknai dalam pengertiannya yang lebih luas, bukan hanya dalam kaitannya dengan perlawanan terhadap otoritas pemerintah, melainkan perlawanan terhadap norma-norma kepatutan yang dijunjung tinggi masyarakat secara umum. Pesan radikal tidak terbatas pada ungkapan pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan pemerintah, melainkan juga pihak-pihak yang di satu sisi mendukung pemerintah tetapi di sisi lain berperilaku bertentangan dengan norma-norma yang seharusnya menjadi rujukan masyarakat.

Pesan-pesan yang dikategorikan radikal di media sosial adalah pesan-pesan yang memiliki sebagian atau semua ciri-ciri berikut: (1) menyatakan kebencian kepada pihak lain, (2) menyatakan intoleransi terhadap pihak lain, (3) melawan tatanan/system sah yang ada, (4) mengandung unsur revolusioner, (5) mengandung unsur kekerasan, (6) mengandung ancaman kepada pihak lain.

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah media website, media sosial, dan informan. Media website yang diteliti sebanyak 14 media website organisasi Islam, yang mewakili tiga kategori: arus utama, kontemporer, dan nonafiliasi. Website Organisasi Islam Arus Utama adalah website yang berafiliasi

pada organisasi-organisasi Islam arus utama. Website organisasi Islam Kontemporer adalah website yang berafiliasi pada organisasi-organisasi Islam kontemporer. Adapun website organisasi Islam Nonafiliasi adalah website yang tidak berafiliasi pada organisasi Islam dari kedua kategori sebelumnya, melainkan berdiri sendiri dengan menggunakan atribut Islam. Website Organisasi Islam arus utama terdiri dari NU Online (<http://nu.or.id>) dan Suara Muhammadiyah (<http://suaramuhammadiyah.id/>). Website organisasi Islam kontemporer terdiri dari Forum Umat Islam (<http://www.suara-islam.com/>), Hidayatullah (<http://www.hidayatullah.com>), Majelis Mujahidin Indonesia (**Error! Hyperlink reference not valid.**), Dewan Dakwah Islam Indonesia (<http://dewandakwah.or.id/>), dan Majelis Tafsir Al-Quran (<https://mta.or.id/>). Website organisasi Islam non-afiliasi terdiri dari Portal Islam (<http://www.portal-islam.id/>), Era Muslim (<https://www.eramuslim.com/>), VOA-Islam (<https://www.voa-islam.com/>), Muslim Moderat (<http://www.muslimoderat.net>), Arrahmah (<https://www.Arrahmah.com>), Thoriquna (<http://www.thoriquna.id/>), dan Dakwatuna (<https://www.dakwatuna.com/>).

Media sosial yang menjadi sumber data mencakup tiga platform, yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Adapun informan yang menjadi sumber data adalah pegiat media sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode digital survey, wawancara, dan *Focused Group Discussion*. *Digital survey* dilakukan dengan menggunakan teknik *web-scraping* dan *web-searching* terhadap website organisasi Islam yang menjadi objek penelitian dan terhadap akun-akun Facebook, Instagram, dan Twitter. *Digital Survey* dilakukan sejak 1 Januari 2016 hingga 20 Oktober 2017. Informan terdiri dari 10 orang redaksi website dan 15 pegiat media sosial yang meliputi lima

orang memiliki akun Facebook, lima orang pemilik akun Instagram, dan lima orang pemilik akun Twitter. Adapun informan dalam FGD terdiri dari para pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah kota, dinas kominfo, POLRI, media, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Dengan adanya riset ini, diharapkan dapat memahami peran website dan media sosial dalam memproduksi dan menyebarkan ideologi-ideologi radikal yang mendukung maupun menolak radikalisme dan kekerasan ekstremis. Secara lebih khusus penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui popularitas website organisasi Islam di kalangan pegiat internet; (2) membandingkan popularitas website organisasi Islam Arus Utama, Kontemporer, dan Nonafiliasi; (3) mendeskripsikan respon website organisasi Islam terhadap isu-isu radikalisme; (4) mendeskripsikan respon media sosial terhadap isu-isu radikalisme; (5) mengungkap latar belakang dan motivasi memproduksi dan menyebarkan pesan-pesan radikal.

bab II

Pesan-Pesan Radikal: Seputar Pilpres, Pilkada DKI, dan Aksi Bela Islam

BAB ini secara khusus hendak membahas hal-hal yang terkait dengan pemikiran serta gagasan radikalisme yang tertuang dalam media sosial dan website yang diunggah dan disampaikan oleh para penikmat, *follower* serta para *netizen* lainnya. Dengan pembahasan bab ini diharapkan terdapat gambaran yang lebih memadai tentang pesan-pesan radikalisme pada periode selanjutnya dalam lanskap politik Indonesia dan keislaman khususnya. Tentu saja pembahasan pada bab ini belum dapat mewakili keseluruhan dari seluruh web dan media *online* yang terdapat di Indonesia pasca reformasi politik 1998 hingga tahun 2017. Bab ini berupaya mengantarkan para pembaca memahami konteks sosial-politik dan keagamaan (keislaman) yang berkembang di Indonesia dalam website dan media sosial sebagaimana dijelaskan dalam bagian-bagian di bab ini.

A. Pesan-Pesan Radikal di Seputar Pilpres 2014

Kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden RI menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono tidaklah semudah Soeharto maupun SBY memenangkan pertarungan. Pada saat Soeharto menjadi presiden ~~seca~~ berulang kali, oleh Dhaniel Dhakidae, setiap Pemilu disebut sebagai ritual pengesahan Soeharto sebagai presiden selanjutnya. Sebenarnya tidak ada Pemilu sebab pemenang sudah dapat dipastikan karena tidak ada kandidat lainnya,

selain Soeharto yang secara aklamasi ditetapkan oleh DPR/MPR RI sejak tahun 1971-1997.

Pasca 1998, dimana Soeharto tumbang oleh aksi demonstrasi mahasiswa, dosen, masyarakat sipil dengan bantuan TNI-Polri telah merubah peta politik nasional secara masif. Habibie menggantikan Soeharto dalam jangka sangat pendek, satu tahun karena tahun 1999, adalah awal mula Pemilu langsung memilih presiden dan wakil presiden dimulai di Indonesia. Kandidat presiden tahun 1999 berasal dari banyak partai pemenang pemilu.

Sejak tahun 1999 hingga 2004 terdapat pergantian presiden yang silih berganti (tiga presiden), yakni BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati. Tahun 2004 terdapat lima pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berlaga memperebutkan kursi pertama di negeri ini pada pemilihan umum (pemilu). Berdasarkan rapat pleno, Sabtu (22/5), Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan, kelima pasangan itu adalah Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudhusodo, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto- Salahuddin Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Kelima pasangan itu menjadi peserta pemilu presiden 2004 berdasarkan Keputusan KPU nomor 36/2004," kata Safder Yusacc, Sekretaris Jenderal KPU yang membacakan keputusan di kantor KPU, Jakarta. Sementara itu, pasangan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid-Marwah Daud Ibrahim gagal menjadi kontestan pemilu presiden, lantaran dinilai tidak memenuhi persyaratan BB4, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. KPU minta PKB memperbaiki persyaratan atau mengganti calon, tapi ternyata tidak dipenuhi, sebagaimana dikatakan Anggota dan Ketua Pokja Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden KPU, Anas Urbaningrum.

Dengan keluarnya keputusan KPU seperti dikatakan kata Yusacc, jaminan keamanan dan kesehatan para calon kemudian diserahkan kepada kepolisian sesuai dengan Undang Undang 23/2003 tentang Pemilu Presiden 2004. Sementara itu, sebelum pengumuman pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU, sekitar 300 pendukung Gus Dur berunjuk rasa menuntut pelolosan Gus Dur sebagai peserta pemilu presiden 2004.

Sementara itu pilihan presiden 2009 berdasarkan keputusan KPU terdapat 3 pasangan Capres-Cawapres, yaitu: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY- Sedang menjabat sebagai presiden)-Boediono (Jabatan terakhir Gubernur BI), Megawati (mantan Presiden RI)-Prabowo (mantan TNI, sekarang pengusaha), Jusuf Kalla (saat ini Wapres RI)-Wiranto (Purnawirawan Jenderal).

SBY-Boediono. Semboyan: SBY Berbudhi, Lanjutkan! Demikian slogan yang digunakan pasangan capres dan cawapres tersebut. SBY-Boediono diusung oleh Partai Demokrat (PD), PKB, PAN, dan PKS. SBY dari PD, serta partai-partai kecil lainnya. Sementara Boediono dari non partai. Pada awal pencalonan, Boediono mendapat tentangan dan tuduhan sebagai Neoliberalis sehingga PKS dan PAN sempat menentanginya, meski SBY-Boediono menyangkal dan mengatakan mereka memakai Ekonomi Kerakyatan. Harta kekayaan SBY sekitar Rp 8,5 milyar sementara Boediono yang menjadi bawahannya sekitar Rp 22 milyar. Jika tidak ada harta yang disembunyikan, maka SBY adalah Capres "termiskin" di antara capres yang ada ketika itu.

Dalam salah satu pidatonya, SBY mengemukakan beberapa strategi untuk Kemandirian Energi di Indonesia. Salah satunya ber-sama DPR menentukan "Pricing Policy" (menetapkan harga) yang "menarik" sehingga investor tertarik berinvestasi di bidang energi. Dari situ ada indikasi bahwa setelah terpilih, pasangan ini kembali menaikkan harga energi/BBM karena

dengan harga tetap seperti sekarang, tentu "Policy Pricing"-nya kurang "menarik" bagi investor.

Sementara itu, kandidat Capres lainnya adalah Megawati-Prabowo. Semboyan: Mega-Pro! Diusung oleh PDIP (Megawati), Gerindra (Prabowo), dan partai-partai kecil lainnya. Pasangan ini menjanjikan Ekonomi Kerakyatan. Dilihat dari *track record* dan analisa para pengamat, Megawati sebetulnya Neoliberalis karena masa pemerintahannya diwarnai dengan pencabutan subsidi BBM oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sehingga harga minyak naik dan juga penjualan BUMN oleh Laksamana Soekardi. Boediono yang dituding Neoliberalis pun sempat menjadi menterinya.

Namun para menteri yang dituding sebagian orang sebagai Neoli-beralis seperti Boediono, Purnomo, dan Laksamana Soekardi saat ini berpindah ke kubu SBY. Sementara Prabowo meski seorang kapitalis, mempropagandakan ekonomi kerakyatan untuk mengembalikan ke-kayaan alam Indonesia dari pengusaha asing ke rakyat Indonesia.

Dari sisi Ekonomi Kerakyatan yang dibawa Prabowo (Prabowo-nomics) mungkin menarik banyak orang. Namun PDIP yang bersama PDS sering berseberangan dengan partai Islam pada masalah isu-isu yang berkaitan agama seperti RUU Pendidikan Nasional, RUU Anti Pornografi dan Porno aksi, tentu memberi sentimen negatif pada sebagian pemilih Islam yang fanatik. Harta Megawati sekitar Rp 256 milyar sementara Prabowo sekitar Rp 1,5 trilyun.

Kandidat presiden yang juga perlu diperhatikan adalah JK-Wiranto. Semboyan: Lebih cepat lebih baik! Dari *track recordnya* yang menaikkan dan mengumumkan kenaikan harga BBM, para analis menuding JK sebagai Neoliberalis. Namun JK kerap menyuarakan Ekonomi Kerakyatan dan Kemandirian Nasional. Sebagai contoh JK memakai sepatu buatan dalam negeri. Kemudian meminta agar Pertamina mengelola sendiri

pengilangan minyak di dalam negeri. Harta kekayaan JK sekitar Rp 303 milyar. Sementara Wiranto Rp 81 milyar. JK berasal dari partai Golkar dari Sulawesi Selatan. Sementara Wiranto dari partai Hanura dan berasal dari Jawa. Ini adalah satu- satunya pasangan yang berasal dari luar Jawa dan Jawa. Hal ini dapat kita lihat dalam “Daftar Kekayaan Capres dan Cawapres” sebagai berikut:

1	Prabowo Subianto	Rp 1,5 triliun dan 7,5 juta dollar AS
2	Megawati Soekarnoputri	Rp 256,4 miliar
3	Jusuf Kalla	Rp 314,5 miliar dan 25.668 dollar AS
4	Wiranto	Rp 81,7 miliar dan 378.625 dollar AS.
5	Susilo Bambang Yudhoyono	Rp 6,8 miliar dan 246.389 dollar AS
6	Boediono	Rp 22 miliar dan 15.000 dollar AS

Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/29/15273635/Inilah.Daftar.Kekayaan.Capres>

Agaknya pada Pilpres 2009 yang menghadirkan tiga pasangan calon terdapat masalah soal isu lioberalisme, neoliberalisme dan HAM, namun masih dianggap biasa saja oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ada permasalahan di Komisi Pemilihan Umum namun tidak gaduh seperti Pemilu Presiden tahun 2014 dimana kandidat hanya dua pasangan, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla versus Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Seperti dilaporkan oleh Kompas.com. Selama Pilpres, Jokowi-JK paling sering diserang kampanye hitam dan isu SARA.

Koordinator Gerakan MataMassa Muhammad Irham mengatakan, dari pantauan yang dilakukan *Matamassa.org*, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, melakukan pelanggaran selama masa kampanye Pilpres 2014. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kata Irham, paling sering diserang dengan kampanye hitam dan isu SARA. Hal itu disampaikan Irham di Media Centre Badan Pengawas Pemilu, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Selama masa kampanye, terkait dengan masalah SARA, yang paling banyak diserang adalah Jokowi, sebanyak 69, sementara Prabowo 12 korban kampanye hitam. Irham menyebutkan, ada 109 laporan pelanggaran administrasi. Dari 109 laporan tersebut, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diduga melakukan pelanggaran administrasi sebanyak 67 kali. Sementara Jokowi Widodo-Jusuf Kalla sebanyak 30. Adapun, pelanggaran administrasi yang tidak diketahui sebanyak 12 laporan. Selain itu, untuk pelanggaran pidana ada 120 laporan, dengan rincian Prabowo-Hatta 69 laporan dan Jokowi-JK 9 laporan. Adapun, yang tidak diketahui sebanyak 42 laporan.

Sementara itu, untuk pelanggaran lain-lain, jumlahnya 83 laporan dengan rincian, yakni Prabowo-Hatta 34 laporan, Jokowi-JK 27 laporan dan tidak diketahui 22 laporan. Matamassa merupakan program pemantauan pemilu yang bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen Jakarta. Matamassa membuka laporan dari masyarakat atas segala bentuk pelanggaran pemilu sejak 3 Juni 2014. (sumber: Laporan tersebut disampaikan melalui situs www.matamassa.org.)

Hawa persaingan dua pasang calon presiden dan wakil presiden RI Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin kuat jelang Pemilu 9 Juli 2014. Ketimbang mengunggulkan program atau visi-misi yang ditawarkan masing-masing kubu, para pengikut dua kubu itu belakangan lebih sibuk mengurus kampanye hitam (*black campaign*).

Kampanye hitam merupakan tindakan yang menyerang kandi-dat capres dan cawapres dengan isu-isu mengenai latar belakang masing-masing yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung-jawab-kan. Kampanye hitam ini sangat tidak etis dan tidak sehat bagi masyarakat luas namun beredar sangat masif di media-media sosial untuk demi memengaruhi serta mengubah opini publik terhadap kandidat. Kedua kubu pasangan kandidat capres-cawapres sama-sama mengecam bentuk kampanye negatif tersebut. Bentuk kampanye seperti ini lebih didasarkan pada misi untuk menebar kebencian dan prasangka atas capres/cawapres yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Peristiwa dan tindakan kampanye hitam ini tidak dapat dipandang remeh dan para pemilih dihimbau untuk tidak terbawa arus dalam kampanye itu.

Prabowo sebagai kandidat presiden yang diusung Partai Gerinda, PKS, PAN menjadi target sasaran tembak atas tindakan kampanye hitam. Sejak dideklarasikan oleh partai pengusung sebagai calon presiden, sejarah masa lalunya pada saat menjadi Danjen Kopassus, selalu dikaitkan dengan kontroversi Tim Mawar yang muncul pada 1997-1998. Tim Kopassus ini disebut-sebut oleh sebagian kalangan melakukan penculikan para aktivis pro demokrasi tahun 1997-1998. Prabowo sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus waktu itu, mendapatkan imbasnya atas peristiwa tersebut pada saat ia sudah dicapreskan. Isu penculikan aktivis digunakan oleh lawan-lawan politiknya digunakan sebagai alat untuk menuduh bahwa Prabowo merupakan aktor dibelakang tindakan penculikan itu. Partai Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo membantah tuduhan dan kontroversi mengenai kasus penculikan. Prabowo sendiri menegaskan dia tidak bersalah karena pada saat itu hanya menjalankan perintah atasan.

Isu lain yang digunakan untuk menyerang Prabowo yaitu mengenai kepemilikan kewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia

dan Yordania. Isu ini imasif disebarikan melalui layanan pesan singkat yang sedang *ngetren* saat Pilpres yaitu *BlackBerry Messenger*, dan blog internet. Dalam kasus ini Prabowo, pasca diberhentikan secara tidak hormat oleh mahkamah militer disebut-sebut meminta kewarganegaraan Yordania kepada Raja Hussein pada tahun 1998. Raja Hussein dikabarkan mengabulkan permintaan tersebut sehingga keluarga Prabowo merasa senang atas perlakuan Raja Yordania tersebut.

Regulasi mengenai kewarganegaraan ganda menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 memang mengatur secara resmi mengenai larangan rangkap kewarganegaraan bagi seorang kandidat presiden. Mengingat Prabowo yang pernah menetap lama –hampir sepuluh tahun– di Yordania, lantas dijadikan isu yang dimainkan oleh lawan-lawan politiknya pada saat jelang pemilihan presiden. Kubu Prabowo dengan tegas membantah isu tersebut. Sebagaimana pernyataan dari Hatta Rajasa "Isu kewarganegaraan ini saya kira karena mereka sudah kehabisan isu untuk mengangkat kemudian diangkatlah isu-isu yang tidak ada. Menjawabnya sangat gampang juga, itu adalah *black campaign*".

Habiburokhman, sebagai bagian tim Advokasi Prabowo-Hatta, ada tiga bentuk kampanye hitam yang dilaporkan. Pertama, fitnah terhadap Prabowo yang dianggap terlibat dalam kasus penculikan dan kerusuhan 1998; kedua, isu Prabowo pernah meminta kewarganegaraan Yordania pada tahun 1999 dan; ketiga, Prabowo memukul seseorang saat pendaftaran bakal capres ke KPU pada 20 Mei lalu. Akun Twitter @partaisosmed pada 24 Mei 2014, disebut oleh Habiburokhman sebagai akun yang melakukan kampanye hitam terkait permintaan kewarganegaraan Prabowo.

Adapun isu Prabowo memukul seseorang disebarikan melalui rekaman video yang diunggah oleh akun Twitter @SamadAbraham. Video tersebut lantas menyebar melalui

jejaring sosial dan *broadcast message* di aplikasi pesan instan (*instant messenger*) Whatsap. Kasus ini hingga pilpres usai tidak dapat diketahui siapa pembuat dan penyebar video berjudul 'Prabowo Pukul Orang di KPU'.

Tersebar nya kampanye hitam di media sosial seperti Twitter, yang menyudutkan kedua kandidat capres-cawapres, seringkali menggunakan nama-nama akun palsu. Misalnya menggunakan nama tokoh tertentu yang dikenal oleh publik luas. Misalnya akun Twitter @SamadAbraham, foto yang digunakan adalah foto mantan Ketua KPK Abraham Samad serta kicauannya seolah-olah juga unggahan dari Abraham Samad. Menyikapi munculnya beberapa kampanye hitam yang ada di media sosial, seperti di Twitter, Mahendradata selaku Tim Advokasi Prabowo-Hatta, menjelaskan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian dan menuntut polisi untuk membongkar serta mengusut tuntas siapa di balik pembuat dan penyebar akun-akun palsu.

Selain isu di atas, isu yang sangat keras beredar di masyarakat dan media sosial tentang kandidat presiden-wakil presiden adalah soal isu SARA. Isu SARA ini sudah muncul ke publik sejak perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2012, khususnya mengenai soal agama yang dipeluk Jokowi. Dampak dari beredarnya isu SARA ini, adanya sebagian masyarakat yang meragukan keislaman Jokowi, sebagai kandidat gubernur DKI saat itu.

Pilpres 2014 sangat dinodai dengan kampanye hitam yang menggunakan sentimen SARA. Menyikapi hal ini Jusuf Kalla, sebagai kandidat cawapres pendamping Jokowi memberikan pernyataan bahwa bentuk kampanye hitam tersebut seyakinya dihindari serta tidak dilakukan. Sebagai upaya konfirmasi atas beredarnya isu-isu yang tidak benar tersebut, JK bahkan siap melakukan klarifikasi secara terus-

menerus atas beredarnya kampanye hitam terhadap dirinya dan Jokowi.

Bentuk kampanye hitam lainnya yang mengarah kepada pasha-an Jokowi-JK juga muncul dalam Youtube. Dalam video berdurasi 3 menit 39 detik tersebut, terdapat rekaman video yang berisi testimoni JK terkait pencapresan Jokowi, yang mana disitu JK mengatakan hancur negeri ini jika Jokowi jadi presiden. Seringkali unggahan video yang digunakan sebagai kampanye hitam tidak pernah dijelaskan konteksnya, sehingga mudah sekali disebarkan kepada publik luas.

Jokowi sebagai calon presiden tidak hanya menerima kampanye hitam yang meragukan dan menyerang ke-Islamannya. Di media sosial Facebook dan Twitter bahkan beredar gambar ucapan dukacita untuk Ir. Herbertus Joko Widodo (Oey Hong Liong), di dalamnya pun dimuat foto Jokowi.

Bentuk kampanye hitam ini berupa iklan pengumuman kematian yang sering dijumpai oleh publik sebagaimana yang dimuat di surat kabar. Di dalam gambar tersebut, tercantum tulisan yang mengumumkan "kematian" Jokowi pada 4 Mei 2014. *"Telah meninggal dengan tenang pada hari Minggu 4 Mei 2014 pukul 15.30 WIB, suami, ayah, dan capres kami tercinta satu-satunya."*

Unggahan dalam akun facebook tersebut berisi tentang informasi mengenai lokasi "jenazah" Jokowi akan dikebumikan. *"Jenazah akan disemayamkan di kantor PDIP Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan dan akan dikremasi pada Selasa 6 Mei 2014."* Pada bagian penutup, disebutkan pula Iriana Widodo sebagai istri Joko Widodo. Iriana seolah-olah sebagai pihak yang dikondisikan sebagai pemasang iklan. Pada bagian berikutnya tertulis pula nama Megawati Soekarno Putri sebagai pihak yang ikut "berdukacita". *"Turut*

berduka cita : Megawati Soekarno Putri beserta segenap staff, kader, dan Tim Sukses Capres 2014."

Pada saat dikonfirmasi oleh para jurnalis Jokowi mengaku sudah biasa diserang kampanye hitam. Namun, diakuinya, "RIP Jokowi" adalah konten kampanye hitam yang paling membuatnya kesal. Menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli mendatang, serangan kampanye hitam yang ditujukan kepada kubu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kian gencar. Banyak kalangan yang merisaukan maraknya kampanye hitam menjelang diselenggarakannya pemilu presiden (pilpres). Kerisauan itu disebabkan isu-isu yang disebar tidak sesuai fakta dan ada yang menyinggung hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan kampanye hitam dapat menghalangi hak masyarakat untuk mengetahui visi dan misi calon pemimpinnya. Kampanye hitam banyak ditemukan di sosial media dan tidak jarang menyinggung hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan. Kondisi tersebut membuat tim kampanye pasangan capres dan cawapres menjadi sibuk melawan kampanye hitam dan tidak punya waktu lagi untuk memaparkan visi dan misinya. Fenomena ini sangat merugikan masyarakat sebagai pemilih, karena pemilih memiliki hak untuk mengetahui program-program yang hendak dibawa oleh calon pemimpinnya. Pengamat komunikasi politik, Triyono Lukmantoro, menilai kampanye hitam menunjukkan cara berpolitik yang tidak berkualitas dan tidak cerdas. Kampanye hitam yang menyerang SARA sangat tidak mendidik dan tidak tepat diterapkan di Indonesia sebagai negara pluralis yang banyak suku dan agama. Tentu berbahaya kalau SARA menjadi materi untuk kampanye hitam.

Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Arie Sujito, menyatakan tim sukses kandidat capres diharapkan dapat membuka kelemahan pesaingnya dengan berdasarkan bukti-bukti dan tidak terjebak dalam kampanye hitam. Hal ini supaya membantu para pemilih menilai *track record* mereka. Kampanye hitam tidak membantu kualitas pemilu. Semua pihak harus memberitahu calon pemilih bahwa pemilu yang fair adalah pemilu yang ditandai sikap kritis bukan kampanye hitam. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan kampanye Pilpres 2009, kampanye hitam pada pilpres kali ini merebak jauh lebih gencar. Hal ini bisa dilihat dari materi yang terkandung dalam kampanye hitam yang sudah tergolong pada masalah SARA. Selain itu juga semakin gencar karena banyak dilakukan melalui media sosial. Beberapa isu yang banyak digunakan sebagai materi kampanye hitam yang banyak dilayangkan melalui media sosial baik melalui Facebook maupun Twitter, serta melalui pesan singkat berantai, yaitu: Tabel 1. Kampanye Hitam Serang Capres No Jokowi-JK Prabowo-Hatta 1 Jokowi dituduk antek zionis. Prabowo dituduh pernah menjadi warga Negara Yordania karena pernah tinggal di negara itu selama dua tahun. 2 Jokowi-JK akan mengangkat menteri agama dari kelompok Islam Syiah. Prabowo dituduh tidak membayar gaji karyawan Kiani Kertas selama beberapa bulan 3 Jokowi dituduh sebagai orang nonmuslim dan beretnik Tionghoa. Muncul video kasus pemukulan oleh capres Prabowo di KPU 4 Muncul iklan dukacita yang menyatakan Jokowi meninggal dengan nama Ir. Herbertus Joko Widodo. Ada twitter mengatas-namakan Abraham Samad yang menyatakan Jokowi harus dilindungi dari pembunuhan. 5 Jokowi-JK disebutkan akan mencabut kebijakan tunjangan guru. *Sumber: Media Indonesia, Senin 26 Mei 2014.*

Pengamat media sosial, Wicaksono, menilai kampanye hitam melalui media sosial untuk menyudutkan kubu Jokowi atau kubu

Prabowo, diperkirakan akan terus mengalami kenaikan hingga pemilu presiden Juli nanti. Menu utama kampanye hitam yang banyak dijumpai di media sosial Twitter dan Facebook, dibanjiri mulai isu rasial, agama, politik, hingga persoalan masa lalu pribadi Jokowi dan Prabowo. Namun Wicaksono mengingatkan sebagian masyarakat telah sadar dan tahu betul bahwa kampanye negatif belum bisa dipertanggungjawabkan, sehingga mereka tidak serta merta menelannya. Wakil Ketua tim media pemenangan kubu Jokowi-Jusuf Kalla, Aria Bima mengatakan, pihaknya selalu berusaha diam terhadap yang menimpa capres dan cawapresnya. Namun demikian, Aria Bima membantah melakukan kampanye serupa terhadap kubu lawannya. Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, mengingatkan seluruh tim kampanyenya untuk tidak melakukan kampanye hitam. Kampanye hitam yang dilakukan akan merugikan publik dan bangsa ke depan. Kampanye harus dilakukan dengan jujur, berakhlak, dan beretika. Terlebih lagi, saat ini masyarakat Indonesia sudah rukun dan damai. Seluruh tim pemenangan tidak boleh memaksa rakyat, tetapi meyakinkan rakyat untuk berjuang menghidarkan bangsa dari segala bencana. Secara khusus Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam twitternya menanggapi tentang maraknya kampanye hitam menjelang pilpres, menyatakan tim sukses sebaiknya fokus membantu capresnya berkomunikasi secara efektif dengan rakyat, bukan sibuk menyerang kompetitor dengan kampanye hitam.

Isu SARA merupakan isu yang tak pernah absen dari pembicaraan media ataupun masyarakat kita sendiri. Sejarah membuktikan dari awal nusantara kita terbentuk, nenek moyang kita memang berasal dari berbagai macam suku, etnis, dan aliran agama yang beraneka ragam. Jadi isu SARA memang sudah normal dibicarakan dan dewasa ini seharusnya kita harusnya lebih peka dan objektif dalam memahami isu tersebut. Pilpres 2014

dipenuhi isu SARA, karena dalam Pilpres kali ini, terjadi polarisasi kelompok-kelompok yang saling berposisi dalam peta dukungan capres. Secara Parpol, Golkar didukung oleh Demokrat dan Hanura. Gerindra didukung oleh PAN, PKS, PPP. PDIP didukung Nasdem dan PKB.

Pilpres 2014 berlangsung dengan peserta yang lebih ramping. Hanya ada dua pasangan yang maju dalam pemilihan langsung, mereka adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hasilnya adalah: Jokowi-JK memperoleh 70.997.833 (53,15 persen). Sementara itu, pasangan nomor urut satu, Prabowo-Hatta, mendapat 62.576.444 (46,85 persen). Disinilah perkembangan isu radikalisme-intoleransi dan komunisme menjadi bagian tak terpisahkan di media sosial dan kampanye.

Itulah kondisi sosial politik Jelang Pilpres 2014 yang telah kita lewati bersama. Tensi proses demokrasi demikian keras. Pertarungan antar kandidat demikian tampak terlihat. Isu yang dikembangkan juga semakin keras tidak sekeras pada Pilpres 2004-2009 yang menghadirkan lebih dari dua pasangan calon presiden-wakil presiden. Partai pendukung pun menyebar dibanyak kandidat. Sementara itu pada Pilpres 2014 yang dimenangkan pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla partai hanya bergerombol pada dua pasangan calon yang secara otomatis berhadapan-hadapan satu lawan satu. Isu komunisme, sesat, kafir, non Islam serta isu Cina-non China menjadi bagian tak terpisahkan dari kampanye Pilpres 2014 terutama dalam media sosial dan media cetak.

B. Pesan-Pesan Radikal di Seputar Pilkada DKI 2017

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang dilangsungkan pada tahun 2017 keramaiannya sudah mulai bisa dirasakan sejak sebelum Pilkada dilangsungkan. Jadwal rangkaian Pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah ditetapkan (KPU, 2016). Sejak tahapan

pendaftaran dan ditetapkan calon Gubernur DKI Jakarta 2017 nama-nama calonnya mulai banyak diperbincang, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Semua orang bebas berpendapat atau beropini tentang calon Gubernur DKI Jakarta 2017 sehingga memunculkan banyak opini, tidak hanya opini yang positif atau netral tapi juga yang negatif.

Perkembangan media yang begitu pesat, memunculkan banyak media online dari media berita sampai media sosial. Media sosial saja sudah begitu banyak, dari Facebook, Twitter, Path, Instagram, Google+, Tumblr, LinkedIn dan sebagainya masih banyak lagi. Media sosial sekarang ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertemanan, mencari teman, tapi sudah banyak digunakan untuk kegiatan lain. Promo dagangan, jual beli apa saja sampai promo partai politik atau kampanye calon legislatif, kepala daerah dan presiden.

Media sosial khususnya Twitter sekarang ini menjadi perangkat komunikasi yang sangat populer di kalangan pengguna internet. Pada konferensi resmi pengembang Twitter Chirp 2010, perusahaan tersebut menyampaikan statistik mengenai situs dan pengguna Twitter. Statistik tersebut menyebutkan bahwa pada bulan April 2010, Twitter memiliki 106 juta akun dan sebanyak 180 juta pengunjung unik setiap bulannya. Jumlah pengguna Twitter disebutkan terus meningkat 300.000 user setiap harinya (Yarrow, 2010). Digital Buzz blog suatu situs yang menyediakan statistik infografik menyebutkan data statistik yang sama. Sebagaimana dikemukakan dalam tulisan *Analisis Sentimen Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 Di Twitter*, Ghulam Asrofi Buntoro Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dari yang ditulis oleh Ghulam dalam artikelnya, dikatakan bahwa diketahui bahwa hasil akurasi tertinggi didapatkan saat menggunakan metode klasifikasi *Naïve Bayes Classifier (NBC)*

untuk klasifikasi data AHY, sedangkan untuk nilai akurasi terendah didapat saat metode klasifikasi *Naive Bayes Classifier (NBC)* digunakan untuk klasifikasi data Ahok dan Anies. Meskipun menghasilkan akurasi yang cukup baik, tapi model yang dibangun masih melakukan sedikit kesalahan pada saat proses klasifikasi data yang pembagian sentimennya tidak seimbang. Karena dengan menggunakan data yang tidak seimbang akan menyebabkan data *minority class* yang salah diklasifikasi sebagai data *majority class* (Kohavi, 1998). Pada akhirnya menjadikan selisih nilai menjadi besar.

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Analisis Sentimen dapat digunakan untuk mengetahui sentimen masyarakat khususnya netizen Twitter terhadap calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Tujuannya membantu masyarakat menentukan sentimen yang terdapat pada twit opini Bahasa Indonesia yang ada di Twitter. Setelah dilakukan analisis sentimen, terlihat berapa banyak sentimen yang ditujukan kepada calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Nilai akurasi tertinggi didapat saat menggunakan metode klasifikasi *Naive Bayes Classifier (NBC)* untuk klasifikasi data AHY, dengan nilai rata-rata akurasi mencapai 95%, nilai presisi 95%, nilai *recall* 95% nilai *TP rate* 96,8% dan nilai *TN rate* 84,6%.

Berdasarkan polarisasi peta kelompok pendukung ekstrem seperti ini dapat dipastikan, isu SARA akan bermain. Sebut saja : Islam versus Kristen dan Katolik, Pribumi versus Tionghoa, TNI versus Polri, Nasional versus Asing, dan sebagainya. Kondisi seperti itu mengingatkan kita pada Pilkada DKI 2017. Etnis Tionghoa dari wilayah Jakarta Barat cerita, seluruh keluarganya menganjurkan coblos Ahok. Apa alasannya? Tak lain karena ada faktor Ahok. Data pemilih wilayah Jakarta Barat menunjukkan dominan memilih Jokowi – Ahok. Fakta yang terjadi di masyarakat ketika Pilkada DKI, Ahok-Saiful dari kelompok Tionghoa menyerukan coblos Ahok karena kesamaan

etnis. Demikian pula team sukses Anies-Sandi menyerukan agar etnis betawi mencoblos mereka. Kemudian juga timses Ahok kelompok Katolik serukan agar penganut Katolik coblos mereka.

Sekitar 71% warga Jakarta mengaku khawatir dengan semakin menguatnya isu SARA selama Pilkada DKI Jakarta, seperti terungkap dalam sebuah survei. Dan masa kampanye yang masih beberapa pekan lagi menjelang pemungutan suara pada 19 April mendatang dikhawatirkan akan semakin meningkatkan intoleransi di kalangan masyarakat. Survei yang dilakukan Populi Center setelah Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, menunjukkan isu SARA yang digunakan dalam Pilkada Jakarta antara lain munculnya himbuan untuk tidak memilih calon muslim dan masalah tidak mensalatkan jenazah.

Selain memisahkan masyarakat, isu SARA -menurut Direktur Populi Center, Usep Ahyar, juga membuat masyarakat terintimidasi. Ketika isu-isu SARA semakin menguat dan politik identitas menguat, maka ada yang merasa terintimidasi. Ada yang kebebasan pendapatnya menjadi terhalang, menjadi takut ketika mengemukakan pendapat. Itu (isu SARA) dan politik identitas itu kan pasti sengaja dibuat secara politik dan itu meniscayakan bahwa kelompoknya yang paling hebat sedang yang lain subordinat. Semuanya karena pengaruh media sosial. (Sri Lestari, BBC Indonesia, 24 Maret 2017).

Penguatan isu SARA, seperti diamati Bonar Tigor Naipospos dari lembaga demokrasi dan perdamaian, Setara Institute, dimanfaatkan oleh elite politik dan kandidat gubernur untuk memperoleh dukungan warga. Bonar juga mengamati bahwa meski partai pendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta merupakan parpol yang beraliran nasionalisme namun tetap jugamelakukan pembiaran penggunaan isu SARA. Dan sudah saatnya pemeirntah untuk campur tangan. Menurut Bonar sebenarnya proses hukum harus dilakukan, media sosial harus diawasi. Dampak dari media sosial adalah orang menjadi asosial

dan akibatnya muncul persepsi untuk egois pada pilihan dia dan ini berakibat pada dunia sosial. Bonar menyarankan agar negara harus membangun ruang publik, ruang dialog agar kelompok - kelompok yang ada itu saling berinteraksi (Media, 14 Juli 2017).

Beberapa isu SARA yang muncul pada Pemilu Legislatif di Jakarta tahun 2017, saat terjadi Pertarungan keras antara pasangan Ahok-Saiful versus Anies-Sandi akan menjadi batu ujian dan sekaligus batu loncatan atas Pemilu Kepala Daerah tahun 2018 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden tahun 2019 mendatang. Kita akan dapat menyaksikan kampanye kekerasan telah mulai terjadi sejak sekarang ini, di media sosial seperti whatshap, twitter, facebook, maupun Instagram. Bahkan dalam pengajian-pengajian dan aktivitas keagamaan lainnya di muka publik.

C. Pesan-Pesan Radikal di Seputar Aksi Bela Islam I dan II

Perhelatan Pilkada DKI putaran kedua Situasi politik dari hari ke hari semakin panas dan sangat menarik untuk diikuti. Panasnya Jakarta semakin luar biasa seiring dengan penetapan KPU DKI Jakarta, yang mengharuskan Ahok-Jarot dan Anies-Sandy bertarung di putaran kedua. Kedua kubu mulai merapatkan barisan untuk menyusun strategi kemenangan untuk paslon yang diusungnya. Aneka strategi dikeluarkan untuk menarik pemilih DKI untuk menjatuhkan pilihan politiknya pada paslon yang bertarung. Dari sekian banyak strategi yang dikeluarkan kedua tim, isu SARA menjadi senjata pamungkas dalam meraih simpati dan dukungan warga DKI. Demi meraih kemenangan isu SARA dimainkan secara terstruktur, sistematis dan masif pada perhelatan Pilkada DKI Jakarta. Bangkitnya isu SARA pada Pilkada Jakarta bisa kita katakan sebagai salah satu bentuk kemunduran proses demokrasi yang berkeadaban di Indonesia.

Dalam politik Pilkada yang memainkan isu SARA dapat pula kita baca sebagai bentuk dari kebangkitan sentiment

primordialisme atas dasar etnisitas dan keagamaan yang sengaja dibangun. Model perpolitikan semacam ini pernah terjadi dengan massif ketika memasuki Pemilu tahun 1971, setelah sebelumnya tahun 1965 terjadi Gestapu PKI yang sampai sekarang masih misteri siapa sebenarnya pelaku utamanya dan apa motif yang ada dibelakang terjadinya pembunuhan beberapa petinggi militer di lingkaran presiden Soekarno. Dalam isu yang sama tetapi disampaikan dengan bahasa lain, Vedi Hadiz (Vedi Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, ISEAS, Singapore, 2016) menunjuk bahwa isu kebangkitan sentiment primordialisme adalah kebangkitan populisme Islam atau bahasa Bassam Tibi adalah Islamisme (Bassam Tibi, *Islamisme: Kebangkitan Islam Politik*, Mizan, 2017).

Isu SARA merupakan satu-satunya cara untuk menurunkan popularitas Ahok. Dalam hal ini isu penistaan agama Islam dan ulama dianggap sebagai langkah strategis dalam mengalihkan dukungan publik Jakarta dari Ahok ke paslon lain. Demonstrasi berjilid-jilid untuk menggagalkan Ahok dalam Pilkada DKI tersulut dari isu penistaan agama dan ulama ini. Isu penistaan agama dan ulama pada akhirnya mengharuskan Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Tidak berhenti di sini saja derita yang ditanggung Ahok. FPI dan ormas lainnya menginginkan Ahok dipenjara tanpa melewati pengadilan. Mau dibawa kemana negeri Indonesia yang tercinta ini kalau nafsu dan keinginan ekstrem kaum sumbu pendek seperti ini tetap dipelihara. Ahok akhirnya harus mendekam di penjara sebagai akibat dari adanya politik SARA. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Ahok: Korban Isu SARA Pilkada DKI.

Ungkapan bahwa Ahok China Kristen dari Kelompok Minoritas dan Haram memilih pemimpin Non muslim merupakan ungkapan yang paling tajam saat jelang Pilkada Jakarta. Isu haram memilih pemimpin non muslim tampaknya

ujaran ini cukup berpengaruh pada publik Jakarta bahkan luar Jakarta. Salah satu bukti manjurnya ujaran ini adalah berduyunduyunnya para pendukung PAN, PKS dan Gerindra yang mengusung Anies-Sandi untuk berdemo dengan jargon Aksi Bela Islam I dan II yang diselenggarakan di sekitar Masjid Istiqlal dan Lingkar Monas Jakarta di bawah komando Front Pembela Islam Rizieq Shihab.

Sebenarnya munculnya isu SARA bisa juga dibaca dengan cara lain yakni bahwa dengan majunya Ahok dalam pesta demokrasi DKI Jakarta sebagai pertarungan untuk menguji kualitas demokrasi kita di Indonesia. Apakah demokrasi kita telah beranjak dari isu SARA menjadi isu keadilan sosial ataupun *good governance*. Setelah isu penistaan agama dan ulama dianggap gagal meredupkan popularitas Ahok. Setelah menggelar isu pemimpin non muslim dan penistaan Islam, maka yang masih berkaitan dengan SARA tetap dilancarkan. Ahok adalah dari keturunan China tetap mendapat perhatian penting lawan politik. Ahok dihubung-hubungkan dengan Negara China yang menganut paham komunis. Latar belakang Ahok yang beragama Kristen menjadi daya pikat tersendiri. Isu kristenisasi menjadi santapan empuk kaum politis radikal untuk menggemosi kekuatan Ahok. Lebih lanjut Kaum muslim diwajibkan untuk memilih sesama pemimpin muslim. Salah satu langkah politis yang paling radikal adalah munculnya spanduk yang mengintimidasi sesama umat muslim. Larangan mensholatkan jenazah pendukung Ahok mencuat ke permukaan. Demi meraih simpati dan kemenangan sesama umat Muslim tega saling menjatuhkan. Label kafir sudah pasti dikenakan pada Ahok yang non muslim. Bukan hanya Ahok yang dicap kafir, pendukung dan pemilih Ahok dari latar belakang muslim pun dapat dikenakan label kafir.

Isu SARA yang dipakai oleh lawan politik Ahok sudah mencapai titik didih. Bagaimanapun juga Pilkada DKI Jakarta

tetap menjadi barometer iklim demokrasi di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai ke Merauke tetap menyimak perhelatan Pilkada DKI. Alasannya sederhana, Jakarta adalah pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekecil apa pun peristiwa di Jakarta akan tetap dipantau oleh segenap bangsa Indonesia. Isu SARA sinyal kebangkitan Radikalisme dan langkah mundurnya demokrasi di Indonesia.

Dengan terjadinya kampanye tentang isu kepemimpinan non muslim, kafir, sesat serta etnisitas, sebenarnya merupakan pertanda kebangkitan paham radikal pada Pilkada DKI dalam demonstrasi yang dikemas dalam bentuk Bela Islam I dan II. Selain itu ditunjukkan dengan jelas oleh tim sukses yang menjadi lawan Ahok. Keharusan memilih pemimpin muslim, mengharuskan memilih pemimpin kafir, melarang mensholatkan pendukung dan pemilih Ahok-Jarot, penduduk Jakarta yang mayoritas Muslim wajib hukumnya dipimpin oleh calon yang berlatar belakang Muslim merupakan tandap-tanda nyata kebangkitan paham radikal.

Selain itu, adanya pemaksaan kehendak dan intimidasi terhadap warga DKI Jakarta yang berpaham nasionalis dan berpijak pada empat pilar kebangsaan ini bukan saja sekedar praduga melainkan bukti, fakta yang tak terbantahkan. Di era demokrasi liberal ini bagus di satu sisi, ada keseimbangan antara pemerintah dan rakyat. Rakyat bisa mengontrol pemerintah. Namun, masalah negafitnya, kalau terlalu bebas maka paham radikal bisa masuk di sana dalam ruang demokrasi. Hal seperti ini seperti disampaikan oleh Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. Hal itu menjadi bukti bahwa NKRI yang tercinta ini sedang diserang dan disusupi paham radikal.

Pilkada DKI Jakarta telah sukses menjadi drama politik dan fenomena nasional dengan isu agama sebagai nafasnya. Ibarat reaksi penguraian persatuan bangsa Indonesia dengan isu agama

sebagai katalisnya. Ibarat perang sipil dengan isu agama sebagai garda terdepannya.

Berkaca dari situasi yang terjadi selama hampir setahun terakhir, dinamika politik terasa sangat stabil di awal periode tersebut, sampai pada bulan September ketika video unggahan Buni Yani menggegerkan dunia maya dan menyulut sentimen dan pertentangan antar agama dan ras. Media sosial turut menjadi pemicu semakin tajamnya silat lidah dan debat nir-faedah di dunia maya. Sekarang pertentangan semacam itu bisa berlangsung kapan saja. Dua orang yang saling tidak mengenal dan tidak pernah bertemu, bisa geger di dunia maya karena isu yang sebetulnya terlalu sia-sia untuk diperdebatkan, seperti isu agama mana yang paling benar atau ras mana yang paling dominan. Tetapi karena isu-isu sesimpel itu bisa menjadi isu-isu yang sesensitif itu, bangsa bisa terpecah-belah; keragaman menjadi penghancur, bukan kekuatan. Pertanyaannya, apakah Pilkada DKI dan Isu SARA: Sebuah Simpati akan terus dilamngsungkan ataukah berhenti di Indonesia?

D. Pesan Radikal Pasca Bela Islam I dan II

Isu SARA dapat menjadi salah satu bagian dari kemunculan islamisme atau kebangkitan politik agama di Indonesia. Politik Agama sendiri sebenarnya bukan khas Indonesia. Namun demikian untuk isu Agama di Indonesia memang selalu menarik. Isu suku, agama, ras, dan antar- golongan (SARA) menjadi salah satu sorotan dari dinamika politik pada 2017. Pengamat politik dari *Exposit Strategic*, Arif Sutanto, mengatakan, politik yang bercampur aspek SARA ini sangat terasa dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Arif menilai, bukan tidak mungkin politik identitas ini akan meramaikan Pilkada Serentak 2018, bahkan Pemilu 2019. "Politik kebencian berbasis identitas tampak kuat membelah masyarakat. Saya khawatir ini menjadi preseden buruk pada tahun politik 2018 dan 2019 mendatang," kata

Arif saat dihubungi, Selasa (26/12/2017), sebagaimana dilaporkan oleh Ihsanuddin Kompas.com - 26/12/2017.

Menurut Arif, kontestasi politik dengan menggunakan isu SARA ini bisa menjalar ke skala yang lebih besar. Sebab, Pilkada 2018 adalah pemanasan menuju Pemilu 2019. Persaingan ketat akan bergeser sedikit dari Ibu Kota ke tiga provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Siapa pun yang menguasai wilayah dengan jumlah penduduk yang paling besar ini, diyakini bisa memuluskan langkahnya menuju Pilpres 2019. Oleh karena itu, daerah-daerah di wilayah Jawa dengan potensi suara besar menjadi pertarungan penting yang potensial mengundang ketegangan politik, ujar Arif. Arif mengatakan, kunci mencegah politik SARA terus terjadi adalah kesadaran di tingkat elite. Jika elite sama-sama sepakat bersaing secara sportif, diharapkan politik identitas yang berpotensi memecah belah bisa ditekan seminim mungkin.

Disebabkan karena gencarnya isu SARA pada Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi berkembangnya isu sentimen suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dalam Pilkada Serentak 2018. KPU membuat dua Peraturan KPU sebagai langkah antisipasi merebaknya isu SARA saat Pilkada. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, selain mengeluarkan dua aturan tersebut, KPU juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengantisipasi kampanye hitam dan penggunaan isu SARA. Tentang merebaknya isu SARA, itu kan kami berkaca dari Pilkada 2017 di DKI. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu memprihatinkan kita semua, dikatakan Wahyu, dalam peluncuran slogan KPU 'Pemilih Berdaulat Negara Kuat', di Jakarta, Jumat (27/10/2017) seperti dilaporkan oleh Estu Suryowati, Kompas.com

Dalam penyusunan PKPU tentang kampanye dan sosialisasi pendidikan masyarakat, (isu) itu menjadi perhatian kita semua,

disampaikan Wahyu. Peraturan pertama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan kedua, PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 17 PKPU 4/2017 menyebutkan, materi kampanye harus menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat. Sementara, pada Pasal 68 (1) disebutkan dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan atau partai politik. Adapun Pasal 29 PKPU 8/2017 mengatur, pelaksanaan sosialisasi pemilihan dengan satu pasangan calon dilarang menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

Sasaran sosialisasi pendidikan pemilih adalah (termasuk) warganet. Jadi, dalam kuncinya, kami memerangi hoaks, memerangi fitnah, dan mengajak masyarakat untuk mencerna informasi dengan bijak. Tidak semua informasi di media sosial bisa dipertanggungjawabkan, sebagaimana Wahyu sampaikan di Kantor KPU. Melalui petunjuk teknis, KPU juga telah menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk tim media sosial dengan berbagai akun.

Agaknya KPU menyadari bahwa Pemilu 2018 dan Pilpres tahun 2019 akan menjadi kampanye yang akan memanfaatkan media sosial sebagai bentuk kampanyenya. Media sosial tidak akan ditinggalkan oleh team sukses maupun kandidat untuk menyampaikan gagasannya ataupun mempromosikan dirinya. Dengan kaitan itu, KPU pun mengambil langkah untuk memanfaatkan Facebook, Twitter, dan sebagainya untuk senantiasa memberikan informasi dan pesan-pesan kunci lain dalam

rangka mengedukasi pemilih, agar dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri, bebas dari berita fitnah dan menjauhkan diri dari isu SARA yang dikemukakan oleh pihak KPU. Oleh sebab itu, pendidikan politik perlu dilakukan dengan baik oleh masyarakat sipil dan negara.

Menanggapi masalah kemungkinan munculnya isu SARA dalam Pilkada tahun 2018 dan Pilpres 2019 Mendagri meminta Bawaslu tegas menindak para kandidat dan team sukses yang menggunakan isu SARA dalam kampanye. Seperti dilaporkan oleh Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tegas apabila mengetahui adanya praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2018. Tjahjo juga berharap aparat kepolisian bisa membantu untuk memerangi praktik politik uang. Dikatakan Tjahjo Kumolo bahwa Pemilu itu sukses kalau tidak ada politik uang. "Saya kira, harus ada proses ketegasan dari Bawaslu dan kepolisian dalam hal yang berkaitan dengan politik uang," tegas Tjahjo dalam sambutannya di peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2018 di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Tjahjo Kumolo menuturkan, ketegasan dalam menindak praktik politik uang ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo. Presiden, kata Tjahjo, juga mengharapkan agar semua calon kepala daerah untuk lebih sibuk adu program, adu konsep atau gagasan. Sebab, program-program bermutu dari pemerintah daerah inilah yang dapat meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Bawaslu dan kepolisian juga diminta tegas terhadap kampanye hitam yang mengarah pada ujaran kebencian dan berbau fitnah yang berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Mendagri kemudian melanjutkan bahwa masalah-masalah SARA itu yang harus ditegaskan oleh Bawaslu, dan pasangan calon pilkada, termasuk calon-calon anggota DPR/DPRD dan timses, juga kepolisian, ujar Tjahjo.

Sementara itu, sebagai langkah antisipasi atas akan maraknya politik SARA dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang, PBNU juga berharap polisi dan pemerintah tegas memberikan hukuman kepada pasangan calon dan team sukses yang menggunakan isu SARA dalam kampanye sebagai sarana pemecah belah masyarakat. Hal ini sebagaimana dilaporkan Kompas.com Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, penyebaran ujaran kebencian yang makin marak di media sosial menjadi salah satu yang dibahas saat bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/9/2017). "Presiden mengharapkan NU mendukung, memerangi *hate speech*, jaringannya," kata Said Aqil kepada wartawan, se usai pertemuan tertutup dengan Jokowi. Said Aqil mengatakan, PBNU siap mendukung pemerintah memerangi ujaran kebencian, fitnah, dan kebohongan di dunia maya. (*Ihsanuddin, Kompas.com - 05/09/2017*).

Dalam salah satu pernyataannya, Ketua Umum PBNU, Said Aqil akan meminta jajarannya untuk menangkal berbagai ujaran kebencian yang menyebar di media sosial. Banyak sekali anak NU yang sudah pandai, menguasai IT (sama) dengan polisi karena itu harus berperan aktif menangkal radikalisme di media, kata dia. Said Aqil mengatakan, fitnah dan kebencian jika dibiarkan bisa mengancam keutuhan negara. Namun, ia juga mengingatkan agar pemberantasan ujaran kebencian tidak hanya dilakukan terhadap pihak yang menyerang pemerintah. Said Aqil meminta pemerintah tidak terbang pilih.

Hal yang paling penting adalah bahwa kebencian, isu SARA dan isu primordialisme lainnya perlu mendapatkan perhatian banyak pihak. Oleh sebab itu, siapapun penyebar fitnah, dari mana, untuk siapa, itu mengancam keutuhan negara. Siapapun yang melakukan dan membuat fitnah, berita bohong, harus ditindak tegas oleh aparat kepolisian secara adil tidak bisa terbang pilih. Dalam konteks itu pula, perlu juga dibahas bagaimana

memperkuat pendidikan karakter dan pendidikan pemilih menuju Pemilu 2018 dan Pilpres 2019 mendatang.

E. Pesan Radikal Jelang 2018-2019

Pilkada 2018, isu SARA diprediksi akan kembali panaskan tensi, seperti diaporkan oleh wartawan Ayomi Amindoni dari BBC Indonesia bahwa Pilkada serentak 2018 yang akan digelar Juni mendatang tampaknya masih dibayang-bayangi dengan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Dibuinya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akibat kasus penistaan agama demi menjaganya terpilih kembali sebagai gubernur DKI Jakarta dan munculnya larangan untuk tidak mendoakan pendukungnya, tampaknya menjadi cerminan buasnya isu SARA dalam Pilkada Jakarta itu.

Dengan kondisi sebelumnya, saat Pilkada DKI Jakarta, dimana kandidat dari PDI Perjuangan Ahok-Saiful menjadi bulan-bulnan dengan isu SARA, diperkirakan bahwa isu SARA kembali akan memanaskan tensi Pilkada 2018. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memandang sentimen SARA masih mengancam kelangsungan Pilkada 2018 dan juga Pemilu maupun Pilpres 2019 karena, antara lain, persaingan ketat para partai politik. Pertarungan tersebut seakan mengindikasikan adanya pertarungan antara Islamisme versus non Islam. Jelasnya antara Islamisme sebagai representasi Islam Politik versus Nasionalisme Sekuler dilain pihak.

Di dalam kompetisi yang sangat sengit, di mana pertarungan itu begitu luar biasa untuk memenangkan pilkada, akan selalu ada pihak-pihak atau oknum yang menggunakan cara ilegal tapi dianggap efektif untuk memenangkan pilkada. Jadi kalau ditanya apakah politik SARA akan digunakan lagi di 2018? Kemungkinan itu selalu ada dan sangat mungkin," ujar Titi kepada BBC

Indonesia, Selasa (10/01). Kondisi seperti ini oleh Vedi R Hadiz disinyalir karena tidak adanya kekuatan dominan partai politik dan elit dari semua partai. Hal yang terjadi adalah adanya persebaran elit partai dan penguasa ekonomi yang turut bermain dalam politik Pilkada maupun Pilpres mendatang. (Lihat Vedi Hadiz, *Ekonomi Politik Indonesi Pasca Orde Baru*, LP3ES, 2016). Kemungkinan maraknya kembali isu SARA agaknya juga menjadi kekhawatiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang langsung wanti-wanti agar para calon tidak menggunakannya dalam kampanye pilkada 2018, melainkan adu program. "Marilah kepala daerah adu program adu konsep adu gagasan untuk kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat daerah. Jangan kampanye fitnah, kampanye berujar kebencian, apalagi SARA," ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta (*Kompas*, 28 Januari 2018).

Salah satu wilayah yang diperkirakan akan menghadapi tensi SARA yang memanas adalah Provinsi Jawa Barat berdasarkan karakter pemilihnya, jelas pengamat politik dari Universitas Padjajaran Firman Manan. Dikatakan oleh Firman Manan, karakter pemilih Jawa Barat itu, salah satu karakter pemilih adalah pemilih yang religius, bahkan perkembangan terakhir juga muncul kekuatan Islam yang konservatif. Oleh sebab itu Jawa Barat cukup mengkhawatirkan dengan pertarungan lima pasangan calon Gubernur pasca Aher-Dedy Mizwar. Lima kandidat Gubernur Jawa Barat tersebut adalah Ridwan Kamil, Dedy Mizwar, Ahmad Syaikh, TB Hasanuddin dan Dedy Mulyadi.

Kondisi seperti itu, baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Di mana Jawa Tengah akan terjadi berhadapan-hadapan antara kandidat dari PDIP Ganjar Pranowo dengan Sudirman Said dari Partai Golkar. Serta pertarungan sengit antara Saifullah Yusuf (PDIP) versus Khofifah (PKS, PAN dan Gerindra) di Jawa Timur dalam Pilkada 2018 ini bisa kita anggap sebagai "pemanasan pilpres 2019". Banyak yang melihat Pilkada 2018 sebagai

pemanasan menuju Pemilu dan Pilpres 2019 karena tiga provinsi yang menggelar pilkada tahun ini -Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur- memiliki jumlah penduduk besar. Jadi siapa pun yang menguasai ketiga wilayah itu diperkirakan akan bisa memuluskan langkah untuk pemilihan tahun depan. Maka dari itu Pilkada 2018 menjadi sangat menentukan, jelas Titi Anggraini dari Perludem, mengingat eksistensi dan kekuatan kompetisi partai akan diuji secara langsung.

Karena itu, Pilkada 2018 dapat menjadi pemanasan, yakni semacam batu uji apakah akan dapat memenangkan pertarungan ataukah kekalahan yang didapatkan. Pilkada di Tiga Provinsi akan dapat menjadi medium untuk menguji kekuatan partai dan kekuatan mesin partai dalam memenangkan pemilu. Oleh karena itu, kalau dapat memenangkan Pilkada di tiga provinsi tersebut akan melahirkan psikologi positif bagi partai dan pemilih lantaran jarak yang sangat berdekatan antara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Oleh pengamat Perludem, Titi Anggraini kemenangan pada tiga provinsi akan meningkatkan kepercayaan diri partai dan mesin partai. Tetapi jika kekalahan yang didapatkan maka akan memerosotkan kekuatan partai dan mesin partainya. Oleh sebab itu pertarungan untuk memenangkan Pilkada, bagi partai, tampaknya dianggap sebagai awal kemenangan 2019.

Itulah faktor psikologi politik yang ingin dibentuk bahwa kemenangan di 2018 berkaitan dengan kemenangan di 2019. Hal seperti itu yang ingin dibangun. Makanya kemudian mereka para kandidat dan team akan *all out* di 2018. Memenangkan 2018 akan dilekati perspektif mereka bahwa sudah sebagian dari memenangkan 2019. Jika berbicara soal wilayah atau daerah, maka ada beberapa daerah yang dianggap rawan dengan politik SARA. Lalu, wilayah mana saja yang rawan politik SARA? Sebenarnya masing-masing daerah punya potensinya, hanya saja isunya apa, skalanya seberapa luas, itu yang berbeda. Karena biasanya isu SARA

akan digunakan kalau masing-masing calon merupakan anti-tesis satu sama lain, dari sisi agama dan suku, misalnya, dijelaskan oleh Titi Anggraini.

Daerah-daerah yang punya sejarah atau latar belakang pertentangan karena faktor etnis, agama, suku, memang menjadi lebih rentan, apalagi kalau kepala daerahnya mempunyai keragaman itu, imbuhnya. Isu suku, misalnya, menurutnya Titi Anggraini sangat mungkin akan dimainkan di Provinsi Sumatra Utara dalam pemilihan gubernur kali ini. "Di Sumatra Utara isu keturunan Jawa, Melayu, serta agama akan menjadi isu karena memang keberagaman di sana itu nyata," Sama halnya seperti di Maluku, benturan SARA dalam pilkada sebelumnya bisajadi bakal digunakan kembali.

Hadirnya politik SARA menandai adanya politik koalisi cair diantara partai-partai yang berdfasarkan pada ideology. Berbeda dengan peta politik dalam pilkada tahun lalu atau pemilu 2014, peta politik dalam pilkada 2018 cenderung cair karena partai-partai politik yang sebelumnya berseberangan kini malah menjadi mitra koalisi. Di Papua, Gerindra berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk mengusung John Wempi Wetipo- Habel Melkias Suwae, padahal keduanya bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2014 lalu.

Hal yang sama terjadi dengan Partai Demokrat yang berkongsi dengan PDI-P. Dalam pilkada serentak 2018, Partai Demokrat dan PDIP sepakat berkoalisi di dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Sedang di Jawa Tengah, dua partai ini mendukung Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan di Kalimantan Barat untuk pasangan calon Karolin Margret Natasa- Suryadman Gidot. Sementara koalisi Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tampak solid dalam pencalonan gubernur di lima provinsi, termasuk di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Partai politik akhirnya dapat dibaca

sebagai pertanda sedang memulai penjajakan menuju pemilihan presiden 2019. Dalam kaca mata yang lainnya, dapat pula dibaca dalam konteks koalisi Pragmatis dan taktis. Namun demikian, analisis tersebut oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, menampik anggapan koalisi dengan PDIP disebut sebagai penjajakan menuju pilpres dengan alasan kongsi dengan PDI-P dalam pilkada di sejumlah daerah pemilihan (dapil) semata-mata untuk meraih kemenangan. Dikatakan oleh Syarifuddin Hasan, bahwa Partai Demokrat tidak punya maksud ke sana. "Maksud kami hanya memenangkan pemilihan gubernur. Bahwa nanti dampaknya berkolaborasi secara nasional, itu hal yang berbeda," kata Syarif kepada para wartawan di Gedung DPR, Senin (08/01). Ia pula menegaskan bahwa koalisi antara Partai Demokrat dan PDI-P dalam pilkada adalah hal yang biasa lantaran situasi politik di daerah yang sangat cair serta adanya peluang untuk berkoalisi dengan partai mana pun. Sementara itu, Presiden PKS, Sohibul Iman, justru menegaskan koalisinya dengan PAN dan Gerindra dalam lima pilgub -di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara- bisa berlanjut ke Pilpres 2019. "Pilkada 2018 itu adalah *stepping stone* kepada pemilu 2019, sebagai batu loncatan ke sana. Mudah- mudahan bisa terpelihara sampai 2019, suatu hal yang kami harapkan."

Sohibul Iman, kemudian menambahkan bahwa soliditas koalisi dimulai sejak pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, ketika PKS, Gerindra dan PAN sama-sama mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang kini menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan bisa berlanjut pada Pilpres 2019 mendatang. Namun, pengamat politik yang juga Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menegaskan peta politik dan koalisi partai dalam pilkada, tidak serta merta menandakan peta politik pilpres tahun depan. Koalisi partai dalam pilkada, menurut Adit, tak lepas dari pertimbangan pragmatis dan taktis

demi perolehan suara. Dikatakan oleh Aditya Perdana, bahwa apa yang dilakukan PKS misalnya bersama dengan Gerindra dari pusat sampai kabupaten kota sama koalisinya. Poblehnya adalah perolehan suara mereka nggak sama antara yang di provinsi dan di daerah, kata Adit. Lebih lanjut Perdana mengatakan "Misalkan Gerindra di pusat dapat lima suara sementara di kabupaten/kota dapat sembilan suara, maka tidak akan sama, sehingga membentuk koalisinya sangat pragmatis dan taktis bagi partai politik karena dia harus berhitung di provinsi," imbuhnya.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta 2017 berdampak buruk terhadap ajang pesta demokrasi di Indonesia. Penyebaran isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di media sosial, seperti yang terjadi dalam Pilkada DKI dikhawatirkan terulang kembali. Politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, mengatakan oknum sengaja mem-buat politik SARA untuk mencari dukungan dari sejumlah pihak serta memanfaatkan situasi yang ada sebagai upaya mendapatkan kekuasaan. Oleh sebab itu isu SARA ada kemungkinan akan dijadikan salah satu senjata oleh politisi dalam Pilkada 2018 ini bahkan Pilpres 2019 mendatang. Seperti dilaporkan oleh wartawan Tribun-news.com, Suherly, 16/1/2018.

Penggunaan isu SARA pada Pilkada Jakarta dan mungkin di provinsi lainnya merupakan tantangan Pilkada di Indonesia tahun 2018 dan Pilpres 2019 mendatang. Memang tidak mudah, karena politik SARA cepat membakar. Ibarat ladang kering, tinggal sulut bensin sedikit menaruh api langsung membakar. Hal itu sangat murah memanfaatkan ketidakmengertian orang, ujar Budiman dalam Diskusi Kebangsaan Biologi Politik "Politik dari Sudut Pandang Kedokteran" di Museum Kebangkitan Nasional, Minggu (14/1/2018). Dia menjelaskan, fenomena isu SARA muncul, karena satu perasaan ketidaknyamanan terhadap keadaan.

Hal seperti itu kemudian menyatu sehingga menyalahkan orang lain yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, dan berbeda golongan. Dia menilai, isu SARA selalu diangkat oknum politisi yang menunggangi situasi tanpa memberikan solusi. Hanya menebar kebencian untuk membuat orang berkumpul di sekitarnya. Menurut politisi PDIP ini, politisi itu mengarahkan kepada rakyat supaya membenci kepada penganut agama atau suku tertentu. Karena itu harus diakui akibat dari Pilkada DKI orang merasa ada cara mudah, murah, murahan membakar itu semua, dikatakannya. Politik SARA itu murah tetapi berpengaruh pada calon pemilih, terutama yang awam politik dan sentimental. Bangsa ini agaknya masih sentimental dalam berpolitik sehingga politik SARA yang bisa radikal laku.

Beberapa kecenderungan seperti dikemukakan pada bagian bab ini dapat kiranya kita katakan bahwa Tahun 2018 sebagai tahun politik menuju tahun politik berikutnya 2019, karena akan diselenggarakan Pilkada serentak di beberapa provinsi dan Kabupaten/Kota jika tidak sejak dini kita kuatkan pandangan perlunya kesalehan politik multikulutral akan menjadi pertaruhan adanya spirit kebencian, keangkuhan dan penghukuman atas warga Negara yang berbeda pilihan politiknya.

Kita tentu tidak ingin pada tahun 2018 ini dipenuhi dengan semangat kebencian antar warga Negara karena perbedaan pilihan politik dalam menentukan calon kepala daerah tingkat satu ataupun tingkat dua. Hal seperti ini harus segera disadarkan sebab di media sosial semangat- semangat kebencian dengan pelbagai ujaran telah mulai bermunculan. Ujung-ujung dari semangat kebencian adalah adanya penghukuman atas mereka yang berbeda pilihan politik. *Takfiri* (pengkafiran) atas siapa yang berbeda pilihan politik akan terjadi jika kita tidak segera memberikan penyadaran bahwa kesalehan multikultural merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan.

Setiap warga Negara itu memiliki hak untuk menentukan sikap dan pilihan politiknya. Tidak ada kesesatan dalam pilihan politik asalkan didasarkan pada pilihan sadar dan kritis pemilihnya. Bahkan akan bermasalah dalam pilihan politik ketika menentukan haknya didasarkan karena sentiment identitas asesoris yang sifatnya jangka pendek. Identitas asesoris yang saya maksud adalah identitas populisme yang sekarang menjadi kecenderungan di dunia maya dan jagat politik Indonesia.

Ruang publik harus dijaga dari pelbagai macam kebencian politik sekaligus kebencian kultural sebab jika tidak terjaga dengan baik maka kekacauan besar sangat mungkin terjadi. Kita memang sering berdalih bahwa masyarakat Indonesia memiliki mekanisme sendiri dalam menyelesaikan masalah krusial. Tetapi kurang bijaksana jika harus menunggu terjadi konflik yang memakan banyak korban baru kita harapkan munculnya kecerdasan lokal (*local genius*) untuk proses *social mechanism* atas konflik sosial. Sangatlah melelahkan!

bab III

Profil Website Organisasi Islam: Arus Utama, Kontemporer Dan Non-Afiliasi

WEBSITE Organisasi Islam yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari 15 website, yang mewakili 3 kategori organisasi Islam, yaitu (1) Organisasi Islam Arus Utama (*Mainstream*), (2) Organisasi Islam Kontemporer (*Contemporary*), dan (3) organisasi Islam yang independent dan tidak berafiliasi pada organisasi Islam tertentu (*Unaffiliated*). Organisasi Islam Mainstream terdiri dari: Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), dan Nahdhatul Wathan.

A. Website Organisasi Islam Arus Utama

1. Suara Muhammadiyah

Website Suara Muhammadiyah (<http://www.suaramuhammadiyah.id/>) adalah versi digital Majalah Suara Muhammadiyah yang merupakan majalah resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Website Suara Muhammadiyah merupakan salah satu dari website Muhammadiyah yang dikategorikan sebagai subdomain. Secara keseluruhan Muhammadiyah memiliki sebanyak 550-an website yang dibedakan menjadi dua domain: domain utama dan subdomain. Domain utama adalah website Pimpinan Pusat Muhammadiyah (www.muhammadiyah.or.id) sedangkan subdomain yang dimiliki oleh Muhammadiyah meliputi: delapan subdomain Majelis di tingkat Pimpinan Pusat (PP), tujuh subdomain Lembaga di tingkat PP, sepuluh

subdomain terkait menu khusus, 33 sub-domain Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan 496 sub-domain Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Indonesia. Selain domain utama dan sub-domain tersebut, Muhammadiyah juga masih mempunyai website yang tidak terintegrasi ke dalam domain utama, yaitu situs yang dimiliki oleh berbagai Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM).

Website Suara Muhammadiyah dikelola oleh kader-kader muda Muhammadiyah yang tergabung dalam PT. Syarikat Cahaya Media (amal usaha milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah) dan berperan sebagai corong utama Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai website yang merupakan suara resmi PP Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah memiliki kaitan erat dengan Persyarikatan Muhammadiyah, sebagaimana tercermin di dalam konten-konten maupun struktur organisasinya. Konten yang disajikan oleh website Suara Muhammadiyah merupakan nilai-nilai yang secara konsisten diperjuangkan Muhammadiyah. Konten-konten tersebut dikemas ke dalam kanal sebagai berikut: Berita, Dinamika Persyarikatan, Editorial (Lanskap, Sajian Utama, Dialog, Analog), Khazanah (Tafsir, Hadits, Bina Akidah, Bina Akhlaq, Bina Jamaah, Hadlarah, Kisah, Sirah, Ibrah), Wawasan (Kemuhimmadiyahan, Pemikiran Islam, Opini, Kolom, Budaya, Mutiara), Tanya Jawab (Akidah, Ibadah, Muamalah, Keluarga Sakinah), dan Khutbah.



Gambar 3.1 Website Suara Muhammadiyah

Struktur organisasi website Suara Muhammadiyah terdiri dari: Penasihat Ahli (H.M. Din Syamsuddin & H.M. Amien Rais), Badan Pembina (H.M. Muchlas Abror, H.A. Munir Mulkhan, H. Suyatno, Pemimpin Umum (H. Ahmad Syafii Maarif), Wakil Pemimpin Umum (H. Rosyad Soleh), Pemimpin Redaksi (H. Haedar Nashir), Pemimpin Perusahaan (Deni Asy'ari), Dewan Redaksi (H. Yunahar Ilyas, H. Chairil Anwar, H. Bambang Cipto, Yusuf A. Hasan, Immawan Wahyudi, Mustofa W. Hasyim), Redaktur Eksekutif (Mu'arif), Desk Editor & Rubrik (Budi Asyhari Afwan), Redaktur (Imron Nasri, Asep Purnama Bahtiar, Mukhlis Rahmanto, Fauzan Muhammadi), Sekretaris (Sethari Rumatika), Reporter (Ganjar Sri Husudo, Sethari Rumatika, Ridha Basri), Layout, Artistik & Foto (Amin Mubarak, Budi Puspa Wijaya), Editor Bahasa (Lutfi Efendi), Produksi (Dwi Agus M.), Iklan & Kemitraan (Ana Fitriana), Sirkulasi (Siti Noor Rohmah Inayati), Agen & Langganan (Wahyu Chusnul Muna), Tata Usaha & Pemasaran (Tri Astuti), dan Keuangan (Muhammad Kais).

Bagi persyarikatan Muhammadiyah, website Muhammadiyah ini dimanfaatkan untuk beberapa hal berikut ini: (1) media untuk menginformasikan profil, berita, agenda kegiatan, maklumat/ pengumuman, artikel Islam dan Kemuhammadiyah, hadist, dan fatwa; (2) media da'wah yang berisi: konten pengajian dan khutbah dalam bentuk teks, suara, dan video, himpunan putusan tarjih (HPT), fatwa Muhammadiyah, serta forum tanya jawab tentang Islam dan Kemuhammadiyah; (3) mapping potensi pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah; (4) pusat data Muhammadiyah; (5) media untuk mengefektifkan konsolidasi dan integrasi internal organisasi; (6) media komunikasi antar anggota dalam bentuk forum- forum; dan (7) media untuk membangun citra Muhammadiyah pada level nasional dan internasional.

Sementara itu, dilihat dari visinya, Suara Muhammadiyah Online memiliki visi: "Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak Tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya." Adapun misinya adalah: (1) Menegakkan keyakinan Tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW; (3) Memahami Agama Islam dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam; (4) Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an sebagai Kitab Alloh terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia; serta (5) Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Berdasarkan visi dan misinya di atas, Suara Muhammadiyah Online bertujuan: "Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

Lebih lanjut, profile Suara Muhammadiyah Online dapat dilihat dari keberkalaan dan update konten, tampilan website (warna dominan, ilustrasi, typografi, flash), isi web, rubrik yang tersedia, dan topik yang dominan. Dilihat dari keberkalaan dan update kontennya, Suara Muhammadiyah Online rata-rata sehari melakukan 4 kali update konten. Adapun dari penggunaan warnanya, ada 6 warna, yaitu: merah, putih, hitam, biru, hijau, dan kuning, dengan 3 warna yang dominan: merah, putih dan hitam. Untuk membuat pembaca tertarik, ada ilustrasi berupa foto orang, foto gedung, dan peristiwa yang relevan dengan teks yang ada. Dalam pemilihan dan penataan huruf dengan ilustrasi yang ada cukup menarik, sehingga para pembaca merasa nyaman selama membaca teks yang ter-

sajikan. Terakhir, pencahayaan dalam tampilan website cukup cerah, sehingga penglihatan para pembaca tidak cepat lelah.

Sebagai sub-domain, Suara Muhammadiyah Online ini merupakan versi digital dari Majalah Suara Muhammadiyah versi cetak, yang terbit pertama kali pada tahun 1915. Suara Muhammadiyah ini terbit dwi mingguan dengan mengusung motto: "Meneguhkan dan Mencerahkan". Hadir dengan versi digital dan cetak, Suara Muhammadiyah Online ini menurut Haedar Nashir (26 April 2016) dimaksudkan untuk "merespon kecenderungan masyarakat untuk mengikuti media-media online yang berkembang. Kecepatan, kemudahan, kenyamanan dan beban biaya yang murah, menjadi alasan pilihan masyarakat untuk beralih menggunakan media online". Lebih lanjut dikatakan, "SM online yang sekarang sudah berjalan di lingkungan Muhammadiyah, adalah hal yang menarik untuk terus dikembangkan, karena kita tidak tahu, sampai kapan media versi cetak SM ini akan terus dijadikan rujukan, di tengah menjamurnya media online. Tapi dengan semangat kerja awak redaksi SM sekarang, saya optimis, perpaduan SM versi cetak maupun online akan menunjukkan SM semakin berkembang dan mampu membaca zaman," tutur Haedar. Suara Muhammadiyah Online ini dikelola oleh kader-kader muda Muhammadiyah yang tergabung dalam PT Syarikat Cahaya Media (amal usaha milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah) siap menjadi corong utama Persyarikatan Muhammadiyah.

2. NU Online

Website NU Online (<http://www.nu.or.id/>) merupakan website resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Website NU Online diluncurkan pertama kali pada 11 Juli 2003 dengan tujuan menyediakan informasi ke-NU-an dan keislaman dengan baik yang dapat diakses secara mudah oleh warga yang membutuhkan. Website NU Online dibangun berdasarkan kesadaran akan pesatnya perubahan masyarakat sebagai dampak

dari teknologi internet. Website NU Online menyuarakan ajaran Islam yang membumi, yang dekat dengan umat dan budaya lokal. Website NU Online mengembangkan corak keislaman ahlussunnah wal jama'ah yang moderat dan toleran terhadap sesama umat Islam serta antarumat beragama.



Gambar 3.2 Website NU Online

Sebagai website resmi PBNU, NU Online mempunyai hubungan yang erat dengan organisasi NU, sebagaimana tercerminkan melalui konten maupun struktur organisasinya. Konten yang disajikan dalam website ini terbagi menjadi beberapa kanal meliputi: Warta (Daerah, Nasional, Internasional, dan Risalah Redaksi), Keislaman (Ubudiyah, Syariah, Bahtsul Masail), Khutbah, Halaqoh, Hikmah, Taushiyah, Doa, Tokoh, Fragmen, Pesantren, dan Lain-lain (Opini, Pustaka, Seni Budaya, Humor, Pendidikan Islam, Quote Islami, Kajian Keagamaan, dan Anti Hoax). Selain konten-konten tersebut NU Online juga memuat sejumlah iklan. Struktur organisasi website NU Online terdiri dari: Dewan Penasehat (KH. Ma'ruf Amin, KH. Said Aqil Siroj, KH. Yahya C. Staquf, H. Imam Aziz, H. Helmy Faisal Zaini, H. Abdul Mun'im DZ., H. Ulil Hadrawi), Pemimpin Umum (H. Juri Ardiantoro), Direktur (Mohamad Syafi' Alielha), Wakil Direktur (H. Syaifullah Amin), Pemimpin Redaksi (Ahmad Mukafi Niam), Wakil Pemimpin Redaksi (A Khoirul Anam), Redaktur Pelaksana (Mahbib Khoiron), Sekretaris Redaksi

(Alhafidz Kurniawan), Staf Redaksi (Sudarto Murtaufiq, Ginanjar Sya'ban, Abdullah Alawi, Fariz Alniezar, Mahbub Ma'afi, Ahmad Fatoni, Hengki Ferdiansyah, Faridur Rohman), Staf IT & Desain (Puji Utomo, Ardyan Novanto, Ayi Fahmi, Nurdin), Direktur Bisnis (Aziz Nasution), Keuangan (Rizki Wijayanti, Muhamad Yunus), dan Kontributor dari berbagai daerah (Andi Muhammad Idris: Makassar, Ajhar Jowe: Kupang - Nusa Tenggara Timur, Muhammad Faizin: Pringsewu - Lampung, Gatot Arifianto: Way Kanan - Lampung, Muslim Abdurrahman & Syamsul Arifin: Jombang, Qomarul Adib & Istahiyah: Kudus, Aryudi A. Razak: Jember, Wasdiun: Tegal, Hairul Anam: Pamekasan, Rokhim & Ahmad Suhendra: Yogyakarta, Syaiful Mustaqim: Jepara, Aiz Luthfi & Ade Mahmudin: Subang, M. Kamil Akhyari: Sumenep, A. Siddiq Sugiharto: Demak, Rof Maulana: Surabaya, Armaidi Tanjung: Padang - Sumatera Barat, Diana Manzila & Ahmad Nurkholis: Malang, Muhammad Zidni Nafi: Bandung, Muhammad Ichwan & Muhammad Zulfa: Semarang, Muhammad Kholidun: Sidoarjo, M. Haromain: Wonosobo, Sholihin Hasan: Blora, Tata Irawan: Majalengka, Samsul Hadi: Mataram - Nusa Tenggara Barat, Syamsul Akbar: Probolinggo, Ibnu Nawawi: Jombang, Ajie Najmuddin: Solo, Husni Mubarak: Tasikmalaya, Ade Nurwahyudi: Bondowoso, M Yazid: Bojonegoro, Anang Lukman Afandi: Banyuwangi, Abdu L. Wahab: Papua, Abdul Majid: Bintan-Kepulauan Riau, dan Nat Riwayat: Banda Aceh.

Secara historis, website NU atau yang populer dengan NU Online (www.nu.or.id) didirikan pada 11 Juli 2003 lalu, saat infrastruktur internet masih belum memadai. Tetapi dengan visi yang jauh ke depan, NU Online bisa belajar lebih awal dan saat semakin banyak masyarakat yang mampu mengakses internet, situs resmi Nahdlatul Ulama ini bisa menyediakan informasi ke-NU-an dan keislaman dengan baik dan mudah diakses dari mana saja.

Konten yang diunggah menyiratkan bahwa NU Online berorientasi untuk memproduksi informasi yang bukan saja akurat, tetapi juga mendamaikan dan menyejukkan. NU Online tidak mengambil jalur seperti website lain yang mengandalkan berita-berita provokatif untuk menarik pengunjung tanpa peduli soal pengaruhnya kepada masyarakat. NU Online berusaha untuk memberi ciri khusus pada gaya pemberitaannya agar berbeda dari situs-situs lain.

NU online memiliki dua visi pokok, yaitu: (1) pengembangan dan penyebaran informasi dalam lingkup nasional dan global untuk mendukung perjuangan Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah, dan (2) mengelola media informasi untuk mendukung perjuangan Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.

Adapun misinya terdiri dari tiga, yaitu: (1) mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah'ah an Nadliyyah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang), l'tidal (tegak lurus), dan Tasamuh (toleran) melalui media cetak dan digital, (2) mengembangkan beragam aktivitas media untuk khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jam'iyah NU, serta (3) mengembangkan aktivitas untuk transformasi syiar dakwah Nahdlatul Ulama kepada masyarakat kelas menengah dan perkotaan secara bersinergi antar lembaga, banom, dan jaringan stakeholder terkait. Terakhir, NU online memiliki tujuan: "Memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal

Jama'ah dengan menganut salah satu dari mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) serta mempersatukan langkah para ulama' beserta pengikut-pengikutnya dan melakukan kegiatan- kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia".

Berdasarkan visi, misi dan tujuannya di atas, NU online memiliki lima program utama, yaitu: (1) Melakukan konsolidasi pengurus secara nasional sebagai change-agent untuk bersama-sama mengelola media dakwah sebagai tulang punggung transformasi dakwah Nahdlatul Ulama di era digital; (2) Melakukan koordinasi dengan lembaga lain, banom, dan jaringan *stakeholder* untuk melakukan dakwah Nahdlatul Ulama pada medan dan target dakwah baru (uncaptive nahdliyin); (3) Pengembangan inovasi dan model dakwah baru pada kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh dakwah Nahdlatul Ulama; (4) Mengembangkan dan mengelola komunitas- komunitas kultural nahdliyin untuk bersama-sama melakukan dakwah di era terkini; dan (5) Mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah.

Capaian prestasi yang berhasil diraih oleh NU Online adalah pernah dinobatkan sebagai situs Indonesia terbaik 2004-2005 kategori sosial & kemasyarakatan versi "Komputer Aktif". Delapan tahun kemudian, NU Online tercatat sebagai 10 website atau situs Islam Sunni atau Ahlussunnah wal Jama'ah urutan pertama pada 23 September 2013, versi MMN Press. MMN Press senantiasa melakukan pemantauan terhadap website berhaluan Sunni dan memberikan penilaian berdasarkan kriteria MMN Press. Hasilnya, MMN Press memilih 10 website Islam Aswaja. Untuk Website Islam Aswaja lainnya yang belum terpilih, MMN Press juga telah melakukan pemilihan berdasarkan kriteria tertentu. Sulit untuk tidak menempatkan

NU Online pada urutan pertama. Sebab NU Online menjadi satu-satunya media Aswaja yang memiliki jaringan luas, update setiap hari, banyak dikunjungi dan banyak dikutip oleh media Aswaja lainnya. Maka sewajarnya NU Online menempati urutan pertama sebagai situs Islam Aswaja Juara. (23 Sept 2013). Capaian prestasi tersebut selanjutnya mengantarkan NU Online ini memiliki posisi peringkat terbaik di antara situs-situs ormas Islam lainnya.

Setidaknya, ada tiga faktor yang menyebabkan NU Online ini menempati posisi ranking yang cukup tinggi di tengah situs-situs ormas Islam yang lain. Pertama, berkat kerja keras para kru dan karena adanya kerja sama yang baik dari para pemangku kepentingan yang bahu- membahu bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Peran besar telah diberikan oleh para kontributor dari berbagai daerah yang mengabarkan aktivitas NU di daerahnya masing-masing sehingga bisa tersaji kepada masyarakat luas. Kedua, penambahan fasilitas dan aplikasi yang ditawarkan oleh NU Online menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembaca. Ketiga, faktor keberkalaan dan update konten, tampilan website (warna dominan, ilustrasi, typografi, flash), isi web, rubrik yang tersedia, dan topik yang dominan. Dilihat dari keberkalaan dan update kontennya, NU Online rata-rata sehari melakukan 7 kali update konten. Adapun dari penggunaan warnanya, ada 6 warna, yaitu: biru, hijau, hitam, kuning, putih dan merah, dengan 3 warna yang dominan: biru, hijau dan putih. Untuk membuat pembaca tertarik, ada ilustrasi berupa berupa foto orang, gedung, peristiwa serta gambar grafis orang dan lain-lain disesuaikan dengan narasi dalam teks.

Dalam pemilihan dan penataan huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia sangat mengesankan pembaca, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Pencahayaan dalam tampilan website cukup serasi,

sehingga memudahkan pembaca untuk membaca cepat atau lambat.

Tiga faktor utama di atas perlu dijaga agar posisi ranking NU Online yang tinggi dapat dipertahankan. Lebih lanjut, jumlah rubrik yang ada juga perlu dipertahankan. Sebagaimana diketahui, NU online ini menyediakan 14 rubrik, terdiri atas: warta, keislaman, khutbah, halaqoh, hikmah, taushiyah, doa, tokoh, fragmen, pesantren, pustaka, humor, pendidikan Islam, dan seni budaya. Adapun topik dominannya adalah: warta dan keislaman. Warta terdiri atas internasional, nasional, daerah dan risalah redaksi. Topik keislaman seputar ubudiyah, muamalah dan bahstul masail.

Selain hal-hal di atas, daya tarik dari NU Online terletak pada sikap keberagamaan yang moderat atau sikap wasatiyyah di tengah-tengah sikap keberagamaan yang radikal dan ekstrem. Sikap keberagamaan yang moderat ini menjadi pilihan karena terkait dengan ideologi yang diikuti yaitu rahmatan lil 'alamin. Dalam hubungan ini, NU Online edisi Jumat, 21 Juli 2017 menyatakan:

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa berbeda agama saja boleh apalagi berbeda kelompok. Yang tidak boleh adalah berselisih. Oleh karena itu, umat Islam perlu memegang prinsip wasatiyyah atau moderatisme dalam beragama. Prinsip wasatiyyah ini memiliki arti berada diposisi tengah dengan tidak condong kekiri ataupun condong kekanan. Kalau condong kekanan akan gampang memperbolehkan banyak hal dan cenderung liberal. Kalau terlalu kekiri akan sering melarang, menyalahkan dan membid'ahkan. Dengan sikap wasatiyyah inilah yang menjadikan Indonesia menjadi rujukan dunia karena mampu mengelola keberagaman yang ada. Indonesia mampu menjadi model bahwa di tengah kebhinekaan yang ada, kerukunan masyarakat, pertumbuhan

ekonomi dan berbagai aspek lainnya dapat tumbuh dengan baik.

Kutipan di atas menjelaskan tiga peran penting yang dilakukan oleh NU Online, yaitu: (1) Menjadi penyejuk bagi kaum muslimin dan petunjuk bagi non-muslim; (2) Menjadi sarana informasi mengenai jamiyah NU yang up to date untuk menghindari hoax yang berkaitan dengan NU; dan (3) Menjadi sumber bacaan yang amanah dan akurat demi perdamaian Indonesia (Teddy Irawan, 8 September 2017 & Abdul Haq, 16 Sept 2017). Ketiga peran penting di atas dewasa ini menemukan relevansinya dimana banyak informasi di website dan media sosial yang berisi hoaks, provokasi, fitnah, dan hal-hal lain yang menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan pertemanan jadi renggang gara-gara media sosial. Masyarakat jadi gaduh juga karena media sosial.

Dengan situasi seperti ini, NU Online memiliki tugas untuk memproduksi informasi yang bukan saja akurat, tetapi harus mendamaikan dan menyejukkan. Banyak situs yang mengandalkan berita-berita provokatif untuk menarik pengunjung tanpa peduli soal pengaruhnya kepada masyarakat. Jika NU Online turut serta dalam gaya pemberitaan seperti itu, maka tidak ada bedanya dengan situs-situs tersebut. Bahkan, sangat disayangkan situs-situs penyebar kebencian dan hoaks itu di antaranya ada yang menggunakan identitas Islam.

NU Online memiliki kewajiban untuk mengisi dunia maya dengan konten-konten keislaman. Jika internet diisi dengan materi yang tidak menyejukkan atau sempit dalam pemahaman agama, yang kemudian menjadi rujukan masyarakat dalam sikap keagamaannya. Hal ini berbahaya bagi harmoni kehidupan keagamaan di masa yang akan datang. Generasi millennial mencari beragam informasi dari internet, termasuk

informasi keagamaan. Jika informasi yang mereka akses dapat tidak mencerminkan ajaran Islam yang ramah, maka Indonesia rentan menjadi lahan subur radikalisme.

Tentu saja, upaya untuk mengampanyekan Islam yang damai di internet tidak dapat dijalani oleh NU Online sendiri. Sinergi dengan website keislaman lainnya yang memiliki visi yang sama. Ibarat lidi, jika digabungkan, bisa menjadi sebuah sapu yang kuat yang membersihkan berbagai macam kotoran. Sinergi terutama bisa dilakukan dalam kerja sama konten. Konten yang berkualitas dari jejaring website Islam moderat bisa disebar oleh website lain agar jangkauan pembacanya lebih luas. Tetapi juga tidak menutup kerja sama lain seperti upaya peningkatan kualitas penulis dan wartawan atau dalam hal penggalan dana.

Untuk bisa bertumbuh dan berkembang, website Islam moderat harus dikelola dengan tata kelola yang baik. Tidak berarti semuanya harus profesional dalam arti para pengelolanya dibayar. Dalam hal ini, yang penting adalah masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas. Terdapat perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan sampai dengan evaluasi. Dengan sistem yang baik, maka organisasi media akan berjalan dengan baik. NU Online juga berusaha terus meningkatkan tata kelolanya agar lebih baik, dan bersama-sama dengan media Islam moderat lainnya, mengampanyekan Islam damai di Indonesia.

Website Muhammadiyah dan website NU, memiliki persamaan pada dua hal. Pertama, persamaannya terletak pada target pembacanya. Kedua website ini sama-sama menjadikan pihak internal dan eksternal organisasi sebagai target pembacanya. Jika warga Muhammadiyah dan non-warga Muhammadiyah menjadi target pembaca Suara Muhammadiyah Online, maka warga nahdhiyyin dan non-warga nahdhiyyin merupakan target pembaca NU Online.

Kedua, kedua website ini sama-sama mengusung agenda besar yang sangat penting dan akan amat berarti bagi dunia Islam, yakni Islam moderat atau Islam jalan tengah. Tentu dengan fokus yang berbeda. Jika Muhammadiyah memaknai Islam moderat itu dengan penekanan pada Islam berkemajuan, sementara NU memaknai Islam moderat dengan penekanan pada Islam Nusantara. Agenda besar itu, sama-sama mendapat respon keras dari berbagai organisasi Islam berhaluan radikal. Oleh karena itu, NU dan Muhammadiyah harus menunjukkan bahwa mereka adalah dua organisasi terbesar, bukan hanya dalam klaim dan (jumlah anggota), namun juga buktinya dalam sikap dan pertarungan dan percaturan wacana. Itu kalau mereka serius dengan agenda Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan (Akhmad Sahal, 2015). Dalam pandangan Ahmad Sahal, "memang benar, dalam soal wacana, bukan saja di media sosial namun dalam berbagai perbincangan keseharian, NU dan Muhammadiyah kurang sigap, kurang agresif, kurang proaktif dalam bersuara."

Soal Islam berkemajuan, Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, menjelaskan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan tajdid dengan cara memperbaharui umat dalam hal pemahaman Islam sesuai perkembangan zaman. Islam selalu baik dan sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu kapanpun dan di manapun. Muhammadiyah membangun kearifan lokal Muhammadiyah berkemajuan. Adapun cara Muhammadiyah memperbaharui umat adalah melakukan pembaharuan pola tingkah laku dan pola pikir manusia. Muhammadiyah membangun umat Islam yang maju di bidang pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah dalam hal memajukan pendidikan tidak hanya dalam bentuk mengajarkan Fiqih, namun di segala hal sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk memperdalam Fiqih, Muhammadiyah mendirikan Pondok Pesantren Muhammadiyah

dengan konsep modern dengan cara menyesuaikan perkembangan zaman. Contohnya, pada zaman dahulu di Pondok Pesantren cara berwudhunya dengan air tidak mengalir yang menyebabkan para santri terkena penyakit kulit. Maka Muhammadiyah selanjutnya mendesain Pondok Pesantren dengan modern. Tempat wudhunya mengalir dengan alat modern sehingga para santri sehat wal afiyat.

Sementara itu, soal Islam Nusantara dijelaskan oleh KH. Maruf Amin, Rais Aam PBNU. Menurutnya, Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, yaitu gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di Tanah Air. Karena sifatnya khas ala Indonesia, maka Islam Nusantara itu adalah Islam yang berada di Nusantara, bukan hanya untuk Nusantara, apalagi Islam dari Nusantara. Isinya adalah Islam Ahlussunnah Wal- Jama'ah ala NU seperti yang diletakkan oleh para pendiri NU. Jadi bukan berarti mengkotak- kotakkan. Tidak ada perubahan, bukan Islam yang lain. Islam Nusantara sama sekali bukan madzhab baru, bukan firqah baru, bukan aliran baru. Islam Nusantara merupakan kekhususan dan keistimewaan. Adapun salah satu ciri khas Islamnya orang-orang Nusantara, yaitu laku Islam yang melebur secara harmonis dengan budaya Nusantara yang sesuai dengan panduan syariat, segala macam adat istiadat, tradisi, yang tidak melanggar batas-batas syariat, untuk dakwah Islam di bumi Nusantara.

Kedua website ini memiliki delapan perbedaan pokok. Kedelapan perbedaan tersebut adalah: sejarah berdiri, alamat URL, keberkalaan, penggunaan warna, ilustrasi, pemilihan dan penataan huruf, pencahayaan, dan manajemen web.

Tabel 3.1 Perbandingan Website Suara Muhammadiyah Online dan NU Online

Website Aspek Pembeda	Suara Muhammadiyah Online	NU Online
Berdiri	26 November 2009	11 Juli 2003
Alamat URL	(http://www.muhammadiyah.or.id/)	www.nu.or.id
Keberkalaan	Rata-rata sehari ada 4 kali up date konten	Rata-rata sehari ada 7 kali up date konten
Penggunaan warna	Ada 6 warna, yaitu: merah, putih, hitam, biru, hijau, dan kuning, dengan 3 warna yang dominan: merah, putih dan hitam.	Ada 6 warna, yaitu: biru, hijau, hitam, kuning, putih dan merah, dengan 3 warna yang dominan: biru, hijau dan putih.
Ilustrasi	Berupa photo orang, gedung, peristiwa serta gambar grafis orang dan lain-lain disesuaikan dengan narasi dalam teks	Berupa photo orang, gedung, peristiwa serta gambar grafis orang dan lain-lain disesuaikan dengan narasi dalam teks
Pemilihan dan penataan huruf	Pemilihan dan penataan huruf dengan ilustrasi yang ada cukup menarik, sehingga para pembaca merasa nyaman selama membaca teks yang tersajikan.	Pengaturan dan penyebaran huruf pada ruang-ruang yang tersedia sangat mengesankan pembaca, sehingga nyaman bagi para pembaca

Pencahayaan	Pencahayaan dalam tampilan website cukup cerah, sehingga penglihatan para pembaca tidak cepat lelah.	Pencahayaan dalam tampilan website cukup serasi, sehingga memudahkan pembaca untuk membaca cepat atau lambat.
Manajemen web	Desentralisasi, memiliki dua domain, yaitu domain utama dan subdomain	Sentralisasi, hanya memiliki domain tunggal

B. Website Organisasi Islam Kontemporer

Website organisasi Islam kontemporer yang dimaksud terdiri dari lima situs, yakni suara-islam.com (dikelola oleh FPUI), hidayatullah.com, majelis-mujahidin (termasuk didalamnya risalahmujahidin.com), dewandakwah.or.id lalu yang terakhir adalah mta.or.id.

1. Suara Islam

Suara-islam.com yang merupakan representasi dari Forum Umat Islam secara tegas menyatakan bahwa motto yang diusung dari media ini yang didirikan pada 2013 adalah Mengawal NKRI Bersyariah. Dari motto tersebut dapat dimaknai bahwa orientasi dari website ini tidak sekedar implementasi nilai-nilai Islam, namun lebih dari itu bagaimana mewujudkan Indonesia ini sebagai negara yang menjalankan syariat Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan suara-islam.com, website majelismujahidin.com (termasuk didalamnya risalahmujahidin.com) juga mempunyai orientasi yang sama yakni berupaya mewujudkan konstitusi negara sesuai dengan syari'at Islam.

Pada aspek yang lain, kemunculan dari website yang dikelola oleh organisasi Islam kontemporer tersebut tidak lain karena adanya pemberitaan yang tidak berimbang terkait Islam pada

media-media mainstream yang saat ini tidak dikelola oleh umat Islam. Hal ini nampak baik dalam visi maupun misi dari suara-islam yang dengan tegas menyatakan akan berupaya untuk menyeimbangkan informasi media sekuler yang senantiasa miring kepada Islam dan umat Islam.

Dari sisi tampilan, hampir semua website yang dikelola oleh organisasi Islam kontemporer cenderung dominan berwarna putih dengan kombinasi warna yang beragam, seperti hijau, maupun hitam. Dalam aspek semiotika, warna putih bisa diartikan sebagai kedamaian, pencapaian diri dan spiritualitas. Warna putih juga sering dikonotasikan dengan terang, kebaikan maupun kesucian. Pada banyak hal, warna ini disarankan sebagai warna 'kesempurnaan' yang berarti aman, murni, dan bersih. Dengan demikian, website tersebut pada dasarnya ingin memunculkan kesan kesucian dalam aspek tujuan ataupun visi-misi mereka. Disisi yang lain, warna putih juga kerap digunakan untuk menggambarkan malaikat yang dalam hal ini selalu taat pada perintah Allah SWT.

Selain warna putih, website suara-islam.com menggunakan warna hitam sebagai warna tulisannya. Hitam yang dikontraskan dengan warna putih melambangkan kekuatan dan sikap elegan.



Gambar 3.3 Website Suara Islam

Pada aspek rubrik, terdapat 10 rubrik yang terdiri dari Kabar, Al Islam, Keluarga, Konsultasi, Sirah, Harakah, Kolom, Muslimah, Muda, Indeks. Masing-masing rubrik tersebut berisi tulisan/naskah baik berupa berita maupun artikel yang ditulis oleh seorang narasumber. Namun demikian, peneliti tidak melihat adanya penulis artikel yang dominan. Penulisan teks terbagi rata antara reporter satu dengan reporter yang lainnya, begitu juga dengan redaktur.

Menjadi menarik bagi peneliti adalah ketika mengamati jumlah dan variasi iklan yang ada di suara-islam.com. Meskipun website ini dikelola oleh organisasi Islam, dalam faktanya iklan yang ada di website bukan hanya produk yang Islami namun sangat beragam, yakni antara lain: asiancancer.com, tirto.id, blibli.com, berrybenka.com, [lotte](http://lotte.com), kayak.com, [qantas](http://qantas.com), cekaja.com, [shopee](http://shopee.com) serta elevania.com.

Berdasarkan penelusuran peneliti, beberapa iklan yang terdapat di suara-islam.com tersebut adalah iklan yang bergerak pada aktivitas jual beli on line. Adanya iklan yang berasal dari penyedia jasa jual beli online ini nampaknya agak bertolak belakang dengan visi dan misi yang diusung oleh media ini. Sebagai media yang salah satu visinya adalah sebagai penerang sistem ajaran Islam, harusnya suara-islam.com mempertimbangkan aspek syariah pada setiap iklan yang masuk di website-nya. Dominasi iklan yang ada tersebut juga tidak sejalan dengan salah satu misinya yakni meningkatkan kesadaran umat Islam secara luas terhadap realitas kehidupan dan ajaran Islam sebagai solusi seluruh persoalan kehidupan.

2. Hidayatullah

Sejalan dengan website suara-islam.com, hidayatullah.com juga dominan menggunakan warna putih serta kombinasi

warna hitam pada tulisannya yang dipadukan dengan warna merah untuk tulisan “.com” dan banner tab nya.

Warna merah sering dihubungkan dengan energi, perang, bahaya, kekuatan, tekad yang kuat, hasrat, dan cinta. Merah adalah warna yang mempunyai unsur emosional yang kuat.



Gambar 3.4 Website Hidayatullah

Dalam ilmu kelambangan, warna merah sering diindikasikan dengan keberanian. Disamping itu, warna merah dapat membuat sebuah objek terlihat sangat jelas (eye catching). Ini cocok untuk digunakan sebagai warna dari banner 'Beli Sekarang' atau 'Klik Disini'. Sehingga peneliti merasa tepat jika pilihan warna yang digunakan hidayatullah.com adalah dalam rangka menarik minat pembaca.

Selain banner tab yang sudah ada, hidayatullah juga menggunakan hastag sebagai topik pilihan seperti : #ALIRANKEPERCAYAAN ; #TABLIGHAKBARGARUT dll. Pemilihan topik tersebut didasarkan pada pada fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi. Semisal sebagaimana dalam gambar 2 tersebut, kemunculan topik pilihan Aliran kepercayaan didasarkan pada adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan atas pasal 61 UU

No. 23/2006 dan pasal 64 UU No. 24/2013 tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan demikian, pemerintah berkewajiban memberi pelayanan secara formal dalam bentuk administrasi, mulai pendidikan agama, perkawinan, tempat ibadah dan lain-lain.

Dari sisi rubrik, setidaknya ada 11 rubrik yang disediakan oleh *hidayatullah.com* untuk dikonsumsi pembacanya. Kesebelas rubrik tersebut antara lain : berita, kajian, artikel, kolom, ramadhan, feature, spesial, konsultasi, redaksi, foto, video. Masing-masing dari 11 rubrik yang ada tersebut mempunyai sub rubrik yang lebih spesifik informasinya. Misal pada rubrik berita, terdapat sub rubrik : nasional, info halal, internasional, wawancara, Palestina terkini. Pada intinya, rubrik berita berisi informasi seputar peristiwa terkini yang tengah terjadi khususnya berkaitan dengan dunia Islam. Pemilihan rubrik beserta sub rubrik yang ada tentunya dalam rangka menasar khalayak atau pembaca yang berasal dari kalangan muslim secara umum dan anggota Hidayatullah secara khusus.

Dari sisi produksi konten, peneliti melihat bahwa tidak ada penulis yang dominan dalam memberikan kontribusi tulisan. Rubrik artikel yang terdiri dari sub rubrik seperti opini, tsaqofah, ghazwul fikr, pustaka dan mimbar juga tidak didapati penulis yang dominan. Masing-masing judul artikel ditulis oleh penulis yang beragam. Satu hal yang menarik ada di rubrik Kolom yang terdiri dari berbagai macam analisa. Dari 8 sub rubrik yang ada, terdapat satu sub dengan judul Salam dari Salim yang merupakan tulisan yang bersumber dari Salim Al Fillah salah satu da'i muda dari Yogyakarta. Pun demikian, tulisan dari Salim Al Fillah tersebut adalah naskah yang disadur dari media sosial yang dimiliki oleh Salim Al Fillah, baik instagram, twitter maupun facebook. Disamping itu, pengelola website juga memberikan kolom Embun Hikmah yang dikelola oleh

Abdullah Sholeh Hadrami, Meminang Surga yang berisi tulisan dari Muhammad Fauzil Adhim.

Sejalan dengan apa yang dilakukan dalam kolom Salam dari Salim, tulisan yang ada pada kedua kolom tersebut juga diambil dari sosial media.

Aspek berikutnya yang peneliti lihat adalah dari aspek keberadaan iklan dalam website hidayatullah.com. Dalam pengamatan peneliti, iklan yang terdapat di hidayatullah.com hanya produk yang dikelola oleh Hidayatullah seperti bazar Hidayatullah yang berupa buku Islam, distro. Namun demikian, ada 1 produk diluar Hidayatullah yakni Zahir yang merupakan penyedia jasa software keuangan.

3. Majelis Mujahidin Indonesia

Dalam sub ini, peneliti akan mengidentifikasi laman website majelismujahidin.com. Secara umum, laman majelismujahidin.com adalah kepanjangan tangan dari organisasi Islam kontemporer yakni Majelis Mujahidin yang berdiri pada 5-7 Agustus 2000 pada saat berlangsungnya Kongres Mujahidin I di Yogyakarta dengan tujuan utama adalah menegakan syariat Islam secara menyeluruh bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia.



Gambar 3.5 Website Majelis Mujahidin

Dibandingkan dengan organisasi Islam kontemporer lainnya, produktivitas laman majelismujahidin.com dapat dikatakan sangat rendah. Berdasarkan penelusuran data, dalam rentang waktu Januari 2016-Oktober 2017, hanya terdapat 6 postingan yang bisa dibaca oleh audiens. Secara umum, 83% dari postingan tersebut berisi pernyataan sikap dari Majelis Mujahidin terhadap beberapa fenomena yang terjadi, antara lain : larangan memilih pemimpin kafir, sikap atas penggunaan dana haji oleh pemerintah serta beberapa isu yang keumatan yang terkait. Dari aspek ini bisa dilihat bahwa Majelis Mujahidin tidak memanfaatkan websitenya dengan baik dalam rangka menyampaikan ideologi maupun sikap mereka terhadap fenomena nasional keumatan yang tengah berlangsung. Padahal, dalam pandangan umum, Majelis Mujahidin sering kali dianggap sebagai organisasi yang kerap menggunakan kekerasan dalam rangka memperjuangkan ideologi yang mereka usung.

Aspek tampilan menunjukkan bahwa majelismujahidin.com menggunakan putih sebagai warna dominan dengan variasi hijau dan merah. Warna putih, sebagaimana website yang lain, bisa diartikan sebagai kedamaian, pencapaian diri dan spiritualitas. Website ini juga dilengkapi dengan warna merah yang mempunyai makna sebagai suatu penegasan akan keberanian melakukan perjuangan. Lebih dari itu, terdapat kombinasi warna hijau yang dianggap mampu menciptakan aura yang menenangkan, lebih dari itu, warna hijau diasumsikan sebagai bagian dari warna Islam.

Dari sisi konten, terdapat 8 rubrik yang peneliti dapatkan, yakni: About us yang berisi tentang sejarah, karakteristik sampai pada aspek rekomendasi Indonesia Bersyariah, Press release yang merupakan pernyataan sikap Majelis Mujahidin akan sebuah fenomena,, Akhbar kurang lebih sama dengan press release hanya ada beberapa penambahan berita, Artikel berisi

kumpulan naskah dari pemimpin Majelis Mujahidin, Media yang menjadikan sub rubrik tausiyah dan video, Contact us, Infaq perjuangan menyajikan fasilitas untuk berinfaq melalui Majelis Mujahidin serta , QTT yang merupakan kepanjangan dari Al Qur'an Tarjamah Tafsiriyah , mushaf yang diterbitkan oleh Ma'had An Nabawy.

Website majelismujahidin.com hanya mempunyai iklan Quran Tarjamah Tafsiriyah sebagaimana peneliti jelaskan di bagian rubrik. Bahkan, QTT yang diiklankan tersebut dikelola oleh Yayasan Ahlu Shufah yang juga merupakan bagian dari organisasi Majelis Mujahidin. Dengan demikian, asumsi peneliti, website ini mengandalkan Infaq perjuangan yang secara detail informasinya tersaji di halaman rubrik Infaq Perjuangan.

4. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia



Gambar 3.6 Website Dewan Dakwah Islamiyah

Organisasi Islam selanjutnya yang masuk dalam kategori kontemporer adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Secara umum, tidak ada visi – misi yang secara khusus ditulis terkait dengan website dewan-dakwah.or.id. Hanya saja, peneliti mengamati visi – misi yang diusung oleh organisasi Islam Dewan Dakwah yakni Terwujudnya tatanan kehidupan

masyarakat Indonesia yang Islami dalam NKRI yang kuat dan sejahtera. Visi yang ada tersebut nampak sekali bahwa orientasi dari organisasi ini bukan hanya sekedar penegakan syariat Islam, akan tetapi lebih pada bagaimana mewujudkan masyarakat yang Islami di Indonesia. Dengan demikian nampak bahwa internalisasi nilai Islam dalam kehidupan lebih diutamakan dari pada sekedar formalitas peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelusuran peneliti, produktivitas dari website dewandakwah.or.id ini rata-rata 15 kali per bulannya. Identifikasi peneliti selama bulan Juli-September 2017, dari bulan Juli- September terdapat 29 berita yang diunggah, 16 berita yang ada berupa informasi seputar kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia seperti aktivitas bhakti sosial, penggalangan dana untuk Al Aqsha dan Rohingya, maupun kegiatan halal bi halal. Secara umum terdapat 55% berita yang merupakan informasi seputar internal organisasi dan 45% sisanya berisi tentang fenomena yang sedang terjadi, khususnya terkait dengan umat Islam.

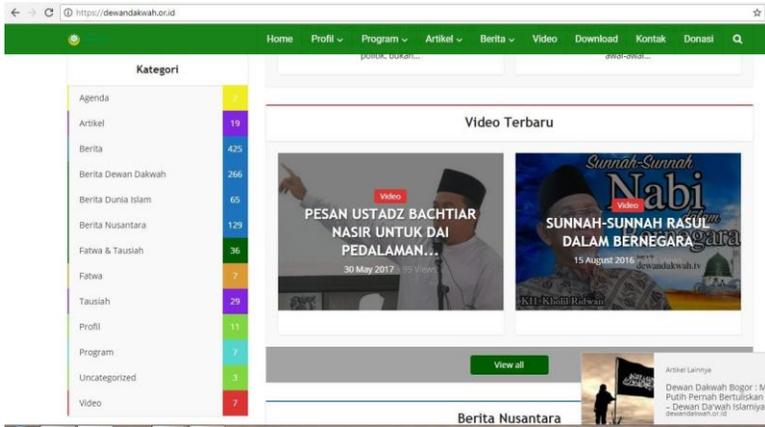
Dari sisi visualisasi, apa yang ada pada dewandakwah.or.id hampir serupa dengan website yang dikelola oleh organisasi Islam lainnya yakni dominan warna putih dengan variasi warna hijau. Adapun rubrik yang disediakan dalam website ini adalah Home, Profil, Program, Artikel, Berita, Video, Download, Kontak, Donasi. Secara keseluruhan, rubrik yang ada tidak menunjukkan adanya variasi dibandingkan dengan organisasi Islam kontemporer yang lain. Pun pada rubrik artikel, tulisan yang dimuatpun berasal dari internal Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Dari aspek Iklan, peneliti tidak menemukan adanya iklan yang terpampang di laman dewandakwah.or.id , hanya saja terdapat kolom Donasi sebagai informasi kepada audiens yang berminat berpartisipasi untuk kegiatan dakwah mereka. Pada

Profil Website Organisasi Islam

aspek berita, dibagi menjadi 3 sub, yakni Berita Pilihan, Berita Nasional serta berita Dewan Dakwah.

Berbeda dengan website lainnya, pengelola dewan-dakwah.or.id memberikan informasi statistik mengenai isi dari lamannya sebagaimana terlihat pada bagian kiri gambar berikut :



Gambar 3.7 Website Dewan Dakwah

5. Majelis Tafsir Al Quran



Gambar 3.8 Website Majelis Tafsir Al-Qur'an

Dibandingkan dengan organisasi kontemporer lainnya, dapat dikatakan bahwa Organisasi Majelis Tafsir Al Quran paling berbeda. Berpusat di Solo, MTA mengalami perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu 1 dekade terakhir di era kepemimpinan Ahmad Sukino yang mulai mengembangkan dakwah melalui media radio dan TV. Menurut situs whois.com, website mta.ac.id dibangun pada tahun 2012 dengan tujuan utama adalah untuk memperkuat kesiapan menghadapi fenomena globalisasi. MTA menyadari bahwa komunikasi dan informasi adalah sendi-sendi kehidupan modern. MTA berharap dengan adanya website ini, perkembangan dakwahnya bisa meluas ke seluruh wilayah tanah air hingga manca negara.

Hasil pencarian data peneliti, sejak Juli hingga September 2017, tercatat 58 teks yang diproduksi oleh mta.ac.id yang meliputi 53 berita dan 5 tausiyah. Dari total keseluruhan teks yang diproduksi tersebut, pada aspek berita sebanyak 100% berkuat pada aktivitas internal dari MTA semisal pelaksanaan kegiatan sholat Idul Adha, silaturahmi nasional MTA, donor darah serta kegiatan internal lainnya. Hasil wawancara dengan pengelola menunjukkan bahwa pihak redaksi hanya mengunggah informasi yang berasal dari internal MTA dan tidak membuka peluang kepada penulis ataupun media lain. Hal ini dilakukan sebagai bentuk filter terhadap informasi yang akan disajikan kepada pembaca. Dengan demikian, konsumen website mta.ac.id pada dasarnya adalah mereka yang sudah bergabung dengan organisasi MTA.

Dari aspek tampilan, mta.or.id didominasi oleh warna putih dengan variasi hijau dan kuning. Terkait rubrik, mta.or.id memfasilitasi pengunjung website dengan beberapa rubrik antara lain Home, Berita, Tausiyah, Kantor Kami, Brosur MTA, Buku Tamu.

Dari sisi iklan, mta.ac.id hanya memuat iklan dari MTA seperti sekolah, toko, organisasi sayap MTA. Kalaupun ada iklan BNI Syariah, maka yang diunggah adalah iklan dari MTA yang memuat informasi mengenai rekening khusus Zakat.

C. Website Organisasi Islam Non-Afiliasi

Pembahasan berikut menguraikan laman yang dikelola oleh organisasi Islam nonafiliasi. Disebut nonafiliasi karena website-website tersebut tidak berada di bawah garis koordinasi secara struktural dengan ormas-ormas Islam mainstream yang ada di Indonesia. Website yang dimaksud tersebut terdiri dari tujuh situs, yakni

- a. <http://www.portal-islam.id/>,
- b. <https://www.eramuslim.com/>,
- c. <https://www.voa-islam.com/>
- d. <http://www.muslimoderat.net/>
- e. <https://www.arahmah.com/>
- f. <http://www.thoriquana.id/>
- g. <https://www.dakwatuna.com/>

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwasanya laman-laman organisasi Islam unaffiliated ini secara visi memiliki kekhasannya masing-masing. Namun demikian, ada beberapa kesamaan antara satu dengan lainnya.

1. portal-islam.id

Laman portal-islam.id, ini tidak dapat dideteksi siapa pemilik ataupun aktor-aktor yang menggerakkan laman. Peneliti sudah berupaya untuk dapat menelusuri dan melakukan wawancara secara langsung maupun via video call, akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang peneliti lakukan via surel. Dalam tagline atau slogan laman portal-islam.id ini disebutkan dengan "menyuarakan kebenaran". Berdasarkan suara tagline tersebut, laman ini bermaksud menghadirkan kepada pembacanya adalah berita-berita yang sesungguhnya, berita

yang didasarkan pada kebenaran dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Akan tetapi jika hal tersebut memang menjadi spirit dari laman portal-islam.id, nampaknya agak susah mendapatkan konfirmasi atas tagline yang sudah mereka buat.

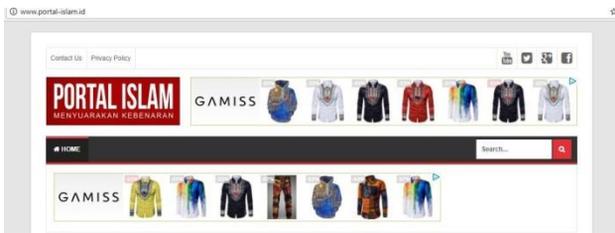
Sebuah media yang dapat dijadikan rujukan oleh pembaca semestinya mencantumkan visi, misi, tujuan, susunan redaksi, alamat redaksi, sekurang-kurangnya beberapa hal mendasar tersebut ada. Setelah ditelusuri secara cermat, pada laman portal-islam.id tidak ditemui sama sekali hal-hal yang sangat mendasar tersebut. Sehingga pada saat dimunculkan sebuah berita yang dinilai bermasalah oleh yang diberitakan misalnya, kontak untuk konfirmasi terhadap sebuah berita pun tidak dapat dilakukan, karena tidak ada kontak alamat maupun telepon, kecuali kontak surel yaitu: portalislam@yahoo.com. Miskinnya informasi tentang diri mereka ini dalam konteks membangun sebuah situs Islam yang bertanggungjawab atas berita-berita yang mereka muat, sangat sulit untuk diberikan kepada laman portal-islam.id. Laman ini terkoneksi dengan akun media sosial yang mereka miliki, seperti facebook dengan nama Portal Islam; twitter dengan akun @portal_islam yang tergabung sejak Oktober 2014; laman ini juga terkoneksi dengan google plus dengan nama Portal Islam, yang mana pengikutnya mencapai lebih dari 10 ribu followers.

Dalam sehari laman ini dapat mengunggah 5-6 berita yang berisi tentang masalah sosial, politik, maupun kejadian-kejadian aktual yang sedang terjadi. Adapun rubrik berita mereka terbagi menjadi enam yaitu: Anies Sandi, Catatan, Kabar Umat, Internasional, Dunia Islam, Ragam. Hal yang menggelitik di sini yakni adanya rubrik yang secara jelas menyebut nama pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anis Sandi.

Sebagai laman yang berharap dijadikan rujukan oleh pembaca, tidak membosankan untuk dilihat melalui gadget, laman ini pun memerhatikan komposisi warna sebagai

tampilan laman mereka. Warna dominan : putih dengan variasi merah dan hitam. Warna putih bisa diartikan sebagai kedamaian, pencapaian diri dan spiritualitas. Warna putih sangat bagus untuk menampilkan atau mengaksetuasi warna lain serta memberi kesan kesederhanaan dan kebersihan. Warna merah diartikan sebagai lambang kesan energi, kekuatan, warna ini dapat menyampaikan kecenderungan untuk menampilkan gambar dan teks secara lebih besar dan dekat. Warna hitam diartikan sebagai lambang perlindungan dan formalitas. Sementara itu ilustrasi yang ditampilkan yaitu pengaturan letak isi website dibagi menjadi dua bagian. Di sisi kiri terdapat informasi utama dengan judul yang menonjol. Di sisi kanan terdapat barisan iklan dengan tampilan warna-warni. Adapun pemilihan huruf (font) untuk mendukung typografi mereka menggunakan Font tipe Arial (body). Sementara berita yang dijadikan secara flash yaitu isu politik dalam negeri.

Sementara itu ruang untuk iklan dalam laman tersebut berada di sisi kanan, dan bagian laman, yang berisikan tentang penjualan fashion umum, pesan kamar hotel, profil tokoh politik, dll. Porsi iklan di laman ini terlihat umum, tidak dibatasi pada iklan yang dianggap syar'i misalnya. Justru produk-produk jual beli online yang terlihat lebih jelas. Apapun produk online yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis. Misalnya iklan cokelat, <http://forever-chocolate.barry-callebaut.com/>, penjualan baju gamis online, via <https://www.gamiss.com/>. Nampaknya iklan apa saja dapat menjadi sponsor terhadap laman portal-islam.id. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.9 Website Portal Islam

2. Eramuslim.com

Website atau laman kedua yaitu eramuslim.com. Website ini dominan menggunakan warna putih sebagai latar utama, disertai kombinasi warna biru sebagai head tulisan berita, opini, maupun informasi lainnya. Hal tersebut nampaknya lebih didasarkan karena tulisan logo eramuslim itu diawali dengan warna oranye (kuning jeruk) di tulisan era, dan warna biru di tulisan muslim. Simbol warna kuning sering diasosiasikan dengan lambang kejayaan, sementara warna biru itu mengayomi, meneduhkan. Sementara dalam pandangan mata perpaduan antara putih dan yang dominan dan biru yang selintas saja di mata tidak membuat sakit, pedih.



Gambar 3.10 Website Era Muslim

Pilihan warna yang demikian menarik minat pembaca, terutama jika lamannya diakses melalui gadget seperti smartphone, ipad, dan tablet, menjadikannya enak dibaca dan tidak membuat mata mudah lelah.

Eramuslim.com memiliki tagline atau moto: "Media Islam Rujukan". Motto tersebut dikuatkan dalam visi yang disebutkan "Menjadi media Islam rujukan dan advokasi opini islam". Untuk

mewujudkan visi tersebut, eramuslim.com mencoba menurunkan kedalam misinya sebagai berikut: "Memberikan informasi tentang dunia Islam yang lebih adil dan punya mashlahat kepada umat Islam, memberikan sarana informasi untuk aktivitas dakwah Islam, memberikan advokasi opini perjuangan umat Islam, membangun dan mengeratkan persatuan umat Islam dan menyediakan informasi tentang pembelajaran nilai-nilai Islam".

Eramuslim.com nampaknya beranggapan bahwa sangat sedikit media Islam yang dapat dijadikan rujukan di Indonesia, sehingga mereka mencoba menawarkan media online sesuai semangat mereka. Hal tersebut bertujuan sebagai: "Mensyiarkan nilai-nilai keislaman baik berupa hanya sebatas informasi, artikel keislaman maupun memberikan suatu penyelesaian terhadap permasalahan melalui media online atau internet untuk dihadirkan kepada para pengunjung terutama kaum muslimin di Indonesia".

Sebagai media yang sedang mencoba menjadi kiblat bagi umat Muslim di Indonesia, eramuslim.com cukup konsisten dalam menghadirkan berita kepada audiens, hal ini terlihat dari intensitas dalam menyajikan konten. Perhari dapat memproduksi lebih dari 20 konten dengan jarak waktu yang relatif tidak terlalu lama. Artinya dalam setiap jam hampir selalu memberikan informasi kepada audiens melalui beragam rubrik yang mereka miliki. Setidaknya mereka memberi 13 pilihan kepada audiens untuk menentukan rubrik mana yang hendak dikonsumsinya, dari isu-isu nasional, keperempuanan (Muslimah), pendidikan dan keluarga, bisnis, novel, bahkan forum konsultasi. Demikian pula untuk melengkapi rubrik maka disiapkan dengan sub-sub dari tiap rubriknya, sehingga ada beragam pilihan yang dapat dijadikan acuan oleh audiens. Kesan pengelolaan yang profesional tampak dari cara mereka mengelola laman ini. Hal ini didukung pula dengan susunan

pimpinan, pimpinan redaksi, jajaran redaksi, bagian iklan, humas, ahli IT, berikut alamat jelas serta nomor telepon genggam yang dapat dihubungi dan tercantum di redaksi. Eramuslim.com beralamatkan di Perum Pratama B3/10 – Bogor, dengan surel redaksi@eramuslim.com, dan mobile phone 085811922988. Meskipun pada saat penelitian dilakukan, respon mereka ketika hendak diwawancarai hanya menjawab akan kami sampaikan pada redaksi/pimpinan (peneliti menghubungi sampai tiga kali, dengan jawaban yang sama), dan setelah itu tidak ada tindak lanjut apapun hingga tenggat waktu penelitian sudah habis tidak ada kesempatan yang diberikan mereka kepada peneliti. Sementara itu, untuk penulisan informasi, berita, opini, dan rubrik lainnya lebih banyak dilakukan oleh tim redaksi, yaitu Zahid Mangkualam, Dede Z, Herry K, Kusuma H. Adapun pada rubrik ustadz, dengan sub ustadz menjawab dihadirkan ustadz Sigit Pranowo LC, seorang alumnus dari al-Azhar Kairo, Mesir. Bagi kebanyakan Muslim Indonesia, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir selalu dianggap lebih mumpuni pengetahuannya dibanding dari lulusan negara-negara lain. Al-Azhar Kairo memang ditilik dari sejarah peradaban Islam, merupakan kampus yang sangat diawal didirikan pada masa kekhilafahan Bani Abbasiyah sekitar abad 11 Masehi dan masih berdiri hingga kini.

Aspek keberadaan iklan dalam website eramuslim.com. Dalam pengamatan peneliti, iklan yang terdapat di eramuslim.com tidak hanya produk yang dikelola oleh internal mereka sendiri, seperti buku-buku terbitan internal, plaza.eramuslim.com, namun dapat juga menerima iklan dari mana saja. Dalam konteks profesionalisme, sesungguhnya menerima iklan dari sumber mana saja itu sah-sah saja, sekiranya ada produk yang bertentangan dengan nilai-nilai tertentu, maka itu permasalahan etika.

3. voa-islam.com

Laman Islam unaffiliated berikutnya yaitu voa-islam.com. VOA-Islam dot com didirikan di Bekasi, Jawa Barat April 2009 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Juni 2009.. Laman ini pernah diblokir bersama 22 situs laman beridentitas Islam lainnya, pada akhir Maret 2015 oleh Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) atas permintaan dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) karena adanya aduan dari masyarakat. Kemkominfo meminta penyelenggara internet service provider (ISP) untuk memblokir ke-22 situs sesuai yang disampaikan pihak BNPT karena situs/website tersebut merupakan situs/wensite penggerak paham radikalisme dan/atau simpatisan radikalisme.

Voa-islam.com mempunyai visi: "1. Menjadi media terpercaya yang mengedepankan kebenaran dan keadilan secara professional; 2. Terwujudnya masyarakat muslim yang sadar akan kemuliaan dirinya dan peran serta tanggungjawab yang harus diembannya untuk terwujudnya sebuah peradaban yang bermartabat."

Adapun misinya terangkum dalam enam hal yaitu: "1. Mendakwahkan Al Haq di mana saja, kapan saja, melalui media apa saja; 2. Meningkatkan kualitas SDM dan kapabilitas teknologi Informasi dan komunikasi umat Islam; 3. Membangun dakwah online dan sebagai bentuk advokasi terhadap umat Islam Asia Tenggara; 4. Menjaga keutuhan dakwah, sunnah, dan perjuangan umat Islam; 5. Menjadi media Islam Online rujukan di Indonesia dan Asia Tenggara, Inshaallah; 6. Menyampaikan informasi berimbang tentang eksistensi dan permasalahan umat Islam di Asia Tenggara khususnya, dan dunia pada umumnya.

Tujuan dakwah dari voa-islam nampaknya tidak sekadar di Indonesia saja, karena di dalam misinya disebutkan kata Asia

Tenggara hingga tiga kali. Selain digunakan sebagai sarana dakwah, voa-islam juga ditunjukan sebagai metode advokasi umat Muslim di Indonesia dan Asia Tenggara. Mengingat jangkauan areanya yang juga menysasar umat Muslim di luar Indonesia, voa-islam sudah menggunakan rubriknya dengan bahasa Inggris, meskipun di dalam konten mereka tidak ada edisi bahasa Inggrisnya sama sekali.

Sebagai media siber yang sudah beroperasi cukup lama, sembilan tahun, voa-islam memiliki moto: "Voice of the Truth", menyuarakan kebenaran, tentu saja kebenaran versi mereka sendiri. Tagline mereka tertulis sangat jelas sebagaimana tertera dalam logo di mana terlihat jari telunjuk menunjuk keatas, dengan tulisan tagline ada di bawahnya persis.



Gambar 3.11 Website VOA Islam

Produktivitas konten dalam laman voa-islam.com dapat dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya jumlah rubrik yang terdapat dalam laman, tidak kurang dari sepuluh rubrik. Diantaranya yaitu: Indonesiana, Worlds, Islamia, CounterFaith, Tekno+Mil, Muslimah, SmartTeen, ShareVoices, SyariahBiz, dan IDC (Infaq Dakwah Center). Penggunaan nama-nama rubrik mencoba

menggunakan bahasa Inggris, hal tersebut nampaknya disesuaikan dengan misi mereka yang berkeinginan dibaca oleh umat Muslim di Asia Tenggara.



Gambar 3.12 Logo VOA Islam

Adapun secara tampilan laman tersebut didominasi warna hitam, merah, dengan headline biru, dan latar belakang warna coklat terang. Rubrik headline news memiliki ruang terbesar di tengah, sedang disamping kirinya terdapat 'IDC' dan 'Hot Topics'. Di samping kanan terdapat konten dari rubrik 'Indonesiana' dan 'iklan'. Terdapat gap di bawahnya yang diisi oleh VIVO (VOA Islam Video Online) dan rubrik-rubrik selanjutnya berada di bawahnya hingga rubrik terakhir. Terlihat sangat penuh sesak, yang justru akan membuat pembacanya lebih mudah lelah ketika membuka laman tersebut, akibat saking penuhnya halaman muka dari laman tersebut. Ditambah lagi dengan penggunaan judul-judul berita berwarna merah, semakin membuat mata pembaca tidak nyaman untuk berlama-lama. Voa-islam.com memilih typografi tulisannya dengan menggunakan model huruf Calibri (Body). Adapun flash dari setiap rubrik memiliki pembagian kontennya sendiri-sendiri. Sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 3.14 Tampilan Konten VOA Islam

Dari sisi konten, terdapat sub rubrik 'JihadNews', bagi peneliti hal ini memperlihatkan bagaimana cara mereka memandang makna jihad itu sendiri. Penggunaan warna merah dalam kata 'jihad', kemudian gambar yang memperlihatkan para milisi yang membawa laras panjang, dan situasi chaos, perang. Padahal sesungguhnya jihad yang lebih mulia adalah menahan hawa nafsu. Adapun perang itu dalam bahasa Arab lebih banyak menggunakan qital.



Gambar 3.13 VOA Islam

Website voa-islam.com mempunyai beberapa iklan. Seperti mukenariri.com, batamode.com, Pikul Bareng, VOA Islam Shop. Dalam rangka menarik pemasang iklan, website voa-islam.com mengklaim telah diakses oleh lebih dari 2.000.000 visitors/bulan, dengan pageviews mencapai lebih dari 6 juta per bulan. Diakses oleh kaum muslimin dari berbagai wilayah di Indonesia dan juga dari seluruh dunia. Media yang tepat bagi

anda yang ingin mempromosikan produk, usaha dan event anda. Mereka menyediakan ruang khusus bagi iklan banner maupun iklan teks, dengan harga yang sudah tercantum pada bagian menu advertisement di halaman laman paling bawah.

Adapun secara kelembagaan pers, voa-islam.com berada di bawah perusahaan PT. Visi Media Veteran, dengan nama pendiri Sabrun Jamil, serta mencantumkan susunan redaktur ahli, pimpinan redaksi, jajaran redaktur, reporter, serta mencantumkan alamat redaksi yang menempati jalan Veteran 48A, Kota Bekasi, Jawa Barat Kode Pos: 17141, email: redaksi@voa-islam.com.

4. Muslimoderat.net

Laman selanjutnya adalah muslimoderat.net. Secara umum, tidak ada visi – misi yang secara khusus ditulis terkait dalam laman ini, mereka hanya mencantumkan diri sebagai situs atau media online yang bergerak dalam bidang pemberitaan, sy'ar Islam, dakwah dan kajian Islam (Islamic studies) dengan mengedepankan sikap moderat (tawasuth). Laman ini pun mengklaim sebagai laman non-komersil.

Produktivitas situs muslimoderat.net agak rendah. Dalam sehari hanya 3-4 yang muncul dalam rubrik beranda, itupun tidak setiap hari ada yang baru. Informasi yang dihadirkan seputar fenomena sosial politik yang terjadi di Indonesia. Pada bulan Juli 2017 misalnya terdapat informasi mengenai mengapa Kemkominfo memblokir aplikasi telegram, yang dianggap menjadi sarana komunikasi jaringan teroris. Sementara berita ataupun informasi yang lain berisi tentang polisi yang mengamankan bendera HTI di rumah tersangka penghina ibu negara (muslimoderat.net, 13/09/2017), ditangkapnya Alfian Tanjung sebagai produsen hoax bangkitnya PKI (muslimoderat.net, 12/09/2017), dan beberapa informasi lainnya.

Dari sisi visualisasi, laman muslimoderat.net hampir serupa dengan situs yang dikelola oleh organisasi Islam lainnya yakni dominan warna putih sebagai latar dengan variasi warna biru yang digunakan sebagai penanda rubrik.



Gambar 3.15 Website Muslim Moderat

Adapun rubrik yang disediakan dalam website ini adalah Beranda, Berita, Kajian Islam, Tokoh Moderat, Cinta NKRI, Hikmah, Habaib, Kalam Ulama. Secara keseluruhan, terdapat sembilan rubrik, apakah itu disesuaikan dengan jumlah bintang sembilan yang tertera di atas tulisan logo muslimoderat, peneliti tidak mendapatkan konfirmasi dari pengelola situs.

Menarik untuk dilihat lebih jauh adalah adanya rubrik 'tokoh moderat', yang mana banyak menampilkan kiai NU yang dianggap sebagai tokoh moderat, seperti KH. Mustofa Bisri, dan para kiai yang sudah almarhum diantaranya yaitu Gus Dur, mbah Makhsum Lasem, KH. Bisri Mustofa, KH. Muslim Rifa'i Imampuro, K.H Ma'ruf Kedunglo, KH. Abdul Karim Lirboyo, KH. Abu Bakar Bandal Kidul, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, (pemberitaan bulan September 2017). Sangat susah menjumpai tokoh moderat yang ditampilkan oleh situs muslimoderat.net, hal ini menurut peneliti kurang tepat karena tokoh Muslim moderat di Indonesia tidak hanya dari kalangan kiai, atau dari organisasi Nahdlatul Ulama saja, namun juga banyak tokoh moderat berasal dari non kiai dan non-NU. Seyogyanya dalam pemberiaan informasi kepada audiens menampilkan juga tokoh-tokoh lain yang berasal dari beragam organisasi Islam yang ada di Indonesia.

Dari aspek Iklan, tidak ditemukan adanya iklan yang terpampang di laman muslimoderat.net. Hal ini nampaknya karena muslimoderat.net mendeklarasikan diri sebagai situs nonkomersil sehingga tidak memasang iklan dalam laman mereka.

Situs yang mengklaim sebagai Islam moderat ini tidak mencantumkan alamat riil berikut nomor telepon, sehingga tidak dapat dikunjungi secara langsung. Meskipun terdapat alamat elektronik melalui berbagimuslim@gmail.com, akan jauh lebih baik sekiranya mencantumkan alamat resmi secara lengkap, sehingga dapat menambah kemantapan para pembaca akan berita, informasi, maupun lainnya yang dimuat oleh situs muslimoderat.net.

5. Arrahmah.com

Situs Arrahmah.com didirikan oleh Muhammad Jibril, anak dari ustaz Abu Jibril, sejak tahun 2005. Merupakan situs media Islam yang berdiri sangat awal, sebelum menjamurnya media-media Islam seperti hari ini. Menurut Muhammad Jibril, Arrahmah.com didirikan sebagai media propaganda dan sekaligus media perjuangan Islam. Beberapa media Islam lain yang sering dihubungkan dengan radikalisme, didukung oleh Arrahmah.com dalam hal penyediaan kemampuan IT. Arrahmah.com merupakan sebuah PT yang memiliki beberapa bidang usaha yaitu: film publishing, percetakan buku, penerbitan majalah (Jihad Magz). Majalah 'Jihad Magz' dibuat dalam rangka menyerukan jihad di kalangan umat Muslim. Bagi Muhammad Jibril, Arrahmah.com dibuat karena media Islam selalu berada di pinggiran, sangat jarang yang melirik sebagai rujukan sumber informasi maupun dijadikan panduan dalam bermedia. Sementara media yang dijadikan rujukan merupakan media-media mainstream yang Muhammad Jibril anggap

sebagai media sekuler yang seringkali meminggirkan umat Islam.

Arrahmah.com yang dilihat saat akses pada 5 Januari 2018 merupakan tampilan yang baru, karena pada saat peneliti melakukan wawancara, 15 Oktober 2017, situs tersebut sedang diperbaiki (under reconstruction). Sebelum diperbaiki, terdapat rubrik 'jihad zone', namun saat ini sudah tidak ada lagi. Berikut ini tampilan situs arrahmah.com pasca diperbaiki, ia memiliki empat rubrik utama: News, Islamic World, Kajian Islam, dan Kontribusi.



Gambar 3.16 Website Arrahmah

Pada rubrik 'news' lebih dominan memberitakan kejadian-kejadian yang berasal dari luar negeri daripada peristiwa di dalam negeri. Sementara pada rubrik 'Islamic world' berisikan peristiwa di pelbagai negara-negara Islam atau yang dominan penduduk Muslimnya; Suriah, Palestina, Aljazair, Turki, Iran, Yaman, untuk menyebut beberapa. Pada rubrik 'kajian Islam' menyajikan sejarah kehidupan para sahabat Nabi Muhammad saw, dan argumen-argumen Islam terhadap larangan atau anjuran melakukan sesuatu berdasarkan versi arrahmah.com, sebagaimana terlihat dalam situs berikut ini



Gambar 3.17 Tampilan Konten Laman Arrahmah

Adapun rubrik 'kontribusi' berisi tentang: kisah pembaca, reader's voice, citizen journalism, dan event. Seperti terlihat pada laman berikut di bawah ini:



Gambar 3.18 Website Arrahmah

Secara tampilan arrahmah.com menggunakan warna biru tua sebagai headline tulisan arrahmah.com, adapun di bagian rubrik dan halaman situs dominan menggunakan warna putih, dengan tulisan warna hitam. Hal tersebut dilakukan demi kenyamanan para pembacanya baik yang mengakses melalui gawai maupun menggunakan laptop/notebook atau desk computer.

Untuk memperoleh berita yang mereka sajikan, arrahmah.com memiliki sejumlah jurnalis lapangan yang direkomendasikan. Tidak ada rekrutmen jurnalis 'resmi' dari arrahmah.com, perannya lebih sebagai kontributor. Secara kelembagaan arrahmah.com tidak masuk sebagai anggota dewan pers, yang merupakan lembaga pers resmi bagi pemerintah Indonesia, arrahmah.com memang tidak ingin berada di bawah dewan pers ataupun lembaga lainnya. Adanya asosiasi jurnalis media-media Islam seperti Jurnalis Islam

Bersatu (JITU) dan Forum Jurnalis Muslim (Forjim) juga tidak terlalu diikuti secara intensif, meskipun Muhammad Jibril merupakan salah satu pendiri JITU.

Dari sisi iklan, saat ini arrahmah.com tidak ada iklan yang muncul dalam laman mereka. Bagi mereka ketika menerima google adsen, berarti menerima dan menoleransi bahwa media Islam dikendalikan oleh orang atau lembaga lain. Pengeluaran pengelolaan media yang mencapai 50 juta rupiah, untuk honorarium jurnalis, termasuk maintenance situs, tidak diperoleh informasi yang jelas dari Muhammad Jibril. Pada saat dikonfirmasi ia hanya menyatakan dari kantong pribadi. Belakangan diketahui bahwa Muhammad Jibril memiliki butik fesyen yang berada di Jakarta.

Arrahmah.com sebagai media yang langsung menggunakan identitas Islam dan termasuk yang paling awal, dan berkenan menerima wawancara yang peneliti lakukan, selama hampir tiga jam, beralasan karena peneliti berasal dari institusi di bawah Muhammadiyah. Dalam pandangan Muhammad Jibril, Muhammadiyah merupakan ormas Islam yang suaranya masih memihak pada umat Islam di Indonesia, tidak terlalu condong pada kelompok-kelompok yang ia anggap menyudutkan umat Islam. Jibril mengakui banyak media, lembaga asing, yang mengajukan wawancara namun ia enggan untuk menerimanya.

6. Thoriquna.id

Situs Thoriquna.id merupakan laman yang berada di bawah organisasi LPPDI Thoriquna. Dalam laman tersebut tidak ditemui tujuan, visi, misi dari thoriquna.id. Termasuk di dalam rubrik 'about', yang di laman media lain seringkali memuat profil organisasi, namun di laman thoriquna.id, justru muncul sebuah opini berjudul: "Jihad Jalan Kami (Definisi Jihad, Tujuan, dan Hukumnya)", yang mana memaknai "jihad paling tinggi

yaitu perang mengangkat senjata di jalan Allah” (<http://www.thoriquana.id/2017/01/blog-post.html>, diakses pada 16 Oktober 2017).

Laman ini pun meyakinkan pembaca tentang definisi jihad, dengan mengutip ayat al-Quran, “Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad” (QS. Al-Hajj 78), tanpa disertai dengan penjelasan asbabun nuzul, yang semestinya dapat dijelaskan kepada pembaca. Asbabun Nuzul dalam mengkaji ayat al-Quran itu sangat penting sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang keliru, atau hanya berdasarkan tekstual semata.



Gambar 3.19 Website Thariquna

Laman [thoriquana.id](http://www.thoriquana.id) ini menggunakan warna hitam sebagai warna dominan dengan cara mencetak headline tulisannya dengan warna hitam kental, disertai latar belakang putih. Sangat jarang dijumpai warna lain kecuali untuk ilustrasi gambar, itupun menunjukkan warna merah membara, seolah dalam kondisi marah, dan dipertegas dengan penyebutan istilah perang yang dapat dijumpai dengan mudah. Hal ini juga tampak pada rubrik 'Akhlaq". Seperti gambar berikut:



Gambar 3.20 Website Thoriquna

Akhlak di dalam ajaran Islam sesungguhnya lebih merupakan representasi dari tingkah laku seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Cara seorang Muslim bertetangga, memperlakukan alam sekitar, menerima tamu, memperlakukan orang lain. Sayangnya di dalam laman thoriquna.id, akhlak justru ditampilkan berperang. Pada saat membuka rubrik 'home', tidak muncul penjelasan mengenai thoriquna.id, namun tentang seruan jihad internasional terhadap Amerika Serikat. Disitu juga disebutkan bukan masanya lagi jihad hanya menggunakan pena, karena masanya sudah berubah, dan diakhir kalimat disebutkan: "Bersiaplah bila masanya tiba jihad memanggil kita...". Sebuah seruan-seruan yang sangat provokatif bagi pembacanya.



Gambar 3.21 Website Thoriquna

Sumber: laman thoriquna.id diakses pada 5 Januari 2017.

Situs thoriquna.id ini dari segi produktifitas update informasi terlihat sangat jarang dilakukan. Informasi yang disuguhkan tidak harian, bisa beberapa minggu baru dijumpai sebuah update. Sebagai media, tentu saja hal ini sangat tidak ideal, dan sangat membosankan bagi pembaca yang mengaksesnya. Padahal rubrik yang disediakan mencapai 11 rubrik: home, aqidah, akhlaq, manhaj, fiqih, siroh, mutiara hadits, khazanah, nasional, internasional, about.

Dari segi iklan, tidak dijumpai iklan sama sekali dalam laman thoriquna.id. Barangkali hal tersebut terjadi karena minimnya update konten di dalam laman ini, sehingga membuat pemasang iklan tidak tertarik untuk mempromosikan produknya di dalam laman yang jarang diupdate. Para penulis di laman ini pun seringkali hanya menggunakan nama thoriquna, tidak ada nama dari jurnalisnya ataupun penulis opininya. Kalaupun ada, nanti dicantumkan editor yang disebutkan namanya: Abu Fayruza.

Thoriquna.id juga melakukan link dengan media-media sosial seperti twitter, instagram, goole plus. Di dalam akun twitter mereka justru muncul sebuah bendera yang selama ini dimiliki oleh organisasi teroris ISIS. Sebagaimana terlihat dari gambar berikut:



Gambar 3.22 Laman Twitter Thariquna

Dari latar belakang di dalam akun twitter, dapat dipahami mengapa penggunaan warna hitam dan putih saja yang digunakan. Secara simbolik, laman thoriquna.id ini dapat dinilai memiliki kesamaan visi dan misi dengan organisasi teroris seperti ISIS. Jika demikian adanya, maka tidak dapat ditoleransi lagi beredarnya situs-situs seperti thoriquna.id., meskipun dengan alasan kebebasan berpendapat maupun berekspresi. Terorisme merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan undang-undang resmi di negeri ini.

7. Dakwatuna.com

Situs dakwatuna.com didirikan oleh Samin Barkah. Seorang alumnus pelatihan kepemimpinan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Dakwatuna.com dalam visinya menuliskan ingin “Menjadi media Islam online terbesar dan terpercaya”, sementara misinya yaitu: “1). Menyajikan konten edukasi yang bermanfaat; 2). Menyampaikan informasi yang terpercaya; 3). Menyediakan ruang aspirasi yang dapat diandalkan; 4). Memberikan layanan konsultasi yang solusional; dan 5). Menyediakan layanan pariwisata yang menguntungkan”. Situs dakwatuna.com ini dikelola oleh Yayasan Dakwatuna dan mulai beroperasi sejak 14 November 2006, kemudian pada 1 Muharram 1428 bertepatan 20 Januari 2007, jam 10.00 WIB situs media Islam ini dilaunching di Aula Hamka, Masjid Al-Azhar Jakarta. Pada saat launching situs dakwatuna.com dihadiri oleh Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR-RI (periode 2004-2009) dan Dr. Amir Faishol Fath, Ketua LKD (Lembaga Kajian Dakwatuna). Selama tiga tahun pertama, laman dakwatuna.com lebih menampilkan artikel-artikel keislaman saja. Kemudian sejak 2010 ditampilkan berita (news) dalam laman

dakwatuna.com. Materi-materi berita didapatkan jurnalis-jurnalis yang merupakan jejaring mereka, yang disebutnya sebagai metode open journalism, tidak memiliki wartawan tetap dakwatuna.com. Sistem open journalism tersebut lebih dekat disebut sebagai kontributor, yang mana kebanyakan berasal dari jejaring Forum Lingkar Pena (FLP). Dalam tujuannya disebutkan bahwa dakwatuna.com ingin "Menyajikan tragedi dan krisis yang melanda umat dari berbagai penjuru serta prestasi dan capaian yang diraih agar umat merasakan sebagai satu tubuh dalam suka dan duka". Tujuan ini berangkat dari saah satu hadis nabi yang menyatakan umat Islam itu bagaikan tubuh, jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh juga akan merasakan sakit.

Sebagai media daring yang menggunakan identitas Islam, dakwatuna.com secara lengkap menampilkan seluruh struktur kelembagaannya dengan detail. Dimulai dari keberadaan pimpinan umum, dewan redaksi, redaktur pelaksana, editor, kontributor, ditunjukkan dengan menampilkan nama-namanya dengan jelas. Demikian pula alamat redaksi dicantumkan di Epiwalk Office Suites A529, Rasuna Epicentrum. Jl. Hj. Rangkayo Rasuna Said. Karet Kuningan- Setiabudi. Jakarta Selatan. Telp: +6281399022427 dengan alamat surat elektronik dakwatuna@gmail.com.

Dari sisi keberkalaan update informasi yang diberikan, laman ini cukup aktif dalam memberikan pembaruan informasi, berita, opini, dll., kepada para pembacanya. Meskipun tidak seluruh rubrik diupdate setiap harinya. Adapun secara penampilan visualnya, laman ini memilih warna biru sebagai dasar penulisan rubrikasi sesuai dengan logo dakwatuna.com itu sendiri. Sementara dalam topik-topiknya sedikit memberikan nuansa warna merah sebagai cara ingin menunjukkan bahwa situs ini juga memiliki semangat yang kuat dalam mengolah kontennya. Sedangkan flash, segala informasi

yang berkaitan dengan hal yang dianggap penting baik di tingkat nasional dan internasional, dan hal yang menyangkut agama.



Gambar 3.23 Website Dakwatuna

Pengelola dakwatuna.com menyebutkan sekurang-kurangnya membutuhkan biaya sekitar 25 jutaan tiap bulannya untuk maintenance situs berikut update rubrik-rubrik yang ada serta memberikan gaji bulanan kepada delapan orang. Sehingga salah satu yang dilakukan adalah menerima iklan, seperti iklan berikut: Almasah (Iklan Jilbab), Air Asia, iklan FBS, Aplikasi Tirto.id. Hemat peneliti ini menjadi bagian dari cara mereka melakukan fund rising bagi keberlanjutan laman tersebut.



Gambar 3.24 Website Dakwatuna

Sebagai media daring yang sudah berusia lebih dari satu dekade, dakwatuna.com pernah diblokir selama 10 hari oleh Kemkominfo pada awal 2015, karena dianggap memuat konten-konten radikal dan berisikan ajaran-ajaran ISIS, dan membahayakan bagi publik. Namun belakangan mereka mengajukan konfirmasi, dibagian rubrik atau konten mana yang dilarang oleh pemerintah. Pemblokiran dakwatuna.com adalah rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT) kepada Kemkominfo, namun setelah ditelusuri, tidak ada bukti valid mengenai rekomendasi pemblokiran terkait dengan isu radikalisme yang disuarakan oleh dakwatuna.com, sehingga pada akhirnya laman ini diperbolehkan untuk beroperasi kembali.

Dakwatuna.com yang bercita-cita menjadi media Islam yang dijadikan rujukan serta ingin merepresentasikan umat Islam dan disebut sebagai media resmi, mereka pun mengajukan permohonan sebagai anggota Dewan Pers Indonesia, yang mana pada saat peneliti melakukan wawancara pada medio Oktober 2017 ijin itu belum turun dari Dewan Pers karena memang agak jelimat secara administratif. Asosiasi yang diikuti jurnalis-jurnalis dari dakwatuna.com adalah lebih yang masuk di Forum Jurnalis Muslim (Forjim).

bab IV

Popularitas Website Organisasi Islam di Internet

POPULARITAS organisasi Islam di kalangan pengguna internet ini ditentukan berdasarkan banyaknya kunjungan pengguna ke situs-situs organisasi Islam tersebut. Penghitungan banyaknya kunjungan tersebut merujuk pada hasil pemeringkatan yang dibuat oleh dua lembaga, yaitu Alexa (<https://www.alexa.com>) dan SimilarWeb (<https://www.similarweb.com>). Alexa dan

SimilarWeb merupakan dua situs yang menyediakan fasilitas informasi tentang peringkat suatu situs, yang didasarkan atas jumlah trafik pengunjung yang masuk ke situs tersebut. Alexa mengupdate data tentang peringkat setiap hari, sedangkan SimilarWeb mengupdate data peringkat website setiap triwulan.

A. Situs Organisasi Islam Arus Utama

Berdasarkan perhitungan SimilarWeb periode Juli-September 2017, jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Muhammadiyah (<http://www.suaramuhammadiyah.id/>) selama periode Juli-September 2017 sebanyak 388,267 (tiga ratus delapan puluh delapan dua ratus enam puluh tujuh) kali atau sebanyak 129,422 kali per bulan. Adapun jumlah kunjungan pengguna internet ke situs NU Online (<http://www.nu.or.id/>) pada periode yang sama mencapai sebanyak 6,585,000 (enam juta lima ratus delapan puluh lima)

kali atau rata-rata sebanyak 2,195,000 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu) kali setiap bulan.

Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017 situs Suara Muhammadiyah menduduki peringkat 8,629 pada 9 Oktober 2017 dan mengalami peningkatan menjadi peringkat 8,198 pada 29 Oktober 2017. Menurut pemeringkatan Alexa, situs NU Online berada pada peringkat 784 secara nasional dan pada 29 Oktober 2017 peringkat situs NU Online mengalami peningkatan menjadi peringkat 705. Sementara itu, menurut pemeringkatan yang dibuat oleh SimilarWeb pada periode Juli-September, situs Suara Muhammadiyah berada pada peringkat 15,222 secara nasional dan peringkat 577,632 secara global, sedangkan situs NU Online berada pada pada peringkat 959 secara nasional dan peringkat 42,312 secara global.

Perbandingan kedua situs tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan tingkat kunjungan dan peringkat antara situs Suara Muhammadiyah dan NU Online. Tingginya jumlah kunjungan dan peringkat situs NU Online antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) NU Online merupakan website dengan domain tunggal (tidak mempunyai sub-domain), (2) NU Online merupakan suara resmi dari PBNU dan menjadi rujukan utama warga NU dalam menjawab berbagai persoalan, (3) NU Online membangun jaringan dan bekerja sama dengan para kontributor yang berada di berbagai daerah di tanah air.

Rendahnya jumlah kunjungan dan peringkat Suara Muhammadiyah disebabkan oleh faktor-faktor antara lain: (1) Suara Muhammadiyah bukan situs domain utama, melainkan hanya salah satu dari ratusan situs subdomain Muhammadiyah, (2) Suara Muhammadiyah merupakan suara resmi PP Muhammadiyah tetapi bukan rujukan utama bagi warga Muhammadiyah, (3) Suara Muhammadiyah kurang

memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh struktur organisasi Muhammadiyah di berbagai daerah.

B. Situs Organisasi Islam Kontemporer

Berdasarkan perhitungan SimilarWeb periode Juli-September 2017, jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Hidayatullah (<https://www.hidayatullah.com/>) sebanyak 4,568,000 (empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu) kali atau sebanyak 1,522,000 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu) kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017 situs Hidayatullah berada pada posisi 1,159 secara nasional dan pada 29 Oktober mengalami peningkatan menjadi peringkat 1,025 secara nasional. Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh SimilarWeb pada periode Juli-September 2017, situs Hidayatullah menempati peringkat 1,322 secara nasional dan peringkat 51,188 secara global.

Jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Suara Islam (<http://www.suara-islam.com/>) sebanyak 837,172 (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua) kali atau sebanyak 279,057 (dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh tujuh) kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017 situs Suara Islam berada pada peringkat 5,375 secara nasional, dan pada 29 Oktober 2017 peringkat situs Suara Islam mengalami penurunan menjadi 6,281 secara nasional. Berdasarkan pemeringkatan SimilarWeb, pada periode Juli-September 2017, situs Suara Islam berada pada peringkat 8,413 secara nasional dan peringkat 269,714 secara global.

Jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Majelis Tafsir Al-Quran (<https://mta.or.id/>) selama periode Juli-September 2017 sebanyak 114,116 (seratus empat belas ribu seratus enam belas) kali atau 38,039 (tiga puluh delapan ribu tiga puluh

sembilan) kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017, situs MTA berada pada peringkat 22,335 secara nasional, dan pada 29 Oktober 2017 peringkat situs MTA mengalami kenaikan menjadi 21,566 secara nasional. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh SimilarWeb pada periode Juli-September 2017, situs MTA berada pada peringkat 32,548 secara nasional dan peringkat 1,027,581 secara global.

Jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Majelis Mujahidin (<http://www.majelismujahidin.com/>) selama periode Juli-September 2017 sebanyak 60,738 (enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) kali atau 20,246 (dua puluh ribu dua ratus empat puluh enam) kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017, situs Majelis Mujahidin berada pada peringkat 116,622 secara nasional, dan pada 29 Oktober 2017 peringkat situs Majelis Mujahidin mengalami penurunan menjadi 118,415 secara nasional. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh SimilarWeb pada periode Juli-September 2017, situs Majelis Mujahidin berada pada peringkat 525,425 secara nasional dan peringkat 1,618,158 secara global.

Jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (<http://dewandakwah.or.id/>) selama periode Juli-September 2017 sebanyak <5,000 (lebih kecil dari lima ribu) kali atau <5,000 (lebih kecil dari lima ribu) kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017, situs Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berada pada peringkat 195,912 secara nasional, dan pada 29 Oktober 2017 peringkat situs Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengalami kenaikan menjadi 100,146 secara nasional. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh SimilarWeb pada periode Juli-September 2017, situs Dewan

Dakwah Islamiyah Indonesia berada pada peringkat 588,149 secara nasional dan peringkat 10,091,582 secara global.

Perbandingan kelima situs organisasi Islam kontemporer tersebut menunjukkan bahwa situs Hidayatullah merupakan situs yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet, yaitu sebanyak 4,568,000 kali atau sebanyak 1,522,000 kali per bulan. Baik Alexa maupun SimilarWeb menempatkan situs Hidayatullah pada posisi tertinggi dibandingkan dengan empat organisasi Islam kontemporer lainnya. Situs Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia merupakan situs yang paling sedikit dikunjungi oleh pengguna internet, kurang dari 5000 kali, dibandingkan empat organisasi Islam kontemporer lainnya.

C. Organisasi Islam Non-afiliasi

Jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Portal Islam (<http://www.portal-islam.id/>) selama periode Juli-September 2017 sebanyak 8,327,000 kali atau 2,775,000 kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017, situs Portal Islam berada pada peringkat 473 secara nasional, dan pada 29 Oktober 2017 peringkat situs Portal Islam mengalami kenaikan menjadi 463 secara nasional. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh SimilarWeb pada periode Juli-September 2017, situs Portal Islam berada pada peringkat 532 secara nasional dan peringkat 26,416 secara global.

Jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Era Muslim (<https://www.eramuslim.com/>) selama periode Juli-September 2017 sebanyak 9,521,000 kali atau 3,173,000 kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017, situs Era Muslim berada pada peringkat 615 secara nasional, dan pada 29 Oktober 2017 peringkat situs Era Muslim mengalami kenaikan menjadi 581 secara nasional. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh SimilarWeb pada

periode Juli-September 2017, situs Era Muslim berada pada peringkat 489 secara nasional dan peringkat 22,825 secara global.

Jumlah kunjungan pengguna internet ke situs VOA-Islam (<https://www.voa-islam.com/>) selama periode Juli-September 2017 sebanyak 5,015,000 kali atau 1,671,000 kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017, situs VOA-Islam berada pada peringkat 1,332 secara nasional, dan pada 29 Oktober 2017 peringkat situs VOA-Islam mengalami kenaikan menjadi 1,328 secara nasional. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh SimilarWeb pada periode Juli-September 2017, situs VOA-Islam berada pada peringkat 1,155 secara nasional dan peringkat 49,820 secara global.

Jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Dakwatuna (<https://www.dakwatuna.com/>) selama periode Juli-September 2017 sebanyak 2,825,000 kali atau 941,718 kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017, situs Dakwatuna berada pada peringkat 1555 secara nasional, dan pada 29 Oktober 2017 peringkat situs Dakwatuna mengalami kenaikan menjadi 1475 secara nasional. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh SimilarWeb pada periode Juli-September 2017, situs Dakwatuna berada pada peringkat 2,403 secara nasional dan peringkat 100,063 secara global.

Jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Arrahmah (<https://www.arahmah.com/>) selama periode Juli-September 2017 sebanyak 1,307,000 kali atau 35,821 kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017, situs Arrahmah berada pada peringkat 3,061 secara nasional, dan pada 29 Oktober 2017 peringkat situs Arrahmah mengalami penurunan menjadi 4646 secara nasional. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh SimilarWeb pada

periode Juli-September 2017, situs Arrahmah berada pada peringkat 3,480 secara nasional dan peringkat 137,489 secara global.

Jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Muslim Moderat (<http://www.muslimoderat.net/>) selama periode Juli-September 2017 sebanyak 1,307,000 kali atau 35,821 kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017, situs Muslim Moderat berada pada peringkat 3,543 secara nasional, dan pada 29 Oktober 2017 peringkat situs Muslim Moderat mengalami kenaikan menjadi 3,470 secara nasional.

Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh SimilarWeb pada periode Juli-September 2017, situs Muslim Moderat berada pada peringkat 3,910 secara nasional dan peringkat 143,135 secara global. Jumlah kunjungan pengguna internet ke situs Thariquna (<http://www.thoriquna.id/>) selama periode Juli-September 2017 sebanyak 10,048 kali atau <5,000 kali per bulan. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Alexa pada 9 Oktober 2017 dan 29 Oktober 2017 situs Thariquna belum terdeteksi oleh Alexa. Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh SimilarWeb pada periode Juli-September 2017, situs Thariquna berada pada peringkat 444,084 secara nasional dan peringkat 6,613,736 secara global.

Perbandingan jumlah kunjungan dan peringkat dari situs-situs organisasi Islam Non-afiliasi tersebut menunjukkan bahwa situs Portal Islam dan Era Muslim merupakan dua situs yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet. Alexa dan SimilarWeb berbeda dalam menentukan situs mana yang menduduki peringkat lebih tinggi. Alexa menempatkan Portal Islam lebih tinggi dari pada Era Muslim, sedangkan SimilarWeb menempatkan Era Muslim lebih tinggi daripada Portal Islam. Namun demikian, selisih di antara kedua situs tersebut jauh

lebih kecil dibandingkan dengan selisih dengan situs yang berada pada peringkat di bawahnya.

Sebagian besar situs organisasi Islam Non-afiliasi mengalami kenaikan pada bulan Oktober. Situs yang berdasarkan pemeringkatan Alexa mengalami kenaikan secara cukup signifikan adalah Dakwatuna (80) dan Muslim Moderat (73), sementara Portal Islam, Era Muslim. Dan VOA-Islam mengalami sedikit peningkatan, masing-masing adalah 10, 34, dan 4. Situs organisasi Islam Non-afiliasi yang pemeringkatannya turun secara sangat signifikan adalah Arrahmah yang mengalami penurunan hingga 1,585 tingkat, dari semula 3,061 menjadi 4,646.

Data tentang jumlah kunjungan pengguna internet dan peringkat situs di atas menunjukkan bahwa sebagian besar situs organisasi Islam yang dikunjungi oleh pengguna internet merupakan situs-situs organisasi Islam yang non-afiliasi.

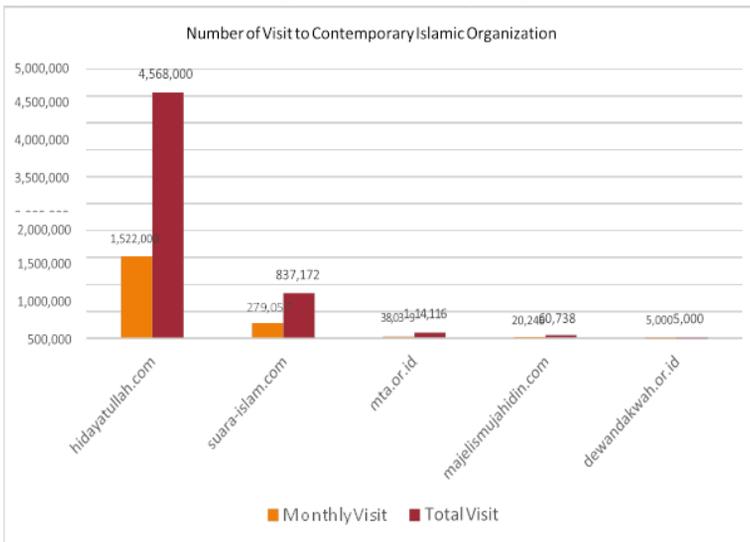


Diagram 3.1 Jumlah Kunjungan Website Kontemporer

Kontestasi Wacana Keislaman di Dunia Maya

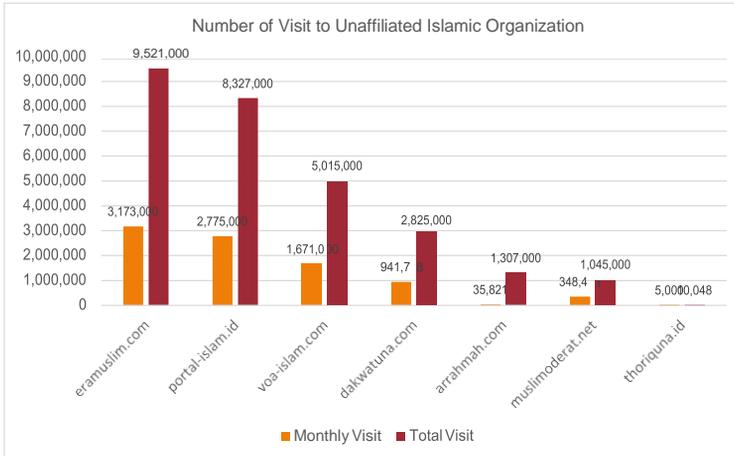


Diagram 3.2 Jumlah Kunjungan Website Non-Afiliasi

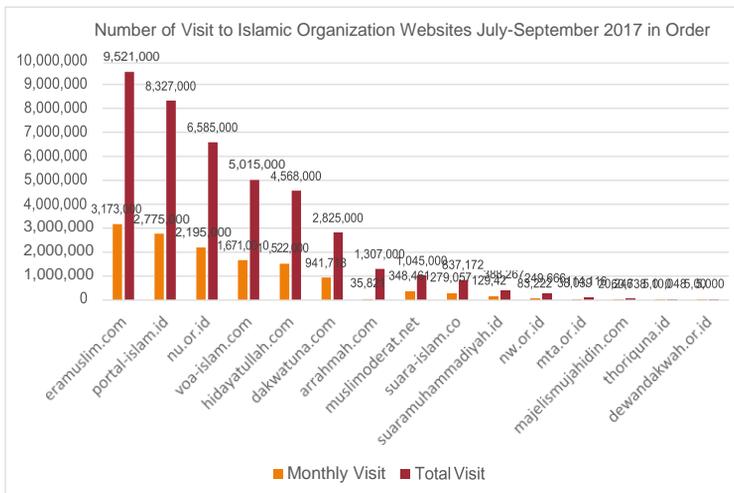


Diagram 3.3 Jumlah Kunjungan Website Juli-Setember

D. Popularitas Tokoh di Media Online

Dalam sub bab ini, dengan menggunakan metode pengumpulan data web scrapping, dijelaskan popularitas tokoh Islam di 15 website yang diteliti dalam kurun waktu 22 bulan dimulai dari Januari 2016 – Oktober 2017. Penggunaan web scrapping sebagai metode pengumpulan memiliki keterbatasan. Pertama, bahwa dalam satu teks, kemunculan

satu nama tokoh bisa jadi lebih dari satu dalam 1 teks. Hal ini karena aktivitas tabulasi dari teks yang sudah terkumpul. Kedua, kemunculan nama tokoh tidak memberikan justifikasi bahwa tokoh yang tersebut terindikasi sebagai tokoh yang berpandangan radikal. Hal ini karena tidak dilakukan analisa sentimen terhadap data yang terkumpul namun hanya melakukan identifikasi berdasarkan nama tokoh saja.

Secara 10 besar, hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa Habib Rizieq Shihab (HRS) merupakan tokoh yang paling populer disebut yakni 3704 kali di website yang diteliti, disusul berikutnya adalah Ustadz Bachtiar Nashir (UBN) (2181), Gus Dur (1070), Yusril Ihza M (956) serta Aa Gym (905). Dari urutan 5 besar tersebut, hanya Gs Dur yang mewakili organisasi Islam mainstream, keempat lainnya adalah tokoh yang dianggap tidak berafiliasi pada organisasi Islam mainstream. Meskipun demikian, pada beberapa kesempatan, UBN kerap menggunakan atributisasi anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sehingga orang sering kali memberikan labelisasi bahwa UBN adalah bagian dari Muhammadiyah.

Tabel 3.2 Popularitas Tokoh Islam

No	Nama Tokoh	Frekuensi
1.	Habib Rizieq	3704
2.	Bachtiar N	2223
3.	Gus Dur	1070
4.	Yusril Ihza M	956
5.	Aa Gym	905
6.	Amien Rais	751

7.	Arifin Ilham	699
8.	Haedar Nashir	593
9.	Ma'ruf Amin	546
10.	Din Syamsuddin	458

Tabel yang ada tersebut menarik untuk dicermati dari beberapa hal. Pertama, meskipun Gus Dur adalah tokoh NU, organisasi Islam mainstream di Indonesia, ternyata dari sisi popularitasnya masih kalah jauh dibandingkan dengan HRS bahkan UBN. Fenomena ini menjadi anomali bahwa tokoh organisasi Islam mainstream yang selalu mengedepankan pandangan perdamaian seperti menghormati kebhinekaan, mendorong kerukunan antar-iman dan keadilan sosial serta mendukung Pancasila dan menjaga NKRI tidak menjadi rujukan website Islam yang diteliti. Dengan demikian ada sebuah gejala bahwa HRS yang dianggap sebagai representasi FPI menyaingi popularitas tokoh Islam mainstream. Hal ini sejalan dengan temuan dari Alvara Research Center pada survei yang dilakukan pada 2017. Dari aspek dikenal publik ternyata FPI, NU, dan Muhammadiyah sama-sama mendapat respons tinggi. NU di posisi paling dikenal dengan capaian 97,0 persen, Muhammadiyah 93,4 persen, dan FPI 68,8 persen. Bahkan FPI sudah menyalip ormas Islam lain, seperti Lembaga Dakwah Islamiah (LDII) 35,5 persen, PERSIS 19,0 persen, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 13,5 persen, dan Front Umat Islam (FUI) 9,8 persen.

Kedua, fenomena Gerakan 212 dalam Pilkada Jakarta 2017 memang tidak bisa dilepaskan dari popularitas tokoh tersebut. Sebagaimana diketahui publik bahwa gerakan sosial 212 yang tokoh sentralnya adalah HRS dan UBN bisa jadi merupakan

alasan kedua tokoh tersebut cukup populer. Habib Rizieq dianggap tokoh/ulama yang mampu menyatukan umat Islam dari berbagai organisasi Islam yang selama ini tersekat oleh primordialisme sempit kelompok dalam menyikapi fenomena Ahok dalam Pilkada. Kecakapannya dalam memanfaatkan momentum mampu menaikkan popularitas mengalahkan tokoh Islam mainstream semisal Haedar Nashir dan Din Syamsuddin.

Ketiga, ketenaran HRS dijagat media online bisa jadi karena dikaitkan dengan beberapa kasus yang diarahkan kepadanya semisal kasus penghinaan terhadap lambang dan dasar negara, Pancasila. HRS yang dilaporkan oleh Sukmawati pada 27 Oktober 2016 terkait pernyataannya yakni "'Pancasila Sukarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala". Dalam laporannya, Sukmawati menyampaikan bahwa apa yang diucapkan oleh HRS adalah sangat tidak santun dan tidak layak diucapkan oleh Pimpinan FPI yang berafiliasi pada Islam. Berdasarkan penuturan kepolisian, HRS disangkakan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan Pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal. Tidak hanya berkaitan dengan Pancasila, pemberitaan tentang HRS juga sangat santer dalam kasus dugaan chat mesum dengan Firza Husein.

Namun demikian, meskipun popularitas HRS melebihi UBN, dari grafis dibawah ini terlihat bahwa UBN dapat dikatakan lebih konsisten tingkat popularitasnya dibanding HRS. Bahkan diawal tahun 2016, UBN lebih populer dibandingkan dengan HRS. Sampai dengan bulan Oktober 2016, grafis UBN lebih statis meskipun ada penurunan namun tidak signifikan. Bahkan, meski pada bulan Nopember naik (karena fenomena aksi 411) pun juga tidak sedrastis HRS. Pada bulan-bulan berikutnya sampai dengan September 2017, meski beberapa kali fluktuatif, namun relatif konsisten.

bab V

Kontestasi Wacana Website Organisasi Islam Arus Utama Dan Kontemporer

A. Pesan Moderat Website Organisasi Islam Arus Utama

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai sebuah Ormas Islam dengan alat organisasi yang besar, Muhammadiyah telah menolak isu-isu radikalisme di Indonesia. Sebaliknya, Muhammadiyah telah menyampaikan pesan-pesan damai lewat website Muhammadiyah untuk kehidupan bangsa Indonesia yang rukun, toleran dan damai.

Pesan damai Muhammadiyah yang pertama adalah ajakan menerima Pancasila dan NKRI sebagai "warisan *founding fathers*" dan sekaligus nafas perekat kebangsaan. Pesan ini dimuat dalam Suara Muhammadiyah Online edisi 15 Juli 2017 berikut.

"Muktamar Muhammadiyah Tahun 2015 menegaskan Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi was Syahadah* atau Negara Kesepakatan dan Kesaksian. Dokumen itu berasal dari pidatonya pada 1 Juni 2012 di MPR-RI dengan tajuk serupa. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa harus menegakkannya, dan terhadap segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pancasila harus diluruskan. Dalam hal ini, terdapat banyak bentuk penyimpangan, baik yang bersifat keagamaan seperti khilafah politik, maupun isme-isme

lain seperti komunisme, sekularisme, liberalisme, kapitalisme, dan berbagai bentuk ekstrimisme lainnya. Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, Haedar Nashir, menegaskan kembali bahwa Pancasila merupakan "*Darul Ahdi wa Syahadah*". Pernyataan tersebut disampaikan pada acara 'Pembinaan Ideologi' bagi penggerak media Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro". (Suara Muhammadiyah Online edisi 15 Juli 2017).

Sementara itu, pada edisi 11 Agustus 2017, SM Online memuat pernyataan Ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, Muhammadiyah akan terus jaga NKRI. Karena menurutnya,

"... secara historis Muhammadiyah memiliki peran penting dalam barisan perjuangan kemerdekaan. Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan fondasi negara-bangsa. Salah seorang tokoh Muhammadiyah, Ki Bagoes Hadikoesoemo, misalnya, berperan dalam perubahan bunyi sila pertama Pancasila. Ki Bagus tidak memaksakan NKRI menjadi negara syariat, Indonesia tetap berazaskan Pancasila yang bisa mempersatukan semua. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan perjanjian luhur dan konsensus nasional yang mengikat seluruh komponen bangsa" (Suara Muhammadiyah Online edisi 11 Agustus 2017).

Pesan damai Muhammadiyah kedua adalah ajakan menerima Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas Islam dan menghargai Pemerintah membubarkan HTI. Pesan ini dimuat dalam Suara Muhammadiyah Online berikut.

Pada edisi 08 Agustus 2017, SM Online menurunkan berita tentang sikap resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat atau PERPPU Ormas. Salah satu sikap Muhammadiyah adalah "Muham-

madiyah menolak paham yang memutlakkan sistem kekhalifahan Islam yang disertai sikap menegasikan pilihan politik Islam lainnya dengan menuding sebagai sistem di luar Islam (tidak Islami, sistem *thaghut*), lebih-lebih apabila disertai gerakan untuk mengganti sistem politik yang telah berlaku pada setiap negara Islam atau negara Muslim.” Sikap lainnya adalah “Muham-madiyah membenarkan bahwa memang diperlukan tindakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang terbukti secara nyata dan meyakinkan mengembangkan paham, ideologi, dan gerakan yang bertentangan serta ingin mengganti Pancasila dan/atau keberadaan NKRI”.

Pada 09 Mei 2017 Suara Muhammadiyah Online memuat berita tentang penghargaan Muhammadiyah terhadap sikap pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pesan damai Muhammadiyah ketiga adalah ajakan menghentikan tindakan main hakim sendiri dan intoleransi. Pesan ini dimuat dalam Suara Muhammadiyah Online berikut.

Suara Muhammadiyah Online Edisi 18 Januari 2017 memuat pernyataan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1998-2005, Ahmad Syafii Maarif, bahwa ormas anarkis dan gemar melakukan penghakiman harus dihentikan. Ormas apapun hendaknya tidak melakukan pelanggaran hukum di wilayah negara yang meng-anut Pancasila. Ormas ini dijuluki oleh Syafii Maarif sebagai polisi swasta. Oleh karena itu, menurutnya “Polisi swasta harus dihentikan aktivitasnya!

Suara Muhammadiyah Online memuat kasus terjadinya pembubaran kegiatan Daurah Tahfidzul Quran yang terjadi di Kari-munjawa, Jepara, Jawa Tengah oleh sekelompok orang yang mewakili organisasi kemasyarakatan tertentu sebagai contoh

tindakan main hakim sendiri. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan penyesalan terhadap tindakan tersebut. "Tindakan main hakim sendiri seperti itu apapun alasannya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan," ujar Haedar Nashir.

Suara Muhammadiyah Online edisi 14 Januari 2017, memuat komentar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, terkait dengan fenomena intoleransi di Indonesia belakangan ini. Haedar mengatakan, pada dasarnya, gesekan kecil pada masyarakat yang bersifat majemuk merupakan hal yang biasa sebagai sebuah dinamika sosial. Namun, bukan berarti kasus-kasus itu bisa dibenarkan dan dibiarkan berulang.

Suara Muhammadiyah Online edisi 07 Januari 2017, memuat pernyataan Azyumardi Azra, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakrukunan umat beragama di Indonesia. Namun, faktor terbesar justru datang dari luar atau eksternal, terutama semenjak reformasi. "Faktor eksternal dan kalau kita lihat 10 tahun terakhir, proses meningkatnya intoleransi karena kekacauan di negara Timur Tengah. Kita lihat orang Indonesia di ISIS misalnya. Ini motif transnasional. Transnasionalisme mempengaruhi Indonesia," kata Azyumardi di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2017).

Pesan damai Muhammadiyah keempat adalah penolakan terhadap pendekatan kekuasaan, radikal dan terorisme. Pesan ini dimuat dalam Suara Muhammadiyah Online berikut. Suara Muhammadiyah Online Edisi 20 Mei 2016 telah memuat *warning* dari Guru bangsa, Ahmad Syafii Maarif, agar pemerintah

Indonesia lebih se-rius menyelesaikan sisa-sisa konflik di Papua. Salah satu cara terbaik yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menggunakan pendekatan yang lunak, bukan dengan cara-cara kekerasan dan militer.

Suara Muhammadiyah Online edisi 10 Juli 2017 memuat peringatan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, bahwa menghadapi gerakan radikal harus dilakukannya dengan bijak. Dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan moderasi. Tidak dengan memakai pendekatan radikal atau sering disebut sebagai deradikalisasi.

Suara Muhammadiyah Online edisi 02 Februari 2017, menurunkan sikap Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir terhadap tindakan terorisme. Di hadapan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan, saat berkunjung di Kantor Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan pendapatnya kalau Muslim Indonesia secara umum moderat dan harmonis. "Kita memang pernah mengalami teror. Namun teror itu sebenarnya bukan atas nama agama. Semua keluarga Muslim Indonesia dan Muhammadiyah selalu berusaha mencegah terorisme," jelas Haedar.

Pesan-pesan damai Muhammadiyah yang disampaikan lewat website Muhammadiyah di atas ditujukan kepada empat pihak, yaitu: (1) Pimpinan dan pengurus Muhammadiyah; (2) Karyawan amal usaha Muhammadiyah; (3) Warga atau anggota Muhammadiyah; dan (4) Masyarakat secara umum, khususnya umat Islam. Dengan kata lain, berita pada website Muhammadiyah di atas menunjukkan pesan-pesan damai yang disampaikan oleh Muhammadiyah tidak hanya ditujukan

untuk kalangan warga Persyarikatan saja melainkan juga mencakup seluruh umat manusia, warga negara Indonesia.

Sebagai ormas Islam *mainstream* yang besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) telah menegaskan dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan di Indonesia. Dalam melakukan fungsinya sebagai organisasi sosial keagamaan, NU telah memberikan layanan keagamaan dengan mengedepankan sikap moderat. Sementara itu, pada ranah kemasyarakatan dan kebangsaan, NU ingin menegaskan kembali wacana sebagai elemen bangsa yang mempunyai peran dan kontribusi besar dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Berikut ini beberapa unggahan pada situs resmi NU yang menunjukkan kuatnya situs ini mewacanakan pesan-pesan damai serta nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme di kalangan NU.

Pesan damai NU yang pertama adalah ajakan menerima Pancasila sebagai dasar negara RI dan NKRI sebagai sistem kenegaraan di Indonesia. Pesan ini dimuat dalam situs resmi NU berikut.

NU Online edisi Sabtu, 22 Oktober 2011 memuat berita bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mengikat semua elemen bangsa yang terdiri dari berbagai macam unsur budaya, etnis dan agama untuk mendirikan suatu negara persatuan dan kesatuan yang berdaulat. Sedangkan NKRI merupakan suatu bentuk negara yang final dan harus dipertahankan serta terus dilestarikan.

NU Online edisi Jumat, 15 Juli 2011 memuat pernyataan KH Mutawakkil 'Alallah, Ketua PW NU Jatim, bahwa siapapun dan apapun ormasnya yang mengganggu asas Pancasila dan keutuhan NKRI, maka akan berhadapan dengan NU. Pernyataan

keras ini disampaikan oleh Kyai tersebut pada acara Harlah NU di Jombang. Ia juga dengan tegas meminta Negara bertindak tegas kepada pengusung ide Khilafah.

NU Online edisi 25 September 2017 memuat pernyataan Ketua Umum GP Ansor, H Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan saat ini ada sekelompok orang yang mengganggu kehidupan berbangsa. "Kelompok ini mempertanyakan kembali konsensus dasar negara, padahal para *founding father* kita telah menetapkan konsensus dasar tersebut sebagai landasan NKRI," urai Gus Yaqut saat membuka diskusi Mengaji dan Mengkaji Islam, Medsos, dan Generasi Milenial di Gedung GP Ansor, Jakarta Pusat, Senin (25/9) malam.

Risalah Redaksi NU Online edisi 10 Mei 2017 menegaskan bahwa NU meminta pemerintah agar organisasi yang nyata-nyata mengam-panyekan anti-Pancasila ditindak. Demokrasi bukan berarti bebas menyampaikan segalanya. Sangat ironis jika yang dikampanyekan adalah penentangan demokrasi tersebut. Ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir bertentangan dengan sistem pemerintahan yang selama ini dipakai di banyak negara. Mereka menyadari bahwa keberadaan Hizbut Tahrir akan membawa persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka harus diwaspadai dalam upayanya merongong Pancasila.

Risalah Redaksi NU Online edisi 03 Juni 2017 menyebutkan bahwa Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terangkum dalam prinsip Pancasila kembali dirasakan pentingnya setelah berbagai organisasi transnasional yang mengusung ideologi khilafah dengan massif mengampanyekan keyakinan mereka tersebut. Ternyata Pancasila belum sepenuhnya diakui sebagai

satu-satunya dasar negara Indonesia. Masih ada sebagian warga negara yang dengan penuh semangat mengampanyekan ideologi lain. Kembalinya kesadaran bahwa Pan-casila merupakan nilai pemersatu bagi bangsa yang sangat beragam ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata untuk menguatkan Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya pada generasimuda.

Pesan damai NU yang kedua adalah ajakan merawat kebhinekaan dan menumbuhkembangkan kerukunan antar ummat beragama. Pesan ini dimuat dalam situs resmi NU berikut.

NU Online edisi 26 September 2017 memuat pernyataan Rais Aam PBNU, KH. Ma'ruf Amin agar tindakan intoleransi diamputasi. "Karena itu kita harus hapus, amputasi intoleransi, itu harus dihilangkan," kata Kiai Ma'ruf Amin dalam Seminar Nasional Menakar Kepentingan Ukhuwah Islamiyah dengan Kepentingan Bangsa di STAI Al Anwar Sarang Rembang, Jawa Tengah, Senin (25/09). Amputasi dan penghapusan, lanjut Kiai Maruf juga harus dilakukan terhadap cara berpikir yang mengarah kepada intoleransi, seperti dilakukan para tekstualis. "Toleransi harus dibangun. Indonesia telah melewati berbagai beda pendapat sebelum merdeka yang hasil akhirnya Pancasila sebagai dasar negara," ujarnya. Menurut Kiai Ma'ruf Islam, ada tiga masalah krusial terkait kehidupan masyarakat Indonesia, yakni keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ketiganya harus saling bersinergi, agar Indonesia menjadi bangsa yang utuh dan toleran, karena intoleransi disebabkan salah tafsir mengenai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

NU Online edisi 27 September 2017 memuat imbauan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, agar para pemuka agama di

Indonesia untuk tidak terprovokasi isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Lebih lanjut ia mengajak seluruh umat beragama untuk terus memupuk persaudaraan dan toleransi antaragama di Indonesia. "Alhamdulillah kita masih punya kapital yang sangat mahal, yaitu budaya, akhlak, moral," katanya saat pada pidato membuka sarasehan yang dihadiri para pemuka agama dari lintas agama itu. Menurut dia, leluhur bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah Belanda bukan dengan senjata modern, tapi senjata ampuh yaitu budaya persatuan dan kesatuan, iman dan akhlak. "Kita bangun kembali budaya kita. Nenek moyang tidak mempersoalkan perbedaan agama, suku, keyakinan. Itu harus dipupuk kembali!" pintanya.

NU Online edisi 27 September 2017 memuat sikap Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) tentang ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial. "Kita tidak akan lagi membahas soal halal-haram ujaran kebencian di ruang publik atau di media sosial. Tetapi kita mencoba berpikir soal kriteria ujaran kebencian itu seperti apa," kata Koordinator Komisi Bahtsul Masail Munas dan Konbes NU 2017 KH Mujib Qoliyubi kepada NU Online di Jakarta, Senin (25/9). "Masalah kriteria dan ukuran ujaran kebencian ini yang akan kita kembangkan di Munas NU 2017 nanti. Ini masalah darurat, kadang mengandung unsur SARA atau masalah kekurangan fisik. Kita tidak perlu lagi bicara halal-haram. Hukumnya sudah jelas. Pembahasan ini dimasukkan ke dalam komisi *bahtsul masail diniyah maudhu'iyah*," kata Kiai Sarmidi.

Pesan damai ketiga NU adalah ajakan menghindari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya keresahan dan

kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Pesan ini dimuat dalam situs resmi NU berikut.

NU Online edisi 28 September 2017 memuat permintaan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Ma'ruf Amin sejumlah elemen masyarakat untuk tidak menggelar aksi "299" yang mengusung tema menolak PKI dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). "Sebenarnya (demo) itu tidak perlu lagi," kata Kiai Ma'ruf di Jakarta, Rabu (27/9). Rais Aam PBNU ini mengatakan, seharusnya masyarakat mempercayakan kepada mekanisme yang telah berjalan terkait dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas itu.

Risalah Redaksi NU Online edisi 21 April 2017 meminta agar Pilkada DKI Jakarta jangan dijadikan sebagai penyebaran berita palsu atau hoax untuk mendiskreditkan lawan dari masing-masing kubu tanpa verifikasi kebenarannya yang mengakibatkan kegaduhan di mana-mana. Para buzzer, menciptakan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat melalui jaringan media sosial yang dikelolanya. Mereka tidak peduli soal efek sosial yang ditimbulkan dari status-status yang mereka unggah, yang penting, secara pribadi dapat bayaran, dan secara kelompok, target kemenangan dicapai.

Pesan damai keempat NU adalah usulan untuk mencabut kewarga-negaraan para teroris. Pesan ini dimuat dalam situs resmi NU berikut. NU Online edisi 25 September 2017 memuat berita penyelenggaraan Musyawarah Kerja III yang diselenggarakan di Graha Residen Surabaya. Masalah yang dibahas antara lain terkait status kewarganegaraan mereka yang pernah terlibat dalam gerakan teroris di sejumlah negara. "Seiring maraknya terorisme global, tidak sedikit

Warga Negara Indonesia yang menjadi simpatisan maupun aktif sebagai milisinya," kata KH Ahmad Asyhar Shofwan, Senin (25/9). Menurut Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Jatim tersebut, kenyataan ini kemudian memunculkan wacana pelepasan status kewarganegaraan orang-orang Indonesia yang terlibat gerakan teroris di luar negeri."Sebab, ketika para teroris mendapat kesempatan pulang ke Indonesia, mereka menularkan ideologinya kepada orang lain sehingga ideologi radikal dan ancaman aksi- aksi teror semakin nyata," katanya. Beberapa berita dan risalah redaksi NU Online di atas menunjukkan dengan tegas bahwa NU telah menolak isu-isu radikalisme di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa identitas NU sebagai organisasi masyarakat Islam *mainstream* di satu sisi dan sebagai organisasi sosial keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan di Indonesia pada sisi yang lain tetap konsisten dengan tujuan para *founding fathers* saat mendirikan organisasi ini.

B. Kepentingan Pragmatis Publisitas Organisasi Kontemporer

Pada tahapan selanjutnya dalam analisa terhadap website organisasi Islam kontemporer adalah menganalisa secara lebih dalam isi dari website tersebut yang dikaitkan dengan wacana radikalisme. Dari penelusuran data peneliti, dari bulan Juli – September 2017, frekuensi produktivitas website organisasi Islam kontemporer beragam sebagai mana dalam tabel berikut:

Tabel Produktivitas Konten Juli – September 2017

No	Nama website	Jumlah teks	Teks internal	Teks Eksternal
1	dewandakwah.or.id	29	16	13
2	hidayatullah.or.id	37	32	5
3	www.majelismujahidin.com	0	0	0

4	mta.or.id	58	58	0
5	www.suara-islam.com	834	32	802

Berdasarkan tabel diatas nampak sekali bagaimanakah website dari organisasi Islam kontemporer tersebut dikelola. Frekuensi pengunggahan informasi di website menunjukkan bagaimana pemanfaatan website tersebut untuk menyampaikan pesan maupun pandangan organisasi terhadap sebuah fenomena.

Cukup menarik jika melihat data unggah yang dilakukan oleh suara-islam.com yang mencapai 834 posting selama bulan. Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen visi-misi suara-islam.com yang secara tegas berupaya sebagai penyeimbang media sekuler, jumlah unggahan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa visi-misi bukan hanya sekedar dalam tataran dokumentasi, namun juga implementasi. Hal ini berbeda dengan media kontemporer yang lain dimana frekuensi unggahannya dapat dikatakan sangat minim, semisal majelismujahidin.com. Meskipun secara tegas disebutkan bahwa visi-misi dari Majelis Mujahidin Indonesia secara keorganisasian adalah menegakkan syariah dalam segala aspek kehidupan, namun demikian distribusi pesan tersebut sangat minim dilakukan. Pun teks yang berhasil diproduksi hanya berupa tulisan dari pimpinan Majelis Mujahidin.

Lebih lanjut, hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa isi dari sebagian besar dari media kontemporer tersebut masih banyak berkuat pada aktivitas organisasi mereka masing-masing. Artinya, media online digunakan dalam rangka menyampaikan kegiatan organisasi. Dengan demikian, fungsi

dari website tersebut tidak lain hanya sebagai media humas organisasi.

Hal tersebut nampak ketika peneliti mencermati isi dari website kontemporer dalam 3 bulan. Sebagai misal dewandakwah.or.id, dari bulan Juli-September terdapat 29 berita yang diunggah, 16 berita yang ada berupa informasi seputar kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia seperti aktivitas bakti sosial, penggalangan dana untuk AlAqsha dan Rohingya, maupun kegiatan halal bi halal. Sisa 13 berita yang ada lebih pada informasi yang terjadi seputar dunia Islam semisal kemunculan film counter dari Aku Adalah Kau yang Lain (KAAL) garapan Anto Galon yang meraih penghargaan Police Movie Award (6/7), pemberangkatan Kloter Haji (28/7).

Dari dunia Islam internasional, informasi mengenai kondisi terkini pengungsi Rohingya serta konflik Palestina-Israel masih menjadi hal dominan untuk diperbincangkan. Namun demikian, pembahasan mengenai Rohingya menjadi menarik ketika Dewan Dakwah menyajikan narasi yang mengungkap bagaimana kepedulian negara di luar Indonesia semisal Turki dan Chechnya. Sudut pandang pengambilan dua negara tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Turki, Erdogan, menjadi pemimpin yang cukup mendapatkan tempat bagi sebagian umat Islam di Indonesia. Parahnya, hal ini sering dikontraskan dengan Presiden Jokowi yang seolah tidak cukup peduli dengan kondisi umat Islam secara global dan bahkan cenderung dikonstruksi sebagai musuh bagi umat Islam di Indonesia. Diluar informasi seputar dunia Islam terkini, dewan-dakwah.or.id juga menyajikan

narasi seputar pro dan kontra Perppu Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah (bahasan ini akan dikaji pada sub bab berikutnya: Organisasi Kontemporer dan respon terhadap Perppu Ormas).

Hal yang sama terkait dengan isi website tidak jauh berbeda pada mta.or.id yang berbasis di Surakarta. Dalam 3 bulan terakhir didapati 58 postingan di mta.or.id. Dari ke 58 postingan tersebut, 100% berisi tentang aktivitas yang dilakukan oleh MTA, baik berupa aktivitas sosial maupun keagamaan. Salah satu contohnya sebagaimana terlihat dalam berita yang terkait dengan kegiatan Silatnas 3 yang berlangsung di Stadion Manaham, baik mulai persiapan, saat acara maupun pascaacara.

Tidak hanya itu, dalam kegiatan hari Raya Idul Adha 1438 H, mta.or.id menyajikan lima berita terkait dengan aktivitas MTA selama Idul Adha, mulai dari pelaksanaan sholat, penyembelihan sampai dengan rekapitulasi kontribusi MTA dalam perayaan hari Raya Idul Adha yang mencapai 34,5 M secara nasional. Alih-alih mencoba memberikan counter narasi terhadap radikalisme, website yang dikelola oleh organisasi Islam kontemporer malah disibukan dengan aktivitas organisasi mereka. Padahal sebagai sebuah website yang resmi, website tersebut harusnya mampu menyajikan narasi yang mampu memberikan cara pandang mengenaigerakan violent extrimisme maupun radikalisme.

Sejalan dengan apa yang terjadi pada organisasi Dewan Dakwah dan MTA, Hidayatullah sebagai organisasi Islam yang berdiri pada 1973 pun melakukan hal yang sama, konten aktivitas internal organisasi sangat mendominasi laman website yakni 32 dari 37 konten. Namun demikian, karakter dari hidayatullah.com

ini agak berbeda dibandingkan dengan dewandakwah.or.id maupun mta.or.id. Dalam website Dewan Dakwah ada perimbangan sajian yang tidak hanya berupa kegiatan internal organisasi, namun juga menyajikan informasi seputar dunia Islam baik dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri semisal tersaji terkait film "Aku Adalah Kau Yang Lain" serta sikap Dewan Dakwah terhadap Perppu Ormas. Terkait dengan MTA hasil analisis data selama 3 bulan menunjukkan bahwa MTA sama sekali tidak memberikan respon terhadap kondisi kekinian yang terjadi pada dunia Islam baik dalam maupun luar negeri, termasuk didalamnya adalah sikapnya terhadap Perppu Ormas maupun bencana kemanusiaan di Rohingya dan konflik Israel-Palestina. Dengan demikian, 100% narasi yang MTA bangun adalah pada penguatan dan eksistensi internal organisasi.

Lain halnya dengan Hidayatullah yang cukup dominan porsi berita internal organisasi yakni mencapai 86%, dalam kurun tiga bulan, Hidayatullah sama sekali tidak memberikan respon terhadap fenomena terkini yang terjadi pada dunia Islam nasional maupun internasional kecuali respon mereka terhadap Perppu ormas dan penguatan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Padahal, isu mengenai Rohingya dan Palestina adalah hal yang sangat menarik untuk diberitakan serta mampu menyita publik Indonesia.

Wacana yang sedikit berbeda dilakukan oleh suara-islam.com. Sebagai media yang dikelola oleh Forum Umat Islam (FUI), dalam kurun waktu tiga bulan, suara-islam.com mampu memproduksi 834 postingan. Dari postingan yang ada tersebut, hanya sebanyak 4% atau sekitar 32 postingan yang menginformasikan kegiatan organisasi. Berita internal yang

dimuat seperti penjelasan FUI kepada Pimpinan DPR terkait kasus penggrebakan kantor LBH Jakarta yang diduga terdapat aktivitas PKI. Selain itu, suara-islam.com juga memberikan liputan tentang Victor Laiskodat yang diduga melakukan penghinaan terhadap Islam dan beberapa partai politik.

Pada bagian lain, suara-islam.com tidak hanya menampilkan berita seputar kegiatan internal FUI, namun juga mencakup kegiatan/berita yang dilakukan oleh media yang lain. Hal ini nampak dalam salah satu artikel berjudul "Dewan Dakwah Terjunksan 103 Dai ke Aceh hingga Merauke" yang diunggah pada 29 September 2017 serta "Bela Rohingya, Dewan Dakwah Serukan Jihad Multidimensi" pada berita 6 September 2017. Tidak hanya organisasi kontemporer, dari sisi organisasi mainstream, baik Muhammadiyah maupun NU, terdapat beberapa berita seputar aktivitas organisasi Islam mainstream tersebut. Sajian liputan tersebut dapat dilihat dari pemberitaan pembangunan museum Muhammadiyah senilai 300 miliar yang menyita perhatian Presiden.

Pada bagian yang lain, secara umum, suara-islam.com juga menyajikan beragam informasi seputar dunia Islam baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri semisal kasus penolakan Perpu Ormas, pro dan kontra kebijakan Full Day School, kekerasan yang terjadi di Rohingnya maupun konflik Palestina-Israel.

Dalam perspektif ekonomi politik media, peneliti berasumsi bahwa motif yang sebenarnya dibawa oleh suara-islam.com bukan hanya ideologi semata tapi juga sebagai ekonomi. Keberadaan berita yang tidak hanya menyajikan kegiatan internal organisasi FUI diperlukan dalam rangka menunjang keberlanjutan dari website suara-islam.com tersebut

dari aspek audiens. Menurut hemat peneliti suara-islam.com sadar betul bahwa masa depan dari keberlangsungan website tersebut sangat tergantung pada audiens yang mengkonsumsi teks mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suara-islam.com telah melakukan praktik komodifikasi.

Komodifikasi dalam perspektif Mosco (2011) bermakna bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Memang terasa aneh, karena produk media umumnya adalah berupa informasi dan hiburan. Sementara kedua jenis produk tersebut tidak dapat diukur seperti halnya barang bergerak dalam ukuran-ukuran ekonomi konvensional. Aspek *tangibility*-nya akan relatif berbeda dengan 'barang' dan jasa lain.

Kendati keterukuran tersebut dapat dirasakan secara fisik, tetap saja produk media menjadi barang dagangan yang dapat dipertukarkan dan berilai ekonomis. Dalam lingkup kelembagaan, awak media dilibatkan untuk memproduksi dan mendistribusikannya ke konsumen yang beragam. Boleh jadi konsumen itu adalah khalayak pembaca media cetak, penonton televisi, pendengar radio, bahkan negara sekalipun yang mempunyai kepentingan dengannya. Nilai tambahnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana produk media memenuhi kebutuhan individual maupun sosial.

Dalam amatan peneliti, terdapat dua komodifikasi yang telah dilakukan oleh suara-islam.com yakni, komodifikasi konten dan komodifikasi audiens. Komodifikasi konten dilakukan dengan cara mengakomodir semua organisasi Islam (baik mainstream maupun kontemporer) untuk masuk kedalam

website dalam bentuk pemberitaan. Suara-islam.com juga mengangkat isu yang dianggap sensitif oleh umat Islam mayoritas di Indonesia semisal konflik Palestina dan pengungsi Rohingya.

Pada aspek komodifikasi audiens, pengelola suara-islam.com melihat bahwa organisasi Forum Umat Islam (FUI) diharapkan mampu merangkul semua anggota yang berada didalam organisasi Islam tertentu. Pembentukan audiens yang demikian tentunya sangat menguntungkan bagi suara-islam.com dalam hal mereka yang akan mengunjungi website tersebut. Pemberitaan yang bersumber dari Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Parmusi serta organisasi Islam lainnya, mampu memunculkan kelas pembaca yang merupakan simpatisan dari ormas Islam tertentu menjadi loyal dengan suara-islam.com

1. Penolakan Perppu Ormas dalam Website Organisasi Kontemporer

Berdasarkan data dari bulan Juli-September 2017, dari website organisasi kontemporer ditemukan beberapa postingan yang berkaitan dengan penetapan Perppu Ormas oleh Pemerintah sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Nama website	Jumlah teks
1	dewandakwah.or.id	4
2	hidayatullah.or.id	2
3	www.majelismujahidin.com	0
4	mta.or.id	0
5	www.suara-islam.com	33

Tabel 4.1 Frekuensi Berita Perppu Ormas Juli-September 2017

Secara umum, dapat kita lihat bahwa website yang paling dominan memposting permasalahan Perppu adalah suara-islam.com (33 kali), disusul dewandakwah.or.id (4 kali) dan terakhir hidayatullah.or.id (2 kali). Namun demikian, hal berbeda dilakukan oleh mta.or.id dan majelismujahiddin.com dalam menyikapi penetapan Perppu Ormas No 2 tahun 2017. Kedua media tersebut sama sekali tidak memberikan ulasan mengenai Perppu yang menuai kontroversi tersebut.

Beberapa alasan bisa jadi memberikan deskripsi mengapa baik MTA maupun Majelis Mujahiddin tidak menurunkan tulisannya. *Pertama*, berdasarkan wawancara dengan pengelola mta.or.id didapatkan penjelasan bahwa salah satu prinsip yang dipegang oleh redaksi adalah tidak menyebarkan informasi yang bersumber dari internal MTA. Dengan demikian, pemberitaan apapun yang diunggah harus berasal dari kontributor internal MTA dan kontributor tersebut adalah anggota cabang ataupun ranting MTA di daerah yang tersebar di Indonesia.

Kedua, MTA sangat menghindari pemberitaan politik, hukum dan kriminal. Asumsi peneliti, penetapan Perppu masuk dalam ranah politik dan hukum. Untuk itu, MTA, meskipun bagian dari ormas, menghindari produksi konten terkait dengan masalah tersebut. *Ketiga*, frekuensi unggahan. Sebagaimana data pada tabel 1 bahwa dalam kurun waktu 3 bulan, majelismujahiddin.com sama sekali tidak melakukan produksi konten di website. Hal ini menunjukkan bahwa MMI tidak cukup aktif dalam mengelola website. Dengan demikian, penggunaan website sebagai penyebar ideologi maupun pandangan organisasi tidak dilakukan dengan maksimal.

Setelah mengetahui seberapa banyak frekuensi pemberitaan Perppu Ormas muncul, lantas bagaimanakah respon mereka menyikapi Perppu Ormas No 2 tahun 2017? Secara umum, ketiga organisasi Islam kontemporer yakni Dewan dakwah, Hidayatullah,

FUI menolak penetapan Perppu Ormas No 2 tahun 2017 karena dianggap mencederai semangat reformasi dalam rangka kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat. Menurut pandangan ketiga organisasi tersebut, seharusnya bukan pemerintah selaku lembaga eksekutif yang berwenang untuk membubarkan sebuah ormas, namun ranah pengadilan lah sebagai lembaga yudikatif yang bertugas menilai dan memutuskan penegakan konstitusi dan undang-undang.

Dalam pemberitaannya, secara jelas organisasi Hidayatullah menegaskan menolak penetapan Perppu Ormas No 2 tahun 2017 sebagaimana diungkapkan Ketua Biro Hukum DPP Hidayatullah, Dr Dudung A. Abdullah, MH (20 Juli 2017):

“Dudung menilai, Perppu No.2/2017 memberikan peluang demikian lebar bagi pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk langsung mencabut izin kegiatan Ormas, melakukan pembubaran ormas dengan azas *contrarius actus* bahkan mempidanakan setiap pengurus dan anggota ormas yang dilarang sebagaimana dimuat dalam Pasal 82A. Asas *contrarius actus* merupakan sebuah kewenangan pemerintah selaku pembuat keputusan untuk memberikan evaluasi hingga mencabut keputusan yang dibuatnya. Dalam hal ini keputusan menerbitkan izin pendirian ormas. Dengan dimasukkannya asas tersebut di Perppu, pemerintah dapat mencabut izin pendirian alias pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) tanpa melalui pengadilan. â€œIni jelas bertentangan dengan hak masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan turut serta dalam organisasi masyarakat”.

Lebih lanjut, Hidayatullah melalui Dudung menegaskan bahwa dasar kelahiran Perppu No.2/2017 juga dianggap bertentangan dengan UUD 45, khususnya Pasal 22 (1), dimana di sana dengan tegas dinyatakan bahwa Penetapan Perppu oleh Presiden adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Terkait dengan Perppu tersebut, Hidayatullah mempertanyakan

kegentingan apa yang mendorong pemerintah menerbitkan Perppu tersebut?

Namun demikian, meskipun menolak Perppu No 2/2017, Hidayatullah melalui Syaifullah Hamid selaku Anggota Dewan Pengurus Pusat melalui keterangan tertulisnya memberikan pandangan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 untuk menggantikan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan seharusnya memuat spirit pembinaan, bukan kesan upaya pembubaran bahkan pemusnahan. Bahkan ia mempertanyakan apakah dengan ormas dijatuhi sanksi administratif pembubaran karena dianggap melakukan tindakan yang dilarang terus bagi setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurusnya juga secara otomatis akan dijatuhi sanksi pidana atau dipidana apabila tidak berhenti jadi anggota dan atau atau pengurus Ormas tersebut? Langkah yang diusulkan oleh Hidayatullah tersebut cenderung lebih menggunakan pendekatan persuasif dari pada pendekatan represif melalui Perppu Ormas No 2/2017 ini.

Sejalan dengan yang dilakukan oleh Hidayatullah, organisasi Islam Dewan Dakwah pun memberikan pandangan serupa yakni menolak Perppu Ormas karena dianggap akan menisbikan keberadaan pengadilan dalam pembubaran ormas dan serta belaku sewenang-wenang. Dewan Dakwah berpendapat bahwa harusnya pemerintah menjalan UU No 17/2013 tentang Ormas dalam kaitannya penindakan terhadap ormas yang berseberangan dengan Pancasila.

Melalui Wakil Sekretaris Umumnya, Dewan Dakwah yang diwakili oleh Taufik Hidayat menjelaskan bahwa UU No. 17/2013 tentang Ormas telah menjelaskan bahwa apabila Pemerintah menganggap ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka pemerintah harus terlebih lebih dulu melakukan langkah persuasif atau pembinaan, memberi peringatan

tertulis, menghentikan bantuan, dan menghentikan kegiatan (pembekuan). Tahapannya selanjutnya, apabila ormas tersebut masih juga melanggar, maka pemerintah dapat mengajukan pembubaran ormas tersebut ke pengadilan. Prosedur yang sedemikian rupa diatur dalam UU Ormas, merupakan penjabaran dan implementasi asas keadilan yakni mendengarkan keterangan kedua belah pihak secara hukum, baik itu pemerintah maupun ormas yang akan dibubarkan. Lebih lanjut, kekhawatiran dalam benak Dewan Dakwah adalah adanya upaya untuk mengadu domba antara Presiden dengan umat Islam sebagaimana dalam judul beritanya pada 29 Juli 2017 yakni "Dewan Dakwah Khawatir Presiden Diadu Domba melalui Perppu Ormas"

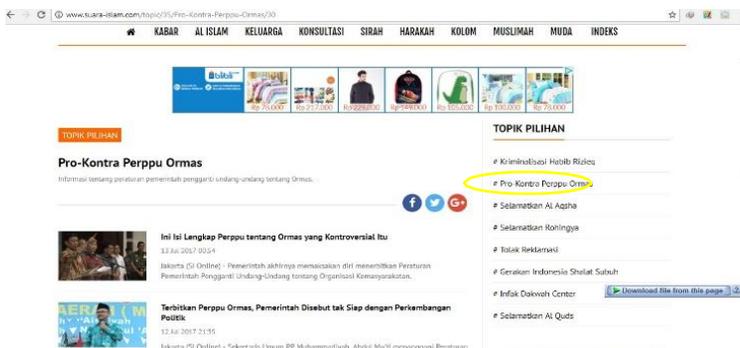
"Dewan Dakwah justru khawatir bahwa dibalik penerbitan Perppu Ormas tersebut, Presiden Joko Widodo berada dalam situasi dan posisi yang tidak independen dalam memutuskan kebijakan, melainkan berada dalam pengaruh tokoh-tokoh sentral (para elit politik disepularannya) yang memiliki agenda-agenda tersembunyi dan rencana jahat"

Yang menarik adalah website suara-islam.com yang merupakan media organisasi Forum Umat Islam (FUI) yang mengunggah 33 berita terkait dengan penetapan Perppu Ormas. Bahkan secara khusus, suara-islam.com men- cantumkan #Pro-Kontra Perppu Ormas sebagai Topik Pilihan.

Gambar 4.1 Tampilan Website suara-islam.com

Namun demikian, meskipun sebagai sebuah organisasi resmi yang mengelola media online, FUI tidak secara tegas menyatakan penolakan terhadap Perppu Ormas No 2/2017 dalam postingan yang diunggah di webnya. Hampir disemua postingannya, FUI lebih menonjolkan nada penolakan tersebut yang berasal dari organisasi Islam lainnya semisal Persis (26/7), Hidayatullah serta beberapa nominalisasi seperti Aliansi Ormas Islam serta Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat (20/10). Dasar penolakan yang dipahami hampir sama dengan pandangan di Dewan Dakwah.

Padahal dalam kajian yang dilakukan oleh Fahmi (2015) menunjukkan bahwa suara-islam.com adalah media Islam bagi mereka yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI). Menjadi aneh bagi peneliti adalah ketidakberanian redaksi suara-islam.com untuk menolak Perppu Ormas No 2/2017 jika dianggap masalah yang penting dan mencederai semangat reformasi. Tidak hanya itu, untuk menunjukkan bahwa penolakan Perppu Ormas tidak hanya berasal dari organisasi Islam semata, suara-islam.com juga menggunakan nominalisasi DPR serta Komnas Ham untuk mendukung gagasan mereka yang menolak Perppu



Ormas tersebut. Bahkan secara tegas komentar dari Komnas Ham tersebut tersaji dalam suara-islam.com (25/10) sebagai berikut.

Ini dapat digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara yang mengkritisi pemerintah dengan dalih 'anti' Pancasila. Ini mengancam masa depan demokrasi Pancasila. Indonesia ber-potensi diantarkan ke pintu gerbang otoritarianisme. Bahkan, menurut suara-islam.com, salah seorang Komisioner Komnas HAM pada saat orasi demo 287 mengatakan bahwa keluarnya Perppu Ormas tersebut dianggap cacat prosedural dan harus dicabut. "Saya tegaskan, Perppu Ormas adalah cacat karena bangsa kita tidak dalam keadaan genting. Indonesia aman-aman aja," ujar Pigai dalam orasinya di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (28/07).

Natalius Pigai adalah anggota Komnas HAM yang berasal dari Papua dan beragama Kristen. Namun demikian, ia berhasil mendapatkan simpati dari umat Islam ketika menyampaikan kritik terhadap upaya 'kriminalisasi' yang dilakukan terhadap beberapa ulama di Indonesia. Dengan demikian, kehadirannya dalam aksi penolakan Perppu Ormas tersebut semakin menguatkan kedekatannya terhadap sebagian umat Islam di Indonesia.

2. Sikap dan Pandangan terhadap Pancasila

Dalam kurun lima tahun terakhir, terlebih pasca berlangsungnya pilpres 2014, wacana untuk membenturkan antara Islam dengan Pancasila berjalan dengan sangat massif. Upaya pendiskriditan beberapa organisasi Islam dengan menuduh bahwa mereka anti terhadap Pancasila lalu berupaya mengubah dasar negara dengan Islam bukan didasarkan pada sesuatu yang sifatnya filosofis dan ideologis, tapi terkadang hanya didasarkan pada perbedaan pandangan politik semata. Disisi yang lain, organisasi Islam mainstream semisal NU mengklaim bahwa Pancasila sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Klaim sepihak tersebut,

terkadang digunakan untuk 'memukul' organisasi Islam diluar mereka. Lantas, bagaimanakah sebenarnya pandangan dan sikap dari organisasi Islam kontemporer dengan Pancasila? Apakah mereka menolak Pancasila dan berupaya untuk menggantinya? Ataukah Pancasila dianggap sudah seiring sejalan dengan garis besar organisasi kontemporer tersebut?

Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan diatas, tim peneliti mencoba memperluas unit analisis dokumentasi teks yang semula hanya 3 bulan dilengkapi dengan tambahan data sekunder lainnya untuk memperkuat pembahasan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa organisasi Islam kontemporer menakini Pancasila sebagai dasar negarayang tidak bertolak belakang dengan Islam. Hal ini sebagaimana yang dituliskan oleh M. Natsir sebagai sebagai Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia kala itu dalam "Tempatkan Kembali Pancasila pada Kedudukannya yang Konstitusional"¹ yang secara umum mengkritik sikap negara pada saat itu (1980) yang hendak menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Natsir beranggapan bahwa kebijakan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal akan merubah makna dan fungsi yang sebenarnya dari Pancasila sebagai titik temu dan pemersatu dalam koridor Bhineka Tunggal Ika. Paradoksnya, bagi Natsir, Pancasila akan menyingkirkan ciri khas yang telah dihayati dari zaman ke zaman oleh beberapa golongan jauh sebelum Pancasila lahir. (Bawazier, 2015) – Jalan Tengah

¹ <http://hidayatullah.or.id/read/berita-utama/2017/10/26/menerapkan-pancasila-dalam-kehidupan-berorganisasi/>

Demokrasi. Sejalan dengan Natsir, Husein Umar (Reformata, 2006) juga menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara merupakan kesepakatan yang tidak perlu diotak-atik lagi.

Pada bagian yang lain, Hidayatullah sebagai organisasi Islam yang secara formal kelembagaan lahir pada tahun 2000 secara tersirat maupun tersurat juga menyakini bahwa Pancasila adalah dasar negara yang harus dirawat kemurniaannya². Bukan hanya dalam tataran konsep semata, Hidayatullah juga mengklaim bahwa organisasi Hidayatullah senantiasa menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. "Secara substantif Hidayatullah sangat Pancasila", demikian kata Anggota Dewan Muzakarah Hidayatullah Anshar Amirudin. Hal tersebut terwujud dalam berbagai macam aktivitas keseharian yang dilakukan oleh Hidayatullah yang merupakan penjiwaan dari Pancasila sila ke-empat misal tercermin pada mekanisme musyawarah dalam membahas permasalahan untuk mencapai mufakat. Lebih lanjut, Hidayatullah juga menempuh istikharah dan istisyyarah³ sebagai bentuk manifestasi ketauhidan kepada Allah SWT dalam menjalankan sila pertama. Namun demikian, dalam banyak kesempatan, Hidayatullah selalu menekankan bahwa Pancasila sebenarnya adalah warisan dari ulama Indonesia semisal Ki Bagus serta Wahid Hasyim. Dengan demikian, pada dasarnya sudah sejak awal perumusan

² <http://hidayatullah.or.id/read/ketua-umum/2017/06/09/merawat-kemurnian-pancasila-sebagai-dasar-negara/>

³ Secara istilah, istisyyarah adalah meminta pendapat orang yang berilmu.

dasar negara, Islam sangat akomodatif dengan keyakinan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara.

Namun demikian, baik Hidayatullah maupun Dewan Dakwah memandang perlunya memurnikan kembali tafsir Pancasila sebagai dasar negara⁴. Menurut dua organisasi tersebut telah terjadi distorsi makna yang luar biasa dalam memaknai Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dijelaskan oleh Adian Husaini.

Hal tersebut misal terlihat dari tafsir sekular Pancasila, misalnya, dilakukan oleh konsep Ali Moertopo, ketua kehormatan CSIS yang sempat berpengaruh besar dalam penataan kebijakan politik dan ideologi di masa-masa awal Orde Baru. Mayjen TNI (Purn) Ali Moertopo yang pernah menjadi asisten khusus Presiden Soeharto merumuskan Pancasila sebagai "Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia". Tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, Ali Moertopo merumuskan, bahwa diantara makna sila pertama Pancasila adalah hak untuk pindah agama. "Bagi para warganegara hak untuk memilih, memeluk atau pindah agama adalah hak yang paling asasi, dan hak ini tidak diberikan oleh negara, maka dari itu negara RI tidak mewajibkan atau memaksakan atau melarang siapa saja untuk memilih, memeluk atau pindah agama apa saja."

Pada bagian yang lain, Pater Beek S.J., juga merumuskan makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsep yang netral agama, dan tidak condong pada satu agama. Ia menggariskan tentang masalah ini:

⁴ <https://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhir-pekan/read/2011/05/16/3640/menjernihkan-tafsir-pancasila.html>

“Barang siapa beranggapan Sila Ketuhanan ini juga meliputi anggapan bahwa Tuhan itu tidak ada, atheisme (materialisme); atau bahwa Tuhan berjumlah banyak (politeisme), maka ia tidak lagi berdiri di atas Pancasila. Pun pula jika orang beranggapan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu hanya tepat bagi kepercayaan Islam atau Yahudi saja, misalnya, maka orang semacam itu pada hakikatnya juga tidak lagi berdiri di atas Pancasila.”⁵

Padahal, jika dicermati dengan jujur, rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa ada kaitannya dengan pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bung Hatta yang aktif melobi tokoh-tokoh Islam agar rela menerima pencoretan tujuh kata itu, menjelaskan, bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah, tidak lain kecuali Allah. Sebagai saksi sejarah, Prof. Kasman Singodimedjo, menegaskan: “Dan segala tafsiran dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu, baik tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya sesuai betul dengan tafsiran yang diberikan oleh Islam.” (Lihat, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal.123-125.)

Lebih jelas lagi adalah keterangan Ki Bagus Hadikusuma, ketua Muhammadiyah, yang akhirnya bersedia menerima penghapusan “tujuh kata” setelah diyakinkan bahwa makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tauhid. Dan itu juga dibenarkan

⁵ PaterBeek, SJ: *Larut Tetapi Tidak Hanyut*. Penulis: *J.B. Sudarmanta*. Penerbit: OBOR, 2008

oleh Teuku Mohammad Hasan, anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Hatta untuk melunakkan hati Ki Bagus⁶.

Sejalan dengan apa yang diyakini oleh Hidayatullah dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, organisasi Majelis Tafsir Al-Quran juga menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang harus dijaga dan senantiasa dikenalkan kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat pada keterlibatan Satgas MTA bersama-sama dengan ormas dari berbagai elemen dalam kegiatan Pawai Simpatik untuk menggelorakan semangat Pancasila. Meskipun tidak secara tersurat bahwa MTA menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dari beberapa teks yang diproduksi (baik berita maupun artikel), melalui pernyataan narasumbernya nampak jelas bahwa MTA menyakini Pancasila sebagai dasar negara. Semisal nampak pada kutipan dari pidato Presiden Jokowi dalam Silatnas 3 di Gelora Manahan pada September 2017.⁷

“Saya mengajak kepada keluarga besar MTA di seluruh penjuru Tanah Air untuk bergandengan tangan dengan elemen-elemen bangsa dan komponen-komponen bangsa yang lain. Seperti tadi disampaikan Ustadz Drs Ahmad Sukina, kita harus menyebarkan kasih sayang, dakwah yang disebarkan berpakasih sayang, persaudaraan, dan kerukunan untuk terus menjaga NKRI yang mempersatukan kita semua. **Menjaga Pancasila dasar Negara kita, rumah kita bersama**, terus menjagabhinnekatunggal ika, yang bukan saja tali pengikat dalam kemajemukan, kebhinekaan, dan keragaman, tetapi juga patut kita banggakan untuk kita sebar ke Negara lain,”

⁶ *Ki Bagus* Hadikusuma: etika dan regenerasi kepemimpinan. Author, *Siswanto Masruri*. Publisher, Pilar Media, 2005

⁷ <https://mta.or.id/presiden-jokowi-mari-bergandengan-tangan-sebar-kasih-sayang/>

Bukan hanya menggunakan klaim dari Presiden, sikap MTA tersebut juga nampak pada ungkapan dari Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yg hebat dan ulamalah yang membuatnya. Sehingga panglima TNI menegaskan Pancasila sebagai ideologi negara, jangan pernah diubah lagi⁸. Dari beberapa narasi yang diproduksi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa MTA mendukung penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terlebih, dari penelusuran dokumentasi yang dilakukan, sama sekali tidak menemukan teks penolakan Pancasila sebagai dasar negara oleh MTA.

Namun demikian, sikap ketiga organisasi Islam tersebut seiring sejalan dengan terkait dengan adanya klaim sepihak dari beberapa orang yang merasa paling Pancasila dan mendiskreditkan kelompok lain diluar mereka sebagai anti Pancasila. MTA misalnya, mengemukakan teks "Siapa yang bisa mengeluarkan sertifikasi pada manusia Pancasila sejati"⁹ "Allah Tuhan Yang Maha Esa sudah mengajari umat Islam untuk selalu konsekwen di dalam perbuatan baik, perbuatan iman dan amal sholih, perbuatan Taqwa kepada Allah, dan bukan sekedar perdebatan dalam lomba cerdas cermat atau lomba perdebatan untuk memelintir-melintir kata-kata. Bukan sekedar kehebatan membangun Opini namun sesuatu yang nyata-nyata membangun ketenteraman dan kebahagiaan

⁸ <https://mta.or.id/panglima-tni-pancasila-adalah-dasar-negara-yang-hebat-dan-ulamalah-yang-membuatnya/>

⁹ <https://mta.or.id/siapa-yang-bisa-mengeluarkan-sertifikasi-pada-manusia-pancasilais-sejati/>

Hidup..... Marilah kita kembali bertanya, siapakah diantara kita yang masih layak menjadi YURI dan pantas diberi kehormatan untuk memberikan SERTIFIKASI pada manusia-manusia PANCASILAIS SEJATI.”

Pandangan MTA jelas bahwa klaim paling Pancasila tidak cukup hanya diwujudkan dalam argumentasi tapi lebih pada sikap dan perbuatan (aksi), terlebih dalam berbagai kegiatan seremonial semata. Pancasila, jelasnya, harus diwujudkan dan implementasi kehidupan sehari-hari. Menyitir pendapat Ketua MPR Zulifli Hasan dalam website MTA yang mengharapkan masyarakat tidak terlalu mudah menghakimi seseorang atau sebuah kelompok sebagai golongan anti-Pancasila. Lanjutnya, masyarakat yang termasuk golongan anti-Pancasila adalah mereka yang sama sekali tidak memedulikan atau menghargai hak orang lain.¹⁰

Hidayatullah dan Dewan Dakwah pun serupa. Mereka menolak dominasi pihak-pihak literal yang mengaku paling Pancasila. Ukuran sikap Pancasila hanya dilihat dari merayakan hari lahirnya, mengganti profil di sosial media seraya menuliskan Saya Indonesia, Saya Pancasila. Klaim yang demikian mengisyaratkan bahwa barisan tersebut baru pada tingkat tekstual. Sajian tersebut nampak pada kolom *ghazwul fikr* Menepuk Memori, Mengembalikan Makna Pancasila¹¹. Bagi Hidayatullah, mengaku-aku Pancasila, sembari menuding pihak

¹⁰ <https://mta.or.id/ketua-mpr-zulkifli-hasan-menyampaikan-tausyiah-di-pengajian-umum-ahad-pagi/>

¹¹ <https://www.hidayatullah.com/artikel/ghazwul-fikr/read/2017/06/05/117969/menepuk-memori-mengembalikan-makna-pancasila.html/2>

lain anti Pancasila justru mengaburkan makna sebenarnya dari Pancasila. Harusnya pembuat klaim tersebut bisa menempatkan pemaknaan terhadap Pancasila berada pada makna yang hakiki. Lebih lanjut, bukan menjalankan ajaran agama yang akan membuat negeri ini pecah seperti yang ditakutkan dan ditudingkan.

Bagi Dewan Dakwah, melalui statment Zulkifli Hasan dalam peringatan Mosi Integral M Natsir dijelaskan bahwa jika ada tuduhan umat Islam anti Pancasila, anti kebinekaan bahkan anti NKRI, maka sesungguhnya kelompok tersebut tidak memahami sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang diwarnai pengorbanan umat Islam.¹²

Dengan demikian, cukup memprihatinkan ketika ada kelompok yang mengklaim dirinya “paling Pancasila” dan paling cinta NKRI lalu menafikan kelompok lain, terkhusus umat Islam. Sikap tersebut justru dapat membahayakan karena dapat memicu disintegrasi bangsa. Bahkan secara tegas, Mohammad Siddiq selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menyayangkan sikap DPP Partai Nasdem yang masih membela kadernya Viktor Laiskodat terkait dengan pidatonya yang menuai konflik pada 1 Agustus 2017 di NTT.

Kelompok-kelompok ekstremis ini ada mau bikin satu negara lagi, dong tidak mau di negara NKRI, dong mau ganti dengan nama negara khilafah. Negara khilafah itu berarti ... (bahasa daerah) dengan NKRI. Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah. Dan celaknya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok

¹² <https://dewandakwah.or.id/zulkifli-hasan-mosi-integral-m-natsir-bukti-umat-islam-cinta-nkri/>

ini ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor 1 Gerindra. Partai nomor dua itu namanya Demokrat. Partai nomor tiga namanya PKS. Partai nomor empat namanya PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran.

Menurut Dewan Dakwah, ungkapan tersebut tersebut, menurutnya bisa mengarah terjadi tirani minoritas. Dapat membahayakan kehidupan demokrasi dan kenegaraan di Indonesia. Dan ini jelas mengancam NKRI dan Kebhinekaan serta sistem kerukunan masyarakat plural NKRI¹³.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa organisasi Islam kontemporer menyakini Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks konstitusional sebagaimana pemahaman M. Natsir. Namun demikian, terdapat titik tekan yang utama yang diinginkan oleh organisasi kontemporer yakni penafsiran Pancasila harus dimurnikan kembali sebagaimana yang dipahami oleh Panitia Sembilan. Disamping itu, organisasi Islam juga memberikan kritik terhadap pihak yang mengklaim sebagai pihak yang paling Pancasila lalu menuding organisasi lain (khususnya umat Islam) sebagai pihak yang anti Pancasila dan berupaya mengganti dasar negara.

13

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/08/08/oud12q330-dewan-dakwah-sesalkan-nasdem-bela-kesalahan-viktor-laikodat>

bab VI

Populisme Website Islam Non-afiliasi: Komodifikasi dan Reproduksi Konten

BAB ini akan membahas laman organisasi Islam nonafiliasi secara lebih mendalam dari sisi konten yang dikaitkan dengan wacana radikalisme. Dari penelusuran data, dari bulan Juli-September 2017, frekuensi produktivitas laman organisasi Islam nonafiliasi dapat terlihat dalam tabel berikut:

No	Nama website	Jumlah teks
1.	Eramuslim.com	2004
2.	VOA-Islam.com	1799
3.	Portal-islam.id	1611
4.	Dakwatuna.com	760
5.	Arrahmah.com	667
6.	Muslimoderat.net	46
7.	Thoriquna.id	4

Tabel 4.2 Tabel Produktivitas Konten Juli – September 2017

Berdasarkan tabel di atas nampak bagaimana website dari organisasi Islam nonafiliasi tersebut dikelola. Frekuensi pengunggahan informasi di website menunjukkan bagaimana pemanfaatan website tersebut untuk menyampaikan pesan ideologis kepada pembacanya.

Berdasarkan data laman *eramuslim.com*, terdapat 2004 teks unggahan dalam situs mereka. Teks-teks tersebut sangat bervariasi dari berita, artikel, opini, dll. Artinya dari 2004 teks tersebut, tiap bulan mereka memproduksi 668 teks, dan setiap harinya mereka memproduksi sekitar 23 teks, yang dapat dikalkulasikan hampir tiap satu jam mengunggah satu teks kepada pembacanya. Sebuah angka yang tidak sedikit, meskipun tidak dapat disebut sangat produktif juga sebagai sebuah media berbasis dalam jaringan jika dibandingkan dengan media-media siber yang "sekuler" atau tidak berbasis identitas agama [Islam] misalnya, mengingat lalu lintas dalam internet hitungannya tidak lagi harian maupun jam, namun lebih pada hitungan menit, bahkan detik. Tentu saja jika dibandingkan dengan situs-situs media Islam nonafiliasi lainnya, *eramuslim.com* ini merupakan yang paling produktif memproduksi konten baik yang sungguh- sungguh diproduksi oleh sendiri atau hanya mengunggah ulang dari situs lain.

Adapun situs *voaislam.com*, menempati posisi kedua dengan memproduksi jumlah unggahannya mencapai 1799 selama kurun waktu Juli-September 2017, tiap bulan memproduksi sejumlah 599 unggahan, dan setiap harinya memproduksi sekitar 19-20 teks unggahan.

Sementara itu yang menempati peringkat ketiga yaitu laman *portal-islam.id* yang mencapai 1611 unggahan selama tiga bulan. Artinya setiap bulan *portal-islam.id* mengunggah berita, artikel, opini, dll., tidak kurang dari 537, yang berarti setiap hari rata-rata 17 unggahan di laman mereka yang dapat diakses oleh pengguna internet.

Posisi keempat yaitu *dakwatuna.com*, yang memproduksi konten sebanyak 760 unggahan dalam laman mereka. Kelima yaitu *arrahmah.com*, dengan jumlah 667. Keenam adalah *muslimoderat.net* dengan jumlah teks unggahan 46; dan

posisi ketujuh yaitu thoriquna.id, dengan jumlah teks hanya ada 4 unggahan.

Jumlah teks yang diproduksi tersebut sesungguhnya juga menggambarkan bagaimana profesionalitas dari pengelolaan sebuah website yang menggunakan identitas Islam sebagai latar belakang mereka. Apalagi jika dalam tujuannya ingin menjadi media Islam terbesar dan dijadikan rujukan seperti yang diungkapkan oleh dakwatuna.com secara tersurat, jumlah produksi konten harian semestinya berbanding lurus dengan implementasi dalam laman. Secara jumlah produksi konten, secara berturut-turut peringkat pertama hingga ketiga yaitu eramuslim.com, voaislam.com, dan portal-islam.id, kemudian disusul dakwatuna.com menempati peringkat keempat yang relatif cukup tinggi dalam mengunggah berita, artikel dll., diikuti arrahmah.com. Pada saat dilakukan penelitian sedang dilakukan perbaikan terhadap website arrahmah.com secara keseluruhan sehingga memengaruhi *update* unggahan mereka, yang menempati posisi kelima. Selanjutnya situs keenam adalah muslimoderat.net, dan situs terakhir dalam produktifitas teks adalah thoriquna.id.

Media internet merupakan lahan perebutan ruang publik – meminjam istilah dari Jurgen Habermas -- di dunia maya yang seringkali memengaruhi realitas yang terjadi di alam nyata, meskipun tidak selalu, namun praktik kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi sejak satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh praktik-praktik para pelaku di dunia siber tersebut. Apalagi jika berbicara wacana ataupun isu radikalisme. Sudah banyak riset menunjukkan bahwa perubahan seseorang menjadi radikal atau tidak itu tidak sedikit yang dipengaruhi oleh informasi dari media dunia siber. Sebagaimana dikatakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa "Teknologi juga itu menyebabkan orang radikal. Itu tandanya *Lone Wolf* itu. Karena yang mengajarkan itu bukan orang. Mereka membaca di internet

dan sebagainya,” diungkapkan pada saat menyikapi teror yang terjadi di Mapolda Sumatera Utara, dan juga di Masjid Falatehan dekat Mabas Polri pada awal Juli 2017.

Situs peringkat pertama dan kedua yakni eramuslim.com dan voaislam.com akan dianalisis secara tersendiri di bagian lain. Di bagian ini akan dibahas website Portal-islam.id yang merupakan laman yang paling produktif ketiga di kategori situs Islam nonafiliasi berdasar jumlah konten yang diproduksi. Sayangnya portal-islam.id tidak mencantumkan visi, misi, tujuan, siapa redaksi dan alamat redaksi di mana kecuali hanya menampilkan alamat surat elektronik (*email*). Tagline portal-islam.id yaitu “menyuarakan kebenaran”, jika diamati pada unggahan- unggahannya justru banyak berita yang secara judul lebih banyak mengumbar sensasionalitas, provokatif, dan agak susah dikatakan sebagai media yang “mengungkapkan kebenaran” sebagaimana menjadi klaim mereka. Alih-alih mengindahkan etika jurnalistik, portal-islam.id berlaku sebagai hakim yang melakukan *judgment* pada kelompok lain yang berbeda, atau kepada pemerintah di bawah Presiden Jokowi yang lebih banyak dianggap membohongi rakyat.

Unggahan berita yang sensasionalitas, provokatif, terlihat pada *capture* berikut:

The screenshot shows a news article on the website portal-islam.id. The URL is www.portal-islam.id/2017/07/absurd-klaim-saya-indonesia-saya.html. The headline reads: "ABSURDI! Klaim SAYA INDONESIA, SAYA PANCASILA, Tapi Selangkah Lagi Menuju Negara KOMUNIS". Below the headline are four buttons: "Konten tertutup iklan", "Sering melihat iklan ini", "Iklan tidak pantas", and "Tak tertarik pada iklan". The main content area features a composite image. On the left, a photo of a man speaking at a podium with the text "Mendagri Minta Warga Indonesia Tiru Korut yang Hormati Pemimpin". In the center, a photo of Kim Jong-un at a podium with the Indonesian flag and the word "INDONESIA" overlaid. On the right, a black box with red text reads "SAYA INDONESIA ID SAYA KOMUNIS??". Below the image, the text reads: "[PORTAL-ISLAM.ID] Dalam sebuah berita lawas, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua elemen masyarakat Indonesia menghormati pemimpin. Dia lantas memberi contoh bagaimana masyarakat Korea Utara begitu menghormati pemimpinnya." At the bottom, a quote states: "Kita ikuti negara kecil, misal Korut (Korea Utara). Orang dari (anak) kecil sampai orang tua begitu hormat dengan pendiri negara, terhadap ideologi negara..." attributed to "ujar Tjahjo di gedung Kementerian Pertanian, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis, 12 Januari 2017."

Gambar 4.2 Laman portal-islam.id

Judul dari berita tersebut jauh dari sebuah kebenaran, sebagaimana klaim mereka. Mendagri Tjahyo Kumolo, sedang memberikan gambaran bahwa negara Korea Utara saja yang meskipun ideologinya komunis sangat menghormati para pendiri negaranya, mengapa Indonesia yang ideologinya Pancasila justru saat ini muncul beberapa kalangan yang mempertanyakan ideologi bangsanya kembali. Pernyataan Mendagri tersebut justru hanya diambil secara sepotong bahwa Tjahyo Kumolo menganut komunisme. Hal ini merupakan pengabaian fakta lapangan jika mengacu pada kaidah-kaidah jurnalistik yang sebenarnya. Bahkan diakhir pemberitaan portal-islam.id menyatakan seperti berikut:

“Begitu absurdnya revolusi mental yang digaungkan oleh rezim Jokowi yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebuah partai yang merasa paling demokratis, paling Pancasila, paling Indonesia, namun dalam kenyataannya justru akrab dengan ajaran marxisme dan komunisme” (<http://www.portal-islam.id/2017/07/absurd-klaim-saya-indonesia-saya.html>, diakses pada 25 Oktober 2017).



Gambar 4.3 lamanportal-islam.id

Secara judul, isi, bahkan diambil kesimpulan secara serampangan dalam sebuah berita (news) yang diunggah oleh portal-islam.id, alih-alih mengungkapkan kebenaran, justru

lebih dominan berisi tentang *judgement* kepada Mendagri, PDIP, dan Presiden Jokowi. Berita semacam ini lebih berupa propaganda yang tidak berdasar, bahkan mengarah pada kampanye hitam terhadap pemerintahan saat ini yang dituduh membuka ruang bagi komunisme di Indonesia. Unggahan dari laman portal-islam.id pun langsung memperoleh reaksi dari warganet (netizen) melalui akun twitter, yang terprovokasi dengan judul berita tersebut dan bereaksi terhadap pernyataan Mendagri yang diambil secara parsial, tidak utuh.

Lebih lanjut, hasil pengamatan menunjukkan bahwa isi sebagian besar media portal- islam.id tersebut justru mengunggah judul-judul berita yang bombastis dan bermuatan prasangka, contohnya seperti berikut: "Ahok Hina Islam Teroris Diam Saja, Saat Ahok Dipenjara Teroris Merajalela, Ente Pikir Kita Goblok?" (portal-islam.id, 1 Juli 2017), "Agenda Tersembunyi Obama Saat "Mudik" ke Indonesia" (portal-islam.id, 2 Juli 2017)., "Ahmad Dhani: Islam Difitnah! SIAPA YANG UNTUNG dengan TERORISME??? Pake OTAK DOBOL Lu untuk MIKIR" (portalislam.id, 2 Juli 2017). Lalu pada bulan Agustus 2017 menampilkan judul-judul diantaranya berikut ini: "AWAS! JEBAKAN BETMEN Soal AHOK" (portal-islam.id, 6 Agustus 2017), "Allahu Akbar! Mantan Pendeta Penista Islam Yang Pernah Dilaporkan FPI Akhirnya Masuk Islam" (portal-islam.id, 16 Agustus, 2017), "ALHAMDULILLAH.. Jakarta Tanpa Ahok, Sekolah Kembali Diperbolehkan Sembelih Qurban" (portal-islam.id., 21 Agustus 2017). Sementara itu pada bulan September 2017 diantaranya yaitu: "Bagaimana Akhir Kesudahan Teroris Botak yang Bantai Muslim Rohingya? Ini Isyarat Al Quran" dan "Abaikan Perintah, Polisi Izinkan Pengungsi Rohingya Masuk Bangladesh" (Minggu, 3 September 2017), "Allahu Akbar! MESKI DICEGAT DAN DIPERSULIT, Ribuan Massa Tumpah Ruah Bela Rohingya di "Aksi Borobudur" (8 September 2017), "Air Susu Dibalas

Air Tuba... Saat Pemilu Muslim Myanmar Dirayu Dukung Suu Kyi, Saat Berkuasa Muslim Dibantai” (10 September 2017).

Dari beberapa judul di atas tersebut mengindikasikan bahwasanya portal-islam.id sedang berusaha melakukan penguasaan media siber dengan menggunakan idiom-idiom Islam dalam *headline* laman mereka. Islam lebih sebagai dijadikan ideologi politik, demi memenuhi syahwat politik elite di kalangan mereka. Selain itu, hal ini dapat disebut juga sebagai bagian dari populisme Islam (*Islamic populism*) – meminjam istilah Vedi R. Hadiz—sebuah gerakan politik yang menggerakkan umat untuk sebuah gerakan sentimen tertentu atas nama demokrasi. Populisme Islam ini berkembang sebelum dan pasca terjadinya Arab *spring* di sebagian kawasan Arab pada 2013 (Hadiz 2014 & 2016). Gerakan Islam yang menggunakan media siber, demi menggerakkan warganet Muslim untuk mereproduksi konten serupa di akun-akun media sosial mereka ataupun di laman-laman blog yang mereka miliki. Populisme Islam dalam dunia siber (*cyber Islamic populism*) saat ini sedang terjadi, dan makin marak dijumpai dalam laman-laman (*websites*) yang menggunakan identitas Islam sebagai identitas mereka.

Situs portal-islam.id didisain sebagai media propaganda. Sebagai propaganda maka tujuannya menjadi sangat umum yang dimaksudkan untuk mengubah sistem kepercayaan publik luas tanpa harus melampirkan bukti-bukti konkrit, cenderung samar-samar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa makna propaganda yaitu penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu (KBBI *online*). Tidak lagi melihat seberapa reliabel sebuah data maupun fakta di lapangan untuk dijadikan berita yang layak diinformasikan kepada publik luas. Hal tersebut banyak ditemukan dalam berita yang

dimuat oleh portal-islam.id meskipun tidak seluruhnya bersifat seperti itu. Namun sebagai media dalam jaringan yang menggunakan label Islam, tentu hal ini sangat jauh dari semangat nilai-nilai Islam itu sendiri yang menjunjung tinggi kejujuran, *tabayyun (check and recheck)*, tidak memfitnah, untuk menyebut beberapa saja.

Sementara itu dakwatuna.com dan arrahmah.com sebagai laman terproduktif keempat dan kelima dalam kategorisasi Islam nonafiliasi, hadir sebagai laman yang lebih profesional dalam pengelolaan maupun konten berita yang diunggah, meskipun pernah mengalami pemblokiran selama 10 hari oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) karena rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mereka dapat disebut lebih profesional karena secara struktur kelembagaan menampilkan secara utuh dari adanya pimpinan perusahaan, pimpinan redaktur, dewan redaksi, berada di bawah PT (Perseroan Terbatas), sebagai syarat menjadi media yang diakui oleh Dewan Pers. Meskipun ada perbedaan sikap mengenai keanggotaan dalam Dewan Pers antara keduanya. Pengelola dakwatuna.com bersedia menjadi anggota Dewan Pers, bahkan sedang mengurus segala hal yang menjadi persyaratannya, sementara pengelola arrahmah.com tidak merasa perlu masuk sebagai anggota Dewan Pers, karena menganggap tidak penting masuk menjadi anggota atau bagian dari Dewan Pers. Kedua laman ini juga menampilkan alamat redaksi yang dapat dikontak secara jelas dan ada kontak personal dari kedua media tersebut. Peneliti pun dapat melakukan wawancara kepada pimpinan dua situs tersebut. Bahkan diterima dengan ramah di kediaman mereka masing-masing, yang berada di daerah Jakarta Selatan dan Jawa Barat. Hal lain yang dapat disebut secara profesional adalah adanya niatan transparansi keuangan dari kedua pengelola situs tersebut. Kedua pengelola situs tersebut bersedia

mengemukakan pembiayaan yang dikeluarkan setiap bulannya untuk *maintenance* situs mereka. Walau tidak mau menjelaskan sumber-sumber yang terang dan jelas dari mana mereka mendapatkan jumlah nominal dana tersebut, mereka bersedia mengemukakan besaran dana yang minimal dibutuhkan untuk *maintenance* dan honorarium bulanan yang harus dikeluarkan.

Situs keenam dan ketujuh dalam kategori media siber Islam nonafiliasi yaitu muslimoderat.net dan thoriquna.id dengan jumlah konten yang minimalis dari keduanya, memiliki karakter yang berbeda. Laman muslimoderat.net lebih bermaksud menampilkan wajah Islam yang moderat, sebagai ciri khas keberislaman orang Indonesia kebanyakan (arus utama – *mainstream*). Nilai-nilai moderat yang diusung oleh laman muslimoderat.net ini sesungguhnya sangat cocok bagi masyarakat Indonesia. Namun sayangnya cara muslimoderat.net ini tidak luput dari cara pandang yang hanya menampilkan satu wajah moderatisme di Islam Indonesia saat ini. Padahal ada banyak ragam moderatisme Islam yang diusung oleh beberapa ormas Islam. Secara afiliasi keormasan Islam *mainstream*, laman muslimoderat.net tidak mencantumkan sama sekali kepada ormas Islam yang mana mereka berafiliasi. Akan tetapi jika diamati secara detail, laman ini sangat berwajah 'Nahdlatul Ulama', hal ini dilihat dari logo yang digunakan, yang mana terdapat simbol bintang sembilan dan sekilas seperti ada tali melingkar yang divisualisasikan sebagai lambang masjid di atas huruf m dalam logo muslimoderat. Hanya saja, tidak memperoleh konfirmasi dari para pengelola laman ini karena mereka tidak mencantumkan nama-nama pengelola situs ini berikut nihil alamat resmi mereka kecuali alamat surat elektronik yang dicantumkan di bagian redaksi.

Laman thoriquna.id sebagai peringkat terakhir yakni ketujuh dari segi jumlah produktifitas teks ini memiliki karakter tersendiri,

sebagai media siber dalam kategori Islam nonafiliasi. Dari produktifitas teks, laman *thoriquana.id* ini sangat tidak memadai disebut sebagai media yang merepresentasikan media Islam, karena minimnya jumlah yang diunggah dalam laman mereka. Dengan jumlah yang sedikit tersebut, justru *thoriquana.id* ini sikap radikalnya lebih terlihat. Dimana mereka dengan terang-terangan menuliskan makna jihad yang paling utama adalah perang dalam salah satu teksnya. Sementara Nabi Muhammad saw, sendiri menjelaskan bahwasanya jihad paling utama adalah menahan hawa nafsu, yang sering dihubungkan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Hal tersebut dikemukakan oleh Rasulullah saw, sesaat setelah pulang dari peperangan dengan orang kafir Quraisy, yang mana beliau mengungkapkan, "Wahai para sahabat, kita baru saja pulang dari jihad *sughro* (kecil) menuju jihad *akbar* (lebih besar)". Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah saw., apakah jihad akbar tersebut?" Rasulullah saw menjawab: "Jihad akbar tersebut adalah menahan hawa nafsu."

Situs *thoriquana.id* secara produksi konten sangat kecil dan jauh dari sikap profesionalitas media. Konten yang diproduksi pertambahannya sangat lambat, secara *timeline* waktu sampai beberapa minggu baru muncul artikel, opini atau lainnya yang mereka buat untuk audiens pembacanya. Meski jumlahnya sangat kecil, kontennya justru sangat terang-terangan menggunakan istilah-istilah yang mengarah pada permusuhan kepada kelompok agama maupun keyakinan yang berbeda. Sebagaimana penjelasan di atas, idiom jihad dipersepsikan bahwa jihad dengan cara berperang lah yang paling utama. Hal ini jika dibaca oleh mereka yang baru saja belajar Islam tanpa disertai sikap kritis akan sangat membahayakan, karena dapat dijadikan argumen bahwasanya metode jihad yang lain itu tidak utama (*afdhal*). Padahal jika mengerti dan memahami ajaran Islam tentang jihad yang

utama justru bersungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah [9]: 22 dinyatakan bahwa: "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya". Begitu pula keutamaan tentang mencari ilmu pengetahuan ditegaskan dalam Al-Quran surat Sad [38]: 29 yang artinya sebagai berikut: "Ini adalah sebuah Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka menghayati (memerhatikan) ayat-ayat-Nya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran". Sementara di dalam artikel yang dikeluarkan oleh thoriquna.id, di dalamnya disebutkan makna paling utama jihad yakni berperang. Berperang dengan cara "memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam dan umat Islam" tersurat dalam artikel di laman thoriquna.id berjudul: "Jihad Jalan Kami" (dalam artikel "Definisi Jihad, Tujuan, dan Hukumnya," diakses pada...). Pemaknaan terhadap jihad yang terlalu simplistis seperti ini sangat membahayakan terhadap relasi antara umat Islam dengan umat beragama lainnya. Ditambah definisi kafir juga seringkali hanya disematkan bagi mereka-mereka yang bukan menganut agama Islam, seperti umat Kristiani, Yahudi, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu.

Perebutan ruang publik dalam dunia siber yang menggunakan simbol, identitas Islam di Indonesia ini bukannya tanpa alasan. Pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, hampir 87,7% warganya menganut Islam sebagai agamanya. Kedua, kontestasi ideologi --termasuk ideologi Islam-- akan mudah disebarkan dengan biaya murah dengan menggunakan media siber

(internet). Ketiga, besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia yang sudah mencapai 51% atau mencapai 132,7 juta (wearesocial.com 2017) dari total jumlah penduduknya merupakan aset yang sangat besar sebagai ladang pasar ideologi, pasar politik, maupun pasar ekonomi. Keempat, dari 51% pengguna internet tersebut hampir 70%nya adalah generasi Y dan Z, yakni mereka yang berusia 17-35 tahun, usia sangat produktif, yang mana 106 juta adalah pengguna aktif media sosial setiap harinya, yang menghabiskan tidak kurang dari 3 jam 16 menit untuk mengakses media sosial mereka (weare-social.com, diakses pada 30 September Januari 2017).

Berdasarkan argumen tersebut, yang terjadi saat ini adalah bagian dari *psy war* di dunia maya, siapa yang berhasil memenangkan "peperangan" tersebut maka dia yang akan menguasai kaum muda (gen Y dan Z) hari ini untuk kekuasaan satu dua dekade kedepan dan seterusnya. Demi memenangkan pertarungan tersebut, seringkali diabaikanlah etika bermedia, serta aturan-aturan lainnya, karena yang dipentingkan adalah mengubah cara pandang, logika, perspektif kaum muda tersebut untuk dapat mengikuti arus berpikir dari kelompok-kelompok tersebut melalui situs-situs yang mereka miliki.

Rendahnya regulasi dalam permasalahan komunikasi di dunia maya yang dimiliki oleh republik ini menjadikan adanya celah yang dimanfaatkan dan bahkan dimanipulasi oleh mereka yang mempunyai agenda tersendiri dalam imajinasi kebangsaan. Dengan dalih kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, serta kebebasan bersuara, maka ruang publik di dunia maya yang sangat longgar tersebut justru digunakan oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya anti terhadap sistem demokrasi namun justru memanfaatkan ruang demokrasi sebagai saluran diseminasi ideologi 'rongsokan' – meminjam istilah Syafii Maarif—yang justru makin menyudutkan dan merusak Islam. Alih-alih menguatkan citra Islam sebagai

agama yang *rahmatan lil'alam*, justru menambah wajah Islam dalam persepsi publik nasional dan internasional itu makin buruk. Hal ini semakin mengukuhkan bahwa saat ini sedang mengalami era *post truth*, "relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief" (<https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016>, diakses pada 5 November 2017), yaitu "istilah yang berhubungan dengan atau mewakili situasi-situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta yang obyektif". Apa yang coba dihadirkan oleh media-media Islam nonafiliasi seringkali hanya berdasarkan opini dan keyakinan pribadi yang lebih dominan ketimbang mendasarkan pada fakta dan data yang ada di lapangan. Kondisi dan situasi ini memerlukan upaya bersama untuk mengatasinya sehingga tidak makin terjerumus pada pembiaran reproduksi hoax oleh mereka yang menggunakan Islam sebagai identitas dalam mediana.

Munculnya sekian media daring yang menggunakan identitas Islam di Indonesia saat ini tidak lantas mendorong praktik bermedia masyarakatnya menjadi lebih beradab. Bahkan ada kesan yang terjadi adalah kondisi sebaliknya. Ketidakberesan informasi karena melimpahnya media yang tidak dibarengi dengan niatan pengelolaan yang profesional, dengankurang mengindahkan manajemen modern, kaidah-kaidah jurnalistik yang benar, serta rendahnya etika bermedia. Hal ini menyebabkan wajah media Islam nonafiliasi dapat terjerembab ke dalam jurang curam, yang dapat mengakibatkan makin dijauhi oleh audiens. Meskipun situasi tersebut barangkali juga sengaja didisain oleh masing-masing pemilik media tersebut, karena era *post-truth* justru "memenangkan" mereka yang menggunakan "kesesatan" nalar manusia.

A. Responnya Era Muslim terhadap Isu Radikalisme

1. Pancasila, NKRI, dan Negara Khilafah

Respon Eramuslim.com terhadap penilaian pemerintah terkait Pancasila, NKRI, dan Negara khilafah di Indonesia diekspresikan dengan narasi: "Selamat Datang The New Orba". Narasi ini dibangun berdasarkan pernyataan pemerintah, antara lain, pernyataan-pernyataan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin. Salah satu pernyataan yang dikutip adalah bahwa Agama harus sejalan dengan Pancasila. Pemerintah tidak anti dengan paham agama. Namun, paham tersebut harus sejalan dengan Pancasila. Dalam konteks ber-Indonesia paham-paham keagamaan itu harus sejalan dengan Pancasila karena semua agama memahami bahwa Pancasila itu hakekatnya adalah nilai-nilai agama itu sendiri. Jika ada organisasi kemasyarakatan yang mengembangkan paham keagamaan lalu ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara NKRI, misalnya menjadi khilafah, maka itu tidak bisa dimaknai sebagai paham keagamaan semata, tapi sudah merupakan agenda politik. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap". Teks ini dikutip dari pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin saat mengomentari pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai tanggal 19 Juli 2017 oleh Kementerian Hukum dan HAM (Eramuslim.com edisi Kamis, 26 Syawwal 1438 H/20 Juli 2017).

Pendapat senada disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Muhammad Luthfi Hamid, bahwa pengelola sekolah tingkat SMP maupun SMA mengawasi berbagai kegiatan organisasi Rohani Islam agar tidak dimanfaatkan oknum tertentu untuk menyebarkan ideologi radikal. Sebenarnya bukan persoalan Rohani Islam (Rohis)-

nya akan tetapi mereka (kelompok radikal) membidik Rohis sebagai satu segmen untuk mentransformasikan ideologinya. Ditambahkan bahwa masuknya paham atau pandangan radikal di kalangan siswa di antaranya disebabkan minimnya kontrol terhadap kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Konsep Rohis, menurut dia, cukup baik namun jika tidak dibina dan diarahkan langsung oleh otoritas sekolah akan dimanfaatkan pihak lain untuk menyebarkan ideologinya. Ia menyayangkan pihak sekolah kerap mempercayakan kegiatan keagamaan kepada Rohis tanpa memberikan perhatian langsung kepada organisasi ekstrakurikuler sekolah itu. Kami selalu mengingatkan agar stakeholder sekolah tidak membuat kebijakan yang justru memberikan celah tumbuhnya radikalisme. Jangan ada kegiatan ekstra keagamaan yang tidak terkontrol guru. Dikatakan lebih lanjut bahwa pendidikan serta berbagai kegiatan keagamaan di tingkat sekolah pada intinya harus selalu bermuara pada pembangunan budi pekerti. Hal itu dapat terwujud apabila pendidikan agama disampaikan secara proporsional. Yang kami perhatikan pertama adalah kurikulum. Kurikulum harus memberikan kontribusi untuk memberikan pemahaman agama secara proporsional (Eramuslim.com edisi Kamis, 12 Syawwal 1438 H/6 Juli 2017).

Selain itu, ada pernyataan pemerintah yang lebih lunak juga dikutip, yaitu pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengatakan, bahwa peran para ulama, kyai dan para santri dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia begitu penting dan sangat berpengaruh. Semangat keislaman yang dimiliki para santri, ulama dan kyai justru menjadi pondasi yang kuat untuk mempertahankan nasionalisme ke Indonesia-an pada saat itu. Jadi sejarah mengatakan bahwa nasionalisme itu yang

mempertahankan adalah umat Islam. TNI tidak akan sanggup mempertahankan dan menghadapi musuh tanpa dukungan ulama dan juga kyai. Karena merebut serta mempertahankan kemerdekaan, keutuhan NKRI tidak lepas dari andil besar para ulama dan kyai. Oleh karena itu, Gatot mengajak seluruh kader PPP untuk mewujudkan partai sebagai rumah besar umat Islam dan pusat perjuangan untuk menegakkan Ahlusunnah Wal Jamaah dan Pancasila dalam wadah NKRI (Eramuslim.com edisi Jumat, 21 Juli 2017).

Pada kesempatan lain, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menambahkan bahwa membela NKRI itu adalah jihad. Apabila keimanan dan ketaqwaan kita tebal, kita akan sadar bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas membela NKRI adalah jihad dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Panglima TNI menjelaskan bahwa pada hakekatnya semua prajurit sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan jihad demi negara dan bangsa. Begitu kita masuk sebagai prajurit, kita sudah membuat surat izin dari orang tua, kemudian dicek kesehatan dan dilatih, itu sebenarnya merupakan persyaratan jihad. Dengan keimanan dan ketaqwaan yang kuat maka prajurit sudah pasti menjadi hebat, profesional dan kuat dalam pelaksanaan tugas, khususnya di medan pertempuran tanpa mengenal rasa takut (EraMuslim.com edisi Kamis, 8 Muharram 1439 H/28 September 2017).

Di pihak lain, ada catatan kritis terhadap pernyataan Menteri Agama "bahwa paham keagamaan harus sejalan dengan Pancasila". Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, misalnya, mengatakan bahwa Pancasila itu dijiwa oleh nilai-nilai keagamaan, sebagai kesepakatan bersama para pendiri bangsa dan negara.

Pancasila merupakan produk dialog di antara para pendiri Bangsa Indonesia (Eramuslim.com edisi Jumat, 21 Juli 2017). Catatan kritis juga disampaikan oleh Din Syamsuddin, mantan ketua umum PP Muhammadiyah. Menurutnya, pernyataan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin agar Pembina Rohani Islam (Rohis) di sekolah-sekolah diawasi, harus dikritik, karena kurang mendidik. Seharusnya Menag berterima kasih kepada para Rohis di sekolah-sekolah yang selama ini, berjasa dalam ikut membina kerohanian siswa. Justeru dalam keadaan kekurangan guru agama seperti yang dilansir selama ini, para rohis telah berperan mengisi kekosongan itu. Din menegaskan bahwa rohis di sekolah-sekolah tingkat menengah itu, berjasa dalam membina pemahaman keagamaan siswa, sekaligus membentuk akhlak generasi muda. Bahwa mungkin ada rohis yang tidak atau belum benar, justeru itu tugas Kemenag untuk membinanya (EraMuslim.com edisi Minggu, 9 Juli 2017).

Demikian pentingnya Pancasila sebagai dasar Negara NKRI, ada ancaman hukuman seumur hidup bagi anggota ormas anti Pancasila. Perppu 2/2017 tentang Ormas yang diterbitkan pemerintah mengatur ketentuan pidana bagi anggota dan pengurus ormas yang melanggar aturan. Sanksi bisa sampai berupa pidana seumur hidup. Perppu 2/2017 memberi ancaman sanksi bagi anggota dan/atau pengurus ormas yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Mereka terancam sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun. Perppu 2/2017 juga mengatur sanksi pidana bagi anggota dan/atau pengurus ormas yang melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA serta melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan

terhadap agama yang dianut di Indonesia. Mereka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Ancaman sanksi pidana seumur hidup atau penjara 5-20 tahun itu juga dikenakan bagi anggota dan/atau pengurus ormas yang menggunakan simbol organisasi separatis, melakukan kegiatan separatis, serta menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Adapun ajaran yang bertentangan dengan Pancasila adalah atheisme, komunisme/marxismen-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (EraMuslim.com edisi Rabu, 18 Syawal 1438 H / 12 Juli 2017).

Sementara itu, terkait dengan wacana Negara khilafah EraMuslim.com memuat tulisan Emha Ainun Najib dengan judul "The Scary Khilafah". Menurutnya, sejak 2-3 abad yang lalu para pemimpin dunia bersepakat untuk memastikan agar Kaum Muslimin tidak bersatu, agar dunia tidak dikuasai oleh Khilafah. Maka pekerjaan utama sejarah dunia adalah memecah belah Kaum Muslimin dengan segala cara. Selanjutnya, melalui pendidikan, media dan uang, membuat Ummat Islam tidak percaya kepada Khilafah, Al-Qur`an dan Islam. Puncak sukses peradaban dunia adalah kalau Kaum Muslimin, dengan hati dan pikirannya, sudah memusuhi Khilafah. Hari ini di mata dunia, bahkan di pandangan banyak Kaum Muslimin sendiri: Khilafah lebih terkutuk dan mengerikan dibanding Komunisme dan Terorisme. Bahkan kepada setan dan iblis, manusia tidak setakut kepada Khilafah. Ummat manusia sudah berabad-abad melakukan penelitian atas alam dan kehidupan. Maka mereka takjub dan mengucapkan *Robbana ma kholaqta hadza bathila*. Wahai Maha Pengasuh, sungguh tidak sia-sia Engkau

menciptakan semua ini. Bahkan teletong Sapi, menjadi pupuk. Sampah-sampah alam menjadi rabuk. Timbunan batu-batu menjadi mutiara. Penjajahan melahirkan kemerdekaan. Kejatuhan menghasilkan kebangkitan. Penderitaan memberi pelajaran tentang kebahagiaan.

Di sisi lain, Emha mengutip potongan ayat *Inni jailun fil ardli khalifah*. Sesungguhnya Aku mengangkat Khalifah di bumi. Ketika menginformasikan kepada para staf-Nya tentang makhluk yang Ia ciptakan sesudah Malaikat, jagat raya, Jin dan Banujan, yang kemudian Ia lantik Tuhan tidak menyebutnya dengan Adam atau Manusia, Insan, Nas atau makhluk hibrida baru, melainkan langsung menyebutnya Khalifah. Konsep Khilafah dengan pelaku Khalifah adalah bagian dari desain Tuhan atas kehidupan manusia di alam semesta. Adalah skrip-Nya, visi misi-Nya, Garis Besar Haluan Kehendak-Nya. Khilafah adalah UUD-nya Allah swt. Para Wali membumikannya dengan mendendangkan: di alam semesta atau alamin yang harus dirahmatkan oleh Khilafah manusia, adalah *tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar*. Tugas Khalifah adalah *penekno blimbing kuwi*. Etos kerja, amal saleh, daya juang upayakan tidak mencekung ke bawah: *lunyu-lunyu yo penekno*. Selicin apapun jalanan di zaman ini, terus panjatlal, terus memanjatlal, untuk memetik blimbing yang bergigir lima. Khilafah adalah desain Tuhan agar manusia mencapai keadilan sosial, *gemah ripah loh jinawi, rahmatan lil alamin* atau *baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghofur*. Apanya yang ditakutkan? Apalagi Ummat Islam sudah terpecah belah mempertengkarkan hukum kenduri dan ziarah kubur, celana congklang dan musik haram, atau Masjid jadi ajang kudeta untuk boleh tidaknya tahlilan dan shalawatan. Mungkin butuh satu milenium untuk mulai

takut kepada masuklah ke dalam Islam sepenuh-penuhnya dan bersama-sama. Itu pun sebenarnya tidak menakutkan. Apalagi dunia sekarang justru diayomi oleh *udkhulu fis-silmi kaffah*. masuklah ke dalam *Silmi* sejauh kemampuanmu untuk mempersatukan dan membersamakan.

Hari-hari ini jangan terlalu tegang menghadapi Kaum Muslimin. Kenduri yang dipertentangkan adalah kenduri *ambengan* antar tetangga, bukan kenduri pasokan dana nasional. Toh juga dengan pemahaman ilmu yang tanpa anatomi, banyak teman mengidentikkan dan mempersempit urusan Khilafah dengan Hizbut Tahrir. HTI sendiri kurang hati-hati mewacanakan Khilafah sehingga dunia dan Indonesia tahunya Khilafah adalah HTI, bukan Muhammadiyah atau lainnya. Padahal HT maupun HTI bukan penggagas Khilafah, bukan pemilik Khilafah dan bukan satu-satunya kelompok di antara ummat manusia yang secara spesifik ditugasi oleh Allah untuk menjadi Khalifah.

Setiap manusia dilantik menjadi Khalifah oleh Allah. Saya tidak bisa menyalahkan atau membantah Allah, karena kebetulan bukan saya yang menciptakan gunung, sungai, laut, udara, tata surya, galaksi-galaksi. Bahkan saya tidak bisa menyuruh jantung saya berdetak atau stop. Saya tidak mampu membangunkan diri saya sendiri dari tidur. Saya tidak sanggup memuaikan sel-sel tubuh saya, menjadwal buang air besar hari ini jam sekian, menit kesekian, detik kesekian. Bahkan cinta di dalam kalbu saya nongol dan menggelembung begitu saja, sampai seluruh alam semesta dipeluknya tanpa saya pernah memprogramnya.

Jadi ketika Tuhan bilang Jadilah Pengelola Bumi, saya tidak punya pilihan lain. Saya hanya karyawan-Nya. Allah Big Boss saya. Meskipun dia kasih aturan dasar *fa man sya`a falyu`min, wa man sya`a falyakfur*, yang beriman berimanlah,

yang ingkar ingkarlah, saya tidak mau kehilangan perhitungan. Kalau saya menolak regulasi Boss, saya mau kerja di mana, mau kos di mana, mau pakai kendaraan apa, mau bernapas dengan udara milik siapa. Apalagi kalau saya tidur dengan istri, Tuhan yang berkuasa membuatnya hamil. Bukan saya. Saya cuma numpang enak sebentar. Hal-hal seperti itu belum cukup mendalam dan rasional menjadi kesadaran individual maupun kolektif Kaum Muslimin. Jadi, wahai dunia, apa yang kau takutkan dari Khilafah? Andaikan Khilafah terwujud, kalian akan diayomi oleh *rahmatan lil alamin*. Andaikan ia belum terwujud, sampai hari ini fakta di muka bumi belum dan bukan Khilafah, melainkan masih Kaum Muslimin. Bahkan di pusatnya sana Islam tidak sama dengan Arab. Arab tidak sama dengan Saudi. Saudi tidak sama dengan Quraisy. Quraisy tidak sama dengan Badwy. Apa yang kau takutkan? Wahai dunia, jangan ganggu kemenanganmu dengan rasa takut kepada fatamorgana (EraMuslim.com edisi Minggu, 6 Agustus 2017).

Salah satu yang ditakutkan oleh dunia soal khilafah adalah aturan dan Syariat hukum potong tangan. Salah satu kebutuhan pokok yang harus ada dalam setiap tatanan kehidupan manusia, dari kehidupan yang terkecil sampai yang terbesar adalah adanya peraturan dengan segala konsekuensinya yang dijadikan sebagai pijakan bagi semuanya. Karenanya, di setiap lini kehidupan pasti ada peraturan atau undang-undang yang berlaku, baik tertuang ataupun tidak, tertulis ataupun tidak. Begitu pula dengan agama ini yang berfungsi sebagai rambu-rambu bagi seluruh manusia, yang telah Allah Azza wa Jalla pilihkan untuk makhluk-Nya. Allah Azza wa Jalla adalah Dzat yang Maha Adil, Maha Mengetahui dan Maha Penyayang kepada para makhluk-Nya. Apa saja yang telah diatur dan dipilihkan-Nya buat manusia, tidak mungkin akan

menyengsarakan mereka. Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah Azza wa Jalla demi kemaslahatan seluruh manusia adalah peraturan tentang hal pencurian, yang berupa sangsi tegas dengan hukuman potong tangan bagi para pelakunya (QS al-Maidah/5:38-39). Namun harus diingat bahwa untuk melaksanakan hukum potong tangan ini ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ada dua orang saksi yang adil, beragama Islam dan merdeka (Ibnu Mundzir).

Dalam kasus pencurian ini, syariat Islam berusaha menjaga kepentingan orang banyak daripada menjaga kepentingan si pencuri. Memberi hukuman yang berat berupa memotong tangan bertujuan membasmi sesuatu yang menjadikan kecemasan manusia pada harta mereka. Sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai cambuk untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan si pencuri yang hanya sesaat dan banyak menimbulkan kerusakan. Ini adalah hukuman yang setimpal yang penuh faedah dan hikmah. Bila seseorang mau berpikir, hukuman setimpal bukan berarti menzalimi si pelaku, tetapi ini merupakan keadilan dalam peraturan Allah Azza wa Jalla yang pasti baik bagi makhluk-Nya karena hanya Dia-lah yang Maha Mengetahui segala sesuatunya. Bila hukuman ini dibiarkan diatur oleh seorang mujtahid atau seorang hakim atau kelompok tertentu, pasti akan menyebabkan saling bertentangan. Dan hasilnya tidak dapat dipastikan akan dapat mewujudkan suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh manusia, sehingga merasa tenang dari kezhaliman dan kekerasan orang lain (EraMuslim.com edisi Kamis, 18 Zulqa'dah 1438 H/10 Agustus 2017).

Lebih lanjut dikatakan bahwa pelaksanaan khilafah dan syariat Islam akan menjamin orang-orang non-Islam tidak

akan terancam. Sebagai contoh, saat Eropa Kristen kelaparan, kekhalifahan Turki datang membantu. Antara tahun 1845-1852 M kelaparan hebat terjadi di seantero Eropa. Peristiwa itu dikenal dengan *The Great Hunger* atau *the Great Irish Famine*. Walaupun bencana kelaparan merata di Eropa, namun kelaparan terparah terjadi di Irlandia dan Skotlandia. Kelaparan ini disebabkan panen kentang yang berulang kali gagal, sementara kentang yang ada diserang jamur berbahaya sehingga tidak dapat dikonsumsi. Selain itu kelaparan juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah Inggris yang mengeksport bibit kentang ke wilayah utara serta pemberlakuan tanam paksa dengan harga sewa tanah yang tinggi terhadap petani Irlandia, yang saat itu dibawah kekuasaan Inggris. Akibat bencana kelaparan ini angka kematian meningkat, lebih dari 1 juta orang meninggal dunia, terjadi imigrasi besar-besaran yang membuat jumlah penduduk Irlandia berkurang sebanyak 25%.

Mendengar peristiwa itu Sultan Ottoman Turki Abdul Majid I menyatakan keinginannya untuk mengirimkan bantuan sebesar 10.000 sterling demi membantu para petani Irlandia. Akan tetapi Ratu Victoria meminta Sultan untuk mengirimkan 1.000 sterling saja. Permintaan Ratu Victoria memang aneh, sepertinya dia tidak mau terlihat rendah karena sebelumnya hanya mengirimkan 2.000 sterling, jumlah yang jauh lebih kecil dibanding tawaran Sultan Turki. Sultan pun sepakat dengan permintaan tersebut. Dia hanya mengirimkan 1.000 sterling, namun secara diam-diam Sang Sultan mengirimkan 3 kapal besar yang memuat makanan, sepatu dan keperluan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah Inggris berusaha memblokir kapal yang membawa bantuan tersebut, akan tetapi kapal-kapal itu berhasil berlabuh di pelabuhan Drogheda dengan aman. Setelah mengantarkan kapal tersebut, para pelaut

Ottoman meninggalkan pelabuhan Drogheda dan kembali ke Turki. Atas pemberian itu masyarakat Irlandia menyampaikan rasa terima kasih kepada sultan Abul Majid I melalui sebuah surat yang hingga saat ini masih tersimpan rapi di mesium arsip Turki. Dalam surat tersebut para pembesar dan bangsawan Irlandia menyampaikan pujian kepada Sultan, dan berharap agar tindakan Ottoman menjadi contoh bagi negara-negara lainnya di Eropa.

Adapun isi surat berikut dengan ucapan syukur kepada Khalifah Negara Islam Turki Utsmani: "Kami para bangsawan, tuan-tuan dan penduduk Irlandia ingin mengekspresikan terima dan terima kasih atas bantuan murah hati Sultan Turki Utsmani. Karena bencana kelangkaan. Hal ini tidak dapat dihindari bagi kita untuk menarik bantuan dari negara-negara lain untuk diselamatkan dari ancaman abadi kematian dan kelaparan. Kemurahan hati Sultan untuk memenuhi panggilan bantuan ini menampilkan contoh untuk Eropa Serikat. Masyarakat merasa lega dan diselamatkan dari kebinasaan melalui tindakan ini yang sangat tepat waktu. Kami mengucapkan terima kasih atas nama mereka dan berharap bahwa Sultan Turki Utsmani dan kekuasaannya akan diselamatkan dari penderitaan yang menimpa kita. ucap para Pimpinan & bangsawan Irlandia. Surat dari Kekhalifahan Turki Utsmaniyah kepada Rakyat Irlandia yang menderita kelaparan Hingga kini peristiwa bersejarah itu masih sangat membekas di hati masyarakat Irlandia, terutama bagi mereka yang tinggal disekitar pelabuhan Drogheda. Dan sejak peristiwa itu pula masyarakat Irlandia menganggap Turki seperti saudara sendiri, sehingga tak jarang siapapun yang pernah berkunjung ke Irlandia khususnya ke Drogheda dapat dengan mudah menyaksikan hal-hal yang bernuansa Turki, bahkan salah satu klub sepak bola Irlandia Drogheda

United menjadikan lambang kesultanan Ottoman sebagai lambang klubnya, sebagai penghormatan terhadap kekhalifahan Ottoman Turki. Mereka bangga dengan lambang tersebut disaat sebagian kaum muslimin bangga dengan jersey berlambang salib (EraMuslim.com edisi Kamis, 18 Zulqad'ah 1438 H/10 Agustus 2017).

Pendapat senada disampaikan oleh Thomas W. Arnold, sejarawan Kristen. Menurutnya, kedamaian dan toleransi tercipta di bawah naungan Khilafah Islam. Dalam buku *The Preaching of Islam*, orientalis dan sejarawan kristen mencatat keadilan Khalifah Islam membuat warga Kristen penduduk Syam lebih memilih hidup di bawah kekuasaan Khalifah Islam dibanding dipimpin oleh Kaisar Romawi walau sama-sama Kristen. Wilayah Syam (Syria, Jordan, Palestina) di bawah pemerintahan kristen Romawi timur (Byzantium) berlangsung selama 7 abad sebelum Islam datang. Ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Abu Ubaidah mencapai lembah Jordan, penduduk Kristen setempat menulis surat kepadanya berbunyi: "Saudara-saudara kami kaum muslimin, kami lebih bersimpati kepada saudara daripada orang-orang Romawi, meskipun mereka seagama dengan kami, karena saudara-saudara lebih setia kepada janji, lebih bersikap belas kasih kepada kami dengan menjauhkan tindakan-tindakan tidak adil serta pemerintah Islam lebih baik daripada pemerintah Byzantium, karena mereka telah merampok harta dan rumah-rumah kami. Penduduk Emessa menutup gerbang kota terhadap tentara Heraclius serta memberitahukan kepada orang-orang Muslim bahwa mereka lebih suka kepada pemerintahan dan sikap adil kaum muslimin dari pada tekanan dan sikap tidak adil penguasa Romawi".

Demikianlah gambaran jiwa rakyat di Syam selama masa perang (tahun 633-639 Masehi). Dimana tentara kaum

muslimin lambat laun dapat mengusir tentara Romawi dari wilayah itu. Dan tatkala Damaskus pada tahun 637 memelopori menciptakan syarat-syarat perdamaian dengan pihak Kekhalifahan Islam, yang berarti terjaminnya keamanan dan diperolehnya kondisi-kondisi yang menguntungkan, maka hal itu segera diikuti oleh kota-kota lainnya. Emessa, Arethusa, Hieropolis mengadakan perjanjian yang sama dengan pihak Kekhalifahan Islam, kepada siapapun mereka harus membayar pajak. Bahkan Patriarch Jerusalem menyerahkan kota itu dengan syarat-syarat yang sama. Kecemasan terhadap timbulnya kekacauan agama akibat tindakan Kaisar Romawi mendorong mereka untuk lebih mendekati sikap toleransi kaum Muslimin. Rakyat propinsi kekaisaran Byzantium yang direbut tentara muslim dapat menikmati alam toleransi seperti paham Monophysis dan Nestoria, yang selama berabad-abad tertekan oleh pemerintahan Kristen Romawi. Mereka diberi kebebasan tanpa gangguan untuk menjalankan keyakinan mereka, kecuali sedikit pembatasan, yaitu mereka jangan terlalu menonjol-nonjolkan symbol agama, untuk mencegah bentrokan antara penganut kedua agama atau timbulnya fanatisme yang dapat melukai perasaan kaum muslimin. Luasnya toleransi ini demikian menarik perhatian dalam sejarah abad ke ketujuh dapat dilihat dari syarat-syarat yang diberikan kepada kota-kota yang ditaklukkan (oleh pasukan Islam), dimana perlindungan terhadap jiwa dan harta penduduk dan keleluasaan menjalankan ajaran-ajaran agama dijamin sebagai imbalan ketundukan dan pembayaran jizyah yang jumlahnya lebih kecil dibanding pajak mencekik yang diterapkan penguasa kristen Romawi.

Jaminan perlindungan khilafah Islamiyah kepada non-muslim juga diberikan oleh Umar bin Khattab. Sebagai

contoh, dapat dikutipkan disini syarat-syarat persetujuan sebagaimana ditetapkan pada waktu penyerahan kota Jerusalem kepada khalifah Umar bin Khattab: "Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Inilah persetujuan keamanan, yang oleh Umar, hamba Allah, Amirul Mukminin, diberikan kepada penduduk Elia (Palestina). Dia memberikan kepada semua, yang sakit atau yang sehat, jaminan keamanan bagi jiwa, harta, gereja, salib, dan semua hal yang berhubungan dengan agama mereka. Gereja tidak akan dirubah menjadi tempat kediaman, tidak akan dirusak, tidak juga mereka atau perlengkapan mereka akan dikurangi dengan cara apapun, begitu juga salib-salib atau harta milik mereka tidak akan diganggu, tidak akan ada paksaan bagi mereka mengenai soal-soal yang berhubungan dengan keyakinan mereka, dan tidak seorangpun diantara mereka akan dianiaya. Sumbangan wajib mereka ditetapkan lima dinar bagi mereka yang kaya, empat dinar bagi yang menengah dan tiga dinar bagi rakyat biasa. Bersama sama dengan Patriarch, Khalifah Umar mengunjungi tempat-tempat suci dan diriwayatkan ketika mereka berada dalam gereja *Resurrection*, sedang bertepatan dengan waktu sholat, Patriarch mempersilahkan Khalifah untuk menunaikan sholatnya ditempat itu tetapi oleh Umar ditolak dengan lemah lembut, seraya mengatakan apabila beliau melakukan hal tersebut, maka dikhawatirkan kelak umatnya akan menganggap gereja itu sebagai tempat sholat bagi kaum muslimin dan menjadikannya masjid. Sikap dan tindakan harmonis seperti itu juga diperlihatkan Umar terhadap penduduk yang beragama lain dalam urusan-urusan lainnya, seperti dituliskan dalam sejarah bahwa Umar pernah memerintahkan agar menyumbang uang dan makanan dari *baitul mal* untuk para penderita sakit lepra dari orang-orang

Kristen. Bahkan dalam wasiatnya yang terakhir dimana beliau menunjuk penggantinya sebagai Khalifah, beliau menyinggung masalah *Dzimmi* (penduduk non-Islam yang tunduk) ini sebagai berikut: "Amatlah kuharapkan agar dia (Khalifah Baru) memperhatikan urusan kaum *dzimmi* ini, agar mereka itu tetap menikmati perlindungan Tuhan dan Rasulullah, pula agar dia (Khalifah Baru) menepati perjanjian dengan mereka, dan janganlah memberati mereka dengan beban-beban yang tak dapat mereka pikul. Demikianlah sejarah mencatat kedamaian dan kehidupan penuh toleransi di bawah naungan Khilafah Islam. (EraMuslim.com edisi Sabtu, 20 Zulqa'dah 1438 H/12 Agustus 2017).

Bukti sejarah tersebut dijadikan rujukan oleh EraMuslim.com untuk menurunkan suatu tulisan yang berjudul: "Gak Paham Tapi Sudah Ngomong Soal Khilafah, Jadinya Ngawur". Bareskrim Polri diminta segera menindaklanjuti laporan beberapa elemen partai politik terhadap Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) M. Nizar Zahro mengatakan, ke depan, tindakan yang sangat berbahaya tersebut bisa diulangi oleh siapapun. Bareskrim Polri harus segera menindaklanjuti laporan dari beberapa elemen parpol atas tindakan VBL, kata Nizar dalam keterangannya, Selasa (8/8). Dia menjelaskan, Victor terlalu sempit dalam menyimpulkan bahwa parpol-parpol yang tidak mendukung Perppu Ormas merupakan pendukung khilafah. Pemikiran sempit itu menggiring Victor pada kesimpulan sesat yang akhirnya memunculkan tuduhan tidak beradab kepada Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai pendukung pendirian negara khilafah. VBL mestinya belajar terlebih dahulu tentang konsep khilafah sebelum melontarkan tuduhan

yang tidak berdasar tersebut. Diingatkan Victor bahwa mayoritas umat Islam pesimis akan lahirnya pemerintahan khilafah di era modern saat ini. Di mana saat ini masing-masing umat Islam sudah bernaung di bawah pemerintahan negara di seluruh dunia, sehingga kemunculan wacana khilafah sejatinya merupakan gerakan utopis yang sangat sulit terwujud. Nizar membeberkan, ketika proses membuat dasar negara, para pendiri bangsa yang tadinya berdebat alot tentang konsep dasar negara Indonesia akhirnya menyepakati bahwa dasar negara adalah Pancasila. Para pendiri bangsa menyadari bahwa kemajemukan Indonesia harus diikat dalam suatu kesepakatan yang luhur. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Pancasila yang dalam uraian sila-silanya mampu mewadahi segenap elemen bangsa yang sangat majemuk dalam hal suku, bahasa, budaya dan agama. Sehingga sudah menjadi kewajiban seluruh anak bangsa untuk memper-tahankan dan memperkuat keutuhan NKRI yang berlin-daskan Pancasila. Membaca sejarah, sangat terlihat sekali bahwa VBL tidak memahami perjalanan berdirinya NKRI sehingga mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak beradab. Sangat aneh jika mengkaitkan penolakan terhadap Perppu Ormas dengan Khilafah, tegas Nizar (EraMuslim.com edisi Rabu, 17 Zulqa'dah 1438 H/9 Agustus 2017).

Keberadaan khilafah Islamiyah seperti yang digambarkan di atas akan tegak kembali pada akhir zaman, yaitu usai tumbangnya raja dzalim. Banyak hadis Nabi saw, mengabarkan bahwa kekhilafahan Islam seperti pada masa Khulafaur Rasyidin akan kembali tegak sekali lagi. Salah satunya adalah hadis yang menggambarkan bentuk dan tahapan kekuasaan yang akan terjadi sepeninggal beliau sampai hari kiamat secara urut. Beliau bersabda: "Periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa

tahun, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang periode khilafah *ala minhaj nubuwwah* (kekhilafahan sesuai manhaj kenabian), selama beberapa masa hingga Allah SWT mengangkatnya. Kemudian datang periode *mulkan aadhdhan* (penguasa-penguasa yang menggigit) selama beberapa masa. Selanjutnya datang periode *mulkan jabbriyyan* (penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak) dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah SWT. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafah *ala minhaj nubuwwah*. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam [HR Ahmad, Shahih]. (EraMuslim.com edisi Sabtu, 10 Muharram 1439 H / 30 September 2017).

2. Kebhinekaan, Toleransi dan Persaudaraan

EraMuslim.com lewat beberapa edisi telah menyebarkan berita tentang larangan bercadar bagi wanita muslimah, merupakan sindiran terhadap kelompok Islam tertentu yang tidak pro-kebhinekaan, toleransi dan persaudaraan. Salah satu contohnya adalah berita tentang "UIN Jakarta Pecat Dosen Bercadar". Buntut dari pembubaran ormas anti Pancasila semakin panjang. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, mengeluarkan kebijakan memecat dosen wanita bercadar setelah sebelumnya diberikan pilihan untuk melepas cadar tersebut saat memberikan materi perkuliahan. Pernah kami lakukan tindakan tegas kepada dosen yang memang terindikasi gerakan-gerakan radikal, ujar Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dede Rosyada di gedung rektorat UIN Jakarta, Ciputat, Minggu (30/7/2017). Menurutnya, dosen wanita itu sudah diberhentikan tahun lalu. Yang bersangkutan pernah kami panggil dan lakukan interogasi. Kami berikan pilihan dan dia malah memilih aktif kegiatan organisasinya itu. Dia pun enggan merinci organisasi dan

kegiatan apa, yang di luar batas kewajaran sang dosen, sehingga sanksi tegas pemberhentian dikenakan. Saya lupa waktu itu apa, tapi memang dia akui dan dia pilih seperti itu.

Pihak kampus mengetahui dosen tersebut berpandangan berbeda, setelah pihaknya meminta dosen itu untuk menanggalkan cadar saat memberi perkuliahan, namun dia menolak. Saat itu sang dosen memiliki argumennya untuk mempertahankan bercadar. Ditambahkan dia, menurut aturan kampus, dosen wanita tidak boleh menggunakan cadar saat mengajar. Kepada dosen yang telah dikeluarkan itu, Dede mengaku telah memberikan pilihan yang demokratis. Karena yang bersangkutan tetap berkeras dengan pendiriannya, pihak kampus lalu mengambil langkah tegas memecatnya. Sedang untuk dosen pria, Dede mengaku bentuk pengawasannya lebih sulit. Apalagi banyak dosen UIN yang memiliki penampilan sama, mulai celana cingkrang, hingga memelihara jenggot. Selama tidak ada laporan tentang aktivitas dosen tersebut, pihaknya tak bisa memberikan sanksi apapun. Saya tidak terlalu jauh mengidentikan itu dari busana dan cara berpakaian dosen, pekerja atau mahasiswa di sini, tapi jika ada indikasi dan bukti kami tindak tegas, katanya. Begitupun dengan dosen yang terkait dengan HTI, dan organisasi radikal lainnya, pihaknya tidak punya data. Alhasil, pengawasan yang dilakukan pihak kampus dirasakan masih sangat lemah sekali. Untuk berapa jumlah dosen atau mahasiswa yang terlibat HTI, tidak ada data yang masuk. Hingga kini, kami belum mengeluarkan dosen atau mahasiswa yang berafiliasi dengan HTI, tukasnya (EraMuslim.com edisi Senin, 8 Zulqadha 1438 H/31 Juli 2017).

Berita lain yang diturunkan oleh Eramuslim.com adalah berita tentang "Pushami: Pelarangan Cadar Adalah

Pelanggaran HAM". Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (Pushami) mengecam keras adanya pelarangan mahasiswi bercadar yang diterapkan di kampus Universitas Pamulang (Unpam), Tangerang Selatan, Banten. Ketua Pushami, Mohammad Hariadi Nasution SH, MH, CLA menegaskan, pelarangan tersebut bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Islam memakai cadar adalah bagian dari ibadah bagi muslimah. Jadi kalau ibadah dilarang itu jelas melanggar HAM, tegas pria yang akrab disapa Ombat itu kepada Suara Islam, Jumat (11/8). Ia pun meminta pihak kampus menghargai pilihan mahasiswi untuk bercadar. Perempuan bercadar itu mempertahankan pendiriannya untuk menghindari fitnah dan tidak mau dilihat auratnya oleh yang bukan muhrim, itukan bagus, tegas Ombat. Ia juga mempertanyakan dasar pelarangan tersebut, menurutnya peraturan kampus tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Kalau pihak kampus bersikukuh dengan peraturannya, mereka harus sadar bahwa kampus mereka itu ada di Indonesia. Dan Undang-Undang di negara kita menjamin kebebasan menjalankan ibadah, jelas Ombat. Dan itukan hanya aturan kampus, Undang-Undang negara saja jika bertentangan dengan HAM itu bisa direvisi kok melalui *judicial review* di MK, apalagi cuma aturan kampus, tambahna. Kemudian, kata Ombat, jika alasan kampus mengaitkan cadar dengan radikalisme, itu menunjukkan tidak paham masalah agama. Standar radikal itu darimana? apa perempuan bercadar, atau laki-laki bercelana cinkrang dan berjenggot?, kalau seperti itu malah diskriminasi bahkan Islamphobia jadinya,kata dia. Jadi jangan paranoid lah, kampus sebagai lembaga pendidikan itu harus menghargai perbedaan pemahaman. Dan jangan terbalik, cadar dilarang sementara yang buka-bukaan aurat pakai pakaian seksi malah dibiarkan, tandas Ombat. Sebelumnya,

pihak rektorat kampus Universitas Pamulang (Unpam) melarang mahasiswi menggunakan hijab bercadar. Larangan tersebut tertuang dalam SK. Rektor Nomor : 338/A/U/Unpam/V/2017. Meski di dalamnya mengatur secara umum tentang tata berbusana perkuliahan. Namun, di sana terdapat penegasan jika hijab yang bercadar tidak diperkenankan bagi seluruh mahasiswinya (EraMuslim.com edisi Jumat, 11 Agustus 2017).

Berita tentang larangan bercadar lainnya juga diberitakan oleh EraMuslim.com di bawah judul "Larang Cadar, Ketua Yayasan Unpam: Ini Kampus Saya, Saya yang Punya Aturan". Ketua Yayasan Universitas Pamulang (Unpam), Drs. Darsono akhirnya buka suara soal larangan bercadar diberlakukan di kampusnya. Ia mengatakan, larangan bercadar memang aturan dari kampus. Ini aturan rumah tangga saya. Kebetulan Unpam ini kampus swasta. Ini kampus saya, saya yang punya aturan, katanya saat ditemui Kiblat.net di Unpam, Pamulang, Tangerang Selatan pada Rabu (09/08). Jadi yang bisa mengikuti aturan saya di rumah tangga kita ya silahkan. Darsono juga mengatakan bahwa ia mempersilahkan mahasiswa Unpam yang tidak sependapat dengan aturan Unpam. Karena ini aturan, mahasiswa tidak bisa memaksanya untuk mencabut aturan tersebut. Jadi mereka nggak bisa memaksa saya. Saya juga nggak memaksa mereka masuk sini. Kalau nggak setuju dengan aturan sini, ya jangan di sini. Ia mengklaim, cadar dapat mengganggu komunikasi. Sebab, yang terlihat hanya mata. Namun, ia tidak memaksa ke mahasiswi yang bercadar untuk melepaskan cadar. Kami nggak memaksa melepas cadar, itu melanggar hak asasi. Tapi aturan kami begitu, melarang bercadar. Selain itu, ia juga mengatakan belum ada mahasiswi yang terkena sanksi karena aturan tersebut. Ia menjelaskan, akan ada sanksi bagi mahasiswi yang

melanggar aturan. Kalau yang tidak mau mengikuti aturan sini otomatis kita beri sanksi. Kita keluarkan (Eramuslim.com edisi Jumat, 11 Agustus 2017).

Pernyataan Menteri Agama RI yang dianggap aneh juga dikutip dan disebar oleh EraMuslim.com. Pernyataan dimaksud adalah "Menag: Orang Islam yang Tidak Moderat Sebenarnya Bukan Islam". Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut *ukhuwah Islamiyah wathaniyah* memiliki relevansi yang tinggi dalam peradaban manusia saat ini. Ajaran ini menuntut umat Islam ikut memberikan kontribusi yang bermakna dalam memelihara persatuan peradaban bersama. Kata *wasath* dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian sering kita dengar istilah wasit. Kalau kita lihat KBBI itu adalah penengah, penentu, pemimpin dalam pertandingan. Atau pemisah, pelera, kalau kemudian ada perselisihan. Jadi itu makna dari *wasath*. Dalam berperilaku, *ukhuwah wathaniyah* mempertimbangkan sikap dan pemikiran yang sesuai dengan kondisi saat ini dan tradisi masyarakat, namun tetap sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Lukman menambahkan, seseorang yang memiliki sifat *wathaniyah* memiliki wawasan yang luas dan hati yang jernih. Oleh karenanya orang-orang yang paham agama dengan baik seperti ini tidak akan terjebak dalam perilaku yang ekstrem. Dalam menyelesaikan masalah, orang dengan sifat *wathaniyah* akan menge-depankan dialog. Perbedaan adalah kenyataan yang tidak mungkin disatukan, makanya Al Quran juga menekankan dialog sebagai solusi menjaga kebersamaan. Lukman menilai Islam *wathaniyah* sangat sesuai untuk dijadikan acuan seka-ligus tujuan umat dalam membangun peradaban dunia ke depan. Pasalnya Islam *wathaniyah* menonjolkan kepentingan dan persatuan kelompok. Jadi sebenarnya Islam itu ya *wathaniyah* itu, Islam itu ya moderat itu. Kalau ada orang

yang mengklaim Islam tapi dia tidak moderat sebenarnya dia bukan Islam. Dia hanya menggunakan alasan kelompok untuk urusan pribadinya (EraMuslim.com edisi Selasa, 23 Zulqa'dah 1438 H/15 Agustus 2017).

Salah satu contoh pelaksanaan dari kebhinekaan, toleransi, dan persaudaraan di antara anak-anak bangsa menurut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo adalah Doa Bersama 171717. Kegiatan doa bersama dan murojaah 171717 ini dilakukan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Kegiatan ini juga dapat menjadi landasan yang kokoh sekaligus menggelorakan semangat persatuan kesatuan di antara warga Indonesia. Dengan Indonesia yang lebih kasih sayang, Indonesia yang makin saling mengasihi dan menyayangi dalam keberagaman, kita semua tentu juga berdoa semoga kebersamaan dan ikatan yang sangat baik ini akan menjadi landasan yang kokoh dalam menggelorakan persatuan bangsa. Persatuan yang dimaksud adalah persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang sangat indah dan kaya; persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika; dan persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Dilandasi semangat persatuan dan keinginan besar untuk merebut kemerdekaan, para tokoh bangsa, utamanya para tokoh agama, saat itu mampu menjadikan pilihan "Merdeka Atau Mati" sebagai senjata pamungkas untuk mendobrak belenggu penjajahan dan meraih kemerdekaan, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat di tanah air Indonesia. Menurutnya, kalimat "Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan Dengan Didorongkan Oleh Keinginan Luhur" sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, mengandung arti bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai berkat Rahmat Allah

yang Maha Kuasa sehingga bangsa Indonesia wajib bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Kita juga harus ingat bahwa kemerdekaan Indonesia direbut atas dorongan keinginan luhur segenap bangsa Indonesia, disertai pengorbanan harta, jiwa dan raga, para syuhada pahlawan kusuma bangsa. Oleh karenanya kita juga wajib mendoakan agar Allah melimpahkan Rahmat dan kasih sayang-nya kepada para pahlawan kusuma bangsa yang rela berkorban demi ibu pertiwi, berjasa besar dalam meneguhkan kedaulatan negeri. Sebagai generasi penerus penikmat kemerdekaan, Panglima TNI mengajak agar sama-sama memohon kepada Allah Yang Maha Pencerah agar menerangi bangsa Indonesia dengan cahaya ilmu dan kearifan agar masyarakat Indonesia pandai merawat kemerdekaan, diberikan kekuatan untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, merawat dan memperkuat ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, serta menggelorakan tradisi semangat gotong royong. Pada saat yang sama, kita juga memohon agar selalu dianugerahi kekuatan, kesabaran, ketekunan dan kasih sayang dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, berkepribadian serta adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia (Eramuslim.com edisi Jumat, 18 Agustus 2017).

Sementara itu, contoh kasus kontra-produktif terhadap kebhinekaan, toleransi, dan persaudaraan juga dimuat oleh EraMuslim.com. Salah satu contohnya adalah berita tentang "Lakukan 19 Persekusi, HTI Laporkan Banser ke Komnas HAM". Hizbut Tahrir Indonesia melaporkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena diduga telah melakukan tindakan persekusi 19 kali kepada anggotanya di beberapa daerah. Kuasa hukum HTI, Ahmad khozinudir mengatakan pihaknya melaporkan Banser karena telah

mengambil alih wewenang aparat penegak hukum. Ini dilakukan oleh oknum saudara kami yaitu Banser NU dalam bentuk penghalangan, pengadangan, bahkan sampai pembubaran pengajian tabligh akbar yang dilakukan oleh simpatisan, anggota, bahkan Lembaga resmi HTI di berbagai daerah, tutur Ahmad di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (17/7). Yang paling terkenal adalah Ustad Felix Siauw karena beliau itu adalah anggota Hizbut Tahrir, lanjut Ahmad. Ahmad menjelaskan, langkah HTI melaporkan Banser ke Komnas HAM bukan karena ingin adanya perselisihan, melainkan mencari jalan keluar yang lebih kekeluargaan. Ini dalam rangka menasehati saudara kami di Banser NU dan wujud kasih sayang kami di Banser NU, ujar Ahmad. Selain melaporkan Banser, Ahmad juga melaporkan aparat kepolisian yang dinilainya melakukan pembiaran atas tindakan persekusi yang menimpa anggotanya. Bahkan, dikatakan Ahmad, kepolisian pernah menjanjikan uang kepada pihak HTI karena acaranya dibubarkan. Ahmad sangat menyesalkan perlakuan aparat kepolisian tersebut. Dia mengatakan HTI tidak membutuhkan uang, melainkan hak asasi yang terpenuhi. Yang menyakitkan ada di Semarang. Aparat penegak hukum justru menyatakan, kami akan ganti uang, kata Ahmad (EraMuslim.com edisi Selasa, 24 Syawwal 1438 H/18 Juli 2017).

3. Kelompok Radikal dan Perppu Ormas Islam

Kelompok radikal yang diberitakan oleh EraMuslim.com adalah berita tentang “Milisi Radikal Irak Dan Suriah Rekrut Anak-Anak Jadi Tentara”. Ada ratusan ribu anak-anak yang dipekerjakan sebagai tentara dalam banyak konflik bersenjata di seluruh dunia, terlepas dari bagaimana mereka direkrut, dan peran yang diberikan kepadanya. Tentara anak adalah korban, sementara partisipasi mereka dalam konflik

tersebut memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk bekerja sebagai tentara dilarang menurut hukum kemanusiaan internasional dan tidak sesuai dengan kesepakatan serta norma internasional, sebagaimana undang-undang tersebut menyebutnya sebagai kejahatan perang. Selain itu, menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia umur 18 tahun adalah batas usia minimum untuk merekrut dan melibatkan anak-anak dalam pertempuran. Di Yaman, Amnesty International telah mengkonfirmasi bukti baru bahwa kelompok Houthi merekrut anak-anak usia dibawah 15 tahun, dan beberapa di antaranya menjadi tentara di garis depan. Di Irak, Pusat Dokumentasi Tindak Pidana Perang Irak, dalam laporannya yang dikeluarkan pada Mei lalu, menerangkan bahwa milisi sektarian melatih anak-anak Irak untuk mengangkat senjata sebagai bagian dari pendekatan Iran dalam merekrut anak-anak. Menurut laporan tersebut, milisi ini menggunakan fasilitas sipil atau pemerintah seperti sekolah dan lapangan olah raga untuk merekrut anak-anak. Kelompok ISIS juga mengikuti pendekatan yang sama. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan banyak organisasi afiliasinya telah mendokumentasikan perekrutan ribuan anak di Suriah dan Irak untuk digunakan saat melancarkan serangan bunuh diri dan menempatkan mereka di garis depan. Menurut PBB, organisasi ISIS memanfaatkan situasi kelaparan keluarga lalu merayu para orang tua untuk mengirim anak-anak mereka untuk mencari uang, kemudian mereka mempekerjakan anak-anak sebagai tentara yang menerima gaji berkisar antara empat ratus dolar dan seribu dolar sebulan. Milisi hezbollah juga baru-baru ini merekrut anak-anak dan menggunakannya dalam konflik bersenjata, terutama dalam peperangan di Suriah. Organisasi internasional seperti

UNICEF telah mempertimbangkan praktik Hizbullah terhadap anak-anak tersebut untuk dicatat sebagai pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan hukum serta norma internasional (Eramuslim.com edisi Senin, 22 Zulqa'dah 1438 H/14 Agustus 2017 WIB).

Kelompok radikal lain yang diberitakan oleh EraMuslim.com adalah berita tentang "Gerakan Pemberontak Houthi Menghasut Para Siswa di Sekolah Agar Pergi Ke Medan Pertempuran". Para pemimpin Houthi di provinsi Mahwit Yaman utara dan Direktur Dinas Pendidikan Direktorat Shibam, Abdullah Al-Qassimi menyerukan kepada siswa SMA di pusat-pusat ujian untuk melanjutkan pergi ke *front* pertempuran setelah ujian selesai, hal itu disampaikan selama kunjungan lapangan ke pusat-pusat direktorat. Pemimpin Houthi, mengatakan bahwa sertifikat kelulusan yang nyata berada di dalam *front* pertempuran dan bukan di sekolah. Al Qassimi menambahkan, kalian tidak boleh hanya duduk di sini, kalian harus pergi menuju *front* pertempuran, pendidikan memiliki sertifikat kelulusan berupa nilai di sini, tapi di *front* pertempuran terdapat sertifikat kelulusan hakiki yang merupakan sertifikat kehormatan. Sementara itu, Al-Mahwit Media Center mengatakan bahwa hasutan dan dorongan Al-Qassimi terhadap para siswa untuk berlatih dan pergi menuju ke pertempuran telah membuat marah banyak siswa. Milisi kudeta terus melakukan tindakan negatif terhadap proses pendidikan, dan melakukan manipulasi masa depan pendidikan serta bermain dengan masa depan generasi muda (Eramuslim.com edisi Senin, 23 Syawwal 1438 H /17 Juli 2017).

Ada narasi tentang jihad yang disosialisasikan oleh kelompok radikal dari Turki juga diberitakan oleh EraMuslim.com. Narasi jihad yang dimaksud adalah "bahwa

tidak ada manfaatnya pengajaran matematika bagi siswa yang tidak tahu arti jihad". Narasi jihad ini selanjutnya oleh salah satu anggota Komite Pendidikan Nasional dalam parlemen Turki dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Turki. Langkah ini memperoleh apresiasi dari Salah satu anggota Partai Keadilan dan Pembangunan, Hakim Ahmed Hamdi alkamili. Menurutnya, pengenalan jihad ke dalam kurikulum pendidikan baru di Turki diakui sebagai langkah yang bagus. Baginya, jihad adalah salah satu unsur Islam terdahulu. Sius Hurriyet menukil perkataan alkamili bahwa: " ..Ketika kita melihat para sultan Ottoman, hampir semua dari mereka tidak pergi haji karena tidak ingin absen dari jihad". Menteri Pendidikan Turki Ismail Yilmaz pada tanggal 18 Juli lalu mengatakan bahwa kurikulum nasional di Turki pada akhirnya , memasukkan tema jihad ke dalam bagian dari hukum Islam dalam buku-buku pendidikan. Dan ia mengatakan jihad adalah salah satu unsur dalam agama kita .. tugas dari Departemen Pendidikan untuk mengajarkan setiap konsep dengan cara yang benar .. Kami juga bekerja untuk memperbaiki pandangan terhadapnya atau hal-hal yang salah dalam pengajarannya. Kementerian kami telah mengambil keputusan yang sangat penting. Jika shalat adalah salah satu pilar agama maka jihad adalah ibarat tenda. Sebuah tenda tidak akan terbangun tanpa adanya pilar-pilar. Tidak ada manfaatnya mengajarkan matematika kepada anak bila mereka tidak mengetahui makna jihad (Eramuslim.com edisi Senin, 1 Zulqa'dah 1438 H/24 Juli 2017).

Sementara itu, soal Perppu Tahun 2017 tentang Ormas Islam juga menjadi berita hangat dari EraMuslim.com. Terkait hal ini, EraMuslim.com memberitakan tentang pernyataan Amin Rais "Perppu Ormas Itu Langkah Fatal Penguasa". Mantan Ketua MPR RI Amien Rais bersuara

keras terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas). Amien menilai Perppu itu langkah fatal Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setelah pemerintah menerbitkan Perppu ormas itu, saya menilai itu langkah fatal Jokowi. Dia sudah mengabaikan fatwa-fatwa. Dengan hadirnya Perppu tersebut keputusan pemerintah, melalui Menkum HAM dan Mendagri bisa membubarkan ormas yang melanggar aturan. Sejauh ini memang sudah membubarkan HTI yang memang disebut ingin menegakkan khilafah di Indonesia. Jadi jelas nanti korban pertama HTI, siapa tahu nanti FPI, kemudian yang lainnya. Amien yang kini merupakan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu berharap DPR bisa menolaknya atas keputusan pemerintah lewat Perppu itu. Sekalipun sudah diumumkan kalau bisa ditolak DPR. Karena saya khawatir Jokowi keliru. Jelas sekali ini harus ditolak. Lantas solusi apa bagi ormas penentang ideologi negara? Amien menyatakan, itu bisa dilakukan dengan cara diskusi sebagai jalan terbaiknya. Kalau ormas berbahaya yang mau mengganti Pancasila, panggil saja. Debat dan argumen. Kasih tegang-tegangannya tertentu, jelasnya. Dia menyatakan, sejak awal tidak pernah setuju dengan adanya pembubaran HTI. Baginya HTI adalah kumpulan orang Islam yang hadir dari kalangan muda dan bisa menjadi solusi bangsa ini. Semangat Khilafah yang didengungkan HTI bukan berarti tidak nasionalis, tetapi mengandung harapan bahwa pemegang otoritas kekuasaan adalah orang yang beragama, cinta pada kebenaran tidak suka dengan kedzaliman. Menurut saya HTI kumpulan orang Islam dari kampus yang berlatih. Yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi mana salahnya. Khilafah itu artinya pemegang kekhilafahan, jadi orang beragama, cinta kebenaran tidak suka kedzaliman dan lain-lain. Jadi tolong Saya katakan apa

adanya supaya tim Perppu tadi dengan Jokowi-JK bisa berpikir ulang. Kalau dilaksanakan DPR mengamini umat tidak tertahankan, negeri ini jadi anarkis dan bergerak hal-hal yang tidak diinginkan (Eramuslim.com edisi Jumat, 14 Juli 2017).

Oleh karena itu, wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta "MK Batalan Perppu Ormas". Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pemerintah tidak bisa merampas hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Ketentuan itu berlaku sejak amandemen UUD 1945 ke empat. Setelah UUD diamandemen empat kali maka kewenangan-kewenangan yang merampas hak-hak asasi manusia itu berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan itu tidak bisa lagi dirampas dengan sepihak. Fahri meyakini pembubaran ormas menggunakan Perppu berpotensi dibatalkan lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak bisa sepihak meski lalui mekanisme UU. Saya khawatir saja nanti Perppu ini *dijudicial review* pasti akan dibatalkan. Oleh karena itu, dia menginginkan agar proses pembubaran ormas kembali melalui proses pengadilan. Karena hukum itu kan punya Tuhan sebetulnya yang dipinjam manusia untuk saling mengatur tetapi ketika dipakai kita harus pakai majelis hakim. Maka kita menyebutnya hakim wakil Tuhan kan begitu. Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan penerbitan Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas. Salah satu pasalnya adalah memberikan kewenangan kepada Kemenkum HAM dan Kemendagri untuk mencabut izin serta status hukum ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Perppu tentang Ormas ini terlebih dahulu akan dimintakan persetujuan ke DPR. Selain itu, sejumlah

pihak juga berancang-ancang mengajukan *judicial review* atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal Perppu ini (Eramuslim.com edisi Jumat, 14 Juli 2017).

Pendapat senada disampaikan oleh Ketua Aliansi Ormas Islam Bersatu (AOIB) Habib Kholilullah Alhabsyi. Menurutnya, Perppu Ormas yang dikeluarkan oleh pemerintah Joko Widodo bisa menimbulkan kegaduhan baru. Ini tindakan pemerintah bisa buat kegaduhan baru, insyaallah kami akan uji materi di MK. Pernyataan Habib Kholil itu langsung diamini oleh salah satu orator dari gerakan pemuda Jakarta. Dengan lantang dia menegaskan siap untuk berjihad menentang Perppu Ormas ini. Kami tinggal menunggu fatwa jihad dari para ulama pemimpin kami. Kami siap angkat senjata, kami siap menumpahkan darah kami untuk menolak Perppu Ormas ini. Saat ini, aksi sudah bubar dan massa aksi berangsur-angsur bubar. Sebelum aksi berakhir, Ustaz Yasin lebih dulu membacakan doanya. Dalam doanya, Ustaz Yasin berharap, ormas Islam dan para pemimpin dakwah bisa diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan, seperti Perppu Ormas. Berikan kekuatan kepada pemimpin dakwah dan ormas Islam supaya tegar. Sebagian peserta aksi tampak terisak, menitikkan air mata. Dia juga berpesan kepada massa yang hadir untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan merapatkan barisan. Insyaallah perjuangan ini akan dimenangkan oleh Allah. Perppu tentang Ormas dikeluarkan sejak 10 Juli 2017. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah berharap masyarakat bisa menerima pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 (EraMuslim.com edisi Rabu, 25 Syawwal 1438 H/19 Juli 2017).

Salah satu kegaduhan yang diakibatkan oleh adanya Perppu tentang ormas Islam adalah munculnya kegiatan

aksi Damai 287 (28 Juli 2017). Insha Allah akan ada 1.000 Merah Putih berkibar. Koordinator Lapangan Alumni Aksi 212 Haji Daud mengungkapkan bahwa rencananya para peserta aksi demonstrasi menolak Perppu Ormas 287 akan membawa 1000 bendera merah putih. Kita tunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa presidium 212 sangat cinta Indonesia. Terkait Aksi 287, Daud menyatakan bahwa pihak penyelenggara sudah menyampaikan izin kepada pihak kepolisian. Rute Aksi 287 akan dimulai dari Masjid Istiqlal, kemudian akan melakukan *long march* melewati monumen nasional dan Patung Kuda menuju Gedung Mahkamah Konstitusi. Waktunya setelah salat Jumat sampai pukul 18.00 WIB. Kami prediksi selesai setelah ashar, jelas Daud. Sampai di Gedung MK, peserta aksi akan mengirim delegasi ke hakim MK untuk menyampaikan keganjilan-keganjilan dalam Perppu Ormas. Sementara itu kuasa hukum Presidium Alumni 212 Kapitra Ampera mengatakan Aksi 287 bukan bentuk perlawanan, melainkan upaya koreksi terhadap kebijakan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas. Karena cinta negara ini maka kita koreksi. Besok itu kita bersama-sama mengawal pendaftaran gugatan baru oleh ormas-ormas yang lain ke Mahkamah Konstitusi. (Eramuslim.com edisi Jumat, 28 Juli 2017 Redaksi).

Kegaduhan lainnya adalah munculnya Aksi 299. Diberitakan tentang "Dukung Aksi 299, Warga Sekitar Gedung DPR Dirikan Pos Konsumsi". Dalam Aksi 299 yang digelar oleh Presidium Alumni 212 terlihat sebuah tenda di seberang Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat yang dijaga sejumlah kaum ibu-ibu yang tengah membagikan konsumsi kepada peserta aksi. Konsumsi yang dibagikan berasal dari komunitas Muslim Benhil Bersatu yang terdiri dari warga masyarakat sekitar Bendungan Hilir yang peduli

dengan peserta Aksi 299 yang digelar pada Jumat (29/9) ini. Ibu Reni (47), warga Benhil di dalam tenda pembagian makanan dan minuman tersebut mengatakan, kita tidak dari mana-mana cuma memang ingin membantu menyediakan makanan dan minuman buat peserta aksi dan warga pejalan kaki yang melintas di depan Gedung DPR MPR Senayan, yang baru selesai sholat Jumat, karena memang hari ini cuacanya panas dan bikin cepet orang lemes jadi kita swadaya aja bikin tenda makan dan minuman begini. Saat ditanya mengenai dana yang dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas logistik tersebut ia menambahkan, kita swadaya aja, bikin tenda di sini, ada mobil yang lewat dan tiba-tiba menurunkan beberapa box makanan dan minuman juga snack seperti rem-arem ayam dan buah jeruk ini. Selain membagikan nasi bungkus dan air minum, tenda itu juga turut menyediakan kopi, teh, susu cokelat yang diperuntukkan buat peserta aksi 299. Tampak para pejalan kaki baik anak-anak sekolah maupun orang dewasa yang rencana mengikuti aksi 299 ini turut meminta satu bungkus nasi dan air mineral sebagai bekal untuk mengikuti jalannya aksi siang ini (Eramuslim.com edisi Jumat, 28 Juli 2017).

Ditambahkan Aksi 299 dihadiri oleh Amien Rais, Taufik Ismail, dan Sejumlah Tokoh Akan Hadiri. Sejumlah tokoh dan figur publik dikabarkan akan turut serta dalam Aksi 299 yang digelar Presidium Alumni 212 di depan Gedung DPR/MPR, Jumat (29/9). Aksi yang akan menyuarakan penolakan terhadap kebangkitan kembali PKI dan penolakan terhadap Perppu Ormas itu akan dihadiri oleh tokoh reformasi 1998 Amien Rais, penyair senior Taufik Ismail, musisi Ahmad Dhani dan sejumlah tokoh lainnya. Insha Allah tokoh nasional dan agama akan hadir. Amien Rais sudah konfirmasi, saya sudah ketemu, lalu Gus Nur, Ahmad Dhani hadir, kata Ketua Presidium Alumni 212

Slamet Maarif di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/9) kemarin. Selain itu, pakar hukum tata negara yang juga menjadi kuasa hukum HTI yang menjadi korban pertama sejak diberlakukannya Perppu Ormas, Yusril Ihza Mahendra, akan menyampaikan orasi tertulisnya. Pak Yusril sedianya akan hadir, tapi masih di Thailand, nanti akan menyampaikan orasi tertulis yang akan dibacakan, tuturnya. Sementara untuk tema penolakan terhadap munculnya kembali PKI, Presidium Alumni 212 telah meminta penyair senior Taufiq Ismail untuk membacakan puisinya. Saya baru ketemu dengan Pak Taufiq Ismail, salah satu budayawan kita. Saya sudah minta beliau hadir untuk membacakan puisi tentang kebangkitan PKI (EraMuslim.com edisi Jumat, 29 September 2017).

Lebih lanjut diberitakan bahwa Fadli Zon dan Agus Akan Temui Perwakilan Aksi 299. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan dirinya bersama Fadli Zon akan menerima perwakilan pendemo 299 yang melakukan aksinya di depan Gedung DPR RI. Hari ini ada saudara-saudara kita yang melakukan unjuk rasa dan hadir di DPR ini tentunya kami sebagai pimpinan DPR berkewajiban untuk menerimanya, kata Agus di Gedung DPR RI, Jumat (29/9). Agus menjelaskan dalam pertemuan nanti pihaknya akan mempertanyakan tujuan mereka melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPR. Nanti yang akan menerima saya sendiri dan pak Fadli Zon, jelasnya. Agus juga menuturkan selain dirinya dan Fadli Zon kemungkinan akan ditambah dengan pimpinan Komisi II. Karena ada hal yang ingin ditanyakan masalah Perppu dari ormas (EraMuslim.com edisi Jumat, 29 September 2017).

Pemerintah melalui Polda Metro DKI Jakarta merespon Aksi 299 tersebut dengan menurunkan Tim Asmaul Husna. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz mengatakan

pihaknya menurunkan tim Asmaul Husna untuk melakukan pengamanan demonstrasi 299 di Gedung DPR RI. Ya salah satunya dengan tim asmaul husna, apalagi ini hari jumat dan itu kan sudah sering kami lakukan. Saya sudah perintahkan kepada polwan untuk membawa aqua serta permen buat pengunjuk rasa, kata Idham di Gedung DPR RI, Jumat (29/9). Idham menjelaskan jika tim *asmaul husna* yang diturunkan ada dari Kompi Brimob Jawa Barat, ada juga dari Polda Metro Jaya. Dia juga mengatakan tim ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bandara Kombes Arif Rahman. Dia kan dulu mantan Den Brimob di sana, jelasnya. Idham juga meminta kepada massa aksi untuk segera membubarkan diri jika sudah ada perwakilan aksi yang diterima oleh Ketua DPR. Kalau memang sudah selesai aspirasi sudah tersampaikan ke DPR maka kami harap aksi segera bubar dengan baik dan tertib lagi, tutup Idham (EraMuslim.com edisi Jumat, 29 September 2017).

Sementara itu, Wiranto mewakili Pemerintah RI diberitakan keheranannya tentang Aksi 299. Dia mengatakan, "Heran: Pemerintah Sudah Larang PKI, Yang Didemo Itu Apa Lagi?" Menko Polhukam Wiranto menanggapi Aksi 299 terkait PKI dan Perppu Ormas. Dia menjelaskan pemerintah sudah tegas melarang organisasi-organisasi terkait komunisme. Bahkan, Wiranto mengatalan, dalam Perppu Ormas juga diatur larangan ideologi radikal lain, baik dari ekstrem kanan maupun kiri yang bertentangan dengan Pancasila. Misal demo munculnya atau anti-PKI, pemerintah kan sudah larang, lha pemerintah sudah melarang, yang didemo apa lagi? Apalagi mendemo Perppu, sudah ada prosesnya, kalau enggak setuju, ada proses di MK, kita tunggu saja, kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (29/9). Wiranto mengatakan, dalam negara demokrasi, aksi demonstrasi diperbolehkan dan diizinkan

undang-undang (UU). Hanya, kata dia, demo yang seperti apa dulu? Selama demo itu konstruktif, tidak mencekam dan tidak mengganggu stabilitas nasional, sah-sah saja. Didemo juga enggak ada pengaruhnya. Para pengusaha tanya ke saya, gawat atau enggak, kita perlu ke luar negeri atau enggak? Mantan Panglima ABRI itu mengatakan demonstrasi memiliki aturan main. Ada aturan mengemukakan pendapat di muka umum. Dia mencontohkan demonstrasi yang justru bisa menjadi objek tontonan turis kalau memang aksi itu dilakukan tertib dan sesuai sasaran. Sementara pengerahan massa yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, menurutnya, itu demonstrasi yang tidak dibenarkan. Wiranto meminta yang terlanjur demo agar berpikir lebih jernih, jangan sampai dapat diombang-ambingkan untuk sesuatu yang tidak jelas (EraMuslim.Com edisi Jumat, 29 September 2017).

Selanjutnya, Jokowi meminta para ulama untuk redam gejolak akibat Perppu Ormas yang dikeluarkannya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta semua pihak untuk meredam gejolak akibat penerbitan Perppu tentang Ormas. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima kehadiran puluhan ulama asal Sulawesi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/7/2017). Yang paling penting, bagaimana umat bisa menahan diri jangan sampai ada gejolak. Dan kita berusaha bersama pemerintah dalam menjaga negara kita. Jadi kita diusahakan untuk meredam hal-hal yang utamanya berkaitan dengan Perppu ini. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Sulawesi Barat, Thamrin. Setelah mengikuti pertemuan bersama Jokowi, Thamrin kembali mengulang pesan yang sama. Yang paling penting, bagaimana umat bisa menahan diri jangan sampai ada gejolak. Dan kami berusaha bersama pemerintah dalam menjaga negara kita. Jadi kami

diusahakan untuk meredam hal-hal yang utamanya berkaitan dengan Perppu ini. Thamrin juga mengakui, banyak masyarakat yang sebenarnya tidak mengerti tujuan pemerintah menerbitkan Perppu tersebut. Karenanya, Jokowi pun berpesan kepada para ulama untuk menjelaskan tujuan Perppu Ormas kepada seluruh umat, khususnya di seluruh Sulawesi. Memang butuh penjelasan kepada masyarakat, kepada umat agar tak ada yang salah paham. Karena kemungkinan mereka ada yang protes karena tidak paham. Perppu Nomor 2/2017 sendiri saat ini tengah menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Perppu tersebut menghapus pasal yang menyebutkan bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan. Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM (EraMuslim.com edisi Rabu, 25 Syawwal 1438 H/19 Juli 2017).

4. Kekerasan, Radikalisme dan Terorisme

Dewasa ini isu kekerasan, radikalisme, dan terorisme merupakan salah satu isu yang sangat fenomenal di Indonesia. Isu ini ternyata menjadi salah satu perhatian serius dari EraMuslim.com. Kasus bom panci yang meledak di sebuah rumah kontrakan di Kampung Kubang Bereum, Kelurahan Buahbatu, Kota Bandung sekira 15.30 WIB sore tadi merupakan berita yang menarik bagi Era.Muslim.com. Semula bom rakitan tersebut rencananya hendak diledakkan di tiga lokasi di Bandung. Berdasarkan informasi yang diperoleh bom panci tersebut rencana akan diledakkan di Cafe Bali Jalan Braga, RM Celengan di Astana Anyar dan Gereja Buahbatu semuanya berlokasi di Bandung. Tetapi kemudian pelaku yang bernama Agus Wiguna ternyata meledakkan bom tersebut di rumah kontrakannya. Ledakan

tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan dinding rumah kontrakkannya pun tidak lecet, seperti terlihat dalam foto. Dari foto yang tampak hanya berupa seperti meja makan berikut lauk dan piring serta magicom yang berantakan habis diacak-acak kucing. Inilah kehebatan bom panci yang dikatakan bisa meledak dengan dahsyat, namun dinding rumah kontrakan saja tidak lecet sedikit pun (Era Muslim.com edisi Minggu, 9 Juli 2017).

Isu lain yang terkait dengan kekerasan, radikalisme, dan terorisme adalah kasus pembacokan terhadap Hermansyah, seorang pakar IT GNPF-MUI. Kasus ini beberapa edisi menjadi berita yang cukup menonjol bagi EraMuslim.com. Anwar Abbas, salah satu ketua MUI mengusulkan agar aksi pembacokan tersebut dikutuk keras oleh komponen umat Islam. Selanjutnya, MUI meminta agar polisi segera melakukan pengusutan tuntas atas kasus tersebut. MUI mengutuk dengan keras sikap dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap saudara Hermansyah di jalan Tol Halim yang benar-benar mengancam keselamatan dan jiwa yang bersangkutan. kepada Minggu (9/7/2017). Menurutnya polisi harus segera mengungkap kasus tersebut dengan segera agar tidak menjadi bola liar. Para pelakunya harus diseret ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Selain itu, menurutnya, jika kasus ini tidak segera diungkap masyarakat akan mengaitkan dengan berbagai persoalan di negeri ini. Palsunya, sesuai dengan keilmuan dan keahliannya dalam bidang telematika. Hermansyah telah mampu mengemukakan perspektif lain dari beberapa kasus yang ada, sehingga Hermansyah terkesan memang menjadi target pembacokan. Karena itu, untuk menghilangkan sakwasangka dan mencegah beredarnya isu yang tidak baik

yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan di negeri ini, MUI mengimbau polisi bergerak cepat. MUI menghimbau pihak kepolisian untuk secepatnya dapat menangkap para pelaku dan memproses serta menggiringnya ke meja hijau untuk diadili dan dihukum dengan seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Dosen Teknologi Informasi ITB, Hermansyah, menjadi korban pembacokan oleh sejumlah orang tak dikenal, Minggu pagi. Ia dibacok saat melintas di ruas jalan Tol Jagorawi. Kejadiannya di KM 6 tol. Di daerah Cipayung, Jakarta Timur, ujar Kepala Polres Jakarta Timur Komisariss Besar Andry Wibowo (EraMuslim.com edisi Senin, 16 Syawwal 1438 H/10 Juli 2017).

Terhadap kasus pembacokan Hermansyah tersebut, Habib Riziq Shihab (HRS) mengintakan kepada umat Islam untuk meningkatkan kewaspadaan. Imam Besar Front Pembela Islam ini meminta umat Islam tidak terprovokasi atas kejadian pembacokan aktivis GNPf-MUI Hermansyah. Hal tersebut disampaikan salah satu penasehat hukum HRS, Sugito Atmo Pawiro. Habib sangat prihatin sekali, supaya umat tidak terprovokasi dan berspekulasi. Tingkatkan kewaspadaan saja. Sugito mengatakan, HRS juga mengecam keras tindak kriminal yang dilakukan orang tidak dikenal pada Hermansyah. Tindakan pembacokan pakar IT Institut Teknologi Bandung (ITB) itu, katanya, merupakan kasus kejahatan serius. HRS mengaku khawatir adanya sekelompok orang yang ingin mengadu domba umat Islam. Mengecam keras, (Habib Rizieq) mengecam keras itu, jelas dia. Sebelumnya, Hermansyah dibacok oleh sekelompok orang tak dikenal. Pembacokan terjadi di sekitar Tol Jagorawi, Jakarta Timur sekitar pukul 03.00 WIB dini hari tadi. Saat ini Hermansyah masih dirawat di Rumah Sakit Hermina Depok. Atas kejadian tersebut, Hermansyah

menderita luka parah di bagian leher akibat sabetan senjata tajam, dan beberapa luka di dahi, telinga dan pergelangan tangan (EraMuslim.com edisi Senin, 16 Syawal 1438 H/10 Juli 2017).

Di pihak lain, pengacara senior Mahendradatta menyesalkan upaya pihak-pihak tertentu yang mencoba melakukan pembunuhan karakter terhadap pakar IT ITB Hermansyah dan sang istri, Irina. Sadis, sudah dipukuli, dibacok merasakan luka yang menyakitkan, sekarang ada upaya membunuh karakter Hermansyah dan Istrinya. Secara khusus, Mahendradatta menyoal media-media liberal yang berupaya mengorek sisi negatif keluarga Hermansyah, dan *memblow up* sisi positif pelaku pembacokan Hermansyah. Keterlaluan, setelah bernafsu mengorek sisi negatif keluarga Hermansyah, media blow up sisi positif pelaku pembacokan. Sebelumnya, sejumlah media memunculkan isu bahwa istri Hermansyah mantan PSK. Hal itu dibantah juru bicara keluarga Hermansyah, Ikhwan. Menurut Ikhwan, Irina tidak pernah melakukan bisnis prostitusi. Klien saya (Irina) adalah seorang muslimah dan membantah keras dia tidak pernah melakukan bisnis prostitusi. Ikhwan mengatakan pasca kejadian pembacokan terhadap Hermansyah, banyak isu yang dialamatkan pada sosok Irina. Akibatnya, Irina merasa tertekan dan depresi. Hingga saat ini, polisi berhasil menangkap empat orang dari lima pelaku pembacokan Hermansyah di tol Jagorawi. Keempatnya adalah Laurens Paliyama, Edwin Hitipeuw, Richard dan Eric. Richard dan Eric dibekuk di Bandung, Jawa Barat. Sementara Laurens dan Edwin ditangkap di Jalan Raya Sawangan, Depok (Eramuslim.com edisi Jumat, 14 Juli 2017).

Menurut Ichsanudin Noorsy, politisi dari PPP, bahwa Hermansyah sudah dikuntit sejak lama! Aktivis yang juga pengamat ekonomi ini datang ke Rumah Sakit Hermina

Depok untuk melihat kondisi sahabatnya, Pakar Telematika Hermansyah, yang menjadi korban pengeroyokan oleh orang tidak dikenal di Tol Jagorawi. Usai keluar dari rumah sakit, Noorsy mengaku cukup kaget rekan diskusinya menjadi korban pengeroyokan hingga harus lakukan operasi oleh dokter. Terkejut jam 11.00 WIB dapat WA (WhatsApp). Biasanya kami sering diskusi soal bagaimana situasi IT dalam perspektif ekonomi dan politik. Dia juga menyimpulkan bahwa ada indikasi korban sudah diikuti sejak jauh hari. Saya tadi mencoba menggali keterangan dari keluarga soal peristiwa di mana, kayak apa dan nopolnya apakah tercatat atau tidak? Pelaku kan dua mobil, pertama diserempet. Herman ini mengejar dan berhenti. Tiba-tiba datang mobil lain dan disabet. Artinya Herman sudah diikuti. Diikuti bukan dari semalam saja. Pasti pelaku akan mencari momen yang pas kapan Herman akan dikerjai. Kalau saya melihat ada motif ke arah sana.

Kasus kekerasan serupa juga diberitakan oleh EraMuslim.com, yaitu kasus teror dengan air keras terhadap Novel Baswedan. Kasus Novel kita tahu belum terungkap. Lalu ada kasus Herman. Saya curiga dalam situasi ini, hukum yang dikembangkan bukan untuk menumbuhkan rasa keadilan masyarakat. Kecurigaan saya ini tidak boleh terwujud. Berbahaya. Sebelumnya, Pjs Kasubbag Humas Polresta Depok, AKP Firdaus, mengatakan, dari hasil pengecekan ke RS Hermina bahwa dibenarkan ada pasien yang diduga korban pengeroyokan dan penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 170 juncto 351 KUHP sekitar jam 04.00 WIB tadi pagi. Korban bernama Hermansyah beralamat di Kelurahan Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, ujar AKP Firdaus saat dikonfirmasi Ahad, 9 Juli 2017. Ia menambahkan, peristiwa tersebut terjadi di Tol Jagorawi KM 6 (antara TMII- Tol JORR), Jakarta Timur. Korban bersama

istrinya dari arah Jakarta bermaksud pulang ke Depok dengan menggunakan mobil Toyota Avanza B 1086 ZFT. Sekitar KM 6 mobil korban diserempet oleh mobil pelaku jenis sedan lalu korban disuruh menepi oleh pelaku kemudian oleh pelaku disuruh membuka pintu. Setelah turun, kata Firdaus, korban langsung diserang oleh para pelaku yang berjumlah sekitar lima orang dan seorang diantaranya menggunakan senjata tajam. Setelah itu para pelakunya melarikan diri. Akibat kejadian tersebut korban terluka dibagian kepala, leher dan tangan, lalu korban menyender di jok mobil dan sempat ditolong oleh petugas Jasa Marga kemudian korban dibawa ke RS Hermina Depok. Mengenai motif, Firdaus belum bisa menyimpulkannya karena saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh petugas. Kami juga berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur karena TKP di sana. Masih didalam (EraMuslim.com edisi Senin, 16 Syawwal 1438 H/10 Juli 2017).

Selain kepada tokoh dan aktivis di Indonesia, kasus kekerasan yang diberitakan oleh EraMuslim.com juga berita kekerasan yang terjadi di Rohingya. PBB menyatakan pada hari Selasa ini bahwa 123.600 orang, kebanyakan Muslim Rohingya, telah mengungsi menyelamatkan diri dari kekerasan di Burma untuk mencari perlindungan di Bangladesh. Jumlah pengungsi meningkat tajam dalam 24 jam terakhir, hingga 37.000 pengungsi menyeberangi perbatasan dalam satu hari. Negara bagian Rakhine yang miskin di Birma, yang berbatasan dengan Bangladesh, telah menjadi fokus kerusuhan keagamaan antara Muslim dan Budha selama bertahun-tahun. Kelompok minoritas Rohingya terpaksa hidup dengan pembatasan kebebasan bergerak serta kewarganegaraan yang mirip dengan apartheid, kata pengamat. PBB mencurigai tentara Myanmar melakukan sejumlah kejahatan terhadap kemanusiaan

terhadap minoritas Rohingya (Eramuslim.com edisi Selasa, 14 Zulhijjah 1438 H/5 September 2017). Pada edisi yang lain juga diberitakan tentang kekerasan yang terjadi pada seorang nenek Rohingya berusia 75 tahun. Diberitakan sang nenek dibakar dan dipenggal kepalanya. Sehari sebelum penyerangan itu, orang-orang dari desa sedang menyeberang sungai, Sungai Dual Toli. Berenang dengan sekuat tenaga untuk lari dari serbuan militer. Lebih dari 10 orang meninggal di sungai, begitu menurut Petam Ali (30), orang yang melindungi para pengungsi di rumah keluarganya. Mereka menyaksikan desanya dibakar dari seberang sungai. Menurut kesaksian mereka:

“Pada pukul 03.30 waktu setempat keesokan harinya, Ali mendengar suara tembakan tapi tidak yakin kemana arah tembakan itu tertuju. Aku tinggal di bagian utara desa dan militer itu menyeberang sungai lebih jauh ke utara dan mereka berduyun-duyun. Aku meninggalkan keluargaku sebentar untuk mengecek hutan dan barak tentara. Kami mengintai hingga pukul 8 pagi hingga para tentara itu bergerak, memakai pakaian hijau gelap dan mereka semua jalan kaki. Aku mengajak keluargaku lari, kami buru-buru namun nenek kami terlalu tua untuk lari. Sesampainya di hutan, kami menyaksikan rumah kami dibakar. Peristiwa yang baru pertama kali terjadi di Tula Toli, tutur Ali kepada Guardian, 6 September 2017. Rumah Ali, bangunan kayu yang terdiri delapan kamar itu ia bangun dengan tiga saudara laki-lakinya untuk 16 anggota keluarga besar. Atapnya dari daun jerami dan dedaunan. Para tentara itu menggunakan granat berpeluru roket dan mereka menembakkannya ke rumah-rumah Rohingya dengan tetap sasaran. Semua rumah terbakar. Di jalanan, aku melihat orang meninggal. Aku mengenali orang itu, namanya Abu Shama. Dia ditembak di dadanya. Usianya 85 tahun. Di reruntuhan rumahnya, Ali menyaksikan neneknya yang meninggal dalam keadaan hangus dan dipenggal kepalanya. Namanya Rukeya Banu. Ia berusia 75 tahun. Saat

aku kembali ke hutan, aku menceritakan seluruh peristiwa memilukan itu kepada yang lain. Mereka pun menangis tersedu-sedu” (Eramuslim.com edisi Senin, 20 Zulhijjah 1438 H/11 September 2017).

Lebih lanjut, kasus kekerasan lain yang diberitakan oleh Era.Muslim.com adalah kekejaman Rezim Myanmar yang membantai Muslim Rohingya dengan sistematis. Kelompok pembela hak asasi manusia, Amnesty International (AI), merilis citra satelit terbaru yang menunjukkan adanya kampanye terorkestrasi untuk membakar desa-desa etnis minoritas Rohingya di Rakhine, Myanmar. AI menuduh pasukan Myanmar berupaya menyingkirkan Rohingya. Sedikitnya 389 ribu etnis Rohingya di Rakhine, melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan meletus pada 25 Agustus. Insiden tersebut dipicu oleh serangan ke pos-pos perbatasan di Rakhine oleh kelompok militan. Tentara Myanmar lalu membalas serangan dengan menggelar agresi militer. Pemerintah Myanmar mengatakan, saat ini sekira 30% desa-desa di Rakhine kosong melompong ditinggal penghuninya. Etnis Rohingya yang mendominasi di Rakhine selama ini dianggap sebagai imigran ilegal karena Pemerintah Myanmar menolak memberikan status kewarganegaraan. AI mengklaim memiliki data baru berdasarkan data deteksi api, citra satelit, foto dan video, serta wawancara dengan saksi mata. Semua bukti itu menunjukkan adanya kampanye terorkestrasi dari pembakaran sistematis dengan target desa-desa etnis Rohingya selama tiga pekan terakhir. Bukti-bukti tidak dapat dibantah. Pasukan keamanan Myanmar tengah membakar wilayah utara Rakhine State dalam sebuah kampanye yang ditargetkan untuk mendorong orang-orang Rohingya keluar dari Myanmar. Kasus kekerasan ini memperoleh komentar keras dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

Menurutnya, etnis Rohingya saat ini menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan. Pria asal Portugal itu menambahkan, serangan ke desa-desa di Rakhine sangat tidak bisa diterima. Dewan Keamanan PBB sendiri sudah mendesak dilakukan langkah darurat untuk mengakhiri kekerasan tersebut (Eramuslim.com edisi Jumat, 15 September 2017).

Kasus kekerasan lain yang diberitakan oleh Era.Muslim.com adalah kasus kekerasan yang terjadi di Palestina dan Suriah. Dilaporkan ada 15 warga Palestina terluka akibat peluru karet pasukan Zionis. Konfrontasi terjadi lagi di pintu asbat di Yerusalem yang diduduki, yang mengakibatkan 21 warga Palestina luka-luka, termasuk 15 diantaranya terluka karena peluru karet, menurut Bulan sabit merah Palestina. 6 orang korban luka telah dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut akibat cedera yang disebabkan oleh peluru karet dalam serangan itu. Di Betlehem, selatan desa al-Khader, sejumlah warga yang terluka tercekik dalam konfrontasi dengan pasukan pendudukan Israel. Menurut Komite Perlawanan Dinding dan Pemukiman di Khadeer menyatakan bahwa bentrokan pecah pada malam Senin antara para pemuda yang sedang menggelar aksi solidaritas untuk Masjid Al Aqsa, dengan pasukan pendudukan Israel, di daerah bukit kota tua. Para tentara pendudukan Israel menembaki para peserta aksi, dan melukai sejumlah warga dan banyak diantaranya menderita sesak napas akibat menghirup gas air (Eramuslim.com edisi Senin, 1 Zulqa'dah 1438 H/24 Juli 2017).

Ditambahkan bahwa pasukan Zionis tembak dua nelayan Palestina. Pasukan pendudukan Israel kembali berulah. Kali ini dua nelayan Palestina terluka akibat tembakan yang

diarahkan kepada mereka pada hari Ahad malam, di laut kota Khan Younis di Jalur Gaza selatan. Seorang juru bicara Departemen Kesehatan di Gaza, Ashraf Qudrah, menjelaskan dua nelayan Palestina mengalami luka di kakinya akibat tembakan pasukan Israel saat mereka melakukan pekerjaan mereka di wilayah laut kota Khan Yunis. Dia mencatat, dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita Anatolia, kedua korban itu kini dipindahkan ke Kompleks medis Nasser di Khan Younis untuk menerima perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ketua nelayan Palestina di Jalur Gaza, Nizar Ayyash, mengatakan kepada Anatolia bahwa pasukan angkatan laut Israel menembak langsung nelayan di Laut Khan Yunis, yang menyebabkan mereka terluka di tempat. Para pejabat Palestina di Gaza mengatakan bahwa pasukan pendudukan militer hampir setiap hari menembak ke arah nelayan Palestina dan melukai serta menangkap beberapa dari mereka dengan dalih para nelayan telah melampaui daerah yang diperbolehkan untuk menangkap ikan yaitu sekitar sepanjang 6-9 mil laut (Eramuslim.com edisi Senin, 23 Syawwal 1438 H/17 Juli 2017).

Kekerasan yang terjadi di Suriah juga menjadi bahan berita Era.Muslim.com. Diberitakan bahwa Rezim Suriah mengintensifkan serangan bom dan serangan udara di lokasi terakhir yang dikuasai oposisi di ibukota, Damaskus, dan ini adalah serangan serta pemboman terberat yang dilakukan selama kampanye militer yang diluncurkan sejak dua bulan lalu, menurut para pejuang oposisi Suriah. Dengan dalih mengebom kelompok ekstremis di Ghouta timur, rezim Suriah mengintensifkan penembakan daerah Jopar dan Ein-Tirma, dimana kedua daerah ini termasuk dalam daerah yang diberlakukan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya, yang diperantarai Rusia dan diumumkan beberapa minggu yang lalu. Pemboman oleh

rezim tersebut, dilakukan dari lokasi di atas gunung Qaysun yang strategis menghadap ke Damaskus, dari serangan yang terjadi tiga hari berturut-turut ini, dilaporkan telah menewaskan puluhan orang dalam tiga hari tembakan terus-menerus. Daerah Zamaleka, Harasta dan Kafr Batna di Ghouta timur juga mengalami serangan ringan. Rezim juga telah membenarkan operasi militernya yang menargetkan lokasi Jabhah Nusra dan kelompok ekstremis lainnya di Al-Ghouta, yang sebagian besar berada di bawah kendali oposisi selama pertempuran enam tahun tersebut. Sedangkan pihak para pejuang oposisi menuduh rezim tersebut mengeksploitasi gencatan senjata untuk keuntungan militer, dan menyatakan bahwa rezim tersebut tidak berkomitmen sama sekali untuk melakukan gencatan senjata. Pihak oposisi berusaha mempertahankan keberadaannya di Damaskus setelah kehilangan beberapa wilayah diantaranya lingkungan Qaboun dan Barza (Eramuslim.com edisi Selasa, 16 Zulqad'ah 1438 H/8 Agustus 2017).

Ditambahkan bahwa organisasi non-pemerintah, Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia mencatat bahwa rezim Suriah telah lima kali menggunakan senjata kimia, setelah serangan terakhir terhadap kota, Khan Shaikhoun di Idlib pada bulan April lalu. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh jaringan yang berbasis di London tersebut menyatakan bahwa serangan kimia baru-baru ini dilancarkan oleh rezim Suriah di wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi di Damaskus dan pedesaannya. Dikatakan bahwa rezim Suriah tidak juga menghentikan penggunaan senjata kimia setelah pemboman bandara militer di Homs, yang merupakan basis pesawat rezim yang melakukan serangan di Khan Shaikhoun. Laporan ini mencatat bahwa rezim Suriah melakukan serangan dengan bahan kimia kecil hingga tidak

meninggalkan jumlah korban yang besar karena takut akan menarik perhatian dunia. jaringan mengatakan bahwa serangan baru oleh rezim yang terdokumentasi sebagian besarnya dilakukan dengan granat yang diyakini sebagai granat gas klorin, selama serangan militer rezim yang berusaha untuk merebut kendali dari kelompok oposisi bersenjata. Pada 4 April lalu Suriah meluncurkan serangan kimia di Khan ShaRezim ikhoun daerah Idlib hingga lebih dari 100 warga sipil tewas, dan melukai lebih dari 500 warga, dimana kebanyakan dari mereka anak-anak, diikuti oleh kecaman internasional. Menurut laporan itu, serangan kimia sejak Maret 2011 sampai dengan 31 Juli 2017, terjadi lebih dari 207 serangan dan telah menewaskan 1.420 orang, termasuk 1.356 warga sipil, diantaranya 186 anak-anak dan 244 wanita, dan 57 pejuang oposisi, dan 7 tahanan dari pasukan Rezim di penjara oposisi, sementara setidaknya 6672 orang teruka (Eramuslim.com edisi Selasa, 23 Zulqa'dah 1438 H/15 Agustus 2017).

Sementara itu, isu radikalisme yang direspon oleh Eramuslim.com adalah komentar Mahfud MD tentang isu radikalisme. Menurutnya, "Tidak Ada Radikalisme, Yang Ada Kemiskinan dan Ketidakadilan di RI". Melakukan aksi ataupun sebutannya demo adalah hak rakyat yang hidup di alam demokrasi. Sehingga sah-sah saja masyarakat melakukan unjuk rasa, dengan catatan tidak mengganggu ketertiban. Terlebih jika masyarakat yang melakukan aksi atau demo itu untuk memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Lalu berikutnya adalah keadilan. Saya mengatakan begini: Orang itu ikut demo-demo sampai marah-marah itu kan sebetulnya bukan soal ideologi tetapi merasa tidak diperlakukan dengan adil. Perlu keadilan. Oleh sebab itu strategi berikutnya adalah bagaimana keadilan itu ditegakkan. Kesejahteraan, keadilan, dan kemudian

penegakkan hukum, ujar Mahfud MD dalam seminar yang diadakan Fraksi Keadilan Sejahtera, Rabu (27/09), di ruang Fraksi, Senayan, Jakarta. Selain itu, menurutnya hal yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun kesejahteraan. Saya terus terang mengatakan begini, orang yang mengikuti gerakan-gerakan radikalisme pada dasarnya ditumpangi dan menumpangi kelompok radikal yang kecil sebenarnya. Kaum radikal ini melihat Indonesia banyak orang miskin dan banyak orang kecewa lalu ditumpangi untuk melawan. Sementara yang kecil-kecil mencari tumpangan ingin mengekspresikan karena ketidakpuasan-ketidakpuasan yang kemudian menggumpal dan menggumpal. Sebenarnya mereka tidak persoalkan dasar negara, Pancasila tetapi mempersoalkan bagaimana kemiskinan itu merajela. Data yang saya dapat dari seorang teman, Pak Halimsyah dari lembaga penjamin simpan pinjam itu 0,04 persen pemilik rekening di Indonesia itu jumlah lebih besar dari 47 persen. Jumlah keseluruhannya. Jadi dia memuat klasifikasi buku tabungan dan rekening bank 0,04 persen itu jumlahnya lebih besar daripada 47 persen. Ada 10 orang pemilik rekening lebih besar daripada 100 juta jumlah pemiliknya. Jadi kesenjangan luar biasa. Jadi inilah yang kemudian menurutnya bisa ditumpangi. Kalau ditanya: berapa sih lahan kita sekarang? Yang dikuasi oleh kita (lahan itu)? Hanya 1 persen penduduk Indonesia: menguasai 70 persen lahan. Sedangkan 99 persen penduduk Indonesia memperebutkan 30 persen lahan (EraMuslim.com edisi Jumat, 29 September 2017).[]

B. Respons Portal Islam terhadap Radikalisme

Secara umum ada keberpihakan yang cukup jelas terbaca dari beberapa artikel yang diproduksi oleh situs Portal Islam. Beberapa isu yang mendapat perhatian adalah terkait

kinerja Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahannya, isu pilkada DKI beserta "romantisme dan dinamikanya", dan isu Rohingnya, dan juga isu tentang bangkitnya komunisme (PKI) di Indonesia. Kritik terhadap pemerintahan Jokowi banyak sekali diproduksi dan dinarasikan dengan jelas oleh Portal Islam, bahkan menggunakan bahasa yang sedikit 'sarkas' misalnya artikel yang dimuat tanggal 5 Juli 2017 yang berjudul *Yth Presiden Jokowi, Anda Yang Semestinya Sungkem Cium Tangan Kepada Rakyat Karena Belum Berhasil Mengemban Amanat atau melawan rezim durjana* tanggal 17 September 2017.

Terkait radikalisme dan kelompok radikalisme, komunisme menjadi isu yang paling disorot dengan "tersangka" Partai Komunis Indonesia (PKI). Beberapa artikel, juga dilengkapi dengan pengalaman pribadi dari saksi sejarah yang ikut juga merasakan dan mengalami situasi kelam tersebut, mengupas dan mengekspose kekejaman dan tindakan radikal, bahkan teror, yang dilakukan oleh PKI. Selain PKI, biksu Wirathu di Myanmar juga mendapat perhatian Portal Islam. Situs ini bahkan mengambil judul yang cukup ekstrem "the face of terror" untuk membrikan label pada tindakan brutal yang dilakukan Wirathu.

Berikut adalah beberapa contoh artikel yang mewakili pandangan situs Portal Islam terkait beberapa isu radikalisme

1. Pancasila, NKRI, dan Negara Khilafah

Apabila ditilik dari narasi yang dibuat, pandangan terhadap khilafah mendapatkan posisi yang cukup jelas akan tetapi kurang mendapat dukungan narasi yang mendukungnya. Hal ini dapat dilihat dari konservatifnya situs ini melihat isu khilafah. Dalam artikel yang dimuat tanggal 27 Juli 2017, situs ini meyitir pendapat dari salah satu budayawan, Emha Ainun Nadjib yang mengatakan

"Jangan membenci HTI, karena mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Mestinya Anda panggil mereka untuk dialog, simposium 3-5 sesi supaya matang. Kalau langsung Anda berangus, nanti ada cipratannya, akan membengkak, serbuk-serbuknya akan malah melebar ke organ-organ lain. Mohon Anda juga jangan anti-Khilafah, kita jangan cari masalah dengan Allah, sebab Khilafah itu gagasan paling dasar dari qadla dan qadar-Nya. Kita punya keluarga dan anak cucu, mari hindarkan konflik laten dengan Tuhan."

Isu khilafah yang ditulis Cak Nun dalam artikel tersebut masih sangat umum pengertiannya dan seakan ingin "menggesar" kerasnya diskursus terkait khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan baru yang diusung oleh sebagian umat Islam. Narasi yang mungkin agak jelas menerangkan posisi Portal Islam adalah artikel yang dimuat tanggal 12 Agustus 2017 yang berjudul Memusuhi Khilafah adalah Penyesalan terbesar Jokowi.

Dalam artikel ini diulas kemungkinan penyebab Jokowi memusuhi khilafah ada misinformasi yang sangat keliru tentang khilafah, dan ini akan menjadi penyesalam terbesar Jokowi. Jokowi dan Laiskodat adalah dua contoh tentang penginformasian yang keliru mengenai khilafah. Mereka berdua ini, seperti halnya banyak orang lain (baik Islam maupun bukan), sama-sama tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang sistem khilafah. Mereka semua, barangkali kita juga, hanya disuguhi informasi yang 100% menjelaskan aspek-aspek yang menakutkan tentang khilafah.

Sebagai penulisnya, Asyari Usman kemudian menjelaskan konsep khilafah dan sisi positifnya yang kemudian dikatakan akan membuat Jokowi menyesal. Padahal, khilafah adalah pemerintahan yang dijalan oleh orang-orang yang paling

belakangan menikmati kesejahteraan setelah semua rakyat memperolehnya. Khilafah wajib (disyariatkan) melindungi semua penganut agama selain Islam.

Dapat dikatakan, narasi terkait khilafah yang tidak banyak dan masih sopannya bahasa yang digunakan mengindikasikan bahwa isu khilafah memang tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius dari situs Portal Islam.

Terkait dengan NKRI dan pemerintah, Portal Islam membuat narasi kritik kepada pemerintah yang disinyalir kembali mempraktekkan cara-cara orde baru dalam mempertahankan keamanan, dan stabilitas politik. Tulisan yang dibuat oleh Asyari Usman (seorang wartawan senior BBC) menjadi referensi yang dipakai untuk memperkuat opini tersebut. Di awal 1980-an, pihak penguasa merasa tidak punya cara lain untuk mengatasi premanisme yang merajalele di Indonesia. Penembakan misterius (populer dengan akronim "petrus"□) dilancarkan oleh penguasa. Menurut Komnas HAM, setidaknya 2,000 orang tewas dalam operasi Petrus. Bahkan, sumber lain meyakini jumlahnya berkali-kali lipat dari itu. Di kota-kota besar bertebaran berita penemuan mayat preman yang mati karena tembakan atau cara lain, termasuk diikat dan digonikan. Macam-macam kondisi. Mereka ditemukan diparit, di sungai, atau di pinggir jalan. Dalam biografi yang ditulis oleh Ramadhan KH dan G Dwipayana, Pak Harto mengakui bahwa Petrus disebar karena kejahatan preman dan gali sudah sangat keterlaluan, waktu itu. Petrus memang berhasil menyebarkan ketakutan di kalangan preman. Premanisme berhenti total. Yang belum kena timah panas Petrus, bersembunyi menyelamatkan nyawa mereka. Tindakan "reign of fear" (cegekeraman ketakutan) ini sangat efektif mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat. Waktu itu,

gerombolan preman memang menjadi sumber ketakutan. Kejahatan sadis yang mereka lakukan, justru lebih dulu menimbulkan "reign of fear" di tengah masyarakat. Jadi, lebih-kurang "reign of fear" Petrus disebar untuk membasmi "reign of fear" premanisme. Itulah kisah tentang cara penguasa membasmi premanisme yang dianggap sudah keterlaluhan, yang menimbulkan cengke-raman ketakutan. Entahkan terinspirasi kisah 1980-an itu, atau tidak, tampaknya pihak yang berkuasa sekarang ini sedang melancarkan taktik "reign of fear" juga. Tujuannya ialah untuk membasmi ujaran kebencian dan berita hoax. Cengkeraman ketakutan (reigh of fear) itu dilakukan oleh kepolisian dalam bentuk penangkapan para aktivis media sosial (medsos) yang mereka yakini sebagai pelaku ujaran kebencian, SARA, dan hoax.

Penyebutan "reign of fear" yang dipakai untuk menggambarkan apa yang tengah terjadi di masyarakat di masa sekarang ini menunjukkan bahwa kebijakan penangkapan aktivis media social menjadi sebuah hal yang menakutkan dan berpotensi akan menimbulkan ketakutan publik. Sebagai sebuah kebijakan, Portal Islam, lewat narasinya tersebut, ingin memberikan penekanan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemegang kebijakan dan pemerintahan adalah sebuah tindakan yang salah dan semena-mena dan sebuah wujud dari kedzaliman penguasa kepada rakyatnya.

Sebagai reaksi atas tindakan salah tersebut, Portal Islam mengingatkan, atau mengancam tepatnya, bahwa kedzaliman penguasa akan mendapatkan balasan yang seimbang melalui narasi yang ditulis oleh Ustadz Salim A. Fillah: Maka kita katakan kepada semua tiran lacut dan penganiaya ummat, terus-teruskan sahaja jika kalian memang mengingini kezhaliman bersimaharajalela, tapi

sekeras kalian mengayun, sebegitupun ia akan berbalik tanpa ampun.

2. Toleransi dan kebhinekaan

Toleransi dapat diartikan sebagai sikap membiarkan dan menghargai suatu pendirian, keyakinan, pendapat, kepercayaan, pandangan, maupun yang lainnya yang berbeda dengan kita. Dalam hal ini situs portal islam memberikan beberapa narasi yang -kembali- mengkritik kebijakan pemegang otoritas. Dalam konten artikel yang dimuat hari Rabu, 6 september 2018, Portal Islam mengupas salah satu program TV yang mendatangkan Presiden RI ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY menjelaskan selama kepemimpinannya ia memiliki pandangan dan cara sendiri menghadapi kritik. Negara demokrasi, tambahnya harus memberi ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi, keresahan dan ketidaksukaan terhadap pemerintah. "Negara demokrasi harus memberi ruang kepada rakyat untuk mengekspresikan pikirannya, pandangannya, keresahannya, termasuk barangkali ketidaksukaannya kepada pemimpin kepada pemerintah. Sepanjang itu dilaksanakan dengan tertib tidak mengganggu keamanan publik, menurut saya perlu diberi ruang," kata SBY. Sekilas memang tidak ada masalah dengan konten yang ditulis tersebut karena memang berisi pengalaman SBY ketika memimpin bangsa ini saat menghadapi perbedaan pendapat. Akan tetapi, di akhir tulisannya Portal islam menuliskan **BEDA BANGETTT... MILITER TAPI DEMOKRATIS.. SEDANG SIPIL, TAPI... AH SUDAHLAH.**

Penggunaan kata militer dan sipil jelas memberikan pesan bahwa ada perbandingan yang dibuat oleh Portal Islam, dan menilik latar belakang dua presiden RI terakhir, maka perbandingan tersebut mengarah pada SBY dan Jokowi.

Perbandingan selanjutnya adalah dengan memberikan sandangan demokratis di pihak militer dan sipil diikuti titik-titik. Meskipun tidak tertulis, akan tetapi makna tersirat yang muncul dalam konteks kalimat tersebut tentulah memberikan perbandingan yang sifatnya pertentangan sehingga yang dapat ‘terbaca’ adalah tidak demokratis. Hal ini ditekankan oleh Portal Islam dengan pemakaian huruf kapital dalam statemen mereka. Dalam sebuah jurnal yang berjudul *All-Caps Typography is doomed*, Paul Lukas menuturkan

“A typeface is designed to be used with capital and lowercase letters. That’s because, from physiological standpoint, lowercase letters are easier to read. They’re more distinguishable, they have ascenders and descenders, they have modulated widths, and all this creates a texture that’s easier and more pleasing to the eye. Capital letters don’t have that.” (Hoefler in Lukas, 2013)

Portal Islam seakan ingin meneriaki rezim yang sekarang dengan mengatakan bahwa penguasa sekarang tidak mengahragai perbedaan, tidak membolehkan ekspresi ketidakan dan akhirnya bersikap intoleransi terhadap segala bentuk ujaran ataupun aksi “menyimpang dari tatanan”.

Pada artikelnya yang lain yang dimuat tanggal 5 September 2017, Portal Islam merepost artikel serupa yang telah dimuat dalam *kompas.com* pada tanggal yang sama yang menyoroti statemen kapolri Tito Karnavian terkait isu Rohingnya.

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap tak perlu ada aksi-aksi merespons konflik Rohingnya. Sebab, pemerintah Indonesia juga sudah bergerak. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah meminta pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan terhadap warganya, khususnya etnis Rohingnya. Kapolri Tito yang baru saja menunaikan ibadah haji ini juga menyatakan isu konflik

Rohingya di Myanmar ramai di Indonesia bukan lagi karena mengangkat sisi kemanusiaan tapi "digoreng" untuk menyerang Pemerintah Jokowi. Portal Islam kemudian menambahkan beberapa tanggapan dari netizen terkait pernyataan kapolri tersebut:

"Padahal ummat hanya menuntut pemerintah berbuat lebih berani sesuai koridor yang berlaku untuk menghentikan pembantaian selamanya, sah-sah saja. Koq malah ditanggapi sangat politis, dan kambuh lagi seruan untuk tidak unjuk rasa. Jikapun pemerintah sudah berbuat sesuai harapan ummat, sah-sah juga koq jika ummat tetap berunjuk rasa sebagai bentuk solidaritas dan pengecaman. Hasil berhaji seharusnya membawa perbaikan diri, meski sedikit," kata Johan Khan di akun fbnya. "Statement2 aneh kya gini yg bikin suasana jd Kontraproduktif.." komen akun @dusrimulya di Twitter. "Istighfar Pak. Bukankah Bpk baru pulang Haji ???" ujar akun @trah1967.

Upaya penggiringan opini publik semakin mengesankan bahwa apa yang dilakukan Portal Islam memiliki agenda politik tersembunyi dibandingkan dengan implementasi ideologi islam sebagai baju mereka.

Pandangan Portal Islam tentang Toleransi dan kebhinekaan sangat jelas terbaca dalam sebuah artikelnya yang dimuat pada tanggal 17 juli 2017 yang berjudul INDONESIA MILIK BERSAMA: Antara Toleransi, Kebhinekaan dan Penyesatan Umat. Artikel ini merupakan buah fikiran dari KH Muhammad Najih Maimoen, putra dari KH. Maimoen Zubaer, salah satu tokoh kharismatik PPP. Dalam artikel ini, penulis menuturkan bahwa ada kekhawatiran akan terancamnya kehidupan bangsa yang beragam karena kesombongan segelintir anak bangsa yang tidak menghargai perbedaan:

"Kenyataannya, justru sinyal perpecahan dan sikap intoleransi itu datang dari para elit politik yang membanggakan

demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pidato politik oleh Ketua Umum PDIP pada acara perayaan HUT ke-44 PDIP sebagai salah satu bentuk intoleransi dan penistaan terhadap Islam. Menimbulkan gesekan antar umat beragama dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pidato tersebut telah menciderai Islam dan Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Mereka mengingkarkan Islam lemah, diam tidak punya nyali. Satu per satu ulama dan tokoh Islam dilaporkan ke pihak berwajib dengan berbagai tudingan. Berbagai kesalahan mereka terus dicari-cari”.

Selanjutnya, penulis menyampaikan pandangannya bagaimana hubungan antara agama dan negara dan bahwa Islam tidak berbenturan dengan negara. Dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, agama harus ditempatkan pada tempat yang strategis. Tidak boleh diciderai, dinodai dan dinista. Umat Islam tidak anti Pancasila, umat Islam hanya tidak terima bila syari'at Islam disejajarkan dengan Pancasila. Kami mengakui Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara, namun bukan sebuah ideologi. Jadi salah bila ada pernyataan "ideologi harus dilawan dengan ideologi" karena tidak sejajar. Mari bersama-sama memiliki dan merawat Indonesia dengan otentik dan tidak egoistik. Saling berbagi, saling memahami tidak saling menguasai. Dengan dideklarasikannya Majelis Dzikir Hubbul Wathan pada tanggal 13 Juli 2017 semoga semakin memperkuat pilar empat, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45, bukan sebaliknya, untuk kepentingan politik sekuler-liberal.

3. Kelompok radikal dan Perpu Ormas

Isu yang hangat diperbincangkan terkait Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) juga disinggung di dalam situs yang menggunakan label Islam ini. Beberapa narasi dibuat dengan cukup sistematis sebagai

usaha memenangkan pertentangan diskursus terkait UU Ormas. Situs ini membuat narasi kontra UU Ormas dengan memberikan telaah dari beberapa sudut diantaranya dari dukungan Ormas besar seperti Muhammadiyah yang juga mengkritisi UU Ormas. Dalam artikelnya yang dimuat tanggal 13 Juli 2017, Portal Islam menuliskan:

"Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan jika Perppu tersebut tidak dikelola dengan sebaik-baiknya maka dampaknya akan bisa sangat serius, terutama terkait dengan kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat. Mu'ti menegaskan bahwa terlalu mahal jika Perppu tersebut diterbitkan oleh pemerintah hanya untuk membubarkan HTI."

Masih dalam artikel yang sama, Portal Islam juga menyitir pendapat dari tokoh Muhammadiyah lainnya, yaitu Busro Muqoddas. Sementara itu, Busyro Muqoddas Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut terindikasi kuat mengancam demokrasi. "Perppu ini terindikasi kuat mengancam demokrasi. Ketika demokrasi sekarang ini justru perlu diperkuat siapapun, terutama pemerintah," ujar Busyro. Mantan Ketua KPK ini menilai Perppu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagai puncak konstitusi di Indonesia, yang di dalamnya terdapat kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan berekspresi.

Portal Islam juga ingin menunjukkan kepada publik bahwa UU yang mengatur Ormas tersebut tidak mendapat dukungan dari publik sendiri dengan memuat sebuah jajak pendapat terkait UU Ormas yang dibuat oleh DPR pada tanggal 13 Juli 2017. Jika Perppu ditolak DPR, maka Perppu tersebut tidak berlaku. Terkait hal itu, pihak DPR mulai menjaring aspirasi dari masyarakat salah satunya dengan melakukan Polling. Melalui akun resmi Twitter @DPR_RI

pada Rabu (12/7/2017), DPR RI telah mengadakan Polling dengan pertanyaan: "Pemerintah telah menerbitkan Perppu No.2/2017 tentang Perubahan atas UU No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bagaimana pendapatnya?" Hasil sementara Polling hingga artikel ini dibuat Kamis (13/7/2017) pagi, dari 14.575 voters mayoritas menyatakan TIDAK SETUJU dengan Perppu Pembubaran Ormas. Berikut Hasil Lengkap sementara: 59% TIDAK SETUJU 33% SETUJU 5% BELUM TEPAT 3% TIDAK PEDULI.

Selain dukungan dari dalam negeri, Portal Islam juga memuat dukungan dari luar negeri yang turut pula menolak UU Ormas. Pada tanggal 26 Juli 2017, Portal Islam membuat artikel yang menyitir pandangan dari lembaga Amnesty Internasional. Amnesty International, organisasi nonpemerintah yang mempromosikan hak asasi manusia berbasis di London, memperingatkan pemerintah RI tentang dampak buruk dari pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai kelanjutan penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Sipil Kemasyarakatan.

Upaya sistematis Portal Islam untuk menyuarakan penolakannya terhadap UU Ormas dilanjutkan dengan memberikan data tandingan pada artikelnya tanggal 14 Juli 2017 untuk melawan beberapa narasi yang dibuat oleh salah satu ormas Islam, NU melalui salah satu organ anaknya yakni Anshor Jawa Timur, yang mengklaim bahwa UU Ormas didukung oleh umat Islam. "Rakyat Indonesia 100% mendukung penuh Perppu No.2/2017 #PerppuOrmasRawatNKRI ??????????," kicau akun @ansor_jatim pada 12 Juli 2017

Portal Islam kemudian memuat beberapa balasan dari kicauan Ansor Jatim tersebut

Main klaim Ansor Jatim ini tentu langsung disanggah netizen. "@ansor_jatim 100% itu survei dari mana? Jangan asal klaim. Saya warga NU menolak PERPPU. #TolakPERPPUAntislam," kata akun @FahrurodjiOzil. JUSTRU FAKTA SEBALIKNYA... dari survei-survei yang digelar oleh berbagai pihak dan berbagai media menunjukkan JUSTRU MAYORITAS RAKYAT INDONESIA MENOLAK PERPPU. Survei yang dilakukan DPR RI, CNN Indonesia, Berita Satu, ILC Tv One, bahkan MetroTV menunjukkan MAYORITAS MENOLAK/TIDAK SETUJU PERPPU. LAH TERUS KLAIM ANSOR JATIM DARI MANA???

Terakait dengan kelompok radikal, Portal Islam banyak memproduksi teks yang langsung menyinggung Partai Komunis Indonesia yang disnyalir sudah menampakkan tanda-tanda kebangkitannya. Portal Islam mulai menyusun narasinya dengan membuka memori pembaca terkait pemberontakan PKI dan hikmah dibalik keberhasilan negara menumpas pemberontakan tersebut. Dalam artikelnya tanggal 27 September 2017, Portal Islam menuliskan:

"Bangsa Indonesia wajib bersyukur pengkhianatan dan kudeta PKI pada 30 September 1965 berhasil ditumpas oleh TNI bersama rakyat. Seandainya dalam kudeta 1965 tersebut PKI berhasil menang, apa yang bakal terjadi? Menanggapi hal itu, Sejarawan Universitas Indonesia, Anhar Gonggong, mengungkapkan semua warga Indonesia yang anti PKI akan dibunuh, jika pada G30S/PKI, DN Aidit dan kawan-kawan berhasil merebut tampuk kekuasaan. "Kalau dia (PKI) menang, kita akan mati, cuman karena dia kalah, dia yang mati," tegas Anhar kepada covesia.com.

Ada kesadaran bersama yang ingin dibangun oleh Portal Islam dalam menyikapi kepingan sejarah nasional tersebut dimana gagalnya kudeta PKI menyelamatkan nyawa semua sehingga rasa syukur harus senantiasa diucapkan. Selain itu, Portal Islam juga mencoba membuka luka sejarah

kepemimpinan presiden Soekarno terkait pidato beliau yang menyebut konferensi Alim Ulama dianggap sebagai "komunis phobia" yang kemudian menyulut api permusuhan dan juga penindasan terhadap ulama pada saat itu serta menguatkan gerakan komunis. Tulisan ini mereproduksi tulisan Buya Hamka di rubrik 'Dari Hati ke Hati' yang pernah dimuat di Majalah Panji Mas 1967.

Pada tanggal 17 Agustus 1958, dengan suara yang gegap gempita, Presiden Soekarno telah mencela dengan sangat keras Mukhtar (Konferensi) para Alim Ulama Indonesia yang berlangsung di Palembang tahun 1957. Berteriaklah Presiden bahwa konferensi itu adalah "komunis phobia" dan suatu perbuatan yang amoral. Pidato yang berapi-api itu disambut dengan gemuruh oleh massa yang mendengarkan, terdiri dari parpol dan ormas yang menyebut dirinya revolusioner dan tidak terkena penyakit komunis phobia. Malangnya nasib alim-ulama yang berkonferensi di Palembang itu, karena dianggap sebagai orang-orang yang kontra revolusi, bagai telah tercoreng arang. "Nasibnya telah tercoreng di dahinya", demikian peringatan Presiden.

Terakhir, Portal Islam mengingatkan dalam narasinya bahwa perlu adanya kecurigaan terhadap pihak-pihak yang menolak kebangkitan PKI. Narasi ini menyitir pandangan dari Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu yang berjudul Menhan: Kita Patut Curiga yang Bilang PKI Tidak Ada, Mungkin Dia Komunis: Negara ini pernah hampir hancur gara-gara pengkhianatan dan pemberontakan PKI 1965, beruntung masih ada TNI bersama Umat. Menhan: Yang Bilang Tak Ada Bahaya Laten PKI, Jangan-jangan Dia Komunis Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kecewa kepada pihak yang selalu membantah adanya bahaya laten dari kebangkitan Partai Komunis Indonesia

4. Kekerasan, Radikalisme, dan Terorisme

Ada hal menarik yang coba disuarakan Portal Islam terkait terorisme. Situs ini dengan satir menyebutkan bahwa gerakan, aksi, dan tindakan terorisme yang terjadi, baik di Indonesia maupun di negara lainnya hanya bentuk komoditas ekonomi dan barang dagangan bagi para penguasa. Dalam narasinya yang dimuat tanggal 3 Juli 2017, Situs ini menuliskan

Di Mesir, AsSisi menjadikan aksi terorisme sebagai jualan. Tentu terorisme menjadi topeng dirinya yang gagal menjaga stabilitas ekonomi dan minim kepercayaan internasional. Sebagai mantan kepala intelejen Mesir, AsSisi sukses mengobrol bahan peledak. Duaaaaarrrr....boooooom....Ledakan di depan kediaman Jaksa Agung Mesir. Sontak kasus pembantaian Rab'ah yang sedang diproses di Mahkamah Den Haag SEPI. Intel AsSisi siap mengorbankan siapa saja. Orang gila tidak masuk dalam radar AsSisi. Tapi ratusan tahanan yang dibina intel, sudah siap menjadi "penyelamat muka" kepolisian dan militer yang hampir dipermalukan di depan dunia. Korban pun bisa siapa saja. Anggota kepolisian atau militer sudah biasa jadi tumbal. Maka kucuran dana dari UE dan AS mengalir deras. Siapa yang kenyang? Dewan Jenderal yang semakim gemuk. Jadi jika di negara lain ada kemiripan. Wajarlah. Mentor dan perekayasa operasi dari guru yang sama. Hanya skala bom panci atau menikam aparat saat shalat tidak dilakukan AsSisi. Selain mudah ditebak rekayasanya, AsSisi enggan keliatan bahlulnya.

Dengan nyinyir, teror yang terjadi di Indonesia, situs ini membuat dua contoh yakni bom panci dan penikaman aparat di masjid, adalah aksi yang sudah didesain sedemikian rupa oleh penguasa, yang pada fase selanjutnya akan memikat negara-negara maju untuk mengucurkan dana bantuan dan membawa kenyamanan dan keamanan ekonomi penguasa pada akhirnya.

C. Respons VOA-Islam terhadap Radikalisme

1. Pancasila, NKRI, dan negara Khilafah

Di dalam beberapa artikelnnya, voa-islam menyuarakan berdirinya negara khilafah. Situs ini mengungkapkan pesan tersebut dengan sangat jelas, dan sistematis . situs ini membuat propaganda yang agak halus, mulai dari judul yang terkesan sejuk misalnya mengapa harus takut khilafah yang berisi penjelasan terkait dengan konsep khilafah yang dikatakan sebagai sistem yang tepat dan akan mengayomi semuanya.

Jika kita lebih cemerlang dalam berfikir maka akan kita temukan bahwa hanya institusi khilafahlah yang mampu mempersatukan umat. Seluruh umat manusia bersatu didalam naungan daulah khilafah, yang di situ terdapat berbagai macam agama, bahasa, suku hingga perbedaan warna kulit. Daulah khilafah tidak hanya menaungi untuk umat islam saja tetapi seluruh umat manusia yang bersedia tunduk terhadap peraturan daulah khilafah.

Pengungkapan tersebut kemudian didukung dengan tulisan mengenai pendapat dari beberapa tokoh dunia terkait sisi positif dari sistem khilafah. Tak kurang ada 4 tokoh terkenal yang diambil testimoninya tentang sistem khilafah.

Salah satu tokoh yang diambil pendapatnya adalah TW Arnold

"The treatment of their Christisn subject by of Ottoman emperors--at least for two centuries after their conquest of greece--exhibits a toleration such as was at that time quite unknown in the rest of Eroupe (Perlakuan terhadap warga Kristen oleh Pemerintahan Khilafah Turki Utsmani--selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani--telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya

tidak dikenal di daratan Eropa)." (The Preaching of Islam : A History of Propagation Of The Muslim Faith, 1896, hlm. 134)

Situs inipun seperti dapat membaca kegelisahan publik, ketakutan lebih tepatnya, yang merasa khawatir akan keberlangsungan kehidupan bernegara apabila sistem yang diambil adalah sistem khilafah. Dalam sebuah artikelnya, situs ini memberi judul apakah khilafah akan menghapus keberagaman?

Pertama yang harus kita tahu adalah bahwa tidak ada negara yang homogen satu jenis, satu rupa, satu aktivitas, satu agama, satu suku saja. Tidak ada. Pun juga dengan Khilafah. Khilafah adalah negara layaknya negara biasanya yang di dalamnya terdapat banyak budaya, bahasa, agama, suku bangsa dll.

Agama yang ada didalamnya bukan hanya islam, tapi juga nasrani, yahudi, majusi dsb. Islam tidak akan memaksa mereka beribadah sesuai dengan agama islam karena islam pun mengatakan *'untuk mu agamamu, untukku agamaku'*. Jadi dari mananya Khilafah akan memutihkan mereka semua? Hanya saja Khilafah akan menerapkan islam sebagai system kehidupan seperti system sosial, system politik, ekonomi, hukum dsb. Dan saya yakin system sekomplek ini hanya ada dalam islam, sistem sesempurna ini karena langsung dari Allah pencipta semesta berdasar alquran dan sunnahnya.

Voa-islam dengan cerdas mengemas kampanye khilafah dalam beberapa fragmen narasi yang tertata secara sistematis. Di sisi lain, voa-Islam mengkritisi pandangan dari beberapa pihak yang menentang ide negara khilafah. Namun, sedikit disayangkan opini tentang Khilafah masih saja ada yang berbau negatif, entah karena ketidaktahuan ataukah karena kebencian. Monsterisasi ide Khilafah juga masih saja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu agar ide ini dimusuhi banyak orang. Karena jika ide dan konsep Khilafah ini diterima oleh masyarakat, maka para penguasa zalim

yang berdiri di bawah ketiak Kapitalisme tidak lagi berkuasa dan kerugian besar diderita oleh mereka.

Berbagai upaya monsterisasi ide Khilafah dan kriminalisasi para pejuangnya dilakukan dengan berbagai upaya tidak elegan dan ngawur, bahkan aturan yang dibuat dilanggar sendiri. Masyarakat pun tak luput ditakut-takuti, diteror secara psikis dengan berbagai spanduk bernada ancaman dari oknum tak bertanggung jawab dan dikondisikan seakan Negara dalam kondisi terancam.

Fitnah keji juga dilancarkan kepada para ulama ataupun pejuangnya. Sungguh inilah bentuk makar penguasa zalim terhadap Islam dan kaum muslimin. Khilafah bukanlah sebuah ancaman, Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Khilafah (Imamah) adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.

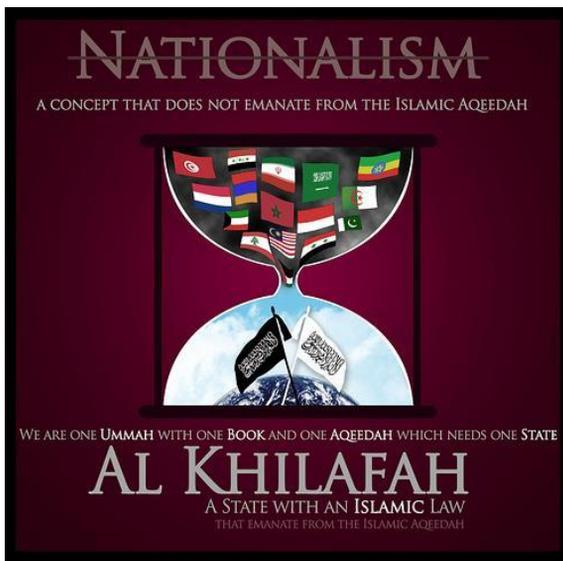
Dalam artikel tersebut jelas disebutkan bahwa ide khilafah mendapat pertentangan dari pemerintah yang sedang berkuasa dan pemerintah dianggap menghalalkan segala cara untuk menghalangi terwujudnya sistem khilafah. Dari sisi bahasa, terdapat beberapa diksi kasar yang digunakan yang dialamatkan kepada pihak-pihak yang menentang ide khilafah, mulai dari istilah monster, tidak elegan dan ngawur. Bahkan penguasa (pemerintah) dicap zalim dan itu diulang sampai dua kali. Kata zalim berasal dari bahasa Arab, dengan huruf "dho la ma" (ظ ل م) yang bermaksud gelap. Di dalam al-Qur'an menggunakan kata *zhulm* selain itu juga digunakan kata *baghy*, yang artinya juga sama dengan zalim yaitu melanggar haq orang lain. Namun demikian pengertian zalim lebih luas maknanya ketimbang *baghyu*, tergantung kalimat yang

disandarkannya. Kezaliman itu memiliki berbagai bentuk di antaranya adalah syirik.

Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkar, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.

Asal makna "zalim" ialah aniaya dan melampaui batas yang telah ditentukan. Arti "zalim" menurut ahli bahasa dan kebanyakan ulama ialah: Meletakkan sesuatu bukan pada semestinya (tempatny), baik mengurangi, menambah, mengubah waktu, tempat dan letaknya". Oleh karena itu kata kezaliman diartikan sebagai penyimpangan dari ketentuan atau melakukan dosa walaupun kecil.

Pandangan situs voa-Islam tentang sistem khilafah bisa dilihat dengan relatif jelas dari ilustrasi gambar yang dimunculkan dalam artikelnya.



Ilustrasi gambar ini dimuat pada tanggal 28 Juni 2017 sebagai pengantar awal dari artikel yang berjudul Apakah sistem khilafah menghapus keberagaman? Posisi situs ini sangat jelas menentang nasionalisme yang dianggap tidak sesuai akidah Islam dan menawarkan sistem khilafah. Bahkan digambarkan semua negara meleburkan seluruh sistemnya dengan sistem khilafah. Jam pasir yang digunakan sebagai simbol memberi pesan bahwa lambat laun semua negara akan menyatukan diri dalam sebuah sistem yakni sistem khilafah. Pesan pada ilustrasi tersebut diperjelas dengan pilhan warna yang dipakai dalam artikel tersebut. Background warna ungu dikontraskan dengan warna putih pada jam pasir bagian bawah yang berisi khilafah. Apalagi warna pada jam pasir bagian atas yang berwarna hitam. Hal ini melambangkan bahwa semua negara-negara dalam situasi yang gelap, salah, dan hanya khilafah saja yang bersih, baik, dan suci.

Lebih jauh situs ini memberikan penekanan bahwa negara yang ideal bukan berasal dari konsep Nasionalisme melainkan hanya akan terwujud di bawah pimpinan Islam. Narasi tentang kesalahan Nasionalisme dituangkan dalam situs ini pada tanggal 23 September 2017 yang berisi opini dari Zainab :

Atas nama Nasionalisme, setiap bangsa harus menjaga keamanan bangsanya sendiri. Tidak boleh ikut campur dalam urusan negara lain. Justru paham ini yang semakin memporakporandakan kesatuan ummat Islam. Nasionalisme telah menjadi benteng pemisah. Saat ummat Islam di negeri lain mengalami ketidakadilan, negeri-negeri Muslim tidak boleh ikut campur. Itulah mengapa ikatan Nasionalisme adalah ikatan yang salah. Ikatan yang harus dicampakkan. Seharusnya kaum Muslim bersatu padu, tidak bercerai berai sebagaimana yang telah disabdahkan Rasul sang panutan, bahwa Muslim

yang satu dengan yang lain adalah saudara, diibaratkan satu tubuh. Semua itu terhalang oleh dinding Nasionalisme. Menjadi bagian-bagian yang terpetak-petak.

Di sini Zainab menambahkan bahwa solusi manajemen universal berasal dari Islam. Tatanan dunia akan harmonis dan indah dalam naungan nilai-nilai Islam.

Tiada kesejahteraan yang paling sempurna kecuali di bawah naungan Negara Islam. Negara Islam bukanlah monster. Selama ini ummat ditakut-takuti dengan omong kosong para pembenci Islam. Negara Islam digambarkan sebagai negara yang sadis karena sanksi-sanksinya. Sementara dijauhkan dari gambaran yang membawa keberkahan. Tidak hanya itu, digambarkan pula bahwa Negara Islam hanyalah ilusi belaka, itu hanya ada di zaman dulu. Padahal di kitab-kitab, suatu saat Islam akan kembali berjaya, lalu apa jika bukan tegaknya kembali Negara Islam? Sudah saatnya negara idealis itu segera diwujudkan dengan menerapkan seluruh aturan-aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Negara yang tidak hanya menyatukan satu agama, tetapi seluruh agama yang ingin tunduk dengannya. Negara ideal ini menjamin keamanan dan kesejahteraan yang meliputi kebutuhan seluruh ummat baik pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Islam tidak pernah memerintah untuk berbuat aniaya terhadap ummat di luar agama Islam. Justru Islam mengajarkan toleransi dan kasih kasih sayang. Negara yang tidak memaksa ummat lain untuk memeluk agama Islam. Mereka bebas beribadah sesuai dengan keyakinannya. Bahkan jika terjadi penganiayaan terhadap ummat non Muslim yang tunduk di bawah Negara Islam, pemimpin wajib membela dan menjamin keamanannya. Bukankan ini adalah Rahmat bagi seluruh alam? [syahid/voa-islam.com]

Pada bagian yang lain situs ini memberikan opininya tentang pancasila dan konstitusi. Terkait dengan Pancasila, VOA-Islam menyatakan bahwa Pancasila hanya untuk umat

Islam. Artikel ini dimuat pada tanggal 29 September 2017 dengan mengutip pendapat Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), Usamah Hisyam

Pancasila seharusnya milik umat Islam karena sila pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa adalah kalimat Tauhid. "Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kalimat Tauhid. Sila pertama ini kan Hablumminallah sedangkan sila kedua, ketiga, keempat serta kelima adalah Hablumminnas," ujar Usamah dalam konferensi pers usai Silatnas PARMUSI di aula Masjid At-Tin, TMII, Jakarta Timur pada Kamis siang kemarin (28/9/2017). Usamah menilai, sila pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa haruslah mewarnai sila-sila berikutnya dan untuk itu Pancasila itu, menurut beliau, harusnya milik umat Islam.

Lebih jauh, situs ini menyatakan bahwa dalam implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ada indikasi dan potensi penyelewengan sehingga perlu ada penguatan dan penegasan. Setidaknya ada dua artikel yang dipakai situs ini dalam menyampaikan pesan tersebut. Yang pertama dimuat tanggal 28 September 2017. Dalam artikel yang tidak terlalu panjang tersebut, pendapat panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menyatakan bahwa tidak memiliki agama, tidak boleh di negara Indonesia. Hal ini ia sampaikan karena Pancasila di Sila Pertama menyatakan bahwa Indonesia negara yang berketuhanan.

"Inilah kalau kita lihat cara beragama, agama apapun juga, yang penting Berketuhanan Yang Maha Esa, tidak beragama tidak boleh di negara ini. Ini dibuat secara kejiwaan," tegas Gatot Nurmantyo menyampaikan, Rabu (27/09/2017), di ruang Fraksi PKS, DPR RI, Jakarta. Ia menuturkan bahwa hal tersebut adalah bagian dari warisan yang perlu dijaga karena didapatkan dengan perjuangan yang luar biasa. "Adalah bagaimana saya yang merasakan terhina, memalukan, menyedihkan menjadi bangsa yang dijajah, berjuang mati-

matian dengan korban darah dan nyawa, saya tidak mau anak dan cucu saya mengalami seperti saya. Makanya saya menjaga. Jaganya dengan Pancasila ini," tambahnya menegaskan. Setelah Sila Pertama sudah dijalankan dengan baik, maka di Sila KEdua, Gatot mengatakan barulah akan tercipta manusia-manusia beradab. "Maka Sila Keduanya adalah berinteraksi sesama manusia. Dikatakan Indonesia tidak punya HAM, justeru Indonesia yang menjunjung tinggi HAM. Karena memperlakukan masyarakat Indonesia dengan adil dan beradab. Bagaimana cara bernegaranya: persatuan Indonesia. Mempersatukan (Sila Ketiga) semuanya tidak peduli dari mana," ia menutupnya.

Di sisi yang lain, pentingnya agama dalam Pancasila juga dikupas oleh VOA-Islam pada tanggal yang sama dan lagi-lagi menyitir pendapat dari Panglima TNI.

Jangan bicara Pancasila apabila agama saja rakyat Indonesia tidak dijadikan sandaran sebagai hidup. Apalagi yang berwacana inginkan ini dan itu perihal agar dapat pancasilais tetapi tidak memperhatikan agama adalah hal yang mustahil memajukan negara. "Bagaimana kita untuk menjaga Pancasila? Kita berteori mesti begini, begini, dan begini tapi ada satu hal yang kita lupakan untuk menguatkan yaitu agama. Yang kedua bahasa. Yang ketiga kewarganegaraan. Saat saya masih kecil dulu, nilai merah tidak bisa naik kelas. Tapi sejak reformasi dihapus," Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menyampaikan, Rabu (27/09/2017), di Fraksi PKS, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Isu terkait negara yang diangkat oleh VOA-Islam adalah isu tentang kepemimpinan atau pemerintah. Terdapat beberapa artikel yang diulas di dalam situs tersebut yang berpandangan bahwa ada yang salah dengan penyelenggaraan kepemimpinan, baik itu di tingkat daerah maupun di level yang lebih tinggi yakni di tingkatan nasional. Salah satu atikel tersebut dimuat pada tanggal 25 September 2017 yang berisi pentingnya menjaga marwah kepemimpinan.

“Peringatan untuk pemimpin bangsa ini untuk tegakkan keadilan sebagaimana mestinya lagi-lagi digaungkan. Sebab, apabila seorang pemimpin tidak memperhatikan hal tersebut, maka hal yang dimungkinkan terjadi adalah disintegrasi bangsa. Penegakkan hukum itu menjadi sangat penting karena saya pernah mencoba membuat semacam begini, dari berbagai buku yang saya baca, simulasinya: ketika suatu negara hukum tidak ditegakkan maka sudah terjadi disorientasi. Disorientasi terhadap tujuan negara. Ketika disorientasi itu tidak ditata secepatnya akan muncul distrust. Kalau hukum tidak ditegakkan orang tidak percaya. Distrust kalau dibiarkan agak lama itu akan menimbulkan disorientasi (pembangkangan). Orang akan membangkang. Misalkan hakim tidak didengarkan: “Itu bohong. Hakim belum apa tapi hakim sudah disebut hakim itu tidak benar. Hingga putusannya dilawan. Mau eksekusi dilawan dengan massa. Hakim dihajar ramai-ramai. Jaksa mau masuk kantor ditusuk. Hakim mau sidang diserbu. Itu pembangkangan. Inilah yang akan mengantarkan ke berikutnya, yakni disintegrasi,” ujar Mahfud MD, Rabu (27/07/2017), di Senayan, Jakarta.

Selain itu, VOA-Islam juga turut mengomentari terjadinya kasus nasional yang membawa-bawa nama presiden, mulai dari kasus papa minta saham hingga kasus impor senjata ilegal yang membuat dua institusi negara yakni kepolisian dan TNI “bertengkar”.

Dimulai dengan judul yang seakan-akan bertanya yaitu “Ada Apa dengan Kepemimpinan Indonesia Saat Ini? Kok Nama Presiden sering Dicatut?” situs ini mencoba mengambil perhatian pembaca dengan judul yang menarik, untuk kemudian diarahkan dengan memberikan opini bahwa presiden sekarang lemah kredibilitasnya, kurang tegas, dan juga tidak pandai mengatur bawahannya. Dalam mengkonstruksi beritanya, artikel ini menukil pendapat dari

salah satu pengamat politik nasional yang berasal dari rumah amanah rakyat, Ferdinand Hutahean.

Pengamat politik menyebutkan tercatat sudah beberapa kali nama Presiden Jokowi dicatut. Pertama dicatut dalam skandal Papa Minta Saham yang sekarang berakhir kemesraan antara Presiden dengan Setya Novanto. Kedua dicatut namanya dalam pertemuan Kepala BIN dengan Lukas Enembe yang sesuai kabar beredar diminta mengamankan Jokowi 2019. Kisah ini masih bergulir sekarang dan belum ada komentar dari Presiden. "Yang paling menggemparkan itu adalah adanya upaya impor senjata ilegal oleh institusi non militer yang disampaikan oleh Panglima TNI. Siapa institusi yang dimaksud Panglima TNI? Ini tentu berbahaya karena dibumbui dengan pencatutan nama Presiden Jokowi.

Ferdinand Hutahean mungkin dianggap cukup signifikan peran dan pandangannya sehingga kembali VOA-Islam mengambil pendapatnya pada artikel yang lain yang berjudul situasi perpolitikan Indonesia Kian tak menentu karena Pejabat Berjalan Masing-masing yang dimuat pada tanggal 25 september 2017.

Seminggu terakhir ini, situasi politik nasional benar-benar diaduk aduk bagai mengaduk air di kubangan yang sudah butek. Kubangan butek merupakan gambaran kondisi bangsa saat ini yang bisa saya gunakan sebagai perbandingan situasi. Diaduk aduk entah untuk mencari sesuatu supaya muncul kepermukaan atau entah untuk membuat suasana terus tidak stabil atau hanya sebuah upaya cipta kondisi dengan tujuan tertentu, semua hanya bisa dijawab oleh kekuatan kekuasaan yang memerintah. Karena semua ini terjadi adalah sebagai akibat dari pertarungan kekuatan internal kekuasaan atau yang sering disebut dengan istilah Power Struggle. Menarik mencermati perkembangan ini. Menarik sekaligus memprihatinkan bagi masa depan karena terlihat dengan jelas bagaimana para elit pemangku kekuasaan yang mengurus negara ini tidak kompak, tidak kordinatif, tidak menyatu dalam

satu kerangka kepemimpinan dan bergerak sendiri-sendiri, demikian kata pengamat politik, Ferdinand Hutahean, melalui siaran persnya, Minggu (24/09/2017). Menurut dia, Presiden Jokowi mungkin pusing juga melihat jajarannya bermain dengan gaya masing-masing, dan sekaligus mungkin lebih bingung lagi karena tak kunjung mampu mengendalikan seluruh mainan yang dimainkan oleh jajarannya. Persaingan dan pertarungan politik antar elit pimpinan lembaga negara terjadi di luar kerangka kepemimpinan. "Inilah akibatnya, politik bangsa riuh justru bukan oleh politisi tapi oleh elit pemimpin lembaga negara yang memegang kekuasaan.

Penggunaan istilah kubangan buthek memberikan kesan rendah dan kotor terhadap situasi perpolitikan nasional. Kubangan dapat diartikan tempat berkubang seekor kerbau di sawah dan buthek itu memberi tanda keadaan yang kotor sekali. Penggunaan dua istilah yang diambil dari bahasa Jawa tersebut menandakan bahwa VOA-Islam menganggap bahwa politik di Indonesia itu rendah dan pada saat ini sangat kotor dan jorok.

VOA-Islam di dalam artikelnya juga memberikan kritik pada penyelenggaraan pelayanan publik yang dinilai merugikan masyarakat. Salah satunya adalah kritik terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan mengambil data beberapa kasus dimana ada pasien yang ditolak rumah sakit terkait dengan ketersediaan fasilitas BPJS, situs ini berpendapat bahwa BPJS melanggar Undang-Undang dan dengan cukup keras beropini bahwa peran negara dianggap tidak ada untuk melayani kepentingan dan kebutuhan publik.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan pemerintah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia terutama untuk rakyat yang tidak mampu, tapi apakah

kenyataannya seperti itu? Beberapa pekan lalu BPJS kembali dengan kisahnya seorang bayi yang bernama Tiara Debora, putri dari pasangan Rudianto Simanjorang dan Henny Silalahi meninggal akibat keterlambatan penanganan, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres lah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Debora, dan yang paling memilukan bukan hanya Debora, dipertengahan tahun 2016 M.Rizki Akbar (2 tahun) meninggal akibat sakit jantung yang hampir 6x bolak-balik dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya dengan alasan rumah sakit yang dituju tidak menerima BPJS, Tangerang Banten. Ada juga Bpk Agus Effendy ditolak berobat ke Poli Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) RS Jember dengan alasan penuhnya kuota pelayanan BPJS setelah 3 hari bolak-balik akhirnya Bpk Agus memutuskan untuk membayar uang langsung dan akhirnya mendapatkan pelayanan. Dengan semua fakta ini, lantas apakah sebelum kita berobat kita harus mengecek dulu RS mana yang menerima BPJS, RS mana yang tidak sedang penuh melayani BPJS atau sebenarnya hanya penyakit tertentu yang mendapatkan penanganan cepat untuk pasien yang memiliki BPJS kalau seperti ini untuk apa adanya BPJS? Padahal dalam UU 44/2009 pasal 29 ayat 1 tentang Rumah Sakit telah spesifik mengatur ketentuan bahwa Rumah Sakit harus menangani pasien gawat darurat tanpa mempertimbangkan faktor biaya. Lantas kenyataannya? Jangan salahkan kami jika kami menganggap bahwa ini bukan bantuan tapi beban dan tanpa kami sadari peran Negara ADA tapi TIDAK ADA dalam jaminan kesehatan rakyatnya. Sementara dalam ajaran Islam negara mempunyai peran central dan sekaligus bertanggungjawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk urusan kesehatan. Dengan demikian Pelayanan Kesehatan termasuk bagian dari Kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh rakyatnya. Kemaslahatan dan fasilitas umum (Al-mashalih wa Al-marafiq) itu wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari Pelayanan Negara terhadap Rakyatnya, sabda Rasulullah SAW : "Imam (penguasa) adalah

pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya." (HR. Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar ra).

VOA-Islam juga memberikan perhatian tentang isu konstitusi kenegaraan dengan memproduksi beberapa artikel. Pandangan VOA-Islam lebih terfokus pada hubungan sejarah muslim dengan pendirian negara, penyusunan konstitusi dan juga pada peran dan pengaruh apa yang bisa dimainkan oleh orang muslim. Pada isu pencabutan TAP MPRS tentang komunisme misalnya, situs ini mengancam pihak-pihak yang ingin mengubah TAP tersebut dan mengatakan bahwa usaha tersebut akan berhadapan dengan TNI dan umat Islam.

Apabila ada oknum massa yang ingin mencabut peraturan bahwa PKI dilarang oleh Negara, maka mereka dikatakan oleh politisi PBB tentu akan menghadapi para tentara, rakyat, dan juga kaum-kaum nasionalis-agamis. Pasalnya, penetapan pembubaran PKI sebagaimana yang termaktud di TAP MPRS itu menurut MS Ka'ban adalah ketetapan abadi, yang artinya sebuah maklumat/dokumen sejarah RI. "TAP MPRS NO. XXV/66 abadi. Dokumeen NKRI. Mau cabut harus bikin revolusi. Revolusi, TNI, umat Islam dan kaum nasionalis bersatu tak terkalahkan," ia mengingatkan, melalui akun Twitter pribadi miliknya, belum lama ini. Di lain soal, bagi Ka'ban pengikut atau simpatisan PKI tidaklah lebih dari para penipu, yang hanya ingin merebut kekuasaan dengan cara-cara inkonstitusional. "Kalau komunis teriak demokrasi, itu pasti tipu muslihat rebut kekuasaan. Habis itu disikat seluruh kontra revolusi. PKI, Tuhan saja dinafikan, apalagi cuma sejarah, so pasti diingkari, dipulas, diputar-balik. Tipu muslihat. Begitulah mental pengkhianat." Pun soal pemutaran film G30S/PKI secara bersama-sama dinilai Ka'ban seharusnya tidak perlu dijadikan polemik. Yang setuju nonton, yang tidak sebaliknya tetapi harus tetap setia kepada UUD. "Tidak perlu ada polemik nobar film G30S/PKI. Itu fakta sejarah. Tidak boleh dilupakan.

Yang tidak setuju, tidak perlu nonton, tapi tetap bela UUD 45. Perintah Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo tentang nobar film G30S/PKI patut didukung dan dilaksanakan. Sekalian meriahkan tahun baru Hijriah dan 10 Muharam. Tahun baru Hijriah 1439 tahun baru Islam, membangun peradaban NKRI sesuai amanat Pembukaan UUD 45. PKI tidak ada tempat di NKRI."

Pada bagian yang lain, VOA-Islam sepertinya juga memberikan warning kepada pemerintah bahwa apabila muslim disakiti, maka akan muncul konflik sosial yang sangat besar dan destruktif. Situs ini mencoba menguak sejarah kelam bangsa Indonesia terkait dengan Peristiwa Tanjung Priuk yang dianggap berawal dari tuduhan anti Pancasila kepada masyarakat muslim.

Ayah saya ditangkap, ditahan, dan dipenjarakan dengan vonis subversif selama 14 tahun. Mendapat remisi karena mengabdikan kepada negara dipotong enam tahun. Jadi menjalani hukuman selama delapan tahun. Saat ini ayah saya adalah Ketua pengurus atau rektor di sekolah tinggi daurah Islam Tanjung Priok, Jakarta Utara. Itu kurang lebih profil ayah saya. Posisi kebijakan Orde Baru saat itu, jadi bisa dikatakan ada satu sistem yang memang dipertahankan oleh rezim tersebut dengan menggunakan satu kekuatan militer. Misalnya ketika saat itu penguasa tidak mempunyai legitimasi yang kuat di parlemen maka yang kemudian terjadi adalah menambah fraksi ABRI (TNI) di sana," ceritanya di hadapan para wartawan, belum lama ini di kantor KontraS, Jakarta. Dirasa belum cukup, pemerintah menurutnya kembali menguatkan dirinya melalui parlemen.

Setelah peristiwa Tanjung Priok terjadi malam hari itu ia menyebut terdapat perintah oleh Pangdam DKI Jakarta saat itu adalah Try Sutrisno untuk membersihkan seluruh tempat termasuk darah-darah yang berceceran sekitar lokasi dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Hingga kini, kasus atau peristiwa tersebut menurutnya masih belum tuntas.

Walaupun peristiwa tersebut sempat duduk di pengadilan dan diurus oleh Komnas HAM saat itu. "Kemudian Komnas melakukan penyelidikan dan poin dari penyelidikan itu adalah terdapat pelanggaran HAM yang berat di peristiwa Tanjung Priok dalam bentuk pembunuhan secara kilat, penyiksaan, penghilangan secara paksa, dan juga perampasan kemerdekaan. Lalu dinaikkan ke Kejaksaan Agung. Kemudian tahun 2003 dan 2004 digelar persidangan HAM Tanjung Priok. Ada beberapa nama yang tidak dimasukkan penyidikan. Terbatas hanya pada empat kelompok," tutupnya bercerita.

Secara lebih fundamental, VOA-Islam menyoroiti adanya beberapa amandemen yang telah dilakukan selama masa reformasi tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang banyak menimbulkan miskonsepsi dalam pemahaman publik. Website ini mengatakan bahwa sampai sekarang format awal (pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan) masih lengkap. Dalam memaparkan narasinya, website ini mengambil pendapat dari prof Jimly Asshiddiqie.

Penjelasan UUD 1945 ternyata berubah sangat signifikan. Bahkan salah satu pakar hukum menyebutkan perubahan penjelasan itu berubah hingga 300 persen. UUD 45 doang. Tapi isinya 300 persen berubah. Ini yang saya namakan big bang change. Makanya kita menjaga kesinambungan sehingga salah satunya reformasi mulus. Menghargai kesinambungan. Tapi yang berubah itu 300 persen. Dampaknya sistem aturan kita bernegara, sistem kelembagaan negara, berubah besar-besaran. Dan ini menuntut perubagan mindset dari penyelenggara negara. Semua kita, sebagai warga negara, berubahnya itu besar-besaran. Kalau kita masih mindset lama, ya, tidak cocok," ujar Jimly Asshiddiqie, belum lama ini di kantor ICMI, Jakarta. Namun demikian, inilah harapan (kita) sesudah 20 tahun reformasi."Kita menyadari perubahan besar kita sempurnakan yang belum sempurna. Dan mari kita kurangi kelebihan. Tambahi yang masih kurang. Inilah

tanggungjawab kepemimpinan negara dari bangsa dan kepemimpinan para penentu kebijakan yang sedang dapat amanah sekarang. Perbaiki mana yang belum baik. Kurang yang kelebihan. Tambahi yang masih kurang. Itu kira-kira karena ini era konsolidasi di sejarah reformasi,"□ paparnya. Pun termasuk amandemen, menurutnya Empat (amandemen) itu hanya lampiran (perubahan 1-4). "Maka kalau kita mau memahami konteks keseluruhan konstitusi kita sekarang, UUD 45 kita sekarang, ya baca semuanya dan selengkapnya, gitu. Jangan hanya baca footnote bintang satu, dua, tiga, dan empat. Itulah kisah dari UUD kita," tambahnya. Sehingga anggapan masyarakat bahwa penjelasan soal UUD 1945 itu sudah hilang, maka sebetulnya tidak demikian. "Jadi ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Ini utuh sampai hari ini masih ada. Kenapa masih ada? Karena yang kita bikin kemarin itu adalah amandemen. Lampiran saja. Maka kalau ada orang yang mengira penjelasan sudah hilang, tentu tidak. Itu masih ada. Naskahnya pun masih asli, tutupnya.

2. Kebhinekaan, Toleransi, dan Persaudaraan

Isu kebhinekaan tidak mendapat perhatian yang signifikan dari situs ini. Yang dapat tercandra adalah respon VOA-Islam tentang toleransi. Angle yang dipilih dalam merespon soal toleransi adalah tentang legalitas formal dan juga kearifan sosial yang dipakai oleh publik melihat demonstrasi. Situs ini jelas dalam posisi tidak menolak adanya demonstrasi, khususnya yang dilakukan oleh umat Islam dalam bentuk Aksi Bela Islam, Aksi 212 dsb, dengan mengambil pendapat dari wakil sekjen MUI, Ustd. Tengku Zukarnaen, yang menyatakan baik secara formal, maupun asas kemashalahatan, demonstrasi yang dilakukan selama ini sudah on the right track dan membawa manfaat bagi umat.

MUI secara lembaga tak pernah melarang untuk demonstrasi. Pernyataan Ustadz Tengku Zulkarnain ini

membantah anggapan beberapa pihak dengan menyitir perkataan Ketua Umum MUI bahwa MUI melarang aktivitas demonstrasi. Ketua MUI atau lembaga MUI tidak pernah melarang demo. Demo adalah hak demokrasi yang dilindungi UUD 1945, tegas Ustadz Tengku yang disampaikan melalui akun Twitter @ustadtengkuzul, Sabtu (30/9/2017). Ustadz Tengku mengatakan bahwa demonstrasi adalah hal yang diperbolehkan dalam konstitusi bahkan agama. MUI tidak mungkin melarang sesuatu yg dibolehkan konstitusi negara apalagi yg dibolehkan oleh agama. Jika ada larangan bersebar hoax, ungkap ulama yang kerap bergamis dan bersurban putih ini. Lebih lanjut, Ustadz Tengku menjelaskan bahwa memang ada beberapa aparat keamanan yang berkunjung ke rumah KH Maruf Amin, Ketua Umum MUI. Namun, Kyai Maruf Amin tidak pernah menyampaikan pelarangan aksi demonstrasi. "KH Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI tidak pernah melarang demo. Ada Silaturahmi ke rumah Yai oleh beberapa oknum keamanan bukan ke lembaga MUI. Dengan tegas kami menyatakan KH Ma'ruf Amin, apalagi lembaga MUI secara resmi tidak pernah melarang demo. Selalu dihimbau tertib tidak anarkis," ujar dia.

Isu yang menarik bagi VOA-Islam terkait dengan persaudaraan sangat kental kaitannya dengan derita umat Islam di Rohingnya. Tak kurang 100 narasi dibuat dalam kurun waktu Juli-September 2017 dan dishare ke publik yang banyak bercerita tentang penderitaan muslim Rohingnya, perlunya kepedulian sesama terhadap muslim Rohingnya dan juga usaha penggalangan dana buat membantu mereka seperti narasi yang ditulis pada tanggal 25 September 2017

Roadshow Tabligh Akbar Peduli Rohingya berkesempatan mengunjungi kota Kembang, Bandung, kegiatan bertema

'Rohingya Panggilan Jihad Akhir Zaman' itu digelar di Masjid Nurul Huda, Cijerah Kota Bandung, Minggu (24/9/2017). Sejumlah pembicara dari sejumlah ormas hadir mengisi acara, diantaranya Ketua GPMI Jabar Ustadz Anwar Anshori, Tokoh Aktivistis Jabar, Ustadz Rizal Fadhilah, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi FORJIM, Ustadz Dudy S Takdir, dan Pembina LPPDI Thoriquna, Ustadz Ashadi. Ustadz Anwar Anshori menegaskan bahwa setiap Muslim wajib membela saudara Rohingya-nya, karena Islam sangat menghargai nilai persaudaraan dan menjunjung kehormatan Muslim.

Dalam upayanya untuk mengetuk kesadaran persaudaraan umat muslim terkait Rohingnya, rasa kecintaan terhadap saudara dinarasikan pada tanggal 20 September 2017.

Tidak beriman jika kalian tidak mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Karena itu kecintaan kita pada saudara Muslim, khususnya muslim Rohingya adalah bagian dari keimanan. Demikian kata pembuka Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Forum Jurnalis Muslim (Forjim) Dudy S. Takdir dalam Tabligh Akbar "Rohingya Jeritanmu Panggilan Jihad" di Masjid Al-Ikhlâs, Paradise Serpong City, Serpong, Tangerang Selatan, Ahad (17/9) pagi. Hadir dalam Tabligh Akbar tersebut, Ustadz Abu Jibril (Majelis Mujahidin) dan Ustadz Mukhlis (Aktivistis Gerakan Islam LPPDI Thariquna). Muslim Rohingya adalah bagian dari tubuh kita. Kalau kita tidak peduli dengan penderitaannya, abai terhadap hak-haknya, kelak di hari kiamat nanti, Allah akan tanya, kenapa kalian tidak peduli dengan saudara muslim Rohingya yang dibantai oleh Pemerintah dan militer Myanmar?" kata Dudy yang juga Jurnalis media Ahad.co.id.

3. Kelompok Radikal dan Perpu Ormas

Respon pertama terkait kelompok yang dianggap "radikal" oleh otoritas kekuasaan, yakni Hizbut Tahrir

Indonesia (HTI). Ada hal menarik yang dapat tertangkap dari narasi yang dibuat oleh VOA-Islam tentang HTI.

HTI menjadi sumber suara bagi para penulis di VOA-Islam untuk menyerang pemerintah. Perlu diingat, tujuan utama HTI ialah menegakkan syariat Islam sehingga hukum Islam dapat diberlakukan di Indonesia. Menyerang pemerintah untuk mengganti "sistem" dengan sistem Islam merupakan usaha yang dilakukan HTI untuk mencapai tujuannya. Merasa memiliki persamaan, serangan terhadap pemerintah yang dilakukan HTI melalui komentar dan kritik juga difasilitasi oleh VOA-Islam. Namun, hubungan VOA-Islam dengan HTI berbeda dengan hubungan VOA-Islam dengan ormas yang dianggap dekat dengan VOA-Islam, misalnya FPI. Hal ini terlihat pada situasi di tahun 2016 ketika isu pembubaran HTI diserukan. VOA-Islam tidak serta merta pasang badan membela HTI, tidak seperti ketika VOA-Islam membela FPI.

Terkait isu tentang perppu ormas, VOA-Islam cukup aktif memberikan pandangannya dengan menerbitkan beberapa artikel yang bernada menolak perppu ormas tersebut. Narasi penolakan Perppu dimulai dengan memberikan wacana demonstrasi penolakan Perppu yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat dan memuatnya dalam edisi 30 September 2017 yang berjudul Aksi 299 Tolak Perppu Ormas dan Kebangkitan Neo-PKI

Diperkirakan 150 ribu massa memadati depan gedung DPR/MPR usai shalat Jumat (29/9/2017). Peserta mengikuti aksi yang dikenal aksi #299 ini menuntut DPR untuk menolak Perppu Ormas dan menolak usul pencabutan TAP MPRS tentang larang PKI. Shalat Jumat sebelumnya dilakukan di masjid-masjid sekitar gedung DPR dan di depan gedung DPR. Massa yang dikoordinir Presidium 212 Â ini terdiri dari ragam kelompok ormas dan aliansi, diantaranya PETA NKRI, LSPI, FPI, PPMI, Pendekar Banten, Gerakan Ibu Negeri, Gema

Pembebasan, Aliansi ormas dan umat Islam sejabodetabek dan sejumlah majelis taklim. Banyak pula di antara peserta berasal dari daerah-daerah mewakili organisasinya.

Masih dalam artikelnya yang sama, situs ini menyinggung bahwa Perppu yang diterbitkan pemerintah ini merupakan bentuk fasisme dan kediktatoran penguasa.

Disebutkan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan menunjukkan rezim ini seperti firaun. "Rezim sekarang ini sama saja dengan Firaun, yang mengeluarkan Perppu untuk membunuh semua anak laki-laki agar kekuasaannya tidak terancam," kata ustadz Felix Siau dalam orasinya.

Dalam artikelnya yang lain VOA Islam juga menarik hubungan antara hadirnya Perppu Ormas dengan bangkitnya PKI dengan memuat hasil buah fikiran Muhammad Akbar Ali pada tanggal 20 September 2017.

Banyak pengamat, akademisi, hingga rakyat jelata menulis artikel analisis politik terkait isu tersebut. Bahkan bertebaran memenuhi dunia online. Dan rata-rata poin pesan mereka ingin menstimulus emosional rakyat akan bahaya kebangkitan PKI. Kehebohan isu kebangkitan PKI yang beraroma ketakutan, menunjukkan respon kesadaran yang berangkat dari sejarah pemberontakan PKI yang terkenal sadis. Ini menunjukkan tumbuhnya berfikir masyarakat Indonesia akan berbagai bahaya yang mengancam bangsa. Namun pada situasi lain, pun berbagai paradoks yang teramat genting terhadap bangsa ini terlihat minim akan kesadaran ataupun pada aksi protes atasnya.

Anggapan tentang kebangkitan PKI dibalik terbitnya Perppu terus digemakan dan terus diperkuat dengan narasi-narasi yang lain seperti yang dimuat tanggal 29 September 2017 berisi resolusi untuk presiden terkait UU Ormas yang

poin-poinnya adalah antara lain menganggap bahwa UU Ormas bertentangan dengan UUD 1945

Pertama, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 nyata-nyata bertentangan dengan pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Bila ujaran kebencian dilarang karena menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, maka Perppu kebencian sebaiknya diabaikan.

Selanjutnya kebangkitan PKI juga masuk dalam resolusi tersebut

Kedua, Pemerintah harus bersikap tegas membendung gejala-gejala kebangkitan PKI. TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 sampai sekarang tetap berlaku. TAP MPRS itu menetapkan pembubaran PKI di seluruh wilayah NKRI serta melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan serta mengembangkan paham atau jaran komunis/marxisme-leninisme. PKI yang pernah berkhianat pada bangsa dan negara Indonesia tahun 1948 dan 1965 tetap merupakan bahaya laten yang harus terus menerus kita waspadai.

Di dalam narasinya yang lain, yang dimuat pada tanggal 29 September 2017 kembali situs ini menyampaikan bahwa UU Ormas melanggar Undang-Undang dan kali ini, pendapat dari salah satu wakil pimpinan DPR, Fadli Zon, dijadikan referensi.

Fadli yang ikut berorasi tersebut mengatakan, bahwa untuk Perppu Ormas yang ada saat ini (dikeluarkan pemerintahan) bertentangan dengan UU yang ada. "Perppu Ormas yang dikeluarkan ini bertentangan dengan Undang-undang," katanya, Jumat (29/07/2017), di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Menurut Fadli, pertentangan soal Perppu Ormas ini sebagaimana karena negara menjamin setiap masyarakat untuk berkumpul dan atau menyampaikan pendapat. Sehingga, sekali lagi ia mengatakan bahwa Perppu ini tidak menjamin sebagaimana UU katakan. Kebebasan

berserikat dan berkumpul itu dijamin Undang-undang kita, yakni menyampaikan secara lisan maupun tulisan apa yang menjadi pendapat masyarakat, ia menambahkan, dengan diiringi teriakan takbir. Selain itu, untuk mengumpulkan kekuatan menolak Perppu Ormas ini, masyarakat dimintanya juga "mengadu" ke Fraksi lain yang ada di DPR RI. Sehingga apa yang ingini itu tercapai. "Bapak-bapak dan hadirin sekalin harus menyampaikan hal ini juga kepada Fraksi-fraksi lain agar ikut menolak Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 ini, tutupnya menyarankan.

4. Kekerasan, Radikalisme dan Terorisme

Sama seperti isu tentang persaudaraan, konflik sosial antara muslim Rohingnya dengan pemerintah Myanmar menjadi topik yang mendapat perhatian serius dari VOA-Islam. Di satu sisi, VOA-Islam melakukan kampanye kemanusiaan yang begitu masif untuk membantu muslim Rohingnya, dan disisi yang lain, situs ini menguak teror, intimidasi dan juga kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan juga pihak-pihak lain yang turut merongrong rasa aman dari muslim Rohingnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa narasi yang dimuat dalam VOA-Islam tanggal 30 September 2017 yang mengungkapkan bahwa ada intimidasi yang dialami oleh muslim Rohingnya yang terjadi tidak hanya di Myanmar saja, akan tetapi juga di wilayah lainnya.

Intimidasi kepada Muslim Rohingya tampaknya tak hanya terjadi di Myanmar saja. Di luar Myanmar pun sejumlah Muslim Rohingya mendapat intimidasi dari biksu Buddha. Di Kolombo, Sri Lanka sejumlah biksu Budha menyerbu sebuah tempat perlindungan Muslim Rohingya yang dioperasikan oleh PBB. Para biksu ini mendesak Muslim Rohingya agar kembali ke Rakhine yang telah melarikan diri dari operasi militer tentara Myanmar.

Selain Rohingnya, kekerasan, dan teror yang terjadi di Suriah juga mendapat perhatian dari VOA-Islam, bahkan VOA Islam memberikan pernyataan bahwa apa yang terjadi di Suriah mengingatkan tragedi Holocaust yang dulu menggemparkan dunia. Narasi ini dimuat tanggal 29 September 2017.

Raungan sirine pertanda datangnya pesawat tempur Rusia dan rezim Basyar Asad kembali menggema di seluruh Kota Idlib, Suriah, setelah nyaris selama 5 bulan terakhir suara tersebut tak terdengar. Terhitung sejak 19 September lalu, ketika kelompok Haiat Tahrir Sham (HTS) mulai melancarkan operasi yang hanya berusia dua hari, pesawat-pesawat Rusia langsung menggempur tiga rumah sakit di selatan Idlib sebagai respons keji mereka. Sangat mengerikan respons biadab yang dilakukan rezim Nushayri Basyar Asad dukungan Rusia dan Iran terhadap kaum Muslimin di Idlib itu. Dalam tiga hari pertama, 19-21 September mereka telah melancarkan 500 serangan udara yang menargetkan rakyat sipil dan kelompok-kelompok pejuang revolusi.

Sementara itu, di dalam negeri, VOA-Islama terus menggemakan memori menyakitkan bangsa yang diakibatkan oleh PKI. Jejak-jejak sejarah tentang kebrutanan, kekerasan dan juga intimidasi PKI menjadi menu yang senantiasa dihidangkan ke meja-meja pengetahuan publik. Narasi yang dihadirkan diantaranya adalah narasi yang dimuat tanggal 29 September 2017 yang berisi kekejaman kekerasan yang dilakukan oleh PKI terhadap para ulama.

Namun, fakta-fakta sejarah mengungkapkan bahwa PKI telah melakukan aksi keji, bengis, kejam. Tak hanya itu, PKI juga berupaya beberapa kali mengganti ideologi negara dan menggulingkan pemerintah yang sah. Aksi keji PKI bisa ditengok pada peristiwa Madiun pada September 1948. Ratusan orang dijagal dan dimasukkan ke dalam sumur tua

yang ada di tengah perkebunan tebu di Magetan, Jawa Timur. Sumur tua itu kini jadi monumen tugu yang dipucuknya terpacak patung garuda terbang. "Ya, persis di bawah tugu itulah dulu lubang pembantaian PKI 1948. Setelah jenazahnya diambil, sumur ditimbun kembali. Beberapa tahun setelah tragedi itu di situ kemudian didirikan monumen," kata Jumiran (57 tahun), warga Desa Rejosari, Ketika ditanya siapa sebenarnya yang dulu "ditanam" di dalam lobang sumur itu, Pariyem mengaku tak tahu persis karena dia saat itu masih anak-anak. Beberapa nama ulama yang ada di monumen itu di antaranya tertulis KH Imam Shofwan. Dia pengasuh Pesantren Thoriquussu'ada Rejosari, Madiun. KH Shofwan dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut setelah disiksa berkali-kali. Bahkan, ketika dimasukkan ke dalam sumur, KH Imam Shofwan sempat mengumandangkan azan. Dua putra KH Imam Shofwan, yakni Kiai Zubeir dan Kiai Bawani, juga menjadi korban dan dikubur hidup-hidup secara bersama-sama.

Tindakan teror, yang tentunya meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, yang dilakukan oleh PKI kembali dikupas dalam sebuah artikel VOA-Islam pada tanggal 25 September 2017. Bahkan judul yang dipakai juga cukup provokatif dengan melabeli iblis dan sekutunya saja yang tertawa lihat jenazah korban G30S/PKI

Pengkhianatan dan pemberontakan PKI kepada pemerintahan saat itu termaktub dalam sejarah. Dengan adanya sejarah yang dinilai kuat kenyataan tersebut, alangkah tidak bermoralnya manakalah orang-orang yang menjadi korban dipersalahkan oleh segelintir oknum. Revolusioner menurut faham komunis lakukan pemberontakan kepada penguasa itu arahan Stalin pada Mao Tze Dong tahun 1927-1931. Mao start dari daerah-daerah. Hanya iblis yang tertawa ketika Adam dan Hawa terusir dari jannah (surge). Hanya iblis dan pengikutnya tertawa ketika melihat jenazah korban kebidaban PKI, MS Kaban berkicau di akun media sosial, Twitter pribadi miliknya, Senin (29/2017). Dewan Syuro PBB ini juga nampak miris saat ada yang ingin

menyaksikan film pemberontakan PKI justru malah dituding macam-macam seperti ingin mengganggu pemerintahan Jokowi. "Fitnah besar yang menuding ajakan nobar (nonton bareng) G30S/PKI nyerang Pemerintah Presiden Jokowi. Yang ngomong itu kebelinger

Terkait isu radikalisme yang dianggap sering dialamatkan kepada Islam, VOA-Islam memberikan pemahaman yang berbeda dan kemudian dijadikan narasi untuk menjadi konsumsi khalayak banyak. Langkah redefinisi dan persepsi tentang makna radikal adalah dengan membuat narasi penyangkalan terhadap stereotip radikal yang dialamatkan kepada Islam dengan membuat artikel yang berjudul "Paska Komunis muncul Radikalisme, namun Mengapa Islam yang Dihembus Radikal?"

Ada pemikir Barat yang menyatakan bahwa paska runtuhnya ideologi komunis negara Uni Soviet tidak akan ada lagi ideologi lain selain kapitalisme. Itu dianggap benar. Akan tetapi, jika ada pemikir yang menyatakan bahwa ke depan, paska runtuhnya Uni Soviet kemudian akan muncul radikalisme Islam itu tentulah tidak benar. Bahwa ideologi tinggal satu sesudah runtuhnya komunis itu benar, Fukuyama. Tetapi bahwa sekarang itu ada ancaman-ancaman yang dikhawatirkan oleh Huntington, bahwa akan ada radikalisme Islam, perang peradaban Barat dan Timur, itu ada benarnya meskipun mungkin banyak salahnya. Saya ingin mengatakan Daniel Behl, Fukuyama, dan Huntington itu berteori ada benarnya tetapi tidak semuanya benar. Bahwa ideologi itu bohong semua, itu Behl benar. Kan tidak ada ideologi yang memenuhi janjinya. Mau begini, begini, dan begini itu tidak ada. Itu semua hanya slogan mulut pemimpin, katanya. Sebab sebenarnya kan radikalisme itu bukan hanya Islam, kalau kita mau jujur. Setiap agama itu mempunyai unsur-unsur radikal juga tetapi yang dihembuskan Islam, Islam, Islam, kritik Mahfud MD

Narasi penyangkalan stereotip radikalisme kemudian diteruskan dengan memberikan wacana lain yang, tentunya, diharapkan dapat mengubah paradigma publik tentang radikalisme seperti yang dimuat pada tanggal 29 September 2017.

Selain itu, menurutnya hal harus dilakukan (strateginya) adalah bagaimana membangun kesejahteraan. "Saudara, saya terus terang mengatakan begini, orang yang mengikuti gerakan-gerakan radikalisme pada dasarnya ditumpangi dan menumpangi kelompok radikal yang kecil sebenarnya. Kaum radikal ini melihat Indonesia banyak orang miskin dan banyak orang kecewa lalu ditumpangi untuk melawan. Sementara yang kecil-kecil mencari tumpangan ingin mengekspresikan karena ketidakpuasan-ketidakpuasan yang kemudian menggumpal dan menggumpal. Sebenarnya mereka tidak persoalkan dasar negara, Pancasila tetapi mempersoalkan bagaimana kemiskinan itu merajela.

D. Respons Thoriquna.id terhadap Radikalisme

1. Pancasila, NKRI dan Khilafah Islam.

Pancasila dan NKRI merupakan satu kesatuan yang sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa tanpa terkecuali. Saat ini tinggal mengisi kemerdekaan yang sudah diraih 72 tahun lalu dengan hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Di sini ditampilkan bagaimana thoriquna.id menarasikan tentang Pancasila, NKRI, dan juga pandangan maupun sikapnya terhadap khilafah Islamiyah.

Berdasarkan penelusuran konten laman thoriquna.id. Tidak ada narasi apapun mengenai Pancasila dan NKRI. Sementara untuk narasi khilafah, diungkapkan dengan kata khalifah yang merujuk pada Khalifah Umar bin Khattab. Hal ini terdapat dalam artikel yang berjudul: "KABILAH "BONEKA" VS UMAT ISLAM" (<http://www.thoriquna.id/2017/07/kabilah-boneka-vs-umat-islam.html>) diakses pada 5

November 2017). Artikel ini ditulis oleh Muntoha Bulqin. Berikut ini kutipan tentang narasi khalifah yang terdapat laman thoriquna.id:

“...Siapa yang tidak kenal dengan Abu Lu’lu’ah ? Seorang Nasrani dan hamba saya Persia yang ditawan pada peperangan Nahawan. Khalifah Umar bin Khatthab menemui ajalnya di tangan orang ini. Melalui tangan-tangan mereka musuh-musuh Islam telah berhasil memunculkan gerakan murtad dan meningkatkan sentimen kekabilahan...”

Artikel tersebut menarasikan tentang bagaimana kaum Salibis-Zionis --demikian sebutan yang dialamatkan pada mereka--, yang tidak akan membiarkan umat Islam begitu saja di manapun. Kaum Salibis-Zionis disebutkan memiliki pemerintah “boneka” di negara-negara Islam, seperti Zine al-Abidine Ben Ali di Tunisia, Thaghut Husni Mubarak sebagai penguasa Mesir, thaghut Muammar Gaddafi di Libya, Saddam Husein di Irak, yang semuanya sudah ditumbangkan oleh umat Islam di negaranya masing-masing. Demikian pula thaghut Syiah Bashar Asad di Suriah yang masih berkuasa selalu mendapat perlawanan bahkan penyerangan dari umat Islam. Berikut ini narasi yang diunggah dalam laman thoriquna.id:

“...pada Januari 2011 thaghut penguasa boneka Tunisia dilengserkan oleh umat Islam di negeranya. Thaghut Husni Mubarak penguasa boneka Mesir dilengserkan pada Februari 2011. Thaghut Muammar Gaddafi penguasa Libya tewas digantung umat Islam pada tahun 2013 menyusul thaghut Saddam Husein yang juga bernasib sama pada tahun 2013. Sedangkan thaghut Syiah Bashar Asad kekuasaannya sampai saat ini masih diserang oleh umat Islam Sunni untuk membalas dendam atas kematian umat Islam Suriah. Thaghut Ali Abdullah Saleh dilengserkan pada tahun 2014. Masih

banyak thaghut-thaghut boneka yang sedang dalam proses dibumi hanguskan oleh umat Islam.”

Narasi berikutnya yang terkait dengan khilafah Islamiyah atau khalifah yaitu terdapat dalam artikel yang ditulis oleh Muntoha Bulqin dengan judul: “PROPAGANDA PERANG AHZAB” (<http://www.thoriquana.id/2017/07/propaganda-perang-ahzab.html> diakses pada 5 November 2017). Berikut ini narasi tentang khalifah yang dipublikasikan dalam laman [thoriquana.id](http://www.thoriquana.id):

“Dalam masa pengepungan tentara Ahzab Modern, umat Islam telah melahirkan *ash-Shahwah al-Islamiyyah* (gerakan kebangkitan Islam) dengan berbagai bentuk dan tujuan yakni mengembalikan **Khilafah**, pemerintahan Islam dan kebangkitan Islam. Rekam jejak gerakan itu menjadi catatan sejarah yang panjang, sejak eksperimen jihad Gerakan Pemuda Maroko 1963 sampai eksperimen jihad Al-Qaidah pada 11 September 2001 yang berhasil menghancurkan simbol ekonomi dajjal Amerika, WTC.” (cetak tebal dari peneliti).

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwasanya laman [thoriquana.id](http://www.thoriquana.id) memfasilitasi pemikiran tentang pembentukan khilafah Islamiyah. Berdasarkan penelusuran memang tidak ditemukan kata maupun kalimat yang menyetujui tentang khilafah Islamiyah, namun secara tersurat memberikan dukungan. Hal ini dikuatkan pula dengan nama penulis artikel yang sama di beberapa artikel yang [thoriquana.id](http://www.thoriquana.id) publikasikan yaitu Muntoha Bulqin.

2. Kebhinekaan, Toleransi dan Persaudaraan

Tidak ada narasi apapun terkait tiga hal; kebhinekaan, toleransi, dan persaudaraan. Slogan yang terpampang dalam logo, yaitu: “Komitmen di Jalan Dakwah” seolah tidak memiliki relasi apapun dengan artikel-artikel yang diunggah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a,

yad'u, da'wan, du'a yang bermakna mengajak/menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Secara istilah yaitu: "Mendorong manusia melakukan kebaikan dan mentaati petunjuk Allah, menyuruh mereka melakukan kebajikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Syekh Ali Mahfuzh, *Hidayat al-Mursyidin ila Thuruq al-Wa'dzi wa al-Khitabah*, h.17)

Makna dakwah yang dimaknai oleh thoriquna.id lebih pada menyebar kebencian kepada orang lain. Demikian kesan yang dapat ditangkap jika mencermati artikel-artikel yang diunggah dalam laman mereka.

3. Kelompok Radikal dan Perppu Ormas

Narasi terkait pandangan dan sikap terhadap keberadaan kelompok-kelompok radikal dan Perppu ormas tidak ditemukan dalam laman thoriquna.id. Laman ini tidak pernah membahas situasi dan kondisi sosial-politik-budaya di Indonesia secara langsung. Perhatian laman thoriquna.id lebih menghubungkan dengan kondisi umat Islam zaman dahulu dengan kondisi saat ini. Selain itu juga artikel-artikelnya lebih berisikan tentang indoktrinasi kepada pembaca.

4. Kekerasan, Radikalisme dan Terorisme

Narasi terhadap kekerasan dan radikalisme yang secara tersurat tertulis di laman thoriquna.id tidak ditemukan. Namun narasi yang diunggah justru sarat dengan hal-hal kekerasan, karena penyebutan kata perang secara verbal terdapat dalam dua judul artikel.

Narasi yang ditampilkan tentang terorisme dalam laman thoriquna.id terdapat dalam artikel yang berjudul "BERAWAL DARI BADAR, PERANG=SOLUSI"

<http://www.thoriquana.id/2017/07/berawal-dari-badar-perang-solusi.html> diakses pada 5 November 2017). Artikel ini ditulis oleh Muntoha Bulqin dan disunting oleh Abu Fayruza. Berikut ini:

"Inilah perang Salib, perang melawan terorisme yang memakan waktu lama. Dilanjutkan oleh Menlu Perancis, Juppe Allen pada 24 Maret 2011, *"Kita akan membombardir kaum Muslimin di Arab Saudi dari Suriah sebagaimana Libya. Perang Salib di Libya harus menjadi contoh bagi Arab Saudi, Suriah dan Negara-negara Islam lain."* Dan Libya pun pernah dibombardir oleh fir'aun Amerika Barack Obama dengan sandi operasi *odyssey dawn*". (Tulisan berbentuk miring dan tercetak tebal asli seperti dalam laman).

Thoriquna.id tidak memiliki data yang cukup untuk dikaji secara lebih mendalam, terkait dengan beberapa kata kunci yang disebutkan di atas. Narasi-narasi penting yang berhubungan dengan Pancasila, NKRI, khilafah Islamiyah, kebinekaan, toleransi, dan persaudaraan, kelompok radikal, perppu ormas, kekerasan, radikalisme tidak ditemukan dalam konten laman mereka.

Adapun kata kunci yang ditemukan dalam thoriquna.id yang cukup berkaitan dengan penelitian ini yaitu jihad, perang, kata perang bahkan dijadikan kata dalam sebuah judul. Jihad disebutkan di empat opini yaitu dalam judul berikut:

1. BENALU UMAT : Mentalitas Penjual Bangsa
(<http://www.thoriquana.id/2017/07/benalu-umat-mentalitas-penjual-bangsa.html>, diakses pada 5 November 2017),
2. BERAWAL DARI BADAR, PERANG = SOLUSI "BERAWAL DARI BADAR, PERANG=SOLUSI"
<http://www.thoriquana.id/2017/07/berawal-dari-badar-perang-solusi.html> diakses pada 5 November 2017),

3. KABILAH "BONEKA" VS UMAT ISLAM
(<http://www.thoriquna.id/2017/07/kabilah-boneka-vs-umat-islam.html> diakses pada 5 November 2017),
4. PROPAGANDA PERANG AHZAB
(<http://www.thoriquna.id/2017/07/propaganda-perang-ahzab.html> diakses pada 5 November 2017).

Mencermati pandangan dan sikap laman [thoriquna.id](http://www.thoriquna.id) terhadap isu radikalisme, maka dapat dikatakan bahwasanya laman ini salah satu laman yang menyebarkan radikalisme dengan artikel-artikel yang diunggah dan dipublikasikan kepada warga net. Jika warga net tidak melakukan sikap kritis dan menerima begitu saja terhadap artikel-artikel tersebut, maka dapat menyebabkan timbulnya pandangan dan sikap radikalisme yang berujung pada legalisasi tindakan kekerasan kepada orang lain yang berbeda agama maupun keyakinan. Sebutan bagi mereka yang tidak disetujui yaitu Salibis-Zionis, liberal, untuk menyebut beberapa.

bab VII

Radikalisme di Media Sosial

A. Platform Media Sosial

Media sosial yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari tiga platform, yaitu Facebook, Intagram, dan Twitter. Pertama, Facebook (FB) merupakan platform media sosial terbesar yang banyak dipakai semua usia. Pengguna facebook pada bulan Mei 2017 diperkirakan mencapai jumlah 1,94 miliar mengalahkan pengguna Youtube dan Instagram dengan jumlah pengguna sebanyak 1 miliar dan 700 juta pengguna. Dari tahun ke tahun facebook mengalami perkembangan dan memiliki kemiripan dengan media sosial lain. Semula pengguna FB hanya dapat menuliskan teks "status" pada akun sendiri dan memberikan "comment" pada akun orang lain. Kini pengguna FB juga dapat menggunakan stori facebook yang memungkinkan penggunanya memposting video, gambar, suara selama waktu postingan 24 jam. Selain itu, kini facebook dilengkapi dengan fasilitas membuat status dengan ukuran dan warna berbeda serta tampilan latar belakang yang dapat diubah. Model pertemanan facebook menggunakan *friends* dan *followers*. Karena batas pertemanan FB biasanya mencapai 5000 maka sekarang ada fitur followers untuk mengikuti pemberitahuan dan

aktivitas dari pengguna akun FB lain. Selain itu pada FB ada Page/Lamanyang biasanya bisa diikuti dan disukai sehingga akun FB bisa mengikuti informasi terkini dari laman yang disukai. Biasanya kita dapat menyukai, membagikan, komentar pada akun dan lamanyang dibuat untuk publik bukan di privat.

Kedua, Instagram adalah sebuah platform media sosial yang memungkinkan penggunaannya berbagi foto dan video lalu bisa membagikannya di jejaring sosial. Pengguna Instagram dapat membagikan foto dan video (1 menit) lalu bisa menuliskan *caption* bukan "status". Kini instagram menciptakan fitur baru, yaitu snapgram atau instastory (instagram stories) yang mirip dengan fitur facebook stories. Instastory ini fitur yang memungkinkan pengguna mengirim foto dan video yang menghilang setelah 24 jam. Konten yang dibagikan (*share*) ke stories juga tidak akan muncul pada *profil grid* atau dalam Instagram *feed*. Orang cenderung menuliskan status di instagram story, dan juga ada banyak *emoticon* sebagai pendukung status. Akun instagram sulit untuk dilacak mengenai latar belakang hidup dari pemilik akun (pendidikan, alamat, tanggal lahir, dll) kecuali si pemilik akun mencantumkannya di bio yang tertera di akun instagram.

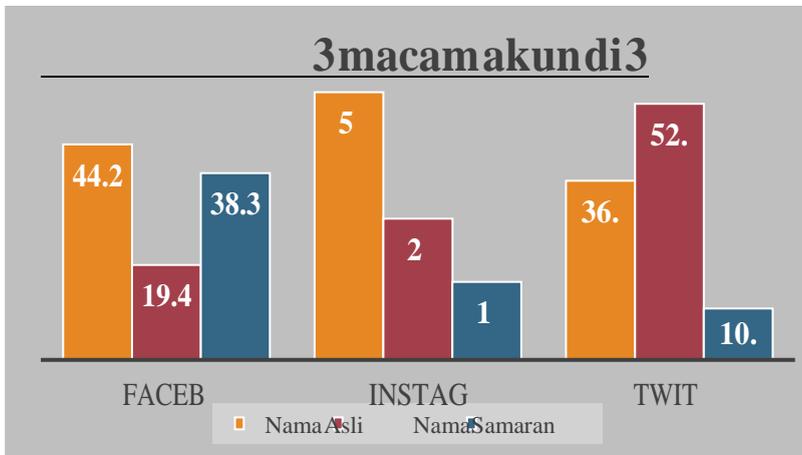
Model pertemanan di instagram biasanya disebut "follower" dan "following". Followers yaitu orang/akun yang mengikuti akun instagram seseorang, sedangkan following adalah akun yang diikuti oleh seseorang. ID atau nama akun di instagram ada dua macam, yaitu nama panjang yang tertera di bio dan "username" atau nama akun instagram yang bisa dicari oleh orang lain/akun lain. ID username seseorang bersifat unik, dalam

arti tidak boleh sama dengan username orang lain. Seperti halnya facebook dan twitter, instagram juga bisa mendapatkan like, comment, tagging dan repost. Perbedaan akun instagram dengan twitter adalah bahwa pada waktu akun Instagram diatur private, pemilik akun masih bias menerima pesan di direct message tanpa harus memfollow/mengikuti akun tersebut.

Ketiga, pada Twitter terdapat istilah "tweet," "retweet," "like" dan "comments." Tweet adalah suatu postingan yang murni diproduksi oleh sebuah akun. Retweet adalah postingan seseorang yang diposting ulang oleh akun lain. Like adalah postingan yang menunjukkan bahwa seorang pemilik akun tertentu menyukai postingan yang dibuat oleh seseorang. Comments adalah komentar yang dibuat oleh seorang pemilik akun pada sebuah postingan dari akun lain.

B. Jenis Akun Pegiat Media Sosial

Jumlah akun media sosial yang diteliti sebanyak 437 akun, yang terdiri dari 180 akun facebook, 200 akun Instagram, dan 57 twitter. Akun ketiga platform media sosial tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) Akun dengan identitas nama asli, (2) akun dengan identitas nama samaran, dan (3) akun dengan identitas nama kelompok. Adapun persentase ketiga jenis akun dari ketiga platform media sosial tersebut adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 5.1 Persentase jenis akun di tiga platform media sosial

Akun FB dengan identitas nama asli: nama sendiri dan panjang seperti akun *Irdiana Wahyuni, Fahmi Yahya Nuryanto, Stefanus Robby Cahyadi G, Andhika Saputra Ardhiansyah*, atau nama aslinya dimasukkan dalam tanda kurung seperti akun *Apiek Danken (Moh Anwar Kholiq)*. Akun nama samaran biasanya menggabungkan nama orang lain, nama dibuat-buat, namanya pendek, dan data profil biasanya tidak lengkap. Identitas akun FB tersebut antara lain seperti *Cinta dan Anugrah, Tria Minoru, Kaum Kecebong, Jack, bravo, Mak Lambe Turah*, dan akun *Ibnu Fulan* yang akunnya sudah dihapus. Ketiga biasanya adalah akun yang ada di laman facebook, nama akun ini menggunakan nama komunitas atau organisasi tertentu seperti *Ahmadiyah Menjawab Fitnah, Aliansi PNS Anti Korupsi, Pemuda Pancasila, Cyber Pancasila, Indonesia Menolak Syi'ah*.

Sebagaimana di FB, di Instagram sebagian akun juga menggunakan identitas asli sebagai *username* semacam @saraandriyani, @andria.fp, @sakina_ina, dan @ikeramdhanaa. Akun dengan identitas nama samaran sebagai *username* atau nama lengkap yang dibuat-buat dan tidak mencerminkan nama manusia pada umumnya, seperti @pakmadon, @conan_edogawa007, @cebong_otak_korengan, dan @coklat_semut. Akun dengan identitas nama komunitas/kelompok, merupakan akun-akun yang menggunakan nama-nama suatu komunitas/kelompok sebagai ID akunnya seperti @forum-beritaviral, @mediarakyat_, @rakyatbersuara11, dan @gene-rasi54.

Adapun di Twitter, akun dengan menggunakan identitas nama asli sebagai *username* misalnya: @fahiraidris, @moch-pramono, @mahendradatta, dan @rizma_widiono. Akun dengan identitas nama samara sebagai username antara lain: @Dragon-Aries233, dan @GuruSocrates, dan @Ayoemimin. Adapun akun Twitter yang menggunakan identitas nama kelompok/komunitas antara lain: @LaskarCyberMus1, @pengikut_ulama, dan @TNasionalis.

Akun-akun di ketiga platform tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori: (1) produsen, (2) distributor, (3) produsen sekaligus distributor, dan (4) konsumen. Adapun persentase masing-masing kategori dari ketiga platform media sosial adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 5.

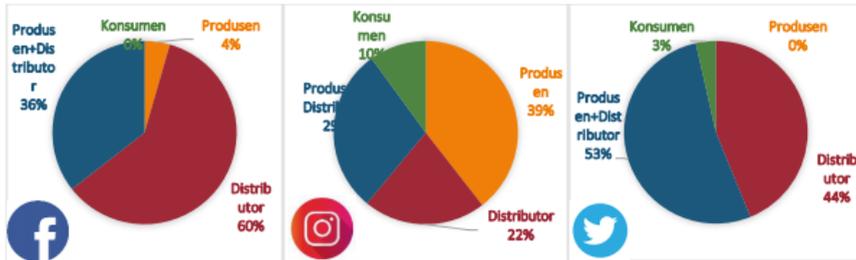


Diagram 5.2: Persentase peran pengguna media sosial dalam penyebaran pesan radikal

Dari 180 akun facebook yang diteliti, sebanyak 8 (4%) diidentifikasi sebagai produsen, sebanyak 108 (60%) sebagai distributor, dan 64 (36%) sebagai produsen sekaligus distributor pesan-pesan radikal. Dari 200 akun Instagram, sebanyak 79 (39.5%) akun sebagai produsen, sebanyak 43 (21.5%) sebagai distributor, sebanyak 58 (29%) sebagai produsen sekaligus distributor, dan sebanyak 20 (10%) sebagai konsumen. Dari 57 akun twitter, sebanyak 25 (44%) sebagai distributor, sebanyak 30 (53%) sebagai produsen sekaligus distributor, sebanyak 2 (4%) sebagai konsumen. Pesan-pesan radikal diproduksi dan didistribusikan oleh pengguna media sosial dengan identitas nama samaran dan nama kelompok/organisasi.

Sebagian besar pengguna media sosial, baik Facebook, Instagram, maupun Twitter tidak memberikan informasi yang lengkap dalam identitas akunnya. Dari 437 akun media sosial ketiga platform tersebut, sebanyak 111 (25,40%) akun secara eksplisit menyebutkan jenis kelaminnya, sebanyak 157 (35.32%) menyebutkan tempat tinggal mereka, sebanyak 48 (11%)

menyebutkan tingkat pendidikan mereka, sebanyak 0% yang menyebutkan sumber belajar mereka. Dari 111 akun yang menyebutkan jenis kelamin mereka, sebanyak 86 (77%) laki-laki dan sebanyak 25 (23%) perempuan. Dari 157 akun yang menyebutkan tempat tinggal mereka, sebanyak lima dari Sumatera Utara, dua dari Sumatera Barat, satu dari Riau, dua dari Sumatera Selatan, satu dari Lampung, 67 dari DKI Jakarta, 11 dari Jawa Barat, empat dari Banten, 21 dari Jawa Tengah, delapan dari DIY, 19 dari Jawa Timur, dua Kalimantan Barat, dua dari Kalimantan Selatan, satu dari Kalimantan Timur, satu dari Sulawesi Tengah, satu dari Sulawesi Selatan, satu dari Bali, dua dari NTB, satu dari NTT, satu dari Papua Barat, dan satu dari Papua. Dari 48 yang menyebutkan tingkat pendidikan, sebanyak 15 berpendidikan SMA dan yang sederajat, satu Diploma, 27 Sarjana (Strata 1), empat Magister (Strata 2), dan satu doktor (Strata 3). Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pegiat media sosial diperoleh informasi bahwa mereka belajar agama dari buku-buku tentang sejarah Nabi (*tarikh*), madzhab fiqih, Youtube, dan tokoh agama. Di antara nama-nama tokoh agama yang populer di media sosial yang berhasil diidentifikasi melalui web-scraping adalah Yusuf Mansur, Abdullah Gymnastiar, dan Felix Siauw.

C. Motivasi Pegiat Akun

Adapun motivasi pengguna medsos memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi pesan-pesan radikal adalah: (1) ingin menjadikan akun media sosialnya sebagai media untuk mengkritisi pemerintah; (2) ingin menjadikan akun media

sosialnya sebagai media untuk menghentikan *hoax* atau berita yang belum tentu kebenarannya; (3) ingin menjadikan akun media sosialnya sebagai media dakwah. Di antara bidang-bidang yang menjadi perhatian pengguna media sosial yang perlu mendapatkan kritik meliputi bidang: (1) politik, (2) hukum, (3) ekonomi, (4) sosial, (5) kesehatan, dan (6) pendidikan.

bab VIII

Penutup

BERDASARKAN paparan data pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Sebagian besar website organisasi Islam yang populer di kalangan pengguna internet adalah website organisasi Islam non-afiliasi. Website Islam yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet adalah Era Muslim. Website organisasi Islam arus utama yang paling banyak dikunjungi adalah NU Online. Di antara website organisasi Islam kontemporer yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet adalah Hidayatullah.

Kedua, dalam merespon fenomena radikalisme di masyarakat, website ketiga kategori organisasi Islam mempunyai sikap yang berbeda-beda. Website organisasi Islam mainstream secara konsisten menyajikan narasi menentang radikalisme. Website organisasi Islam kontemporer bersikap “diam” (tidak mendukung, tidak pula melawan) fenomena radikalisme di masyarakat, dan sibuk dengan urusan internal. Sebagian website organisasi Islam non-afiliasi mengandung konten yang mendukung radikalisme.

Ketiga, sebagian besar pengguna media sosial yang memproduksi dan menyebarkan pesan radikal menggunakan identitas nama samaran dan nama kelompok. Sebagian besar

pengguna media sosial yang memproduksi, menyebarkan, dan mengkonsumsi pesan radikal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) berjenis kelamin laki-laki, (b) berpendidikan sarjana, (c) bertempat tinggal di Jakarta, (d) belajar agama dari buku-buku tentang sejarah Nabi, madzhab fiqih, Youtube, dan tokoh agama. Narasumber yang sering disebut di kalangan pengguna media sosial bukan tokoh-tokoh yang populer di website organisasi Islam mainstream.

Keempat, motivasi pengguna media sosial memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi pesan-pesan radikal adalah: (1) ingin menjadikan akun media sosialnya sebagai media untuk mengkritisi pemerintah; (2) ingin menjadikan akun media sosialnya sebagai media untuk menghentikan *hoax* atau berita yang belum tentu kebenarannya; (3) ingin menjadikan akun media sosialnya sebagai media dakwah.

Temuan penelitian bahwa website ormas Islam arus utama, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak menjadi rujukan populer oleh pengguna media sosial terutama dari generasi Y dan Z, menjadi peringatan dini bagi ormas Islam moderat dan pemangku kepentingan kebangsaan dan keindonesiaan. Padahal, kedua ormas utama ini mewartakan pesan-pesan damai Islam, seperti menghormati kebhinekaan, mendorong kerukunan antar-iman, mengadvokasi keadilan sosial, mendukung Pancasila dan menjaga NKRI. Tokoh-tokoh Islam moderat yang mewartakan nilai-nilai perdamaian, keadaban dan kemajuan, kalah populer dibanding tokoh-tokoh Islamis-konservatif yang mengagitasi

kekerasan epistemik dan menyulut intoleransi kebencian. Selain itu, terjadi ambivalensi di kalangan pengguna media sosial dan pengelola website Islamis: di satu sisi bersemangatkan dakwah yang besar untuk mengajak *netizen* menuju perbaikan sosial, namun di sisi lain dakwah itu dilakukan melalui ujaran intoleransi yang tidak mencerminkan moral kemasyarakatan (*civic virtues*). Ambivalensi ini ditengarai diperparah oleh provokasi pelintiran kebencian, dalam konteks meningkatnya iklim politik populisme (George, 2016). Juga ada kecenderungan 2 kutub ekstrem melakukan *mutual animosity* dan *reciprocal derogation* (Zamperini, 2012; Brewer, 1999; Staats, 1994). Ekstremisme Islam dan Islamisme cenderung bertentangan diametral dengan Hipernasionalisme (Hadiz, 2017). Suara Moderatisme terdengar lamat-sayup di antara pelek keras kedua kutub ini.

Ancaman terorisme, radikalisme dan esktrisme kekerasan yang dewasa ini kian kompleks, memerlukan pendekatan baru yang lebih inklusif dan holistik, mengedepankan pencegahan daripada perlawanan berparadigma keamanan. Dalam kerangka itu, hasil penelitian ini diharapkan menyediakan pijakan alternatif bagi para perumus kebijakan, praktisi dan profesional dalam merespon fenomena sosial keagamaan di Indonesia, khususnya terkait dengan radikalisme dan kekerasan ekstrem. Beberapa rekomendasi kebijakan utama dari hasil penelitian ini:

Pertama, pengelola website arus utama dan moderat perlu mengubah strategi, konten, tampilan, dan daya jangkau pesan-pesan dakwah social-keagamaan melalui website dan media social menjadi lebih menarik, relevan, dan sesuai dengan karakter netizen, terutama dari kalangan muda.

Kedua, pengelola website organisasi Islam kontemporer dan non-afiliasi perlu diajak bekerja sama dan dilibatkan di dalam upaya-upaya bina damai dan melawan radikalisme yang dapat mengarah pada kekerasan ekstrimis dan terorisme, dengan pendekatan inklusif yang mengedepankan metode nir-kekerasan.

Ketiga, untuk mendukung upaya-upaya bina damai dan melawan radikalisme diperlukan langkah-langkah advokasi, baik terkait dengan literasi media maupun etika berinternet (*netiquette*), utamanya pada generasi milenial.

Daftar Pustaka

- Behr, I. v., Reding, A., Edwards, C. & Gribbon, L., 2014. *Radicalisation in the digital era*, Santa Monica: Rand Corporation.
- Hadiz, V., 2005. *Ekonomi Politik Indonesia Pasca Orde Baru: Transformasi Oligarki dan Disorganisasi Akar Rumput*. Jakarta: LP3ES.
- Halili & Naipospos, B. T., 2015. *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2014*, Jakarta: Setara Institute.
- Indonesia, W. F. & L. S., 2016. *National Survey Report: A Measure of the Extent of Socio-Religious Intolerance and Radicalism within Muslim Society in Indoneisa*, Jakarta: Wahid Foundation.
- Kompas, 2009. *Inilah Daftar Kekayaan Capres dan Cawapres*. [Online]
Available at:
<http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/29/15273635/Inilah.Daftar.Kekayaan.Capres>
- Kuwado, F. J., 2018. *Sudah Gaduh Dulu, Mendagri Belum Tetapkan Calon Pejabat*. [Online]
Available at:
<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/29/08441081/sudah-gaduh-dulu-mendagri-belum-tetapkan-calon-penjabat-gubernur>

| Daftar Pustaka

- Lazuardi, G., 2018. *Dampak Pilkada DKI, Isu SARA Diprediksi Akan Kembali Dimanfaatkan Oknum Politisi*. [Online]
Available at: <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/14/dampak-pilkada-dki-isu-sara-diprediksi-akan-kembali-dimanfaatkan-oknum-politisi>.
- Lestari, S., 2017. *Isu SARA meningkat di Pilkada DKI, salah siapa?*. [Online]
Available at: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353>
- Merriam-Webster, 2017. *Dictionary by Merriam-Webster: America's most-trusted online dictionary*. [Online]
Available at: <https://www.merriam-webster.com/>
- Plinner, J., September, 2013. *Observable Indicators of Possible Radicalization*, Paris: ISCA.
- Provost, F., Fawcett, T. & Kohavi, R., 1998. *The Case Against Accuracy Estimation for Comparing Induction Algorithms*. Madison, Winconsin, pp. 1-9.
- Ramadhiani, M. A., 2014. *Mata Massa: Selama Pilpres, Jokowi-JK Paling Sering Diserang Kampanye Hitam dan Isu SARA*. [Online]
Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/23/19390581/Matamassa.Selama.Pilpres.Jokowi-JK.Paling.Sering.Diserang.Kampanye.Hitam.dan.Isu.SARA>
- Setyowati, E., 2017. *KPU Tak Ingin Partisipasi Politik Masyarakat Sekedar Mobilisasi Partai*. [Online]
Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/27/19132771/k>

Kontestasi Wacana Keislaman di Dunia Maya

pu-tak-ingin-partisipasi-politik-masyarakat-sekadar-mobilisasi-partai

Senarai Penulis

Yayah Khisbiyah

Yayah Khisbiyah adalah dosen Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ia juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, Dewan Direktur *Center for Peace and Conflict Studies*, dan pegiat *Committee for the Psychological Study of Peace*. Berkomitmen mengintegrasikan keilmuan dengan aktivismenya dalam tiga minat utama: psikologi binadamai, agama untuk perdamaian, dan kesejahteraan ekologis. Publikasinya a.l.: *Contested Discourses on Violence, Social Justice and Peacebuilding Among Indonesian Muslims* (2009); *Islamic Peace Education for Indonesian Youth in Divided Communities* (2012); *Accessing Global Information: The Use of the Internet for Current Islamic and Non-Islamic Issues* (2012); Pendidikan Interreligius: Gagasan Dasar dan Modul Pelaksanaan untuk Perguruan Tinggi (eds, 2015), Perubahan Sosial Positif dalam Islam Berkemajuan (2016), *Culture of Peace and Interfaith Harmony for Indonesian Youth* (forthcoming 2018).

M. Thoyibi

M. Thoyibi adalah pengajar di Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Direktur Riset dan Publikasi Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial. Bidang kajian dan keahliannya meliputi kehidupan masyarakat Muslim, dialektika Islam dan budaya lokal, budaya popular, sastera Melayu Tongghoa, dan pendidikan karakter. Ketua Center for Child Right Studies, dan bergabung dalam Global CRC Network yang berbasis di Lund, Sweden. Ia menulis beberapa artikel a.l. *Extracurricular Project for Creativity: A Note on the Implementation of Arts Appreciation Education* (2017).

Abdullah Aly

Abdullah Aly adalah dosen Pendidikan Agama Islam di UMS sejak tahun 1991. Ia menyelesaikan pendidikan S3 dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: (1) Pendidikan Multikultural di Pesantren: Telaah thd Kurikulum di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta (2011), (2) Pendidikan Karakter dan Kebhinekaan (2017), (3) Cegah Kekerasan di Sekolah (2017), (4) Pendidikan Islam dan Multikulturalisme (2017), (5) Membangun Empati Kemanusiaan (2017), (6) Penguatan Islam Moderat di Indonesia (2018), (7) Absennya Budaya Menghargai Orang Lain (2018).

Agus Triyono

Agus Triyono adalah pengajar di Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta sejak 2009. Menyelesaikan S1 di UMM serta S2 di UI pada Program Studi Ilmu Komunikasi. Kajian utama penulis adalah media dan konflik sosial. Sejak 2015 menjadi Ketua Editor Jurnal Komuniti Prodi Ilmu Komunikasi UMS. Beberapa kegiatan ilmiah telah diikuti antara lain Workshop Riset Radikalisme di Media Baru (2017), Countering Violent Extremism Communication (2018). Ia juga sebagai peneliti pada Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) UMS.

Subkhi Ridho

Subkhi Ridho adalah aktivis demokrasi, gender, pluralisme, dan multikulturalisme. Ia adalah pengajar tamu di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan IAIN Surakarta. Bidang kajian dan keahliannya yaitu pada media dan *cultural studies*, gender, *Islamic popular culture*, radikalisme dan agama, media sosial dan *digital democracy*, serta *countering violent extremism*. Saat ini tengah

melakukan riset doktoral tentang perilaku berpolitik di kalangan menengah Muslim di Indonesia pasca 2009. Ia merupakan *associate researcher* di lembaga konsultan komunikasi politik di Jakarta, Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), serta di Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Saat ini ia tinggal di Staffordshire, United Kingdom.

Yanuar Ihtiyarso

Yanuar Ihtiyarso adalah pengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ia menyelesaikan studi S1 dan S2-nya di Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta pada program Ilmu Komunikasi. Beberapa hasil penelitian yang telah dihasilkan antara lain berjudul "A Comparative Study of Editorials in *The New York Times* and *Arab News* Related to the Civil Conflict in Indonesia and Sri Lanka after the Tragedy of Tsunami (An Analysis Based on Systemic Functional Linguistics)." Dan "Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Surat kabar Suara Islam tentang Pilkada DKI Jakarta 2017".

Yeny Prastiwi

Yeny Prastiwi adalah pengajar di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Minat penelitiannya mencakup masalah budaya, identitas kultural, pengajaran Bahasa Inggris, sastra anak, *visual culture* dan kebahasaan. Pendekatan penelitian melalui Critical Discourse Analisis (CDA) adalah hal menarik perhatiannya untuk melihat lebih jauh masalah-masalah sosial maupun pengajaran bahasa. Ia meraih gelar Ph.D dalam bidang TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) dari Deakin University, Australia. Di antara publikasinya adalah *Transmitting Local Cultural Knowledge through English as Foreign Language (EFL) Learning as a Means of Fostering "Unity in Diversity"* (2013), *Indonesian Folktales in English Translation Text and Its Illustrations Perceived as A Medium of Developing Students' English Vocabulary* (2016).

Zuly Qodir

Zuly Qodir adalah seorang pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia juga seorang peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), Universitas Gadjah Mada (sejak 2004), peneliti di Interfidei (1996-2001), salah satu pendiri Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta (1997); pegiat Komite Kemanusiaan Yogyakarta (sejak 1997) dan Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP) Yogyakarta (sejak 2004). Beberapa karya ilmiah yang telah diterbitkan antara lain Gerakan Sosial Islam (2010), Sosiologi Agama (2011), Sosiologi Politik Islam (2012), HTI dan PKS menuai Kritik (2013), Gerakan Islam Non-Mainstream (2014), Radikalisme Agama di Indonesia (2015), Teori dan Praktek Politik Indonesia (2016) dan Sosiologi Pemerintahan (2017).



Ancaman terorisme, radikalisme dan esktrisme kekerasan yang dewasa ini kian kompleks, memerlukan pendekatan baru yang lebih inklusif dan holistik, mengedepankan pencegahan daripada perlawanan berparadigma keamanan. Dalam rangka mempromosikan strategi berpendekatan perdamaian positif, buku hasil penelitian ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan pemahaman berbasis data terbaru hasil riset (*evidence-based knowledge*) tentang pergumulan dan kontestasi wacana keislaman Indonesia di dunia maya, dan menyediakan pijakan alternatif bagi para perumus kebijakan, praktisi dan profesional dalam merespon fenomena sosial keagamaan di Indonesia.

Temuan penelitian ini antara lain bahwa *website* ormas Islam arus utama, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak menjadi rujukan populer oleh pengguna media sosial, terutama dari generasi Y dan Z. Padahal, kedua ormas utama ini mewartakan pesan-pesan damai Islam, seperti menghormati kebhinekaan, mendorong kerukunan antar-iman dan keadilan sosial, mendukung Pancasila dan menjaga NKRI. Tokoh-tokoh Islam moderat yang mewartakan nilai-nilai perdamaian, keadaban dan kemajuan, kalah populer dibanding tokoh-tokoh Islam Islamis-konservatif yang mengagitasi kekerasan epistemik dan menyulut intoleransi kebencian. Selain itu, terjadi ambivalensi di kalangan pengguna media sosial dan pengelola *website* Islamis: di satu sisi bersemangatkan dakwah yang besar untuk mengajak netizen menuju perbaikan sosial, namun di sisi lain dakwah itu dilakukan melalui ujaran intoleransi yang tidak mencerminkan moral kemasyarakatan (*civic virtues*). Ambivalensi ini ditengarai diperparah oleh provokasi pelintiran kebencian, dalam konteks meningkatnya iklim politik populisme. Juga ada kecenderungan 2 kutub ekstrem melakukan *mutual derogation*: Islamisme cenderung bertentangan diametral dengan Hipernasionalisme. Suara Moderatisme terdengar lamat-sayup diantara pekik keras kedua kutub ini.